



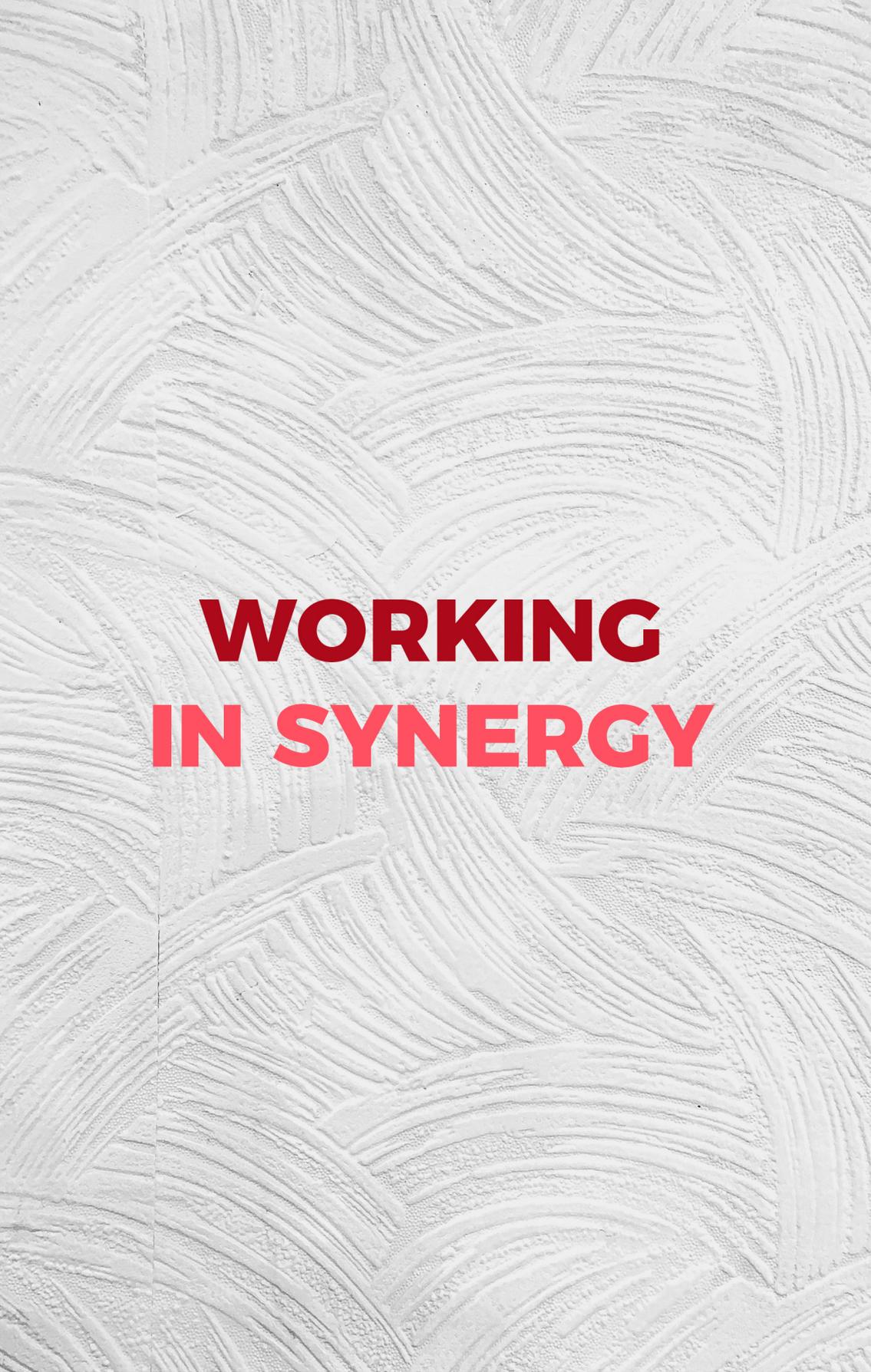
SINERGI **BERKARYA**

Working in Synergy

2
0
2
0



**Laporan
Tahunan**
Annual Report



**WORKING
IN SYNERGY**

TENTANG LAPORAN TAHUNAN

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup sulit untuk dilalui oleh berbagai industri, baik industri lokal, nasional, maupun internasional. Tidak seperti proyeksi yang diimpikan pada awal tahun 2020, terhitung sejak kuartal kedua terlihat bahwa kondisi perekonomian mengalami perlambatan yang signifikan sebagai dampak adanya pandemi virus Covid-19.

PT BPR Surya Yudhakencana (BSY) sekuat tenaga berusaha untuk tetap berkarya di tengah berbagai tantangan yang ada. Tindakan strategis yang dilakukan tersebut antara lain dengan menciptakan ruang lingkup ekonomi yang sinergis, baik di lingkungan internal maupun eksternal, demi mencapai tujuan agar BSY senantiasa mampu menciptakan nilai tambah dalam setiap karya yang diciptakannya.

Dengan mengangkat tema “Sinergi Berkarya”, BSY meyakini bahwa telah menjadi kebutuhan bagi sebuah organisasi yang maju untuk mencapai sukses dalam persaingan, dan juga mencapai sukses dalam bersinergi. Sinergi sangat dibutuhkan oleh organisasi, karena berkolaborasi atau bersinergi merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mencapai keunggulan bersaing di dalam industri.

Bersinergi adalah wujud dari penciptaan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama. Hubungan kerjasama, baik internal maupun eksternal, tidak hanya semata-mata demi membangun kebersamaan, namun juga membangun interaksi yang dapat memicu daya pikir yang membentuk kreativitas secara kolektif.

Hubungan sinergi yang baik bagi BSY adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang dijalin dapat menjadi aktivitas produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan berbagai karya yang bermanfaat dan berkualitas.



TENTANG TEMA

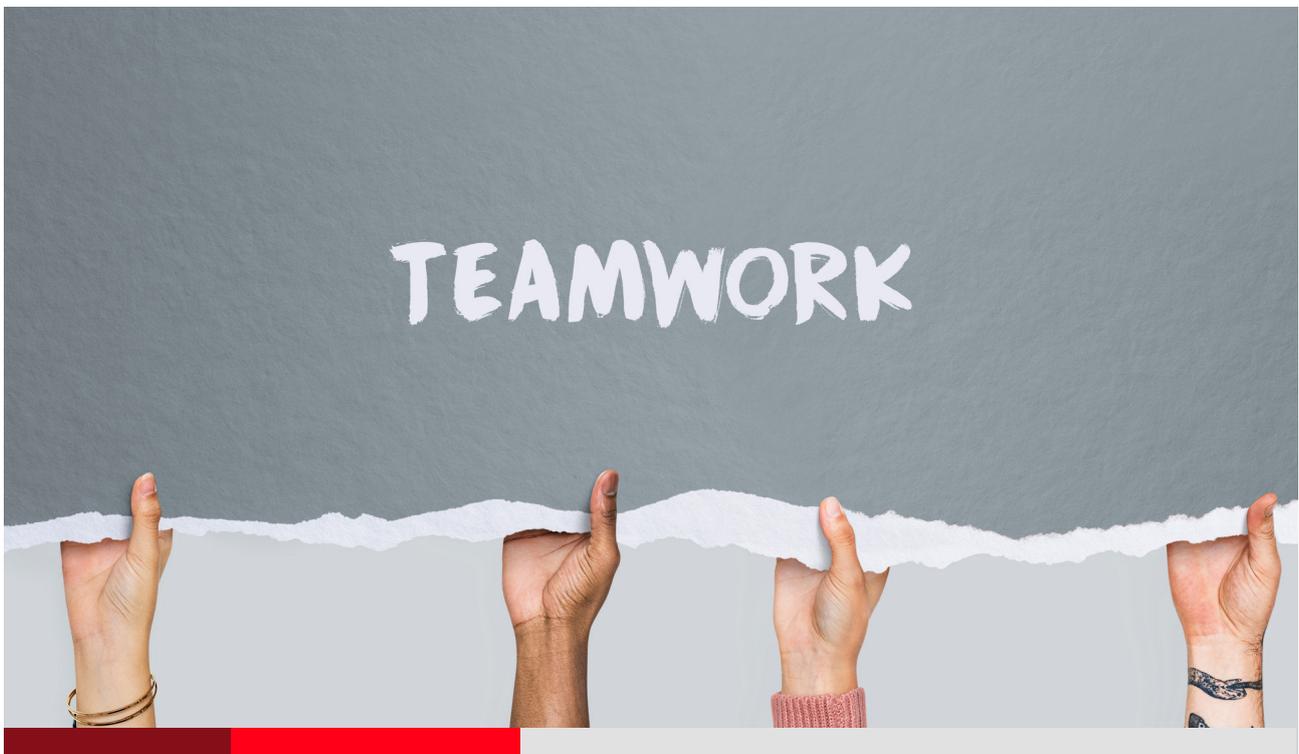
SINERGI BERKARYA

“Working in Synergy”

Berkarya dalam sinergi merupakan pola kerjasama yang mengutamakan penciptaan nilai lebih bagi pihak yang terlibat. Sinergi merupakan bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan keseimbangan harmonis demi sesuatu yang optimal. PT BPR Surya Yudhakencana (BSY) meyakini bahwa untuk dapat menyatukan seluruh elemen yang saling bahu membahu, penerapan kepemimpinan dengan gaya manajemen sinergi akan mendukung hubungan kerjasama yang produktif dan harmonis.

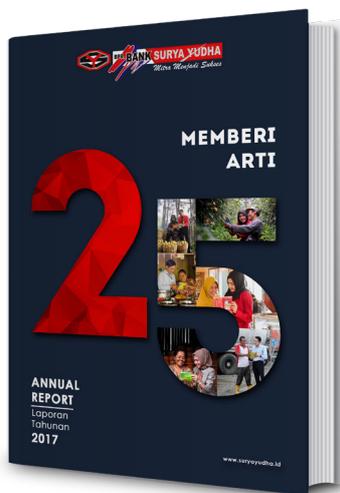
Secara internal organisasi, BSY memandang hubungan sinergi penting untuk mewujudkan tujuan bersama. Hal ini dapat tercapai apabila dalam organisasi terdapat komunikasi yang intensif untuk memaksimalkan tercapainya tujuan. Selain itu, adanya kejelasan visi dan misi organisasi merupakan landasan yang kuat untuk menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. BSY mengadopsi nilai sinergi internal sebagai sebuah pendekatan yang menjadikan perbedaan dalam organisasi sebagai suatu kekuatan bersama untuk mencapai hasil yang terbaik.

Dilihat dari perspektif sinergi dengan pihak eksternal, sinergi berarti bergabung atau bekerja sama dalam menciptakan nilai tambah dan memungkinkan pencapaian pengembalian yang lebih tinggi. Sinergi dengan pihak eksternal berarti adanya kemampuan BSY untuk menciptakan penghematan biaya, peluang pertumbuhan, posisi pasar dan kompetensi yang lebih kuat, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta manfaat finansial yang lebih menguntungkan.



KESINAMBUNGAN TEMA

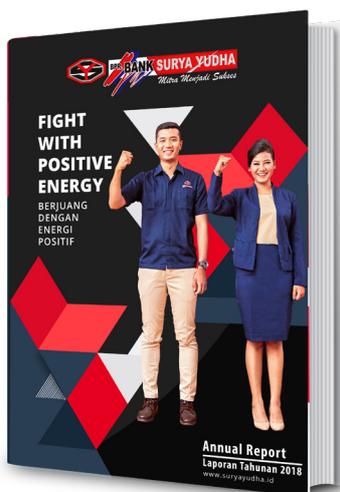
Kesinambungan tema laporan tahunan menampilkan tema dari laporan tahunan yang dibuat selama kurun waktu empat tahun terakhir (2017-2020). Dengan adanya tema yang berkesinambungan di setiap tahunnya, diharapkan dapat menunjukkan konsistensi BSY dalam transparansi pembuatan laporan tahunan.



25 Tahun Memberi Arti *"Give Meaning"*

2
0
1
7

Di usia ke-25 ini, BSY berharap senantiasa matang dalam memberikan layanan perbankan terbaik bagi seluruh nasabahnya. Bukan hanya melayani, namun juga memberikan arti lebih bagi setiap masyarakat di seluruh pelosok. Arti yang dapat membuahkan kesuksesan di kehidupan nasabahnya, arti yang dapat memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan perekonomian mikro di Indonesia.



Berjuang Dengan Energi Positif *"Fight With Positive Energy"*

2
0
1
8

Semangat kerja PT BPR Surya Yudhacencana yang diimbangi dengan energi positif di setiap lini bisnisnya, menunjukkan optimisme dan kemantapan BSY untuk senantiasa menjadi pemain penting di industri perbankan mikro Indonesia. Dengan semakin berkembangnya organisasi, kekompakan untuk berjuang bersama merupakan salah satu keunggulan BSY di dalam mencapai keberhasilan. Semangat juang yang positif ini telah berhasil membawa BSY memiliki pertumbuhan kinerja yang solid dan menjaga performa untuk senantiasa menjadi yang terdepan di industri perbankan mikro Indonesia.



2
0
1
9

Optimis Berinovasi

“Optimistic about Innovation”

Inovasi merupakan jawaban bagi PT BPR Surya Yudhakencana (BSY) untuk menghadapi tantangan persaingan bisnis dan perubahan jaman yang begitu cepat. Berinovasi memang tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Salah satu upaya untuk meneguhkan semangat di dalam berinovasi adalah mengadopsi sikap optimisme bahwa perubahan dan pembaruan yang dilakukan akan menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih bernilai dan bermanfaat. Optimis berinovasi mencerminkan konsistensi komitmen BSY di dalam meraih kinerja perusahaan yang optimal agar senantiasa eksis dalam bersaing.



2
0
2
0

Sinergi Berkarya

“Working in Synergy”

Tetap berkarya menunjukkan semangat tinggi PT BPR Surya Yudhakencana (BSY) menghadapi tantangan pandemik global yang terjadi di tahun 2020. Demi mempertahankan eksistensinya melawan lemahnya kondisi perekonomian nasional, BSY menerapkan prinsip sinergi berkarya yang dilaksanakan di dalam dan luar organisasi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama yang memberikan nilai tambah yang bersifat produktif dan harmonis, sehingga kolaborasi masing-masing pihak dapat saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

KILAS KINERJA 2020

**Rp2,88
Triliun**

Aset

Aset tahun 2020 sebesar Rp2,88 triliun, tumbuh sebesar 0,72% dari tahun 2019.

**Rp1,92
Triliun**

DPK

Dana pihak ketiga 2020 adalah sebesar Rp1,92 triliun, tumbuh 5,35% dari tahun 2019.

**Rp749,56
Miliar**

Tabungan

Dana Tabungan tahun 2020 sebesar Rp749,56 miliar, tumbuh 11,14% dari tahun 2019.

**Rp1,17
Triliun**

Deposito

Dana Deposito tahun 2020 sebesar Rp1,17 triliun, tumbuh 1,95% dari tahun 2019.

**Rp2,37
Triliun**

Kredit

Kredit yang diberikan di tahun 2020 sebesar Rp2,37 triliun, turun 2,17% dari tahun 2019.

**Rp368,22
Miliar**

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga di tahun 2020 sebesar Rp368,22 miliar, turun 8,9% dari tahun 2019.

**Rp398,09
Miliar**

Pendapatan Operasional Rp398,09 miliar

Pendapatan operasional di tahun 2020 sebesar Rp398,09 miliar, turun 6,65% dari tahun 2019.

**Rp62,19
Miliar**

Laba bersih Rp62,19 miliar

Laba bersih tahun 2020 sebesar Rp62,19 miliar, turun 21,93% dari tahun 2019.

31,49%

CAR 31,49%

Rasio CAR/ pemenuhan modal minimum di tahun 2020 adalah sebesar 31,49%.

2,82%

ROA 2,82%

Rasio ROA / total laba terhadap rata- rata aset di tahun 2020 adalah sebesar 2,82%.

79,77%

BOPO 79,77%

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional di tahun 2020 adalah sebesar 79,77%.

83,82%

LDR 83,82%

Rasio LDR / rasio kredit terhadap dana yang diterima di tahun 2020 adalah sebesar 83,82%.

PERISTIWA PENTING TAHUN 2020

NO	TANGGAL	KETERANGAN	TEMPAT	FOTO
1	3 Januari 2020	Penyerahan hadiah undian simpanan tahun 2019.	Balai Apung, Surya Yudha Park Banjarnegara.	
2	10 Januari 2020	Tasyakuran pembukaan Kantor Kas Gandrungmangu.	Kantor Kas Gandrungmangu.	
3	23 Januari 2020	Signing addendum Perjanjian Kerja Sama dengan Bank BJB.	Kantor Notaris Fitroh Surakarta.	
4	26 Januari 2020	Pertandingan tenis lapangan bersama PEMDA Pekalongan.	Tenis Indoor PEMDA Banjarnegara.	
5	10 Februari 2020	Signing MoU dengan asuransi kesehatan Mandiri In health.	Savana Room, South Office.	

6	21 Februari 2020	Ramah tamah bersama para pengusaha di Kabupaten Cilacap.	Kantor Cabang Cilacap Lantai 2.	
7	26 Februari 2020	Mengikuti lomba kirab budaya dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara ke-449 tahun 2020.	Alun-alun Banjarnegara.	
8	3-7, 10-14 Maret 2020	BSY <i>Development</i> Program tahun 2020.	Surya Room, Surya Yudha Park Banjarnegara.	
9	6 - 17 April 2020	Penyemprotan cairan disinfektan dalam rangka BSY Peduli Covid-19.	Kabupaten wilayah kerja BSY.	
10	14 April 2020	Penyerahan bantuan sembako dalam rangka BSY Peduli Covid-19.	Kabupaten Cilacap.	
11	27 April 2020	Penyerahan bantuan <i>disinfectant chamber</i> dan kapsul transportasi dalam rangka BSY Peduli Covid-19.	Rumah Sakit Emanuel Klampok.	

12	27 Mei 2020	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Jateng.	Savana Room South Office Kantor Pusat BSY.	
13	16 Juni 2020	Mengikuti online training "future leader : KEPO (Knowing Every Potential Opportunity)" oleh Perbarindo.	Tokyo Room, Head Office, Kantor Pusat BSY.	
14	2 Juli 2020	Webinar inovasi jualan untuk Mitra BSY	Savana Room, South Office, Kantor Pusat BSY.	
15	15 Agustus 2020	Penyerahan pataka alih generasi Surya Yudha Grup, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.	Cinema 2 Surya Yudha Park Banjarnegara.	
16	21 September 2020	BSY Nextgen 63.	Surya Room, Surya Yudha Park Banjarnegara.	
17	1 Oktober 2020	Infobank BPR Award (online).	Osaka Room, Head Office, Kantor Pusat BSY.	
18	21 Oktober 2020	Penerimaan penghargaan wajah bahasa tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Hotel Patra Jasa Semarang.	

19	6 November 2020	Penyerahan bantuan sembako kepada korban banjir.	Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.	
20	18 - 22 Desember 2020	Penyerahan bantuan sembako untuk korban longsor di Kabupaten Banjarnegara.	Kecamatan Klampok, Pagentan, Pandanarum dan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.	
21	31 Desember 2020	Undian simpanan tahun 2020 secara virtual.	Surya Yudha Park 2 Banjarnegara.	

THINK
BIG



DAFTAR ISI

Tentang Laporan Tahunan	1
Tentang Tema	2
Kilas Kinerja 2020	5
Peristiwa Penting Tahun 2020	7
Daftar Isi	12
Ikhtisar Data Keuangan Penting	18
Ikhtisar Data Operasional Non Keuangan	26
LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	28
Laporan Dewan Komisaris	29
Laporan Direksi	34
Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020	38
PROFIL PERUSAHAAN	40
Identitas Perusahaan	42
Riwayat Singkat	42
Bidang Usaha	43
Filosofi Bisnis	49
Tujuan Perusahaan	49

Strategi Pengembangan	49
Struktur Organisasi	50
Visi & Misi	52
Nilai dan Budaya Perusahaan	53
Profil Dewan Komisaris	54
Profil Direksi	62
Profil Pejabat Eksekutif	67
Sumber Daya Manusia	84
Teknologi Informasi	96
Kepemilikan Saham oleh Pengurus	100
Daftar Entitas Anak	100
Struktur Grup	100
Kronologi Penerbitan Saham	100
Kronologi Penerbitan/Pencatatan Efek Lainnya	100
Nama dan Alamat Lembaga/Profesi Penunjang	101
Penghargaan dan Sertifikasi 2020	101
Jaringan Kantor	102

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN	108
Tinjauan Bisnis BPR	110
Tinjauan Per Segmen Usaha	128
Kinerja Keuangan	138
Kemampuan Membayar Utang & Tingkat Kolektibilitas Piutang	146
Struktur Modal & Kebijakan Struktur Modal	148
Ikatan Material Investasi Barang Modal Tahun 2020	149
Investasi Barang Modal Direalisasikan Tahun 2020	150
Perbandingan Target Dengan Realisasi 2020	150
Informasi & Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	152
Prospek Usaha	152
Aspek Pemasaran 2020	154
Kebijakan Dividen	156
Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/Atau Manajemen (ESOP/MSOP)	156
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	157
Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/ Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi	157
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan	157

Perubahan Kebijakan Akuntansi	162
Informasi Kelangsungan Usaha	163
Pelaksanaan Literasi & Inklusi Keuangan	165
TATA KELOLA PERUSAHAAN	166
Dewan Komisaris	168
Direksi	171
Penilaian Penerapan Tata Kelola Untuk Tahun 2019	173
Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	174
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat	176
Informasi Pemegang Saham Utama & Pengendali	183
Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris & Direksi	184
Komite Audit	187
Komite Pemantau Risiko	187
Komite-Komite Di Bawah Direksi	189
Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan	191
Keterbukaan Informasi	192
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	199
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)	201

Kepatuhan	203
Akuntan Publik	205
Manajemen Risiko	206
Sistem Pengendalian Intern	210
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	212
Perkara Penting Yang Dihadapi Tahun 2020	215
Akses Informasi & Data	216
Kode Etik Perusahaan	216
<i>Whistle Blowing System</i>	223
Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	226
INFORMASI KEUANGAN	227



MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IKHTISAR DATA

KEUANGAN PENTING

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan disusun secara sistematis dan disajikan secara periodik. Laporan keuangan adalah muara dari kegiatan transaksi perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi mengenai laporan keuangan bank sebagai salah satu upaya untuk membantu para pelaku bisnis dalam menilai kondisi keuangan suatu bank.

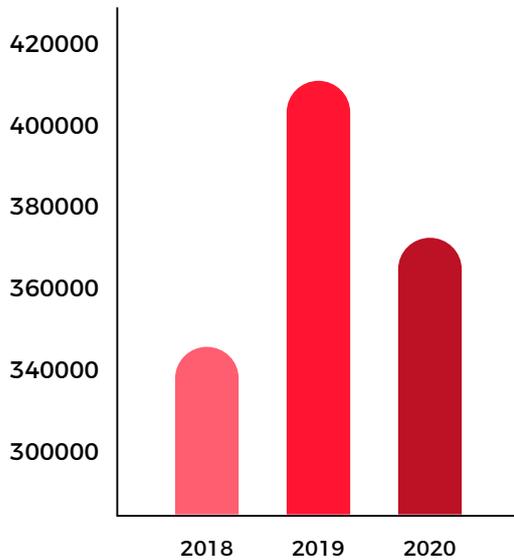
Laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan dan sangat berguna untuk menilai kinerja bank, serta bisa dijadikan ukuran kinerja bank yang baik. Bagi BSY yang bergerak di bidang perbankan, sangatlah penting untuk menyajikan laporan keuangan yang sehat mengingat BSY memegang kepercayaan masyarakat dan mitra *linkage* untuk mengelola dana mereka.

Bukan hal yang mudah untuk menjaga kepercayaan pihak eksternal baik itu dari masyarakat, mitra bank maupun bank yang memberikan fasilitas *linkage* program. Sehingga BSY berkomitmen untuk terus berupaya memperbaiki diri tidak hanya mempertahankan prestasi yang sudah dicapai namun juga berusaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berikut ini dijabarkan kondisi keuangan BSY selama 3 (tiga) tahun terakhir.

LABA RUGI

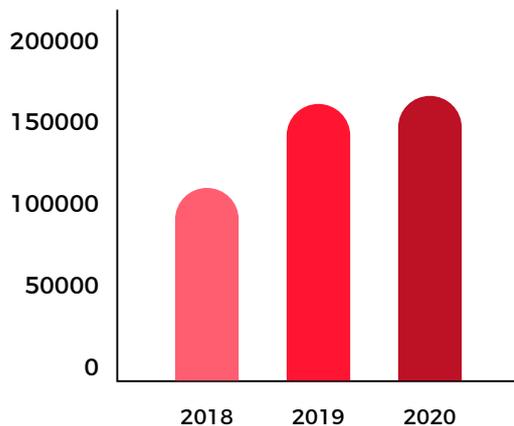
Keterangan	Realisasi (dalam jutaan Rp)		
	2018	2019	2020
Pendapatan Bunga	344.331	404.184	368.221
Beban Bunga	120.186	155.349	162.899
Pendapatan Operasional	367.439	426.473	398.093
Biaya Operasional	257.529	319.430	317.560
Laba Operasional	109.910	107.043	80.533
Laba Sebelum Pajak	110.140	106.437	79.877
Laba Bersih	82.466	79.653	62.187
Laba Per Saham	0,42	0,34	0,26

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bunga



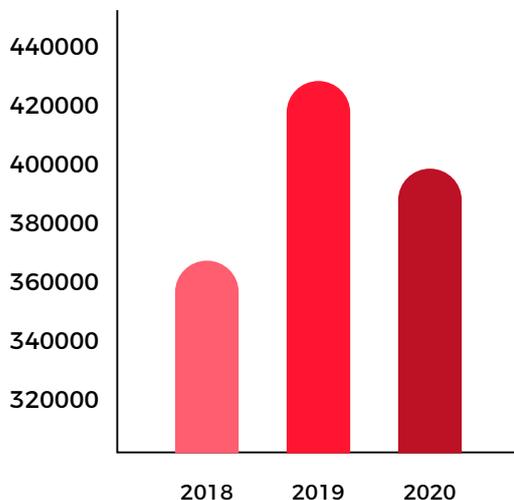
Dari grafik di samping dapat dilihat bahwa pendapatan bunga BSY di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp35.963 juta atau turun 8,89% dari tahun 2019 akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia berimbas ke perbankan khususnya terhadap BSY. Kondisi ekonomi debitur, pembatasan jam kerja hingga pemblokiran akses (*lock down area*) di beberapa wilayah kerja sangat membatasi ruang gerak operasional perusahaan. Pendapatan bunga terdiri dari pendapatan bunga kredit, pendapatan bunga provisi dan pendapatan bunga PPBL (Penempatan Pada Bank Lain).

Grafik Beban Bunga



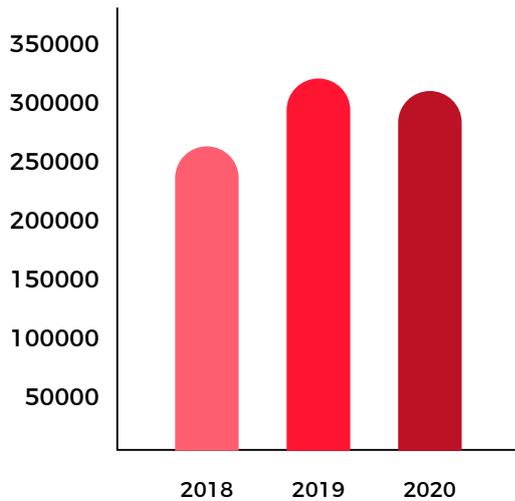
Beban bunga di tahun 2020 adalah sebesar Rp162.899 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.551 juta atau naik 4,86% dari tahun 2019. Beban bunga terdiri dari beban bunga pinjaman diterima, beban bunga deposito pihak ketiga, beban bunga tabungan pihak ketiga, beban bunga simpanan dari bank lain, beban penjaminan LPS dan beban biaya transaksi. Dari keenam komponen tersebut beban bunga pinjaman mengalami kenaikan paling signifikan yaitu sebesar 4,92% dibandingkan dengan tahun 2019.

Grafik Pendapatan Operasional



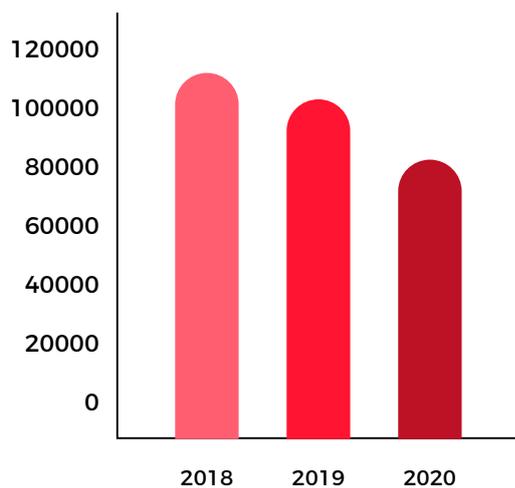
Dari grafik dapat dilihat bahwa pendapatan operasional mengalami penurunan. Di tahun 2020 pendapatan operasional BSY sebesar Rp398.093 juta, mengalami penurunan 6,65% atau turun sebesar Rp28.380 juta dari tahun 2019. Penurunan pendapatan operasional disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga terutama pendapatan bunga kredit yang merupakan sumber utama pendapatan perusahaan.

Grafik Biaya Operasional



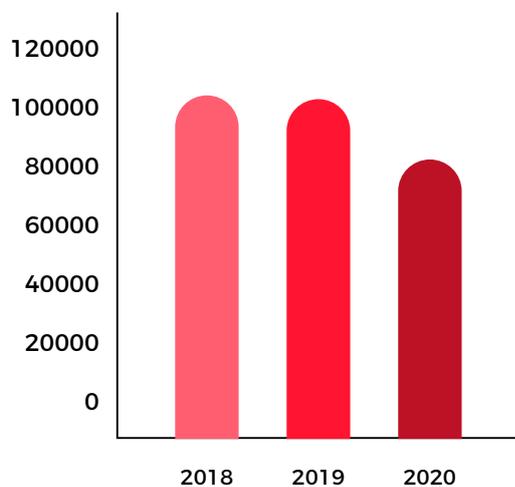
Biaya operasional di tahun 2020 sebesar Rp317.560 juta, mengalami penurunan 0,59% atau sebesar Rp1.870 juta dari tahun 2019. Secara garis besar biaya yang masuk ke biaya operasional mengalami penurunan di sisi lain ada salah satu biaya yang mengalami kenaikan yaitu di pos biaya bunga dimana kenaikan biaya bunga sebesar 4,86% dari tahun 2019.

Grafik Laba Operasional



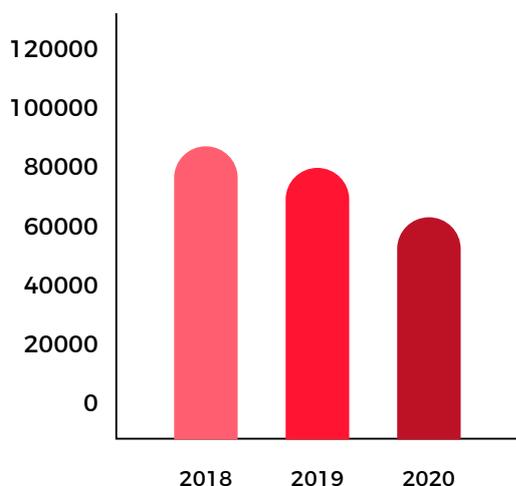
Dalam kondisi perekonomian yang memburuk di tahun 2020 dan berpengaruh terhadap hasil usaha yang diperoleh BSY, ditunjukkan dalam angka perolehan laba operasional sebesar Rp80.533 juta, turun 24,77% atau sebesar Rp26.510 juta dari tahun 2019.

Grafik Laba Sebelum Pajak



Sama seperti laba operasional, perolehan laba sebelum pajak di tahun 2020 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu 24,95% atau turun sebesar Rp26.560 juta.

Grafik Laba Bersih

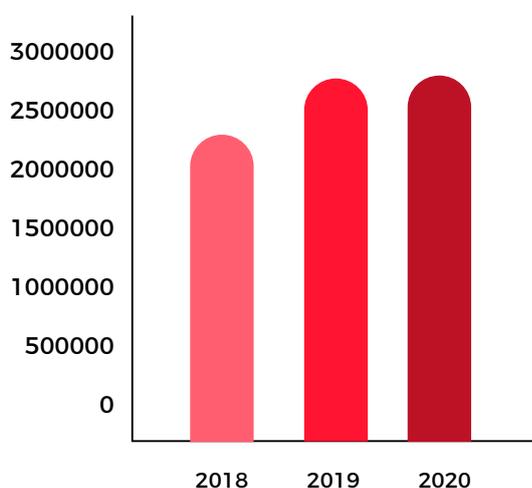


Di tahun 2020 BSY berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp62.187 juta, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 17.466 juta atau turun 21,93%.

NERACA

KETERANGAN	REALISASI (dalam jutaan Rp)		
	2018	2019	2020
ASET	2.279.720	2.864.344	2.884.929
ABA	249.172	436.406	413.310
KREDIT bruto	2.023.133	2.420.675	2.368.208
TABUNGAN bruto	545.989	674.405	749.556
DEPOSITO bruto	977.680	1.147.623	1.170.018
ABP + non bank	415.974	658.958	558.014
MODAL INTI	286.010	332.080	363.000

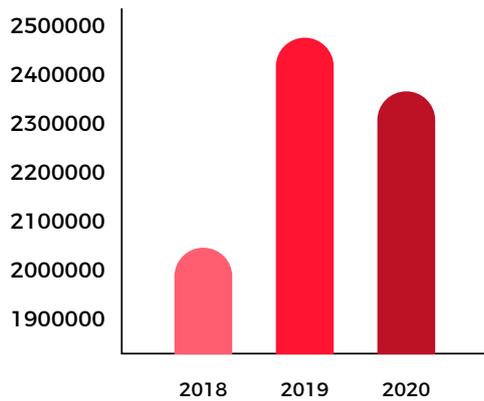
Grafik Pertumbuhan Aset



Dari grafik di samping dapat dilihat bahwa aset BSY mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 aset meningkat 0,72% atau naik sebesar Rp20.585 juta dari tahun 2019 menjadi Rp2.884.929 juta.

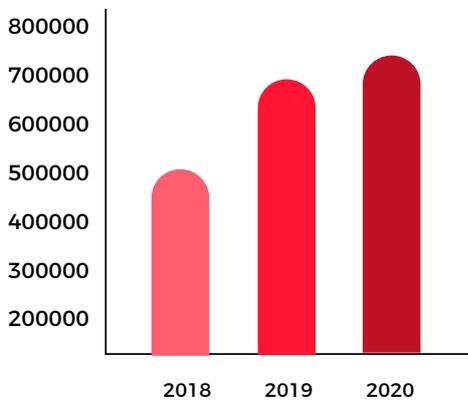
kenaikan aset tahun 2020 disebabkan adanya kenaikan dana pihak ketiga sebesar Rp97.547 juta, kenaikan penempatan dari bank lain Rp8.718 juta, kenaikan kewajiban segera atas pajak Rp1.100 juta dan kenaikan laba di tahan atas pengambilan deviden Rp39.652 juta disisi lain terdapat penurunan laba sebesar Rp17.465 juta dan penurunan dana *linkage* sebesar Rp108.619 juta.

Grafik Pertumbuhan Kredit



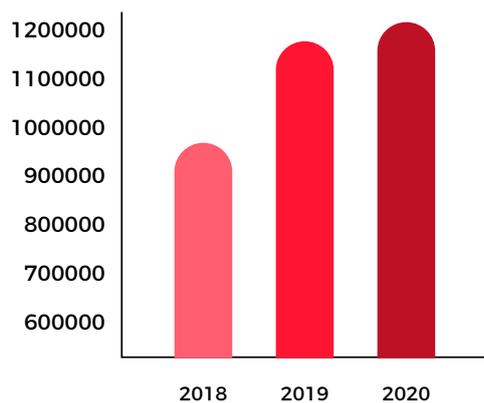
Posisi kredit yang diberikan (KYD) di tahun 2020 mengalami penurunan 2,17% atau sebesar Rp52.467 juta apabila dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi Rp2.368.208 juta.

Grafik Pertumbuhan Tabungan



BSY dalam penggalan dana berupa tabungan di tahun 2020 sebesar Rp749.556 juta, mengalami peningkatan 11,14% atau sebesar Rp75.151 juta apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Grafik Pertumbuhan Deposito



Jumlah deposito di tahun 2020 naik 1,95% atau sebesar Rp22.396 juta menjadi Rp1.170.018 juta dibanding tahun 2019.

Penghimpunan dana pihak ketiga baik itu berupa tabungan maupun deposito dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Keberhasilan dalam menghimpun dana masyarakat tidak lepas dari nama baik BSY dan kepercayaan masyarakat yang begitu besar, dengan didukung oleh komitmen Bank yang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Di tahun 2020 tabungan yang mengalami kenaikan signifikan yaitu tabungan piknik (naik 95,53%).

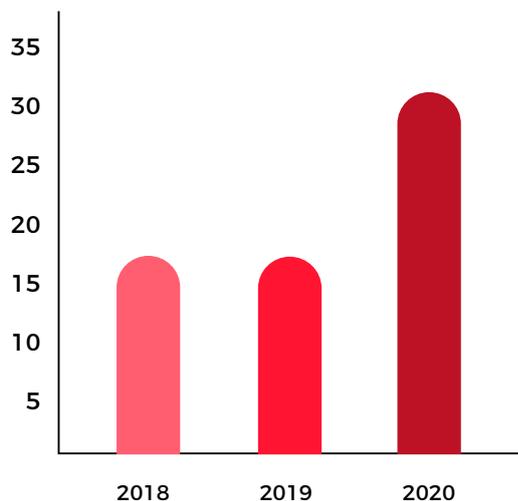
Kenaikan dana pihak ketiga memberikan indikator bahwa di tengah krisis pandemi Covid-19, masyarakat tetap percaya Bank sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi.

RASIO TINGKAT KESEHATAN BANK

Kesehatan keuangan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan. Penilaian rasio tingkat kesehatan BSY secara umum pada predikat sehat, terbukti selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020, dapat dilihat dari tabel berikut.

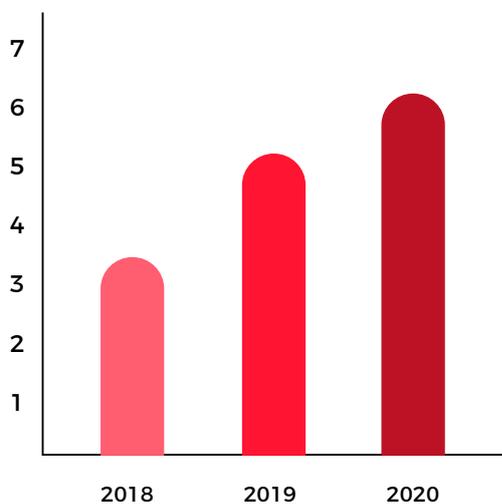
KETERANGAN	2018	2019	2020
CAR	15,42%	14,68%	31,49%
NPL GROSS	3,06%	5,59%	6,20%
NPL NET	1,83%	3,96%	4,20%
ROA	5,28%	3,25%	2,82%
ROE	39,37%	25,62%	22,18%
BOPO	70,17%	80,30%	79,77%
LDR	91,43%	86,45%	83,82%

Grafik CAR



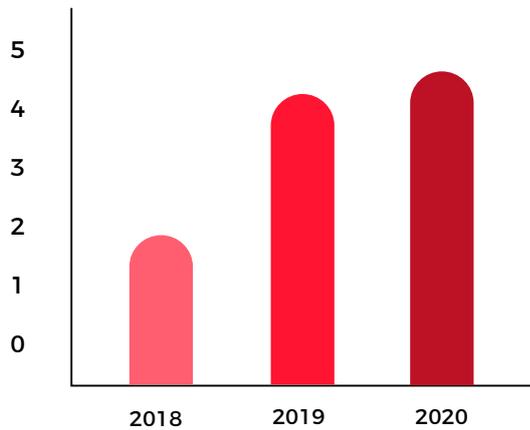
Suatu perusahaan perbankan dikatakan sehat apabila memiliki permodalan yang kuat. BSY selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki CAR pada posisi di atas standar, yaitu di atas 12%. Rasio CAR BSY di tahun 2020 adalah sebesar 31,49%. Semakin tinggi rasio CAR maka semakin baik karena rasio CAR menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana untuk menutup kemungkinan risiko kerugian sehingga nasabah lebih percaya untuk menempatkan dananya di BSY.

Grafik NPL Gross



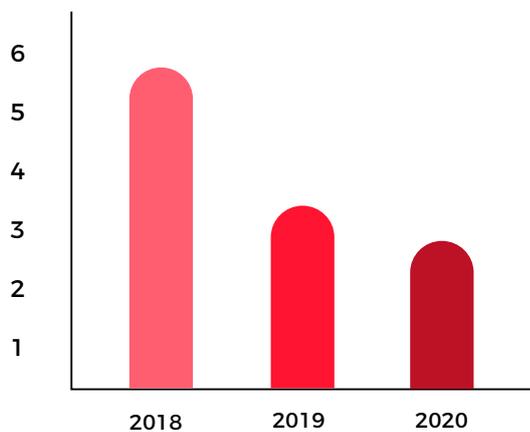
Rasio NPL gross di tahun 2020 adalah 6,20%, lebih tinggi dibanding akhir tahun 2019. Tingginya NPL ini disebabkan oleh munculnya kredit-kredit besar bermasalah yang sebagian besar disebabkan oleh pandemi Covid-19. BSY telah menerapkan kebijakan stimulus dan relaksasi sebagaimana pesan POJK No.11 dan POJK No.35 tahun 2020 yang akan berakhir pada bulan Maret 2022. Namun demikian kebijakan stimulus dan relaksasi belum mampu menekan angka NPL sebagaimana standar ketentuan.

Grafik NPL Gross



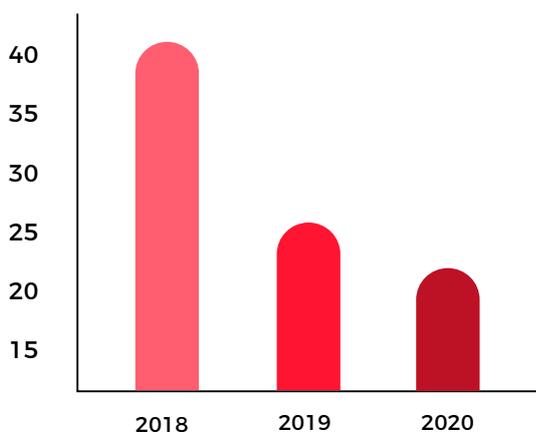
Rasio NPL nett di tahun 2020 adalah 4,20%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2019. Sebagaimana terjadi pada NPL gross, NPL net juga mengalami kenaikan signifikan. Covid-19 menghentikan mobilitas masyarakat dan menurunkan aktivitas dunia usaha. BSY yang penyaluran kreditnya mayoritas diberikan kepada UMKM langsung terkena imbas, berupa kredit dengan kualitas macet. Namun BSY terus berupaya untuk menekan NPL secara berkesinambungan.

Grafik ROA



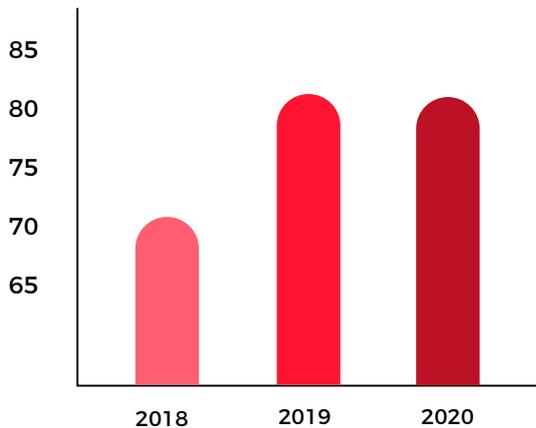
Rasio ROA adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivasnya untuk memperoleh laba, BSY menunjukkan keberhasilan selama 3 (tiga) tahun terakhir ROA berada pada posisi sehat. ROA dikategorikan sehat jika >1,215%. Di tahun 2020 ROA BSY adalah 2,82%. ROA merupakan tolak ukur bagi perbankan dalam menghasilkan profit/ laba. Semakin tinggi rasio maka semakin baik, berarti bahwa laba perusahaan semakin besar. Rasio ROA BSY di tahun 2020 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ROA ini disebabkan oleh adanya penurunan laba. Untuk menghitung ROA terdapat 2 (dua) indikator utama yaitu laba dan aset.

Grafik ROE



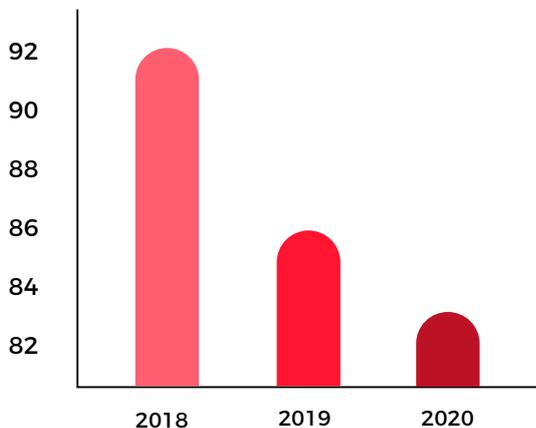
Rasio ROE BSY tahun 2020 adalah 22,18%, mengalami penurunan dari tahun 2020. ROE menunjukkan kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri. Semakin besar suatu perusahaan akan semakin besar rasio ROE, dan semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik karena ini berarti posisi pemegang saham semakin kuat dan merupakan daya tarik bagi calon investor/pemegang saham.

Grafik BOPO



Rasio BOPO BSY tahun 2020 lebih efisien bila dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 79,77% atau turun 0,53%. Batas standar sehat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk BOPO adalah $\leq 93,52\%$. Rasio BOPO diperoleh dengan cara membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, ini untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan. Semakin rendah rasio BOPO berarti perbankan semakin efisien.

Grafik LDR



Rasio LDR di tahun 2020 adalah 83,82%. LDR dikatakan sehat jika berada di posisi $\leq 94,75\%$. Rasio LDR yang terlalu tinggi menunjukkan perbankan tidak memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah (DPK), sebaliknya jika LDR terlalu rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang memadai. Namun harus digaris bawahi bahwa LDR yang rendah itu berarti bahwa pelemparan kredit perusahaan tersebut juga rendah selain berimbas pada pendapatan bunga kredit yang diterima, juga ada beban membayar kewajiban bunga pada dana pihak ketiga.

Di tahun 2020 rasio LDR BSY turun sebesar 2,63%, hal ini dikarenakan KYD mengalami penurunan sedangkan Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan.

INFORMASI HARGA SAHAM

BSY tidak memiliki kapitalisasi pasar sehingga tidak dapat menyajikan informasi harga saham, dan volume perdagangan saham. Saham BSY bersifat tertutup dan tidak diperjualbelikan.

INFORMASI OBLIGASI

BSY tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, sehingga tidak dapat mengungkapkan mengenai:

1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding).
2. Tingkat bunga/imbalan.
3. Tanggal jatuh tempo.
4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2019 dan 2020.

IKHTISAR DATA OPERASIONAL NON KEUANGAN



KANTOR PUSAT

2018	2019	2020
1	1	1



KANTOR CABANG

2018	2019	2020
26	29	29



KANTOR KAS

2018	2019	2020
50	50	50



PAYMENT POINT

2018	2019	2020
1	1	1



KAS KELILING

2018	2019	2020
2	2	2



KARYAWAN

2018	2019	2020
1.213	1.290	1.293



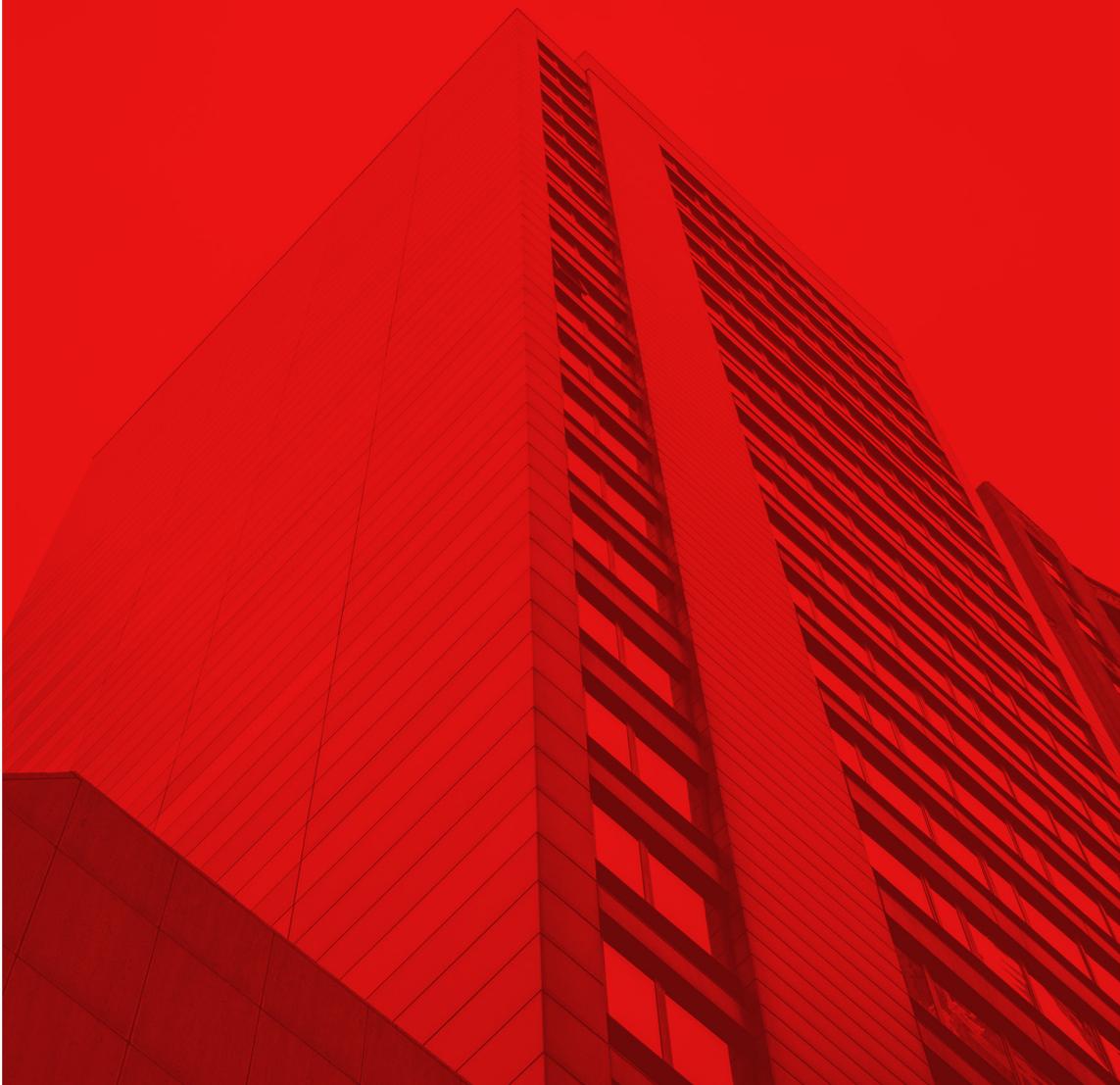
NASABAH

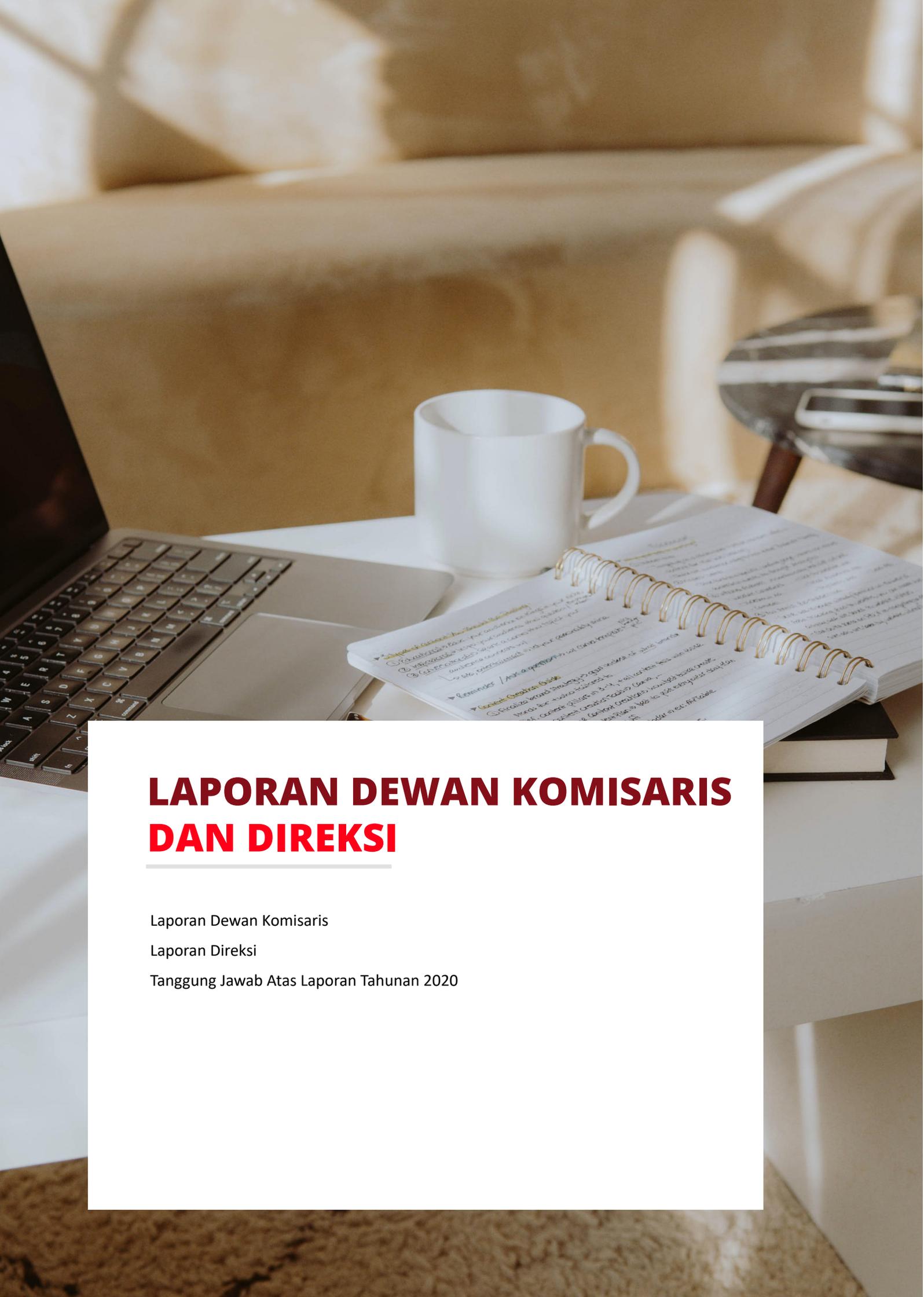
2018	2019	2020
284.714	295.898	305.079

Jumlah jaringan kantor BSY di tahun 2020 tetap, ini artinya selama tahun 2020 BSY tidak memperluas ekspansi wilayah kerja. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang membuat rasio NPL meningkat dan membuat syarat pembukaan jaringan kantor tidak dapat dipenuhi.

Penambahan jumlah nasabah setiap tahunnya menunjukkan bahwa BSY semakin dipercaya oleh masyarakat untuk dijadikan pilihan berinvestasi. Meskipun jumlah kenaikan di tahun 2020 tidak sebesar di tahun 2019, namun BSY tetap dapat meningkatkan jumlah penggunanya di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.

**Disiplin harus
dipaksakan dan
dibudayakan**





LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Laporan Dewan Komisaris

Laporan Direksi

Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020



Dewan Komisaris : Abdul Khoir MP (Komisaris Independen), Emila Hayati (Komisaris Utama), Tenny Yanutriana (Komisaris), Dick F. Tarigan (Komisaris Independen), Hadi Supeno (Komisaris Independen).

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Aset PT BPR Surya Yudhakencana (BSY) mencapai Rp 2.885 miliar di akhir tahun 2020, dan telah menempatkan BSY sebagai BPR terbesar di Jawa Tengah dengan perolehan laba mencapai Rp62 miliar.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya. Kami sampaikan pada 2020, BSY telah berhasil mempertahankan kinerja terbaik dan beradaptasi dengan berbagai perubahan pada industri BPR Indonesia. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada manajemen atas pencapaian BSY selama 2020. BSY menunjukkan kondisi yang baik di tengah kontraksi ekonomi dunia dan nasional. Angka kinerja BSY mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya dan di atas rata-rata industri BPR nasional.

Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian kinerja BSY tidak lepas dari kepercayaan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, BSY terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memberikan solusi-solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Kepercayaan seluruh pemangku kepentingan utamanya para pemegang saham yang telah diperoleh selama ini menjadi landasan bagi perkembangan bisnis BSY saat ini, dan di masa mendatang.

PENILAIAN ATAS KINERJA MANAJEMEN

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja manajemen perusahaan pada 2020 berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) BSY yang disampaikan oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai secara keseluruhan selama tahun 2020 manajemen telah menunjukkan kinerja yang baik dan membanggakan dalam mengelola BSY di tengah dinamika perekonomian nasional yang penuh ketidakpastian.

Manajemen juga berada pada arah yang konsisten untuk mencapai tujuan BSY. Aset BSY mencapai Rp2.885 miliar di akhir 2020 telah menempatkan BSY sebagai BPR terbesar di Indonesia dengan perolehan laba mencapai Rp62 miliar. BSY dapat memelihara fungsi intermediasi BSY pada tingkat yang optimal sepanjang tahun 2020. Likuiditas dan LDR terjaga stabil dengan angka LDR 83,82%, *Cash Ratio* 19,02% . Modal BSY juga semakin kuat yang tercermin pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) mencapai 31,49%, yang berada di atas ketentuan regulator. Secara umum, kinerja keuangan BSY pada 2020 menunjukkan pertumbuhan yang positif di semua indikator utama.

Di akhir 2020, Kredit Yang Diberikan (KYD) BSY berada di angka Rp2.368 miliar. Kewajiban BSY dalam melaksanakan tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) telah dijalankan dengan antusias, konsisten dan berkesinambungan, baik kegiatan maupun anggaran.

Selama 2020, BSY fokus melakukan berbagai inovasi untuk memperkaya *business model* dan menyempurnakan *business process*, baik dalam rangka mempertahankan *existing customer* maupun menasar *new customer*, termasuk kelompok masyarakat milenial. Dengan pengembangan sistem teknologi informasi yang mengarah pada digital banking akan meningkatkan daya saing BSY dalam menghadapi tuntutan yang semakin kompleks dan perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Catatan urgen yang harus segera dilakukan oleh manajemen adalah:

1. Penyelesaian kredit-kredit besar bermasalah.
2. Angka *non performing loan* (NPL) yang cenderung naik, harus dikembalikan pada posisi sesuai ketentuan regulator, yakni NPL Gross di bawah 5%. Pada 31 Desember 2020, NPL Gross BSY pada angka 6,20%.
3. Langkah-langkah antisipasi dan *action plan* menyikapi masa berakhirnya kebijakan stimulus dan relaksasi sebagai implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 dan POJK No.34/OJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 dan Kebijakan Bagi BPR-BPRS sebagai Dampak Penyebaran Covid-19.

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BSY dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan jalannya kepengurusan BSY oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka Panjang BSY, Rencana Kerja, dan Anggaran Dasar BSY dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Struktur dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris dan komite-komite tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan kepastian pertanggung-jawabannya, Dewan Komisaris menyusun berbagai Kebijakan dan Tata Tertib Kerja, yang selalu disesuaikan dengan perubahan ketentuan dan tuntutan yang dihadapi.

PENGENDALIAN RISIKO DAN PENERAPAN TATA KELOLA

Pencapaian kinerja bisnis BSY tidak terlepas dari keberhasilan pengelolaan risiko BSY yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan risiko BSY sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan juga mengadopsi *best practice* yang didukung dengan sistem informasi manajemen risiko yang memadai sehingga ketepatan penilaian dapat diyakini, baik faktor risiko inheren maupun faktor kualitas penerapan manajemen risiko.

Parameter dan limit yang ditetapkan pada setiap jenis risiko pada 2020 sudah cukup mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang terukur serta dilakukan penyempurnaan beberapa aspek kualitas penerapan manajemen risiko.

Penerapan Tata Kelola perusahaan telah menjamin dan membuktikan terselenggaranya dengan baik prinsip-prinsip dan standar *best practice* penerapan Tata Kelola yang berlaku secara umum. Tinjauan dan perbaikan terus dilakukan dalam rangka menyempurnakan kebijakan mengenai manajemen risiko dan memastikan penerapan Tata Kelola sejalan dengan tuntutan perubahan dan tantangan yang dihadapi BSY.

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

Memastikan bahwa kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur serta pelaksanaan kegiatan atas setiap aktivitas fungsional BSY telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan regulator senantiasa menjadi komitmen BSY. Dewan Komisaris bersama Direksi terus mendorong pelaksanaan fungsi kepatuhan semakin baik di semua jenjang organisasi dan fungsi, antara lain dengan membangun dan menyempurnakan sistem dan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Kesalahan pelaporan kepada regulator yang berdampak pada pengenaan sanksi kewajiban membayar, sebagai akibat *human error* dan kelemahan sistem, menjadi salah satu yang harus dihindari.

Untuk memastikan seluruh operasional BPR melaksanakan kepatuhan, manajemen telah membuat perangkat kepatuhan sampai pada tingkat wilayah, yaitu dengan dibentuknya Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Manajemen Risiko Wilayah (KMW). Mereka adalah SDM Pusat tetapi ditempatkan pada kantor-kantor wilayah, sebanyak 11 orang, dari wilayah 1 hingga wilayah 10.

Secara periodik para pejabat KMW melaporkan hasil kinerjanya yang meliputi semua elemen operasional BPR melalui kunjungan lapangan *on the spot* maupun pemeriksaan dokumen-dokumen kantor-kantor cabang dan kantor kas.

PENGENDALIAN INTERN

Kerangka pengendalian intern BSY secara umum sudah berfungsi secara efektif dan memberikan keyakinan yang memadai. Pelaksanaan fungsi pengendalian intern ini telah melakukan pengawasan dan audit dengan baik secara berkala diikuti gelar temuan atau *exit meeting*. Temuan audit, baik yang dilakukan oleh otoritas pengawas, akuntan publik maupun Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan tindak lanjut oleh Direksi BSY, dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala. Temuan audit yang belum selesai ditindak lanjuti, terus dipantau oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit agar dapat diselesaikan sesuai rekomendasi auditor.

PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Dewan Komisaris memandang *whistle blowing system* (WBS) memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. BSY telah memiliki dan melaksanakan WBS dengan membuka beberapa saluran pengaduan (*telepon, sms, email, dan website*).

SKAI bertugas untuk membantu memastikan berjalannya sistem WBS dengan baik. Banyak pengaduan dan kasus yang telah ditindaklanjuti bersumber dari pengembangan WBS. Secara periodik, Dewan Komisaris memantau dan memastikan WBS berjalan secara efektif, antara lain dengan memanfaatkan laporan dari SKAI dan tindak lanjutnya serta memastikan WBS ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dewan Komisaris meyakini WBS merupakan bagian dari upaya pemeliharaan budaya dan kepedulian seluruh karyawan dan para *stakeholder* lainnya kepada perusahaan.

RENCANA KERJA 2021

Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja BSY 2021 yang disusun secara realistis dengan berdasarkan asumsi makro yang relevan dan mengacu pada angka-angka perkiraan yang dikeluarkan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris optimis bahwa target kinerja keuangan dan non-keuangan akan tercapai mengingat secara historis BSY memiliki inisiatif-inisiatif strategis dalam mencapai target yang ditetapkan.

REKOMENDASI

Berdasarkan capaian dan prestasi pada 2020 dan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja BSY 2021, serta memperhatikan pandangan atas kondisi perekonomian, perubahan lingkungan yang cepat dan tuntutan pemangku kepentingan yang semakin kompleks, maka Dewan Komisaris beranggapan bahwa masih terdapat cukup ruang untuk peningkatan kinerja BSY, antara lain dengan cara:

1. Terus berinovasi mengembangkan business model dan *business process* disertai penguatan penanaman nilai-nilai utama BSY agar mampu menjawab tantangan dan memberikan solusi bisnis yang terbaik;
2. Fokus dalam pengembangan sistem informasi dan teknologi yang tangguh secara terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa keuangan yang cepat, efisien dan aman;
3. Fokus dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pemberian remunerasi yang berbasis kinerja;
4. Mengendalikan penuh risiko kredit dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian, mengurangi *non-performing loan*, lebih selektif dalam restrukturisasi kredit dan memastikan antisipasi berakhirnya kebijakan stimulus dan relaksasi pada Maret 2022 melalui simulasi *stress test*, beserta tindak lanjutnya berupa *action plan* pasca kebijakan stimulus dan relaksasi sejak akhir tahun 2021.
5. Mengendalikan risiko operasional untuk memastikan tidak ada korupsi (*fraud*), tidak ada pelanggaran dan kesalahan berulang, serta tidak ada *pending* masalah.

PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Selama 2020, telah terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris PT BPR Surya Yudhakencana. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 20 Oktober 2020, komposisi Dewan Komisaris BSY menjadi sebagai berikut:

No	Komisaris	Jabatan Anggota Dewan	
		Semula	Menjadi
1	Komisaris Utama	Tenny Yanutriana	Emila Hayati
2	Komisaris	Emila Hayati	Tenny Yanutriana
3	Komisaris Independen	-	Hadi Supeno
4	Komisaris Independen	Dicky Firman Tarigan	Dicky Firman Tarigan
5	Komisaris Independen	Abdul Khoir M.P.	Abdul Khoir M.P. (dalam persetujuan menjadi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham atas dukungan yang tiada henti. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Direksi dan segenap karyawan BSY atas dedikasi yang ditunjukkan selama ini dan kerja keras di sepanjang tahun 2020. Kepada para mitra bisnis, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, kami ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami.

Juni 2021

Atas nama Dewan Komisaris

Emila Hayati

Komisaris Utama



Direksi : Sugeng Riyanto (Direktur Utama), Sri Wahyu Utami (Direktur Umum), dan Wahjoe Roekmono (Direktur Kredit).

LAPORAN DIREKSI

Selama tahun 2020, PT BPR Surya Yudhakencana (BSY) berhasil membukukan kinerja operasional dan keuangan yang baik dan berkelanjutan di atas rata-rata industri BPR nasional. Terjaganya kinerja ini sejalan dengan komitmen BSY sebagai BPR yang terpercaya dan terkemuka bagi para pelaku UMKM.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan lindungan yang diberikanNya sehingga BSY berhasil membuahkan kinerja positif dan berkelanjutan. Hingga di usia yang ke-28 tahun, BSY terus memantapkan perannya sebagai pemberdaya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) melalui berbagai inisiatif yang dijalkannya. Meskipun di tengah pandemi global, BSY mampu meraih laba signifikan.

Selanjutnya, perkenankan kami menyajikan rangkuman kinerja BSY dan situasi selama tahun 2020.

KONDISI MAKRO EKONOMI

Kondisi perekonomian dunia 2020 mengalami penurunan drastis di semua sektor menyusul pandemi global berupa *corona virus diseas-19* (Covid-19). Seperti semua negara di dunia, Indonesia juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Berberapa sektor usaha bukan hanya menurun tetapi mandeg dan bankrut yang berimbas pada banyaknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020 mengalami penyusutan atau kontraksi sekitar 4,7 %. Sama halnya dengan negara-negara di berbagai belahan dunia, pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami kontraksi walaupun tidak separah rata-rata kontraksi glonal, yakni 2,5%. Kondisi perekonomian yang memburuk tentu saja berpengaruh terhadap kinerja dunia perbankan secara umum. Pemerintah cepat mengambil langkah tepat dengan diintrodukirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomer 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Pentebaran *Coronavirus Desease* 2019 (Covid-19), serta kebijakan-kebijakan susulan

lainnya. Kebijakan relaksasi dan stimulus tersebut, diharapkan mampu memperkuat daya tahan UMKM dari hantaman resesi ekonomi.

KINERJA, PENCAPAIAN TARGET DAN STRATEGI

Secara umum, kinerja BSY terus menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan konsisten tumbuh di atas industri. Total aset BSY konsolidasi di Tahun 2020 mencapai Rp2.885 miliar atau secara tahunan tumbuh 0,72% *year-on-year* (yoy) dari sebelumnya Rp2.864 miliar (2019). Sementara itu, pertumbuhan kredit BSY turun 2,17% (yoy) atau menjadi Rp2.368 miliar dari sebelumnya Rp2.421 miliar di tahun 2019 dengan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) nett tahun 2020 di level 4,20%. Kontribusi terbesar pertumbuhan kredit BSY berasal dari bisnis utama selama ini yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dari sisi pendanaan, BSY mampu menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) Tabungan pada tahun 2020 sebesar Rp750 miliar atau tumbuh 11,14% dari posisi tahun 2019 sebesar Rp674 miliar, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Deposito pada tahun 2020 sebesar Rp1.170 miliar atau tumbuh 1,95% dari posisi tahun 2019 sebesar Rp1.148 miliar. Namun demikian, laba bersih mengalami penurunan -21,93% dari tahun 2019 dari sebesar Rp80 miliar menjadi Rp62 miliar.

Bila dilihat dari pencapaian perusahaan sebagaimana ditampilkan dalam rasio keuangan, 6 (enam) indikator kinerja di tahun 2020 menunjukkan angka yaitu CAR (permodalan) sebesar 31,49%, NPL Nett (kualitas aset) sebesar 4,20%, BOPO sebesar 79,77% dan ROA sebesar 2,82% (keuntungan), serta LDR sebesar 83,82% dan *Cash Ratio* 19,02% (likuiditas). Jika dibandingkan dengan kinerja industri perbankan, BSY secara konsisten mampu tumbuh di atas rata-rata nasional.

Secara menyeluruh, terkecuali pada laba perusahaan, BSY telah mampu melampaui target finansial yang ditetapkan pada awal tahun. Realisasi total aset sebesar Rp2.885 miliar merupakan pencapaian 93,28% dari target sebesar Rp3.093 miliar, yaitu kurang dari target sebesar Rp208 miliar. Sedangkan realisasi kredit BSY tahun 2020 adalah Rp2.368 miliar, yaitu merupakan pencapaian sebesar 90,59% dari target 2020, dengan nominal sebesar Rp246 miliar kurang dari target.

PROGRAM DIGITALISASI, PAPERLESS DAN GO GREEN

Sepanjang tahun 2020, BSY telah mengambil beberapa kebijakan strategis yang berfokus pada penerapan berbagai inovasi di berbagai bidang. Melalui penerapan program digitasi dan *paperless*, BSY telah mampu mentransformasi pembagian slip gaji menjadi format E-Gaji melalui aplikasi android, menerapkan *E-Petty Cash* secara digital sehingga penggunaan kas kecil semakin mudah dimonitor, serta penggunaan *E-Inventory* untuk kenyamanan pemantauan stok barang milik BSY.

Dari aspek teknologi informasi, BSY telah menerapkan replikasi data perbankan dengan metode *software back up data center online*. Selain itu, telah pula diterapkan *help desk* untuk seluruh cabang yang dilakukan secara terpusat di kantor pusat.

Strategi pemasaran di tahun 2020 juga banyak dilakukan melalui platform digital, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan akun resmi media sosial milik BSY. Dengan gaya bahasa yang informatif dan komunikatif, melalui media sosial berbagai kelebihan produk-produk BSY dipaparkan, dan sekaligus nasabah dapat pula berinteraksi secara langsung dengan personel BSY.

Demi mendukung perilaku ramah lingkungan, BSY mengadopsi perilaku *go green* dengan tidak lagi menggunakan air minum dalam kemasan sekali pakai dan penggunaan *soft file* tanpa pencetakan dokumen untuk keperluan materi rapat maupun pengajuan proposal. Untuk keperluan perekrutan, BSY menghimbau kepada calon pelamar untuk mengajukan lamaran melalui situs resmi BSY untuk mengurangi penggunaan cetakan kertas yang berlebihan.

Untuk meningkatkan semangat kerja para personel BSY di lapangan, serta menciptakan citra perusahaan yang lebih positif dan dinamis, BSY berinovasi menerapkan penggunaan seragam casual yang nyaman dan menarik berwarna biru tua dengan bawahan coklat muda atau warna-warna serasi lainnya.

PANDANGAN KE DEPAN

Kondisi ekonomi global di tahun 2021 diperkirakan akan mengalami perbaikan. Dengan tetap menjaga optimisme, BSY percaya bahwa kondisi ekonomi nasional tahun 2021 juga akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 4,5 % di tahun 2021 meninggalkan kondisi kontraksi pada tahun 2020. Sejalan dengan kondisi ekonomi dalam negeri yang membaik, pertumbuhan kredit perbankan nasional diperkirakan akan lebih tinggi. Membaiknya perekonomian dan perbankan nasional, serta potensi pengembangan bisnis UMKM di Indonesia yang masih besar, maka prospek usaha BSY kedepannya masih sangat baik.

Namun demikian, masih tingginya tantangan di lingkungan perekonomian strategis, terutama karena belum berakhirnya masa pandemi global, mendorong BSY untuk tetap selektif dan *prudent* dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis. Beberapa hal yang akan menjadi fokus BSY untuk merealisasikan tema 2021 adalah peningkatan *cross selling* produk. Dengan strategi ini, prospek usaha bank memberikan optimisme pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menghasilkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

BSY tetap konsisten untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dan menjamin adanya peningkatan kualitas dalam penerapan Tata Kelola. Hal ini terlihat dari kondisi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana kinerja operasional maupun keuangan menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merupakan hasil dari implementasi Tata Kelola.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola adalah komitmen yang dimiliki oleh semua anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan BSY. Menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang telah digariskan di dalam aturan dan kebijakan bank dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senantiasa menjadi pedoman bagi setiap personil BSY. Ketaatan terhadap Tata Kelola tentunya menyumbang pencapaian kinerja BSY di tahun 2020.

Dalam pengukuran kinerjanya di bidang Tata Kelola, BSY melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*). Dalam hal pelaporan, BSY telah menyusun laporan yang berkelanjutan. Atas realisasi yang sudah dilakukan selama tahun 2020, BSY membuat laporan dalam bentuk Laporan Tata Kelola Perusahaan dan sudah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

CSR DAB GERAKAN LITERASI KEUANGAN

Komitmen BSY untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan semata, tetapi juga melalui pelaksanaan program tanggung jawab lingkungan sosial kemasyarakatan atau *Corporat Social Responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial BSY terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional BSY dan wilayah lain yang sedang mengalami musibah seperti banjir, tanah longsor, maupun pandemi Covid-19. Ini berbeda dengan orientasi CSR pada tahun sebelumnya yang banyak ditujukan untuk kegiatan rohani, kegiatan sosial, perbaikan sarana prasarana dan kegiatan kemasyarakatan.

Pada sisi lain, BSY juga aktif melakukan Gerakan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat. Kegiatan dimaksud dilakukan dengan menyampaikan edukasi melalui media sosial, maupun Gerakan Ngendong ke instansi pemerintah, sekolah, maupun berbagai komunitas.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 20 Oktober 2020, telah terjadi perubahan susunan komposisi Direksi PT BPR Surya Yudhakencana sebagai berikut:

No	Dewan Komisaris	Jabatan Anggota	
		Semula	Menjadi
1	Direktur Utama	Sugeng Riyanto	Sugeng Riyanto
2	Direktur Umum	Sri Wahyu Utami	Sri Wahyu Utami
3	Direktur Kredit	Gurita Nursetyawan	Wahjoe Roekmono
4	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Wahjoe Roekmono	Abdul Khoir M.P. (dalam proses persetujuan OJK)

APRESIASI

Mewakili Direksi, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel atas komitmen dan dedikasi yang mereka berikan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan, arahan dan nasehat yang selalu diberikan pada hampir semua kesempatan.

Tidak lupa kami sampaikan apresiasi kepada semua nasabah, mitra usaha, pemegang saham, dan semua pemangku kepentingan atas dukungan yang tidak pernah putus diberikan kepada BSY. Sinergi BSY dan semua pihak yang terkait adalah sumber energi kami untuk menumbuhkembangkan dan memberdayakan berbagai sumber daya yang kami miliki agar menjadi semakin berarti.

Terima kasih.

Juni 2021

Atas nama Direksi,

Sugeng Riyanto

Direktur Utama

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini berikut Laporan Keuangan dan informasi yang terkait.

Banjarnegara, Juni 2021



Emila Hayati
Komisaris Utama



Tenny Yanutriana
Komisaris



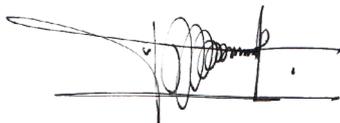
Hadi Supeno
Komisaris Independen



Abdul Khoir Maradika Putra
Komisaris Independen*



Dicky Firman Tarigan
Komisaris Independen



Sugeng Riyanto
Direktur Utama



Sri Wahyu Utami
Direktur Umum



Wahjoe Roekmono
Direktur Kredit

*Dalam proses perizinan menjadi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

MAKE
TODAY
AMAZING



A smiling man and woman standing in front of a BPR. BAN logo. The man is wearing a pink shirt and the woman is wearing a red coat and a black hijab. The background features a large logo with the letters 'BPR. BAN' and a stylized 'S' in a red and white hexagonal shape.

PROFIL PERUSAHAAN

Identitas Perusahaan

Riwayat Singkat

Bidang Usaha

Filosofi Bisnis

Tujuan Perusahaan

Strategi Pengembangan

Struktur Organisasi

Visi dan Misi

Nilai dan Budaya Perusahaan

Profil Dewan Komisaris

Profil Direksi

Profil Pejabat Eksekutif

Sumber Daya Manusia

Teknologi Informasi

Kepemilikan Saham Oleh Pengurus

Daftar Entitas Anak

Struktur Grup

Kronologi Penerbitan Saham

Kronologi Penerbitan/Pencatatan Efek Lainnya

Nama dan Alamat Lembaga/Profesi Penunjang

Penghargaan dan Sertifikasi 2020

Jaringan Kantor



PT GARUDA
INDONESIA

Services



IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Lengkap : PT BPR Surya Yudhakencana
Nama Singkat : BPR Bank Surya Yudha atau BSY
Kantor Pusat : Rejasa Rt. 03 Rw. 03 Madukara,
Banjarnegara, Jawa Tengah 53482
Telepon : (0286) 591662
Faximile : (0286) 591808
Tanggal Berdiri : 12 April 1992
Jenis Usaha : Perbankan

Status : Perseroan Terbatas
Email : pusat@suryayudha.id
Website : www.suryayudha.id
Facebook : BSY
Twitter : @BPRBSY
Instagram : @bprbsy
Modal Inti : Rp362.999.719.238,00
Jumlah jaringan : 29 kantor cabang, 50 kantor kas, 1
payment point dan 2 kas keliling.

SEJARAH SINGKAT

PT BPR Surya Yudhakencana yang biasa disebut BSY didirikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Perseroan Terbatas pada tanggal 12 April 1992 berdasarkan ijin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.066/KM.13/92 tanggal 16 Maret 1992. Selama berdiri sampai dengan saat ini BSY tidak pernah melakukan perubahan nama.

Kehadiran BSY di tengah-tengah masyarakat merupakan perwujudan dari kebutuhan akan pelayanan jasa perbankan yang lebih baik dengan berbasis budaya masyarakat lokal. Sebagai sebuah Bank Perkreditan Rakyat, BSY mengenalkan pelayanan perbankan jemput bola dimana para staf mendatangi para nasabah secara door to door. Melalui pelayanan perbankan ini BSY telah berhasil memperoleh perhatian masyarakat luas melalui produk dan layanannya. Dengan didukung tenaga kerja yang profesional serta produk perbankan yang aman dan menguntungkan, kini BSY telah menjadi BPR yang terpercaya dan dapat diandalkan.

BSY senantiasa melakukan upaya perbaikan restrukturisasi yang mencakup aspek manajemen, karyawan, organisasi, sistem, dan teknologi. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, tanggung jawab, integritas dan profesionalisme.

Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, BSY secara konsisten mengembangkan dan meningkatkan struktur permodalan serta usahanya. Usaha dan inisiatif yang

dibutuhkan untuk beroperasi di wilayah yang sedang berkembang banyak memiliki tantangan. Untuk itu agar senantiasa dapat mengembangkan pangsa pasarnya, BSY secara konsisten terus memperkokoh permodalannya dan meningkatkan kinerja keuangannya secara terpadu.

Selama 28 tahun sejak berdirinya, BSY senantiasa berupaya membangun dan meningkatkan reputasi serta kepercayaan masyarakat di wilayah operasi BSY. Dimulai dengan dibukanya Cabang Wanadadi di Banjarnegara pada tahun 1995, BSY kini telah memiliki jaringan sebanyak 29 kantor cabang, 50 kantor kas, 1 *payment point*, dan 2 mobil kas keliling yang tersebar di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Pekalongan.

Meski di tahun 2020 perekonomian secara global mengalami masa sangat sulit akibat pandemi Covid-19, namun BSY masih memperoleh predikat SEHAT dari Otoritas Pengawas Perbankan (BI dan OJK), dan pada 28 tahun melayani masyarakat, per akhir tahun 2020 jumlah aset total BSY telah mencapai Rp2.8 triliun yang menjadikan BSY menjadi BPR terbesar se-Jawa Tengah dan menempati posisi ketiga se-Indonesia. Selain itu di tahun 2020 BSY juga mendapatkan Platinum Award dengan predikat "Sangat Bagus" atas kinerja keuangan selama satu dasawarsa berturut-turut sejak tahun 2009. Sampai dengan saat ini BSY senantiasa berkarya secara profesional, bertindak cepat dan mengutamakan kepentingan nasabah serta membangun kesan BPR sehat dan ramah.

MILESTONE

- 1992** : Berdiri dengan nama PT BPR Surya Yudhakencana.
- 1995** : Pembukaan Kantor Cabang Wanadadi, Cabang Klampok.
- 1996** : Pembukaan Kantor Cabang Purwonegoro, Cabang Karangobar.
- 2004** : Pembukaan Kantor Cabang Purbalingga.
- 2006** : Pembukaan Kantor Cabang Purwokerto. Penambahan produk Tabungan Arisan Surya (TAS).
- 2007** : Pembukaan Kantor Cabang Kalibening.
- 2008** : Pembukaan Kantor Cabang Batur, Cabang Singamerta.
- 2009** : Pembukaan Kantor Cabang Bobotsari, Cabang Dieng. Perubahan *Core Banking* dari DOS menjadi AS400.
- 2010** : Pembukaan Kantor Cabang Pasar Besar, Cabang Cilacap, Cabang Mandiraja.
- 2011** : Pembukaan Kantor Cabang Pekalongan. Menggunakan ATM *Co-Branding* dengan Bank Syariah Mandiri (BSM).
- 2012** : Pembukaan Kantor Cabang Pagentan. Peningkatan Layanan ATM ke *host to host*.
- 2014** : Pembukaan Kantor Cabang Rembang. *Launching* 2 unit mobil kas keliling. *Launching* layanan loket PPOB. Penambahan produk Tabungan Umroh.
- 2015** : Pembukaan Kantor Cabang Banyumas. Penambahan produk Tabungan Hari Tua (THT). Penambahan layanan SMS Masking.
- 2016** : Pembukaan Kantor Cabang Kroya, dan Cabang Ajibarang. Penambahan Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel).
- 2017** : Pembukaan Kantor Cabang Punggelan, Cabang Madukara, Cabang Karangreja. Penambahan Produk Kredit Kendaraan. Penambahan Produk *Bridging Loan*. Penambahan Produk Kredit Mikro Pedagang Pasar.
- 2018** : Pembukaan Kantor Cabang Wanayasa, Cabang Pagedongan, Cabang Kaligondang. Penambahan Produk Tabungan Piknik. *Launching* Aplikasi *E-Inventory*. Pengembangan E-Paperless: E-Informasi, E-Collect, E-KTP Online, dan E-Petty Cash. Migrasi *Core Banking System*.
- 2019** : Pembukaan Kantor Cabang Baturraden, Cabang Sragi, Cabang Kedungwuni. Pengembangan E-Paperless antara lain: E-Gaji, E-SPP, Aplikasi TKS.
- 2020** : Uji coba aplikasi BSY Mobile. Uji coba transaksi ATM di mesin ATM BSY.

BIDANG USAHA

Bidang usaha BSY menurut anggaran dasar nomor 94 tanggal 10 Januari 1991 adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito berjangka dan Tabungan.
2. Memberikan Kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan.

PRODUK SIMPANAN

Tabungan Surya

Tabungan tanpa biaya administrasi bulanan, yang penyeterannya dan penarikannya dapat dilakukan melalui sistem jemput bola, dengan tingkat suku bunga sebagai berikut.

Tabel suku bunga Tabungan Surya

Bunga	Saldo Tabungan
0%	0 - < 100.000
1%	> 100.000 - < 50.000.000
2%	> 50.000.000 - < 500.000.000
3%	> 500.000.000

No	Jangka Waktu	Prosentase		Nominal	Total Biaya
		Bunga Rekening	Hadiah		
1	3 bulan	Min 0,25%	2,25%	2.500.000 - ≤ 50.000.000	2,50%
			2,75%	> 50.000.000 - ≤ 500.000.000	3,00%
			3,25%	> 500.000.000	3,50%
2	6 bulan	Min 0,25%	2,75%	2.500.000 - ≤ 50.000.000	3,00%
			3,00%	> 50.000.000 - ≤ 500.000.000	3,25%
			3,25%	> 500.000.000	3,50%
3	12 bulan	Min 0,25%	3,00%	2.500.000 - ≤ 50.000.000	3,25%
			3,50%	> 50.000.000 - ≤ 500.000.000	3,75%
			3,75%	> 500.000.000	4,00%

Inovasi dari Tabungan Surya adalah program Tabungan Surya Berhadiah, yaitu program tabungan dengan memberikan hadiah khusus berupa barang sesuai dengan pilihan nasabah di awal penempatan dana, dengan syarat dan ketentuan adanya batasan nominal dan jangka waktu pengambilan tabungan sebagaimana tabel di atas.

Tabungan ATM Surya Umum

Tabungan dengan fasilitas kartu ATM sehingga transaksi penarikan dana dapat dilakukan melalui mesin ATM dengan beban biaya administrasi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulannya. Suku bunga Tabungan ATM Surya Umum adalah 1% untuk nominal di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau untuk nominal di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bisa dinegosiasikan dengan manajemen.

Tabungan ATM Surya Khusus

Tabungan ATM yang ditujukan khusus untuk karyawan BSY, karena digunakan sebagai rekening pembayaran gaji bulanan. Suku bunga ATM Surya Khusus sebesar 5% untuk nominal di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Tabungan Hari Tua (THT)

Tabungan berjangka dengan bunga berjenjang dan kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi.

Produk ini adalah produk tabungan berjangka dikarenakan dana belum dapat diambil apabila belum jatuh tempo kontrak, kontrak THT adalah selama 5 tahun. Bunga Tabungan THT adalah sebesar 4%.

Tabungan Pensiun

Tabungan khusus diberikan kepada karyawan BSY dipersiapkan untuk bekal di hari tua bila telah memasuki masa purna bakti/pensiun, dengan suku bunga 10%.

Tabungan Arisan Surya (TAS)

TAS adalah tabungan berjangka dengan sistem arisan berbonus yang terdiri dari kelompok-kelompok dengan jumlah setoran tetap setiap bulannya dan dilakukan pengocokan seperti halnya kegiatan arisan. TAS menggunakan sistem gugur, yaitu bagi peserta yang namanya keluar dalam kocokan bulanan maka tidak diikuti lagi dalam kegiatan arisan bulan selanjutnya, atau dengan kata lain rekening TAS nasabah tersebut ditutup dan nasabah tidak perlu melakukan setoran Tabungan untuk bulan selanjutnya. Masa periode TAS adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dengan setoran Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulannya, dengan jumlah kepesertaan dalam 1 (satu) kelompok adalah 200 (dua ratus) rekening. Suku bunga TAS sebesar 0,25% untuk nominal di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan total biaya dana sebesar 7,5%.

Keuntungan TAS :

- Disediakan 10 (sepuluh) buah *doorprize* menarik di setiap bulan saat kocokan arisan.
- Disediakan insentif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap nasabah yang namanya keluar dalam kocokan arisan setiap bulannya.
- Disediakan 4 (empat) buah *doorprize* uang tunai masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 6 (enam) bulan sekali untuk satu kelompok arisan.
- Disediakan 4 (empat) buah *doorprize* uang tunai masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- Grandprize* sepeda motor, mesin cuci/lemari es dan televisi pada saat akhir periode kocokan.

TabunganKu

Tabungan yang merupakan produk dari Bank Indonesia (BI) melalui seluruh Bank di Indonesia, guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan suku bunga yang telah ditetapkan yakni sebesar 4%.

Tabungan Umroh

Tabungan Umroh adalah tabungan berjangka yang dipersiapkan untuk ibadah umroh dengan nominal plafon disesuaikan dengan tarif umroh yang ada. Setoran tabungan dilakukan rutin setiap bulan selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan jumlah tetap. Tabungan Umroh diasuransikan sehingga dapat diberikan kepada ahli waris apabila nasabah meninggal dunia. Suku bunga Tabungan Umroh adalah 0,5% dengan total biaya dana sebesar 5%.

Tabel jangka waktu dan setoran Tabungan Umroh

Jangka Waktu	Setoran (Rp)
1 tahun	2.500.000
2 tahun	1.250.000
3 tahun	850.000
4 tahun	625.000
5 tahun	500.000

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)

SimPel adalah produk Tabungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Bank di Indonesia, yang diperuntukkan bagi siswa sekolah mulai dari PAUD/ sederajat sampai dengan SMA/ sederajat untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Pengembangan produk ini berdasarkan pada program pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Amanat Strategi Nasional Literasi Keuangan Nasional (SNLKI).

Tabungan Piknik

Tabungan Piknik adalah Tabungan berjangka yang ditujukan kepada nasabah yang memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan dalam rangka piknik/tamasya. Tabungan ini dibuat secara berkelompok dan setoran Tabungan dilakukan secara rutin setiap bulannya selama jangka waktu tertentu. Pada akhir periode Tabungan nasabah berhak mendapatkan:

- Piknik gratis.
- Pokok Tabungan dan bunga.
- Grandprize.
- Doorprize.
- Insentif.

Tabungan Piknik dibagi menjadi 2 jenis yaitu Tabungan Piknik Umum dan Tabungan Piknik Sekolah Dasar (SD).



Adapun ketentuan Tabungan Pknik sebagai berikut:

Ketentuan	Umum 1	Umum 2	Sekolah Dasar
Jumlah rekening per kelompok	200 rekening	100 rekening	100 rekening
Jangka waktu	36 bulan	36 bulan	60 bulan
Setoran per bulan	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp75.000,00
Grandprize akhir periode	1 = Rp1.000.000,00 2 = Rp 750.000,00 3 = Rp 600.000,00	1 = Rp500.000,00 2 = Rp400.000,00 3 = Rp300.000,00	1 = Rp350.000,00 2 = Rp300.000,00 3 = Rp250.000,00
Doorprize akhir periode	25 rekening @Rp500.000,00	25 rekening @Rp200.000,00	20 rekening @Rp200.000,-
Insentif peserta	@Rp100.000,00 (72 rekening)	@Rp100.000,00 (72 rekening)	@Rp50.000,00 (77 rekening)
Tujuan piknik	Sesuai kesepakatan	Sesuai kesepakatan	Sesuai kesepakatan
Total biaya dana	6%	6%	6%

Deposito Berjangka

Deposito adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Tabel suku bunga Deposito

Jangka Waktu	Nominal			
	1jt - ≤50jt	>50jt - ≤100jt	>100jt - ≤500jt	>500jt
1 bulan	5,25%	5,50%	5,75%	6,25%
3 bulan	5,50%	5,75%	6,00%	7,00%
6 bulan	5,75%	6,00%	6,25%	7,25%
12 bulan	6,00%	6,25%	6,50%	7,50%





PRODUK LAYANAN

Jemput bola

Merupakan pelayanan kepada nasabah dimana petugas marketing mendatangi nasabah berada untuk melakukan transaksi perbankan (setoran Tabungan, angsuran, Deposito).

ATM BSY

Merupakan layanan yang dapat digunakan sebagai media informasi dan penanganan keluhan nasabah melalui telepon. Layanan ini dilengkapi dengan IVR (*Interactive Voice Response*) dan beroperasi selama 24 jam. Nasabah dapat mengakses nomor telepon 0286-595000 untuk melakukan aktivasi kartu ATM BSY, menanyakan informasi seputar layanan perbankan atau mengajukan keluhan yang dialami oleh nasabah dalam melakukan transaksi keuangan.

Call Center BSY

Merupakan layanan yang dapat digunakan sebagai media informasi dan penanganan keluhan nasabah melalui telepon. Layanan ini dilengkapi dengan IVR (*Interactive Voice Response*) dan beroperasi selama 24 jam. Nasabah dapat mengakses nomor telepon 0286-595000 untuk melakukan aktivasi kartu ATM BSY, menanyakan informasi seputar layanan perbankan atau mengajukan keluhan yang dialami oleh nasabah dalam melakukan transaksi keuangan.

PPOB (*Payment Point Online Bank*)

Merupakan layanan pembayaran secara *online* yang dapat digunakan untuk pembelian atau pembayaran tagihan dan voucher listrik, tagihan PDAM, tagihan telepon, TV kabel, telepon seluler Prabayar dan pasca bayar, tiket kereta api dan pesawat, pembayaran asuransi dan BPJS. Layanan PPOB dapat dilakukan dengan pembayaran tunai atau debit rekening Tabungan.

SMS Masking

Merupakan bentuk layanan informasi kepada nasabah atau karyawan melalui pesan singkat atau SMS atas nama BSY.

BSY Mobile

Merupakan layanan *mobile banking* menggunakan *smartphone* yang dapat digunakan untuk melakukan transfer antar rekening, informasi rekening dan pembelian produk PPOB. Di tahun 2020 layanan BSY Mobile baru dalam tahap implementasi secara internal khusus karyawan, dan sebagai bentuk ujicoba sebelum dilakukan *launching* untuk seluruh nasabah.

PRODUK PEMBIAYAAN

Produk kredit BSY memiliki keunggulan bersaing yang mampu memberikan keuntungan lebih kepada para debitur. Dengan suku bunga kredit yang ringan, proses yang cepat, tenaga kerja yang ramah dan siap membantu sejak proses pengajuan, pencairan, penarikan angsuran hingga pelunasannya tanpa adanya uang pelicin.

Fasilitas Kredit yang diberikan:

1. Permohonan pinjaman dapat diajukan ke kantor BSY terdekat .
2. Jangka waktu pinjaman 1 sampai dengan 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
3. Sistem angsuran kredit dapat dipilih sesuai dengan kesepakatan, yaitu: Flat Murni, Anuitas, Efektif, Bulanan Tetap (BT), Rekening Koran (RK).
4. Limit kredit dapat diambil mulai dari plafon Rp1 juta sampai dengan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK).
5. Angsuran Kredit dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor BSY, melalui petugas jemput bola maupun menggunakan transfer melalui bank umum ke rekening BSY.

Persyaratan Kredit:

1. Mengisi formulir permohonan kredit.
2. Melampirkan legalitas usaha NPWP, SIUP, SITU, TDP/Surat keterangan usaha.
3. Melampirkan dokumen identitas diri berupa KTP/SIM dan Kartu Keluarga, dan untuk badan usaha melampirkan Akta Pendirian dan perubahannya.
4. Melampirkan fotocopy Pendapatan Usaha atau rekening tabungan yang digunakan untuk lalu lintas transaksi selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Jenis kredit yang dimiliki BSY antara lain:

1. Kredit Umum

Kredit umum adalah kredit yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat atas nama perorangan maupun badan hukum/perusahaan yang digunakan sebagai modal kerja, investasi, atau konsumsi. Kredit umum wajib menggunakan agunan. Jangka waktu kredit paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun.

2. Kredit Pegawai

Kredit pegawai adalah kredit yang diberikan kepada pegawai baik pegawai pemerintah/negeri (termasuk CPNS) maupun swasta dengan pembayaran angsuran dilakukan dengan sistem potong gaji oleh bendahara instansi, yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Kredit dapat diberikan tanpa menggunakan agunan. Jangka waktu kredit paling lama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun.

3. Kredit Agunan Deposito (*Back To Back*)

Fasilitas kredit yang diberikan dengan jaminan bilyet deposito berjangka, dan/atau tabungan yang diterbitkan oleh BSY.

Manfaat:

- a. Penarikan dapat dilakukan setiap saat.
- b. Bagian yang belum ditarik tidak dikenakan bunga.
- c. Pelunasan pada saat jatuh tempo kredit.

4. Kredit Elektronik

Kredit elektronik adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat dalam hal kepemilikan barang-barang elektronik.

5. Kredit Talangan (*Bridging Loan*)

Kredit Talangan (*Bridging Loan*) adalah produk kredit yang diperuntukkan bagi seluruh pengusaha baik atas nama pribadi maupun atas nama badan usaha sepanjang memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, dan diberikan dalam bentuk pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana yang bersifat sementara sambil menunggu pendanaan yang akan diperoleh pada masa akan datang. Sistem pembayaran angsuran berlaku hanya secara Bulanan Tetap (BT) dan Rekening Koran (RK) dengan tipe produk pada sistem sama dengan kredit umum lainnya.

6. Kredit Mikro Pedagang Pasar (KMPP)

Kredit Mikro Pedagang Pasar (KMPP) adalah kredit khusus yang diberikan kepada pedagang pasar dengan tujuan mengatasi maraknya kreditur informal di tengah masyarakat sekaligus turut serta dalam program Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh BSY bersama-sama dengan bank atau lembaga pembiayaan lain, dengan pembagian dana, risiko dan pendapatan (bunga dan provisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi.

FILOSOFI BISNIS

Demi mencapai dan menjaga tingkat kepuasan para *stakeholder* yang menjalin hubungan kerja dengan BSY, filosofi yang dianut adalah senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. BSY memberikan apa yang menjadi hak para *stakeholder* dan selalu melakukan kewajibannya demi tercapai tingkat kepuasan yang tinggi baik dari pihak internal maupun eksternal BSY.

Pelayanan terbaik ini secara khusus ditujukan pula bagi mereka para masyarakat kecil, mikro dan menengah yang membutuhkan jasa pelayanan perbankan, namun belum mampu dipenuhi oleh pihak perbankan umum. BSY siap menjadi “Mitra Menjadi Sukses” bagi mereka, sesuai dengan moto BPR selama ini.

TUJUAN PERUSAHAAN

BSY telah menetapkan target usaha sebagai BPR Regional Jawa Tengah. Sebagai bank regional artinya BSY mampu menjadi bank yang menguasai pangsa pasar Jawa Tengah baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

STRATEGI PENGEMBANGAN

STRATEGI POSITIONING

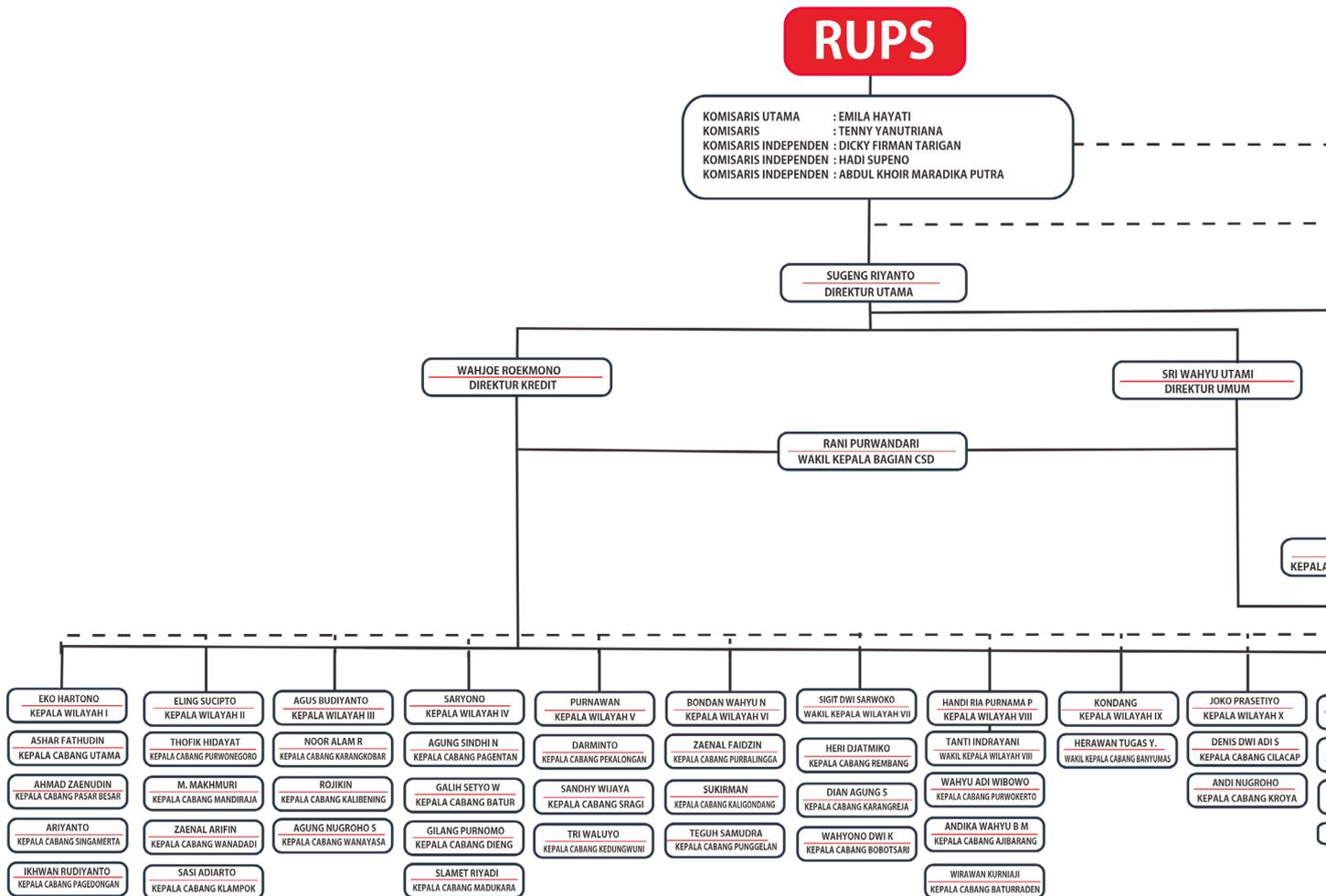
BSY menempatkan dirinya sebagai *market leader* di wilayah operasionalnya di dalam melayani sektor mikro. Hal ini dilakukan dengan mempelajari pasar dengan seksama, menjangkau masyarakat tanpa enggan melangkah ke bawah dan senantiasa menciptakan diversifikasi produk, baik dari produk simpanan maupun produk pinjaman.

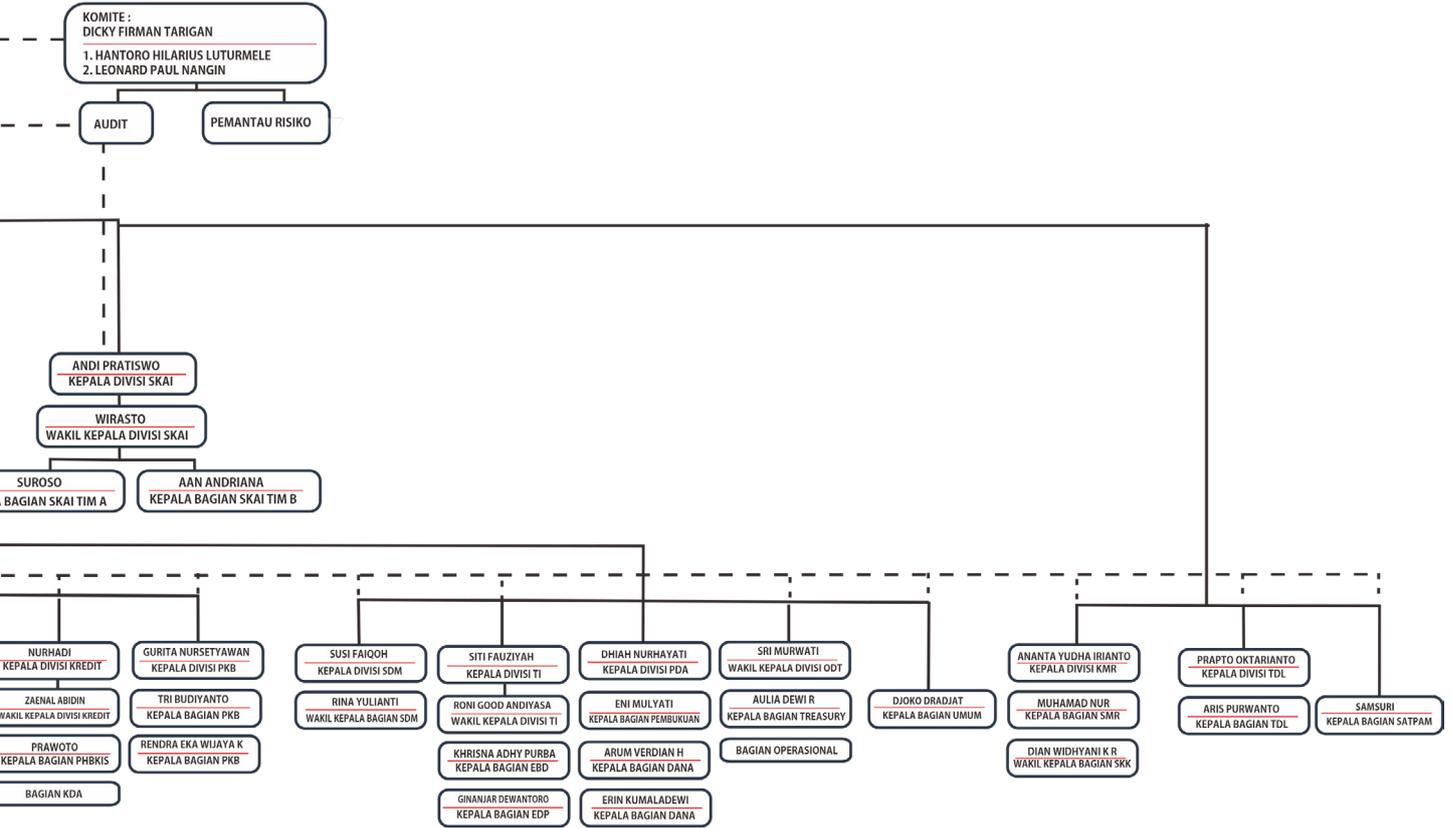
STRATEGI ALIANSI

Saat ini, BSY telah bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam mewujudkan rencana-rencana bisnisnya. Beberapa pihak penting yang mendukung antara lain Bank Indonesia/Otorisasi Jasa Keuangan, beberapa Bank Umum terkemuka, Lembaga Keuangan Pemerintah dan berbagai instansi lainnya yang memiliki sinergi strategis dengan BSY, baik instansi milik swasta maupun milik pemerintah.



STRUKTUR ORGANISASI





VISI DAN MISI

DASAR PENGESAHAN VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Perumusan visi dan misi BSY diawali dengan penggalian filosofi dan nilai-nilai budaya perusahaan. Implementasi filosofi BSY dijabarkan dengan menetapkan visi dan misi yang didukung penuh oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Visi

Menjadi BPR Regional di Jawa Tengah dan terkemuka di Indonesia.

Misi

1. Menjadi infrastruktur keuangan yang berorientasi pada pengembangan UMKM menuju kesejahteraan bersama rakyat.
2. Suatu organisasi yang terpusat pada nasabah, menawarkan nilai lebih berdasarkan keunggulan pelayanan melalui sumber daya manusia profesional dan teknologi yang mutakhir.
3. Menjadi Bank pilihan untuk berkarya dan yang dihormati oleh nasabah, karyawan, pemegang saham, regulator, dan komunitas dimana kami berada.

PENJELASAN VISI

PT BPR Surya Yudhakencana (BSY) memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan perbankan yang berkualitas bagi para UMKM di seluruh wilayah Jawa Tengah. Tujuan ini diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif, serta bantuan dana untuk tujuan investasi maupun konsumtif. Selain itu sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, BSY menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan hasil investasi yang menguntungkan. Meskipun fokus wilayah operasional di provinsi Jawa Tengah, BSY berupaya untuk menjadi BPR terkemuka di Indonesia dengan mengedepankan kinerja keuangan dan profesionalisme yang tinggi sehingga dapat berkontribusi aktif dalam perkembangan industri BPR secara Nasional dan dipercaya penuh oleh seluruh pemangku kepentingan.

PENJELASAN MISI

1. Pertumbuhan pembangunan perekonomian UMKM merupakan misi utama BSY sebagai mitra yang sangat peduli akan peningkatan kesejahteraan para nasabahnya.

2. BSY senantiasa berupaya untuk menyediakan produk-produk layanan perbankan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia dengan integritas dan loyalitas yang baik, mempunyai jiwa melayani dan bertindak profesional, serta didukung dengan infrastruktur teknologi tinggi.
3. Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha secara sehat, BSY berupaya untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan menjalin hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan dengan mengedepankan rasa hormat dan asas saling menguntungkan.

NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

BSY memiliki budaya kerja yang dilatarbelakangi oleh *founder values* yaitu:

1. Peka dan peduli.
2. Jujur dan terbuka.
3. Konsisten terhadap komitmen.
4. Tuntas.
5. Kreatif dan Inovatif.

Nilai-nilai dari pemilik sekaligus pendiri BPR ini yang kemudian diterapkan dalam budaya kerja BSY.

Budaya Kerja BSY Adalah Menerapkan 7 Prinsip Dasar Kerja Yang Terdiri Dari Nilai-Nilai:



1. Jujur

Memiliki sikap yang berani untuk berkata dan bertindak yang benar, sesuai dengan etika bank dan nilai moral yang berlaku di masyarakat.



5. Kerjasama

Bekerja dengan mengutamakan *teamwork* dengan metode dan tujuan yang disepakati bersama, untuk kepentingan bank.



2. Tanggung Jawab

Memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang menjadi kewajibannya.



6. Adil

Suatu sikap objektif, yang berlandaskan kejujuran dan tidak memihak kecuali kepada kebenaran.



3. Visioner

Memiliki wawasan, sikap dan pandangan yang jauh ke depan untuk membangun bank ke arah yang lebih baik.



7. Peduli

Rasa memiliki yang tinggi dan cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi lingkungan kerja.



4. Disiplin

Konsisten dalam melaksanakan tugas, tepat waktu, serta menjunjung tinggi dan menaati Kode Etik Perbankan.

PROFIL DEWAN KOMISARIS





SURYAWIDHA



SURYAWIDHA



SURYAWIDHA



SURYAWIDHA

EMILA HAYATI

KOMISARIS UTAMA



Personal

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Oktober 1965
Usia : 55 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Doktoranda Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, lulus pada tahun 1989.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Komisaris Utama untuk periode jabatan 2020 – 2025. Sebelumnya beliau telah menjabat sebagai Komisaris di BSY sejak April 2010 – Oktober 2020. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Non-Operasional II yang membawahi Bagian Pembukuan, Sekretariat dan Personalia. Beliau pernah bekerja di The Bank of Tokyo, Ltd Surabaya pada Bagian Operasional (1989-1993), dan di Sanwa Indonesia Bank Jakarta pada Bagian Ekspor Impor dan Bagian Operasional sebagai Supervisor (1993-2001). Hingga saat ini selain menjabat sebagai Komisaris Utama di BSY Banjarnegara, Emila Hayati juga merupakan Komisaris Utama di PT BPR Surya Yudha Wonosobo dan PT BPR Eleska Artha Purwokerto.

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No. 155 tanggal 22 Oktober 2020, masa jabatan berlaku hingga 20 Oktober 2025.

TENNY YANUTRIANA

KOMISARIS



Personal

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Januari 1981
Usia : 39 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia tahun 2004. Mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2014 sebagai lulusan terbaik, dan menjalani satu semester abroad di Fachhochschule Koln, Jerman. Tenny Yanutriana, MBA merupakan satu-satu lulusan dari iLab Entrepreneur Institute yang berasal dari Indonesia, program tersebut diselesaikannya di tahun 2015.

Pada tahun 1997, selama satu tahun beliau mengikuti Rotary Youth Exchange Program di Idaho, USA. Di tahun 2010, The MasterCard Foundation memberikan beasiswa kepada beliau untuk mengikuti pendidikan Boulder Institute of Microfinance "*Microfinance Management*" concentration di Turin Italia dan di tahun 2011 beasiswa untuk mengikuti pendidikan Harvard Business School Executive Education "*Strategic Leadership for Microfinance*."

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Komisaris di BSY untuk periode jabatan 2020-2025. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober 2020. Tenny Yanutriana sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Non-Operasional II yang membawahi Bagian Pembukuan, Sekretariat dan Personalia. Hingga saat ini selain menjabat sebagai Komisaris di BSY Banjarnegara, per April 2019 juga menjabat sebagai Komisaris di PT BPR Bhakti Daya Ekonomi (BDE) Yogyakarta. Selain itu juga sebagai Ketua Departemen Bidang Luar Negeri di DPP Perbarindo.

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No. 155 tanggal 22 Oktober 2020, masa jabatan berlaku hingga 20 Oktober 2025.

DICKY FIRMAN TARIGAN

KOMISARIS INDEPENDEN



Personal

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 6 Juni 1958

Usia : 62 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 1982.

Perjalanan Karir

Bergabung dengan BSY sejak Oktober 2018 sebagai Wakil Kepala Divisi *Training and Marketing Communication* dan Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko (TMS). Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Maret 2019 untuk periode jabatan 2019-2024.

Sebelumnya bekerja di Bank Indonesia (1982-2013), jabatan terakhir sebagai Manajer Pengawas BPR di Bank Indonesia Purwokerto. Setelah pensiun, sempat mendirikan lembaga training VISITO *Training & Consulting* dan menjabat sebagai Direktur Utama.

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.119 tertanggal 19 Maret 2019 dan masa jabatan berlaku hingga 16 Maret 2024.

HADI SUPENO

KOMISARIS INDEPENDEN



Personal

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 14 April 1959

Usia : 61 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Jurusan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada tahun 2001.

Perjalanan Karir

Bergabung di BSY sejak 2019 dan sejak 18 Mei 2020 beliau resmi menjabat sebagai Komisaris independen. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko & Training (KMT).

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.202 tertanggal 20 Mei 2020 dan masa jabatan berlaku hingga 18 Mei 2025.

ABDUL KHOIR MARADIKA PUTRA KOMISARIS INDEPENDEN

(Dalam proses persetujuan OJK menjadi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)



Personal

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 April 1971
Usia : 49 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto tahun 2002.

Perjalanan Karir

Bergabung dengan BSY sejak tahun 1994 sebagai staf marketing (1994-1995), Wakil Kepala Cabang Karangobar (1995-1997), Kepala Cabang Karangobar (1997-2002), Wakil Kepala Divisi Kredit (2002-2004), Kepala Wilayah (2004-2009), Direktur Kredit (2009-2016), pernah menjabat juga sebagai Direktur Kepatuhan sejak bulan September 2016 sampai dengan Februari 2018. Sejak Februari 2018 menjabat sebagai Komisaris Independen dan saat ini sedang dalam proses persetujuan OJK sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sebelumnya pernah bekerja di BPR Pilar Niaga Jakarta sebagai Marketing (1993-1994).

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.175 tertanggal 20 Februari 2018 dan masa jabatan berlaku hingga 20 Februari 2023.



PROFIL DIREKSI





YA XI A

lenji

SUGENG RIYANTO

DIREKTUR UTAMA



Personal

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 8 Oktober 1974
Usia : 46 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Jendral Soedirman Purwokerto tahun 2012.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak Agustus 2015 untuk periode jabatan 2015-2020, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Wilayah I (2010-2015), Wakil Kepala Divisi Kredit (2006-2010), Kepala Cabang Karangobar (2002-2006), Kepala Cabang Utama (2000-2002), Wakil Kepala Cabang Mandiraja (1999-2000), Kepala Seksi (1997-1999), Staf Marketing (1995-1997). Meniti karir di BSY sejak tahun 1995.

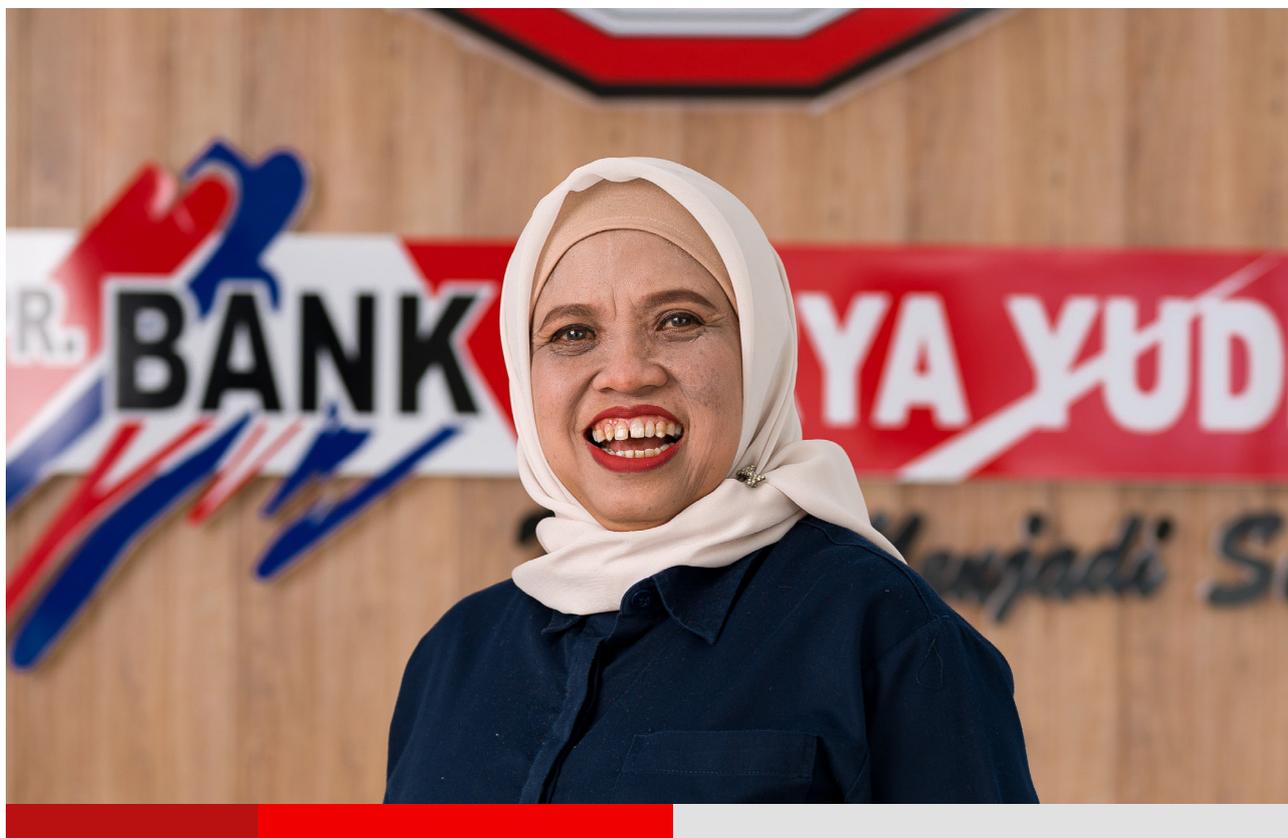
Saat ini juga menjabat sebagai ketua bidang dana dan usaha Perbarindo DPD Jawa Tengah.

Dasar Pengangkatan

Akte Notaris No. 65 tanggal 03 Juli 2020, masa jabatan berlaku hingga 07 Juli 2025.

SRI WAHYU UTAMI

DIREKTUR UMUM



Personal

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Februari 1965

Usia : 55 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya tahun 1989 dan lulus pendidikan profesi akuntan di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) pada tahun 2007.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Direktur Umum sejak tahun 2009 dan saat ini menjabat untuk periode jabatan 2019-2024, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama (1999-2009) dan Direktur (1992-1999).

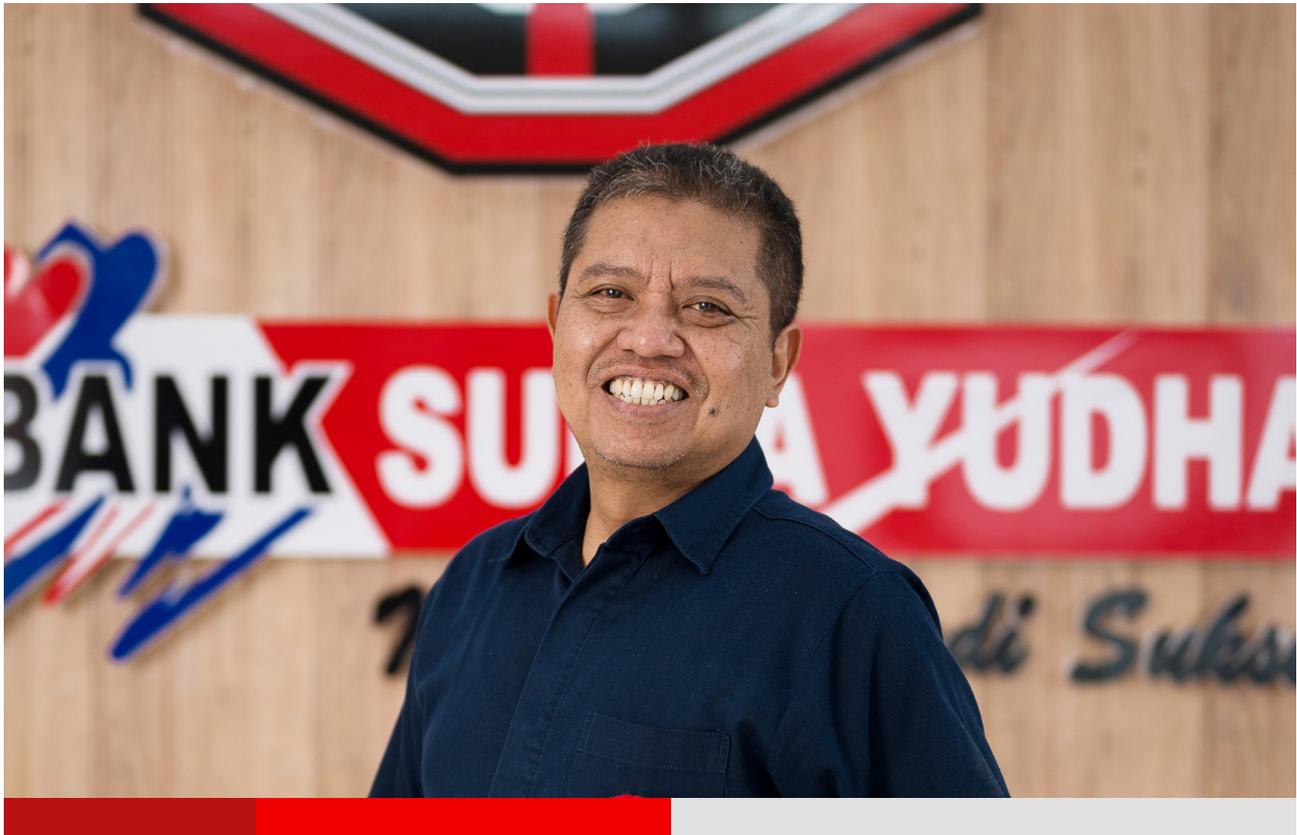
Bergabung di BSY sejak tahun 1992, sebelumnya pernah bekerja di PT BPR Artha Senapati Bangil Pasuruan Jawa Timur (1990-1992), *Applied Computer Management* Indonesia (1990), Auditor di Kantor Akuntan Publik Subandi Surabaya (1989-1990), staf pengajar SMP PGRI 32 Surabaya (1988-1989).

Dasar Pengangkatan

Akte Notaris No.283 tanggal 25 November 2019, masa jabatan berlaku hingga 09 November 2024.

WAHJOE ROEKMONO

DIREKTUR KREDIT



Personal

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Maret 1967
Usia : 53 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Putra Bangsa Surabaya tahun 1997.

Pengalaman Bekerja

Menjabat sebagai Direktur Kredit sejak Mei 2020 untuk masa jabatan 2020-2025. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sejak Februari 2018 sampai dengan Mei 2020. Wahjoe Roekmono pernah menjabat juga sebagai Kepala Wilayah VI yang membawahi Cabang Purbalingga, Cabang Bobotsari, Cabang Rembang, Cabang Karangreja (2015-2018), sebagai Kepala Wilayah V yang membawahi Cabang Purwokerto dan Cabang Cilacap (2013-2015), sebagai Kepala Wilayah VI yang membawahi Cabang Purwokerto dan Cabang Cilacap (Apr-Sept'13), sebagai Kepala Wilayah VI yang membawahi Cabang Purbalingga dan Cabang Purwokerto (2010-2013), sebagai Kepala Cabang Purwokerto (2006-2010), sebagai Kepala Cabang Wanadadi (2003-2006), sebagai Kepala Cabang Utama (Mar-Sept 2003), sebagai Wakil Kepala Bagian PKB (2002-2003), sebagai Kepala Seksi PPKB (2001-2002), sebagai Staf Bagian Penagihan (1999-2001).

Sebelum bergabung dengan BSY Banjarnegara di tahun 1999, sebelumnya pernah bekerja di PT BPR Dau Anugrah Malang sebagai Kolektor (1998) dan PT Bina Swadya Surabaya sebagai Sales Representatif (1998).

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.202 tertanggal 20 Mei 2020, masa jabatan berlaku hingga 18 Mei 2025.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



Andi Pratiswo

Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Menjabat sebagai Kepala Divisi SKAI berdasarkan SK Direksi No.109/DIR/PRS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Banjarnegara, 26 November 1978. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMK Cokroaminoto Banjarnegara lulus tahun 1999. Bergabung dengan BSY pada bulan Maret 2000.



Wirasto

Wakil Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi SKAI berdasarkan SK Direksi No.19/DIR/HRD/III/19 tanggal 1 Maret 2019. Lahir di Sragen, 12 Desember 1979. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) LPI Makassar lulus tahun 2004. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 2007.



Suroso

Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Tim A

Menjabat sebagai Kepala Bagian SKAI Tim A berdasarkan SK Direksi No.31/DIR/HRD/MTS/III/19 tanggal 1 Maret 2019. Lahir di Banjarnegara, 29 September 1974. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta lulus tahun 1998. Bergabung dengan BSY pada bulan April 1999.



Aan Adriana

Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Tim B

Menjabat sebagai Kepala Bagian SKAI Tim B berdasarkan SK Direksi No.20/DIR/HRD/III/19 tanggal 1 Maret 2019. Lahir di Banjarnegara, 14 Desember 1971. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Komputer di STIMIK AKAKOM Yogyakarta lulus tahun 1996. Bergabung dengan BSY pada bulan Maret 2003.



Nurhadi **Kepala Divisi Kredit**

Menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit berdasarkan SK Direksi No. 92/DIR/HRD/MTS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020. Lahir di Banyuwangi, 6 Mei 1967. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2012. Bergabung dengan BSY pada bulan Februari 1997.



Zaenal Abidin **Wakil Kepala Divisi Kredit**

Menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Kredit berdasarkan SK Direksi No. 268/DIR/SDM/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Lahir di Banjarnegara, 18 April 1980. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta lulus tahun 2016. Bergabung dengan BSY pada bulan Februari 2001.



Prawoto **Kepala Bagian Pengembangan Hubungan Bank Kelompok Instansi dan Sekolah (PHBKIS)**

Menjabat sebagai Kepala Bagian PHBKIS berdasarkan SK Direksi No. 135/DIR/SDM/MTS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Lahir di Wonosobo, 29 Mei 1986. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta lulus tahun 2016. Bergabung dengan BSY pada bulan Maret 2010.



Gurita Nursetyawan **Kepala Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB)**

Menjabat sebagai Kepala Divisi PKB berdasarkan SK Direksi No. 25/DIR/HRD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020. Lahir di Banjarnegara, 3 Februari 1979. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Kehutanan di Instiper Yogyakarta lulus tahun 2003. Bergabung dengan BSY pada bulan Desember 2003.



Tri Budiyanto

Kepala Bagian Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB)

Menjabat sebagai Kepala Bagian PKB berdasarkan SK Direksi No. 286/DIR/SDM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020. Lahir di Cilacap, 25 Juni 1982. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Peternakan di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2005. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 2006.



Rendra Eka Wijaya Kusuma

Kepala Bagian Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB)

Menjabat sebagai Kepala Bagian PKB berdasarkan SK Direksi No.246/DIR/HRD/IX/19 tanggal 2 September 2019. Lahir di Jakarta, 15 Mei 1973. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 di Akademi Keuangan dan Perbankan "LPI" Jakarta lulus pada tahun 1993. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 1997.



Dhiah Nurhayati

Kepala Divisi Pembukuan dan Dana (PDA)

Menjabat sebagai Kepala Divisi PDA berdasarkan SK Direksi No. 96/DIR/SDM/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020. Lahir di Banjarnegara, 27 Juli 1970. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2012. Bergabung dengan BSY pada bulan November 2019.



Eni Mulyati

Kepala Bagian Pembukuan

Menjabat sebagai Kepala Bagian Pembukuan berdasarkan SK Direksi No.067/DIR/PRS/MTS/VII/15 tanggal 30 Juli 2015. Lahir di Banjarnegara, 17 Mei 1973. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta lulus pada tahun 2015. Bergabung dengan BSY pada bulan Desember 1996.



Arum Verdian Hernani **Kepala Bagian Dana**

Menjabat sebagai Kepala Bagian Dana berdasarkan SK Direksi No. 278/DIR/SDM/XI/2020 tanggal 9 November 2020. Lahir di Banjarnegara, 15 Juli 1985. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Akuntansi di Akademi Akuntansi Sapta Widyatama Yogyakarta lulus tahun 2006. Bergabung dengan BSY pada bulan Maret 2013.



Erin Kumaladewi **Kepala Bagian Dana**

Menjabat sebagai Kepala Bagian Dana berdasarkan SK Direksi No. 88/DIR/SDM/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Lahir di Purwokerto, 27 Januari 1984. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Manajemen di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto lulus tahun 2005. Bergabung dengan BSY pada bulan Juli 2008.



Sri Murwati **Wakil Kepala Divisi Operasional dan Treasury (ODT)**

Menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi ODT berdasarkan SK Direksi No. 267/DIR/SDM/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Lahir di Banjarnegara 10 September 1980. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta lulus tahun 2016. Bergabung dengan BSY pada bulan Juli 2001.



Aulia Dewi Rarasratri **Kepala Bagian Treasury**

Menjabat sebagai Kepala Bagian Treasury berdasarkan SK Direksi No.119/DIR/PRS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Banjarnegara, 26 Februari 1983. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Bahasa Inggris di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus pada tahun 2004. Bergabung dengan BSY pada bulan Maret 2005.



Prpto Oktarianto

Kepala Divisi Training, Penelitian dan Pengembangan (TDL)

Menjabat sebagai Kepala Divisi TDL berdasarkan SK Direksi No.120/DIR/SDM/MTS/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020. Lahir di Banjarnegara, 21 Oktober 1969. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir di SMA Negeri 1 Banjarnegara lulus tahun 1989. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 1993.



Aris Purwanto

Kepala Bagian Training, Penelitian dan Pengembangan (TDL)

Menjabat sebagai Kepala Bagian TDL berdasarkan SK Direksi No. 146/DIR/SDM/MTS/XI/2020 tanggal 10 November 2020. Lahir di Banjarnegara, 30 Juni 1974. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2013. Bergabung dengan BSY pada bulan Februari 1999.



Siti Fauziyah

Kepala Divisi Teknologi Informasi (TI)

Menjabat sebagai Kepala Divisi TI berdasarkan SK Direksi No.041/DIR/PRS/MTS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Banjarnegara, 26 Februari 1978. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus pada 2012. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 1999.



Roni Good Andiyasa

Wakil Kepala Divisi Teknologi Informasi (TI)

Menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi TI berdasarkan SK Direksi No.114/DIR/PRS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Banjarnegara, 30 Desember 1976. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Widya Wiwaha Yogyakarta lulus tahun 2015. Bergabung dengan BSY pada bulan Desember 1995.



Ginanjar Dewantoro

Kepala Bagian Electronic Data Processing (EDP)

Menjabat sebagai Kepala Bagian EDP berdasarkan SK Direksi No.117/DIR/PRS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Banjarnegara, 2 Mei 1991. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Teknik Informatika di STIMIK Widya Utama Purwokerto lulus tahun 2018. Bergabung dengan BSY pada bulan Januari 2012.



Khrisna Adhy Purba

Kepala Bagian Electronic Banking & Product Development (EBD)

Menjabat sebagai Kepala Bagian EBD berdasarkan SK Direksi No.118/DIR/PRS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Sleman, 1 Maret 1980. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMU Taman Madya Jetis Yogyakarta lulus tahun 1999. Bergabung dengan BSY pada bulan Februari 2003.



Susi Faiqoh

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Menjabat sebagai Kepala Divisi SDM berdasarkan SK Direksi No.95/DIR/SDM/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020. Lahir di Banjarnegara, 9 September 1978. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Semarang lulus tahun 1999. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 2000.



Ananta Yudha Irianto

Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KMR)

Menjabat sebagai Kepala Divisi KMR berdasarkan SK Direksi No. 86/DIR/SDM/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020. Lahir di Jakarta, 23 Juni 1975. Memiliki latar belakang pendidikan pilot di Australian Aviation College lulus tahun 1994. Bergabung dengan BSY pada bulan Agustus 2020.



Muhamad Nur

Kepala Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko (SMR)

Menjabat sebagai Kepala Bagian SMR berdasarkan SK Direksi No. 82/DIR/HRD/MTS/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020. Lahir di Jakarta, 1 Desember 1977. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto lulus tahun 2018. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 2002.



Samsuri

Kepala Bagian Satuan Pengamanan

Menjabat sebagai Kepala Bagian Satuan Pengamanan berdasarkan SK Direksi No.411/DIR/HRD/VII/18 tanggal 23 Juli 2018. Lahir di Demak, 11 Juni 1960. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir STM YPP Bersubsidi Semarang lulus tahun 1979. Bergabung dengan BSY pada bulan Juli 2018.



Djoko Dradjat

Kepala Bagian Umum

Menjabat sebagai Kepala Bagian Umum berdasarkan SK Direksi No.229/DIR/HRD/VI/19 tanggal 11 Juni 2019. Lahir di Bandung, 1 Agustus 1950. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 di Universitas Terbuka lulus tahun 1991. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 2019.



Eko Hartono

Kepala Wilayah I

Menjabat sebagai Kepala Wilayah I berdasarkan SK Direksi No.022/DIR/PRS/MTS/II/18 tanggal 20 Februari 2018. Lahir di Banjarnegara, 27 November 1973. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus pada tahun 2012. Bergabung dengan BSY pada bulan Desember 1996.



Ashar Fathudin **Kepala Cabang Utama**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Utama berdasarkan SK Direksi No.29/DIR/HRD/MTS/III/2020 tanggal 26 Maret 2020. Lahir di Banjarnegara, 23 April 1972. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir di S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2012. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 1995.



Ariyanto **Kepala Cabang Singamerta**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Singamerta berdasarkan SK Direksi No.070/DIR/PRS/MTS/VII/16 tanggal 13 Juli 2016. Lahir di Banjarnegara, 8 Maret 1980. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Manajemen Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta lulus pada tahun 2016. Bergabung dengan BSY pada bulan Maret 2005.



Ahmad Zaenudin **Kepala Cabang Pasar Besar**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Pasar Besar berdasarkan SK Direksi No.07/DIR/HRD/I/19 tanggal 28 Januari 2019. Lahir di Banjarnegara, 7 Oktober 1989. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir di MAN 2 Banjarnegara lulus pada tahun 2007. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 2010.



Ikhwan Rudiyanto **Kepala Cabang Pagedongan**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Pagedongan berdasarkan SK Direksi No.424/DIR/HRD/IX/18 tanggal 5 September 2018. Lahir di Banjarnegara, 6 Juni 1973. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Keuangan dan Perbankan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) STIKUBANK Semarang lulus pada tahun 1996. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 1999.



Eling Sucipto **Kepala Wilayah II**

Menjabat sebagai Kepala Wilayah II berdasarkan SK Direksi No.024/DIR/PRS/MTS/II/18 tanggal 22 Februari 2018. Lahir di Banjarnegara, 7 Juli 1971. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus pada tahun 2012. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 1993.



Zaenal Arifin **Kepala Cabang Wanadadi**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Wanadadi berdasarkan SK Direksi No.16/DIR/HRD/MTS/I/19 tanggal 28 Januari 2019. Lahir di Banjarnegara, 23 Maret 1985. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara lulus pada tahun 2003. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 2004.



Thofik Hidayat **Kepala Cabang Purwonegoro**

Menjabat sebagai Cabang Purwonegoro berdasarkan SK Direksi No.013/DIR/PRS/MTS/II/17 tanggal 28 Februari 2017. Lahir di Banjarnegara, 30 Mei 1977. Memiliki latar belakang pendidikan S1 Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto lulus pada tahun 2016. Bergabung dengan BSY pada bulan Desember 2001.



M. Makhmuri **Kepala Cabang Mandiraja**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Mandiraja berdasarkan SK Direksi No.241/DIR/PRS/XI/16 tanggal 2 November 2016. Lahir di Banjarnegara, 10 Juni 1985. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cendikia Karya Utama lulus tahun 2014. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 2007.



Sasi Adiarto **Kepala Cabang Klampok**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Klampok berdasarkan SK Direksi No. 55/DIR/SDM/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020. Lahir di Banjarnegara, 1 Oktober 1982. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan lulus tahun 2006. Bergabung dengan BSY pada Juli 2008.



Agus Budiyanto **Kepala Wilayah III**

Menjabat sebagai Kepala Wilayah III berdasarkan SK Direksi No.113/DIR/PRS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Banjarnegara, 12 Agustus 1975. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta lulus pada tahun 1998. Bergabung dengan BSY pada bulan Maret 2008.



Noor Alam Rudwiansyah **Kepala Cabang Karangobar**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Karangobar berdasarkan SK Direksi No. 134/DIR/SDM/MTS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Lahir di Banjarnegara, 5 Desember 1982. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2006. Bergabung dengan BSY pada bulan April 2006.



Agung Nugroho Saefurochman **Kepala Cabang Wanayasa**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Wanayasa berdasarkan SK Direksi No.081/DIR/PRS/III/18 tanggal 8 Maret 2018. Lahir di Banjarnegara, 24 September 1981. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMU Negeri Karangobar lulus pada tahun 2001. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 2006.



Rojikin **Kepala Cabang Kalibening**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Kalibening berdasarkan SK Direksi No. 264/DIR/SDM/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Lahir di Banjarnegara, 06 Mei 1991. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA Negeri 1 Purwonegoro lulus tahun 2009. Bergabung dengan BSY pada bulan Agustus 2010.



Saryono **Kepala Wilayah IV**

Menjabat sebagai Kepala Wilayah IV berdasarkan SK Direksi No.030/DIR/PRS/II/18 tanggal 15 Februari 2018. Lahir di Banjarnegara, 21 Oktober 1976. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus pada tahun 2012. Bergabung dengan BSY pada bulan Juli 1997..



Agung Sindhi Nugroho **Kepala Cabang Pagentan**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Pagentan berdasarkan SK Direksi No.036/DIR/PRS/MTS/IV/14 tanggal 22 April 2014. Lahir di Banjarnegara 10 September 1980. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus pada tahun 2003. Bergabung dengan BSY pada bulan Desember 2003.



Slamet Riyadi **Kepala Cabang Madukara**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Madukara berdasarkan SK Direksi No.225/DIR/PRS/VII/17 tanggal 20 Juli 2017. Lahir di Banjarnegara, 20 Agustus 1980. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Bisnis Internasional di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus pada tahun 2004. Bergabung dengan BSY pada bulan Maret 2005.



Galih Setyo Wicaksono **Kepala Cabang Batur**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Batur berdasarkan SK Direksi No.122/DIR/PRS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Banjarnegara, 26 Agustus 1981. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) STIKUBANK Semarang lulus pada tahun 2006. Bergabung dengan BSY pada bulan Januari 2007.



Gilang Purnomo **Kepala Cabang Dieng**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Dieng berdasarkan SK Direksi No.033/DIR/PRS/II/18 tanggal 22 Februari 2018. Lahir di Wonosobo, 8 September 1988. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA Negeri 1 Bawang lulus pada tahun 2006. Bergabung dengan BSY pada bulan Agustus 2006.



Purnawan **Kepala Wilayah V**

Menjabat sebagai Kepala Wilayah V berdasarkan SK Direksi No.066/DIR/PRS/MTS/VII/16 tanggal 13 Juli 2016. Lahir di Banjarnegara, 17 Mei 1976. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2012. Bergabung dengan BSY pada bulan Juli 1997.



Darminto **Kepala Cabang Pekalongan**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Pekalongan berdasarkan SK Direksi No.069/DIR/PRS/MTS/VII/16 tanggal 13 Juli 2016. Lahir di Pekalongan, 25 September 1983. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir di SMU PGRI 2 Kajen lulus pada tahun 2001. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 2004.



Sandhy Wijaya **Kepala Cabang Sragi**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Sragi berdasarkan SK Direksi No.17/DIR/HRD/II/19 tanggal 6 Februari 2019. Lahir di Banjarnegara, 4 Juni 1988. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir di SMA N 1 Karangobar Banjarnegara lulus pada tahun 2006. Bergabung dengan BSY pada bulan Desember 2008.



Tri Waluyo **Kepala Cabang Kedungwuni**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Kedungwuni berdasarkan SK Direksi No.278/DIR/HRD/X/19 tanggal 11 Oktober 2019. Lahir di Pekalongan, 12 September 1984. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir di SMK N 1 Kedungwuni Pekalongan lulus pada tahun 2002. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 2007.



Bondan Wahyu Nirboyo **Kepala Wilayah VI**

Menjabat sebagai Kepala Wilayah VI berdasarkan SK Direksi No.111/DIR/PRS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Banjarnegara, 26 November 1976. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta lulus pada tahun 2014. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 2006.



Zaenal Faidzin **Kepala Cabang Purbalingga**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Purbalingga berdasarkan SK Direksi No.043/DIR/PRS/MTS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Purbalingga, 5 Agustus 1982. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Manajemen Informatika di AMIK Veteran Purwokerto lulus pada tahun 2004. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 2013.



Sukirman **Kepala Cabang Kaligondang**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Kaligondang berdasarkan SK Direksi No.463/DIR/HRD/XI/18 tanggal 19 November 2018. Lahir di Purbalingga, 30 Mei 1985. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Bisnis Internasional Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus pada tahun 2006. Bergabung dengan BSY pada bulan Juli 2008.



Teguh Samudra **Kepala Cabang Punggelan**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Punggelan berdasarkan SK Direksi No.22/DIR/HRD/IV/19 tanggal 1 April 2019. Lahir di Banjarnegara, 22 Desember 1982. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir di SMA N 1 Sigaluh Banjarnegara lulus pada tahun 2001. Bergabung dengan BSY pada bulan Desember 2002.



Sigit Dwi Sarwoko **Wakil Kepala Wilayah VII**

Menjabat sebagai Wakil Kepala Wilayah VII berdasarkan SK Direksi No. 289/DIR/SDM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020. Lahir di Banjarnegara, 30 April 1991. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara lulus tahun 2009. Bergabung dengan BSY pada bulan November 2009.



Heri Djatmiko **Kepala Cabang Rembang**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Rembang berdasarkan SK Direksi No.17/DIR/HRD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020. Lahir di Cilacap, 1 April 1974. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Keuangan dan Perbankan di Akademi Keuangan dan Perbankan (AUB) Surakarta lulus tahun 1996. Bergabung dengan BSY pada bulan Agustus 2006.



Wahyono Dwi Kristanto **Kepala Cabang Bobotsari**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Bobotsari berdasarkan SK Direksi No.25/DIR/HRD/MTS/III/2020 tanggal 19 Maret 2020. Lahir di Banyumas, 19 September 1978. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Akuntansi di Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta lulus tahun 2002. Bergabung dengan BSY pada bulan November 2004.



Dian Agung Sasongko **Kepala Cabang Karangreja**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Karangreja berdasarkan SK Direksi No.017/DIR/PRS/II/17 tanggal 20 Februari 2017. Lahir di Purbalingga, 29 Maret 1983. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lulus pada tahun 2005. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 2009.



Handi Ria Purnama Putra **Kepala Wilayah VIII**

Menjabat sebagai Kepala Wilayah VIII berdasarkan SK Direksi No. 156/DIR/SDM/MTS/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020. Lahir di Banjarnegara, 20 Desember 1983. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) STIKUBANK Semarang lulus tahun 2006. Bergabung dengan BSY pada bulan Oktober 2007.



Tanti Indrayani **Wakil Kepala Wilayah VIII**

Menjabat sebagai Wakil Kepala Wilayah VIII berdasarkan SK Direksi No.34/DIR/SDM/IV/2020 tanggal 27 April 2020. Lahir di Wonosobo, 2 Agustus 1978. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Jurusan Sekretariat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2000. Bergabung dengan BSY pada bulan Juli 2001.



Wahyu Adi Wibowo **Kepala Cabang Purwokerto**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Purwokerto berdasarkan SK Direksi No.157/DIR/SDM/MTS/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020. Lahir di Purbalingga, 14 Agustus 1983. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2008. Bergabung dengan BSY pada bulan September 2008.



Andika Wahyu Bagus Maradipta **Kepala Cabang Ajibarang**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Ajibarang berdasarkan SK Direksi No.291/DIR/SDM/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. Lahir di Purwokerto, 18 Juni 1988. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di STIE Cendekia Karya Utama Semarang lulus tahun 2014. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 2012.



Wirawan Kurniaji **Kepala Cabang Baturraden**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Baturraden berdasarkan SK Direksi No.79/DIR/SDM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020. Lahir di Purwokerto, 1 Desember 1985. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2007. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 2009.



Kondang **Kepala Wilayah IX**

Menjabat sebagai Kepala Wilayah IX berdasarkan SK Direksi No.110/DIR/PRS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Banjarnegara, 2 Mei 1973. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto lulus pada tahun 2016. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 1995.



Joko Prasetyo **Kepala Wilayah X**

Menjabat sebagai Kepala Wilayah X berdasarkan SK Direksi No.06/DIR/HRD/I/19 tanggal 28 Januari 2019. Lahir di Banjarnegara, 14 Oktober 1982. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto lulus pada tahun 2006. Bergabung dengan BSY pada bulan November 2009.



Denis Dwi Adi Saputro **Kepala Cabang Cilacap**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Cilacap berdasarkan SK Direksi No.35/DIR/HRD/IV/2020 tanggal 27 April 2020. Lahir di Banjarnegara, 23 Desember 1986. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir di SMU Negeri 1 Wanadadi lulus tahun 2005. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 2009.



Andi Nugroho **Kepala Cabang Kroya**

Menjabat sebagai Kepala Cabang Kroya berdasarkan SK Direksi No.120/DIR/PRS/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Purbalingga, 15 Maret 1974. Memiliki latar belakang pendidikan terakhir di SMA Negeri Bukateja lulus pada tahun 1993. Bergabung dengan BSY pada bulan Januari 1998.

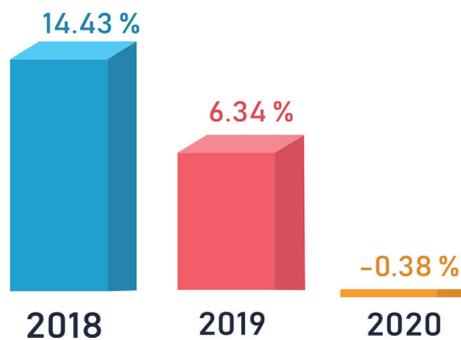
SUMBER DAYA MANUSIA

Karyawan merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan. Perusahaan dengan SDM berkualitas akan memiliki daya saing yang baik dan mampu berkompetisi dalam era globalisasi maupun perdagangan bebas. Untuk menghadapi persaingan ketat antara lembaga keuangan dan perbankan maka perlu dilakukannya peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Pengembangan karir juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi peningkatan kualitas kinerja karyawan. Pengembangan karir di BSY didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan organisasi, integritas, budaya dan etos kerja serta motivasi.

Data Jumlah Pegawai



Grafik Peningkatan Data Karyawan



Pada tahun 2020, jumlah karyawan BSY tercatat menurun sebesar 0,38% atau sejumlah 5 orang menjadi 1.285 karyawan dari sebanyak 1.290 karyawan yang tercatat di tahun sebelumnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah karyawan meningkat setiap tahunnya, di tahun 2020 tidak terdapat penambahan jumlah karyawan disebabkan karena BSY tidak melakukan perluasan jaringan kantor.

Pada grafik di atas dapat dilihat perbandingan kenaikan dan penurunan jumlah karyawan BSY dalam kurun 3 tahun terakhir. BSY memberikan apresiasi berharga atas komitmen pelaksanaan dan kinerja maksimal yang telah diberikan seluruh jajaran Manajemen BSY. Namun sebagai bentuk pengembangan langkah berkelanjutan

pengelolaan SDM, BSY senantiasa memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan SDM baik dalam pengembangan karir, skill maupun pengetahuan. Diperlukan perencanaan dan tata kelola SDM yang terintegrasi supaya kebijakan yang ditetapkan dapat menyentuh seluruh elemen dalam manajemen BSY.

KOMPOSISI KARYAWAN

Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Kecukupan kuantitas, kompetensi, *skill* dan aspek lainnya dapat menentukan besarnya dukungan SDM kepada BSY. Oleh karena itu BSY telah menentukan kuantitas SDM berdasarkan kategori yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan BSY saat ini.

Tabel data jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian tahun 2018. S.d 2020 :

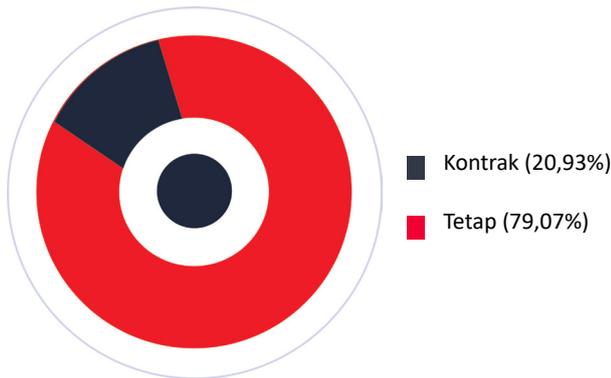
Keterangan	2018	2019	2020
Tetap	952	1.017	1.016
Kontrak	261	273	269
Total	1.213	1.290	1.285

Karyawan tetap adalah karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi setelah dinyatakan lulus masa pendidikan dan masa evaluasi. Karyawan kontrak atau karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah setiap orang yang mengadakan hubungan kerja untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Setiap karyawan memiliki hak yang sama dalam meniti karir, termasuk karyawan kontrak juga dilibatkan dalam pengembangan SDM dan promosi jabatan. Manajemen BSY membuka kesempatan pula bagi karyawan dengan status kontrak untuk mendapat kenaikan status menjadi karyawan tetap dengan melihat lowongan adanya kebutuhan karyawan dan harus memenuhi persyaratan jabatan, serta lolos dalam seleksi melalui *fit & proper test* sebagai karyawan tetap.

Pada tahun 2020 jumlah karyawan tetap menurun sebesar 0,09% menjadi 1.016 karyawan dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1.017 karyawan. Untuk jumlah karyawan kontrak tahun 2020 menurun sebesar 1,51% menjadi 269 karyawan dari tahun 2019 sebanyak 273 karyawan. Dilihat dari komposisi karyawan, sebesar 21% karyawan merupakan karyawan kontrak dan 79% lainnya merupakan karyawan tetap. Komposisi tersebut sesuai dengan kebijakan manajemen atas pemenuhan kebutuhan SDM, dimana selain *Core Business Staff* untuk

bagian *supporting* antara lain tenaga *front liner* (kasir, *teller* dan *customer service*) serta tenaga dasar (*driver*, *office boy* dan satpam) dipenuhi dari tenaga kontrak.



Karyawan Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

BSY sebagai organisasi yang terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas, memiliki adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut dapat terintegrasi dengan baik.

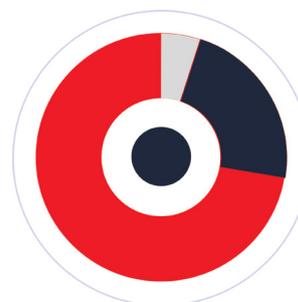
Setiap jabatan yang ada di dalam perusahaan memiliki fungsi dan *job description* yang jelas. Dalam struktur organisasi BSY terdiri dari beberapa level jabatan seperti: Kepala Divisi/Kepala Wilayah, Wakil Kepala Divisi/Wakil Kepala Wilayah, Kepala Bagian/Kepala Cabang, Wakil Kepala Bagian/Wakil Kepala Cabang, Kepala Seksi/Kepala Kas, Wakil Kepala Seksi/Wakil Kepala Kas, Staf Senior, Staf, Staf Junior, Satpam, *Driver* dan *Office Boy*.



Tabel data karyawan berdasarkan jenjang kepangkatan tahun 2018. S.d 2020

Jabatan	2018	2019	2020
Kepala Wilayah	10	10	9
Kepala Divisi	6	6	8
Wakil Kepala Wilayah	-	-	2
Wakil Kepala Divisi	3	4	4
Kepala Cabang	27	30	29
Kepala Bagian	14	15	15
Sub Total Pejabat Eksekutif	60	65	67
Wakil Kepala Cabang	34	37	36
Wakil Kepala Bagian	11	11	11
Kepala Kas	49	50	50
Kepala Seksi	37	45	38
Wakil Kepala Kas	46	49	51
Wakil Kepala Seksi	99	102	105
Sub Total Pejabat	276	294	291
Staf	739	777	771
Satpam	92	108	111
Driver dan Office Boy	46	46	45
Sub Total Karyawan	877	931	927
Total	1.213	1.290	1.285

Pada tahun 2020 jumlah pejabat eksekutif mengalami peningkatan 2 orang atau sebesar 3,07% menjadi sebanyak 67 pejabat dibandingkan jumlah pejabat eksekutif tahun 2019 sebanyak 65 pejabat. Peningkatan tersebut sesuai dengan kebijakan manajemen untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas layanan melalui penambahan struktur jabatan atas penambahan jaringan/unit layanan baru. Dilihat dari komposisi struktur karyawan berdasarkan jabatannya, maka BSY telah menerapkan pola piramid dimana komposisi karyawan semakin mengerucut pada setiap jenjang organisasi.



- Staf dan Non-staf (72,14%) : 927
- Pejabat (22,65%) : 291
- Pejabat Eksekutif (5,21%) : 67

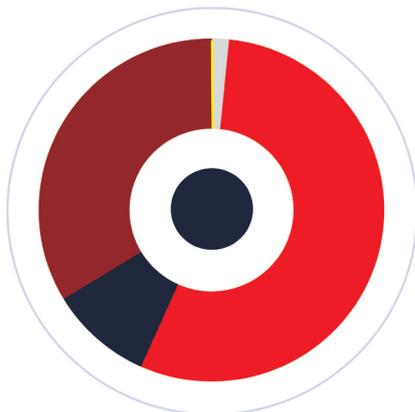
Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Menjadi BPR regional di Jawa Tengah dan terkemuka di Indonesia, BSY memberikan perhatian khusus atas pengembangan karyawan, terutama dalam pengembangan pendidikan karyawan.

Tabel data karyawan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 s.d. 2020

Keterangan	2018	2019	2020
SMP	23	19	19
SMA	653	710	710
D3	133	127	123
S1	404	432	431
S2	-	2	2
Total	1.213	1.290	1.285

Tingkat pendidikan SDM BSY sampai dengan saat ini mayoritas masih didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat, dengan angka tahun 2020 sebanyak 710 orang atau 55,25% dari total SDM 1.285 orang, kemudian disusul tingkat pendidikan Sarjana (Strata 1) sebanyak 413 orang. Meskipun mayoritas karyawan masih dari latar pendidikan setara SMA namun kualitas dalam segi penyelesaian target pekerjaan tetap tidak kalah bersaing dengan jenjang Strata 1. Selain itu manajemen BSY memiliki kebijakan tentang adanya program pendidikan Sarjana bagi karyawan dengan latar belakang setara SMA dan D3, dengan diikutkan proses perkuliahan secara kolektif pada jenjang studi tertentu, terkait mempersiapkan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi unggul.



- SMP : 19 (1,48 %)
- SMA : 710 (55,25 %)
- D3 : 123 (9,57 %)
- S1 : 431 (33,54 %)
- S2 : 2 (0,16 %)

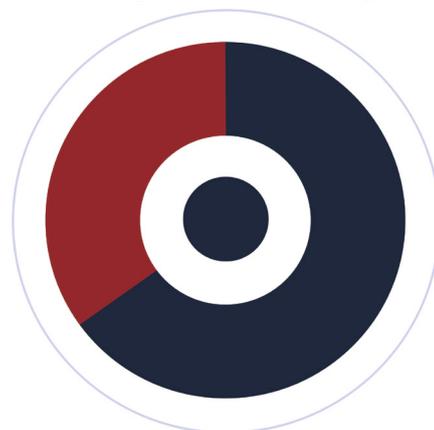
Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

BSY senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk terus berkembang, baik laki-laki maupun perempuan. Kesempatan yang diberikan baik dari sisi pengembangan diri, kenaikan jabatan dan hak-hak lain atas apresiasi kinerja diberikan secara adil kepada seluruh karyawan.

Tabel data karyawan berdasarkan jenis kelamin tahun 2018 s.d. 2020

Keterangan	2018	2019	2020
Laki-laki	794	841	833
Perempuan	419	449	452
Total	1.213	1.290	1.285

Pada tahun 2020 jumlah karyawan laki-laki menurun sebesar 0,96% menjadi 833 karyawan dibandingkan tahun 2019 sebanyak 841 karyawan. Untuk jumlah karyawan perempuan tahun 2020 meningkat sebesar 0,66% menjadi 452 karyawan dibandingkan tahun 2019 sebanyak 449 karyawan. Dilihat dari komposisi karyawan, sebesar 35% karyawan merupakan karyawan perempuan dan 65% lainnya merupakan karyawan laki-laki. Komposisi karyawan tersebut sejalan dengan kebijakan BSY dimana pemenuhan kebutuhan tenaga laki-laki lebih banyak sebagai petugas *account officer* dan penagihan, sedangkan pada unit-unit pelayanan (*front liner* dan *marketing*) dipenuhi dari tenaga perempuan.



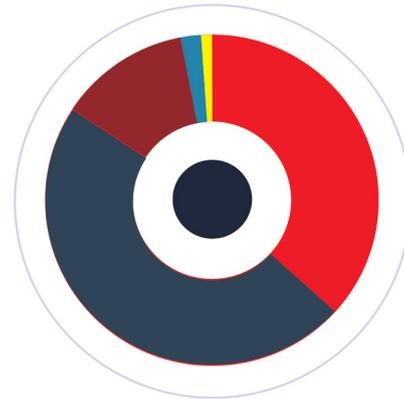
- Laki - laki : 833 (64,82 %)
- Perempuan : 452 (35,18 %)

Karyawan Berdasarkan Usia

Pergantian struktur organisasi merupakan hal yang wajar bagi seluruh organisasi. Bagi perusahaan yang senantiasa berkembang, reorganisasi BSY sebagai akibat dari penyelesaian masa jabatan, BSY memiliki kebijakan untuk memberikan hak kepada karyawan untuk menjalani masa pensiun pada usia 56 tahun.

Keterangan	2018	2019	2020
18-25 tahun	431	474	386
26-35 tahun	617	614	663
36-45 tahun	138	163	192
46-55 tahun	19	28	35
>56 tahun	8	11	9
Total	1.213	1.290	1.285

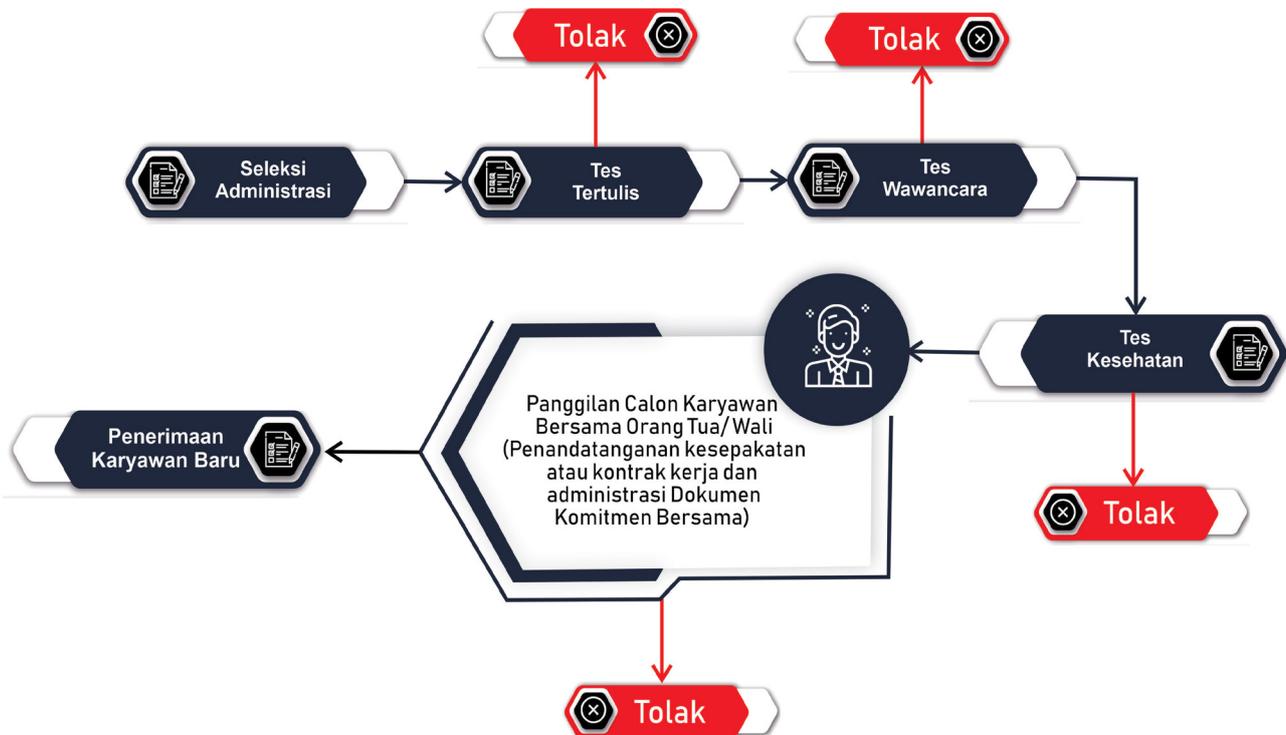
Jumlah karyawan berdasarkan usia mencerminkan bahwa BSY tumbuh produktif seiring dengan sumber daya internal yang berusia produktif. Pada tahun 2020 jumlah karyawan mayoritas berusia 26-35 tahun yaitu sebanyak 663 karyawan atau sebesar 51,59 %, yang disusul karyawan usia 18-25 tahun sebanyak 386 karyawan atau sebesar 30,04 %. Sedangkan karyawan dengan usia mulai 36 tahun keatas sebanyak 236 karyawan atau hanya memiliki prosentase sebesar 18,37%.



- 51,59 % : 26 - 35 tahun : 663 orang
- 30,04 % : 18 - 25 tahun : 386 orang
- 14,94 % : 36 - 45 tahun : 192 orang
- 2,72 % : 46 - 55 tahun : 35 orang
- 0,71 % : >56 tahun : 9 orang

PROSES REKRUTMEN

Rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari calon karyawan yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna memenuhi kekurangan posisi dalam perencanaan SDM. Dalam rangka mendukung pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas layanan, BSY membutuhkan karyawan berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut BSY telah melakukan proses rekrutmen sebagai berikut.



ORGANISASI DAN JABATAN

BSY sebagai organisasi yang terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas, memiliki adanya pembagian kerja yang jelas dan terstruktur. Setiap jabatan yang ada dalam BPR, memiliki tugas dan wewenang yang jelas. Level struktur organisasi BSY sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Koordinator kepala wilayah;
4. Kepala wilayah/kepala divisi;
5. Wakil kepala wilayah/wakil kepala divisi;
6. Kepala cabang/kepala bagian;
7. Wakil kepala cabang/wakil kepala bagian;
8. Kepala kas/kepala seksi;
9. Wakil kepala kas/wakil kepala seksi;
10. Staf Senior
11. Staf
12. Staf Junior

Struktur organisasi BSY dan nama pengurus serta pejabat eksekutif dapat dilihat di bagian Struktur Organisasi, Profil Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat.

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Penilaian kinerja karyawan BSY dilakukan saat akan :

1. Selesai Masa Pendidikan;
2. Selesai Masa Evaluasi.
3. Jatuh Tempo Kontrak Tahunan.
4. Pengajuan Promosi Karyawan.

Penilaian kinerja karyawan menggunakan Lembar Evaluasi Kerja Karyawan yang terdiri dari 16 poin penilaian.

1. Disiplin kerja.
2. Kreatifitas.
3. Kecepatan.
4. Ketelitian.
5. Inisiatif dan ide.
6. Tanggung jawab terhadap pekerjaan.
7. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan.
8. Loyalitas terhadap pekerjaan.
9. Kepemimpinan.
10. Kemauan meningkatkan kemampuan.
11. Sikap terhadap nasabah.
12. Sikap terhadap atasan.
13. Sikap terhadap teman sekerja.
14. Kerapian dan penampilan.
15. Kejujuran.
16. Kemauan meningkatkan pengetahuan.

Kriteria penilaian Lembar Evaluasi Kerja Karyawan dengan angka sebagai berikut.

- 1 = Kurang
- 2 = Cukup
- 3 = Baik
- 4 = Sangat baik

Masa Pendidikan

Apabila pimpinan menilai bahwa kinerja karyawan selama 3 bulan masa pendidikan sudah memenuhi standar, maksimum 1 minggu sebelum karyawan selesai masa pendidikan, pimpinan mengajukan daftar karyawan yang direkomendasikan mengikuti *Fit and Proper Test* Selesai Masa Pendidikan dengan dilampiri:

1. Lembar Evaluasi Kerja Karyawan (nilai rata-rata minimum 2).
2. Daftar Kelebihan dan Kekurangan.
3. Data perolehan bagi *Marketing* dan *Account Officer* (AO) yang dicetak dari sistem.



Masa Evaluasi

Periode Masa Evaluasi 2 tahun dimulai dari tanggal dinyatakan lulus masa pendidikan. Apabila pimpinan menilai bahwa kinerja karyawan selama masa evaluasi sudah memenuhi standar, maksimum 1 minggu sebelum karyawan selesai masa evaluasi, Pimpinan mengajukan daftar karyawan yang direkomendasikan mengikuti *Fit and Proper Test* Selesai Masa Evaluasi dengan dilampiri:

1. Lembar Evaluasi Kerja Karyawan (nilai rata-rata minimum 2).
2. Daftar Kelebihan dan Kekurangan.
3. Data perolehan bagi *marketing* dan AO yang dicetak dari sistem

Kontrak Tahunan

Karyawan dengan status kontrak tahunan akan dilakukan perpanjangan kontrak kerja setiap kali kontrak jatuh tempo secara otomatis tanpa perlu ajuan tertulis dari pimpinan terkait, dan akan diterbitkan surat perpanjangan kontrak paling cepat 1 bulan sebelum jatuh tempo. Pengajuan perpanjangan kontrak kerja hanya dilakukan apabila terdapat perubahan gaji, status maupun pegelompokan karyawan sesuai penilaian pimpinan dengan dilampiri :

1. Lembar Evaluasi Kerja Karyawan (nilai rata-rata minimal 2).
2. Daftar Kelebihan dan Kekurangan.
3. Data perolehan bagi *marketing* dan AO yang dicetak dari sistem.

Apabila proposal disetujui Direksi, akan dilakukan perubahan data sesuai dengan persetujuan.

Promosi Jabatan

Untuk karyawan status tetap berhak diajukan promosi kenaikan grade atau jabatan apabila kinerjanya dinilai baik oleh pimpinan serta sesuai kebutuhan organisasi. Apabila diajukan promosi, pimpinan mengajukan proposal promosi kenaikan grade/ Jabatan dengan dilampiri:

1. Lembar evaluasi kerja karyawan (nilai rata-rata minimal 2).
2. Daftar kelebihan dan kekurangan.
3. Daftar perolehan bagi *marketing* dan AO yang dicetak dari sistem.

Apabila proposal disetujui Direksi, akan dilakukan *fit and proper test* dengan ketentuan sebagai berikut.

1. *Fit and Proper Test* promosi menjadi Staf s.d Staf Senior berupa tes tertulis sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

2. *Fit and Proper Test* mulai level Wakil Kepala Seksi/ Wakil Kepala Kas berupa presentasi dengan materi Visi Misi, Kendala dan Solusi serta analisis SWTO (*Strengths, Weaknesses, Threats & Opportunities*) baik pribadi maupun kantor masing-masing dengan penguji yaitu Direksi dan Kepala Wilayah/Kepala Divisi.

REWARD AND PUNISHMENT

Sebagai wujud penghargaan atas hasil kerja dan demi peningkatan kesejahteraan karyawan BSY, maka di tahun 2020 perusahaan memberikan *reward* diantaranya:

1. Pemberian Uang Prestasi Kerja Semester I pada bulan Juli 2020 berdasarkan prestasi kerja dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020, dengan besaran sesuai gaji bulan Juni 2020 sebesar 50%, atau sesuai dengan ketentuan.
2. Pemberian Uang Prestasi Kerja Tahunan pada bulan Desember 2020 berdasarkan penilaian kinerja selama tahun 2020 dan dengan besaran sesuai gaji bulan November 2020 sebesar 175%, atau sesuai dengan ketentuan.
3. Penghargaan bagi karyawan yang tidak pernah sakit selama tahun 2019, yang diberikan pada bulan Januari 2020.

Hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Di BSY sendiri, pemberian sanksi/tindakan disiplin bukan merupakan hasil akhir dari penyelesaian suatu masalah, melainkan suatu awal dari proses peningkatan kualitas kerja karyawan. Dalam menentukan sanksi dipertimbangkan tingkat kesalahan/pelanggaran yang dilakukan serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut.

Adapun sanksi yang diberlakukan di BSY, bertahap mulai dari:

1. Teguran lisan.
2. Pemberian surat teguran tertulis.
3. Pemberian Surat Peringatan (SP) .
4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/pemberhentian bekerja.
5. Penundaan promosi jabatan/peningkatan gaji.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Pengembangan kompetensi karyawan BSY dilakukan melalui program training baik internal maupun eksternal. Penyelenggara training adalah Satker yang membawahkan fungsi training yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan, protokoler, logistik, akomodasi dan evaluasi. Kegiatan training dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi, transparansi, pemerataan dan keadilan. Satker yang membawahkan fungsi training wajib mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan training.

Kegiatan training di BSY dibagi menjadi:

1. *On The Job Training (OJT)*, yaitu kegiatan praktek kerja yang dilaksanakan bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan pengajaran praktek langsung sesuai jobdesnya masing-masing.
2. *BSY NextGen (Next Generation)*, yaitu kegiatan training lanjutan bagi karyawan yang telah dinyatakan Lulus OJT. Tujuan BSY NextGen adalah menyiapkan SDM BSY yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar (*basic*) tentang perbankan dan tata kelola perusahaan.
3. *Officer Development Program (ODP)*, yaitu kegiatan training yang dipersiapkan untuk SDM yang akan dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi, yaitu sampai dengan jabatan kepala cabang/bagian.
4. *Leadership Development Program (LDP)*, yaitu kegiatan training yang dipersiapkan untuk SDM yang akan dipromosikan menduduki jabatan paling rendah sebagai wakil kepala wilayah/divisi.
5. *In House Training (IHT)*, yaitu kegiatan training yang diselenggarakan dalam rangka menyampaikan pengetahuan, ketrampilan praktis, *soft skill*, motivasi, serta restorasi atau perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh SDM BSY.
6. Sertifikasi, yaitu kegiatan training untuk mendapatkan gelar sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi khusus.
7. *Refreshment*, yaitu kegiatan training yang diselenggarakan dalam rangka penyegaran pengetahuan tentang perbankan maupun non perbankan bagi seluruh jajaran SDM.
8. Training lain-lain meliputi *sharing session*, sosialisasi, desiminasi, studi banding tematik, *workshop*, seminar, *external communication training*, *character building* dan studi lanjut.

Setiap tahunnya BSY selalu membentuk anggaran biaya pendidikan sebesar 5% dari Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Tenaga Kerja Lainnya. Di awal tahun 2020 biaya pendidikan

dianggarkan sejumlah Rp5.770.538.000, namun pada bulan Juli 2020 terjadi perubahan anggaran sesuai revisi dalam Rencana Bisnis BPR (RBB) karena adanya pandemi Covid-19 yaitu menjadi Rp3.134.608.000 (2,5% dari Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Tenaga Kerja Lainnya).

Tabel biaya pendidikan tahun 2018, 2019 dan 2020.

Tahun	Biaya Pendidikan (Rp jutaan)
2018	3.701
2019	4.615
2020	3.134

Uraian Program Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

Training di BSY diselenggarakan secara terjadwal yang disusun pada awal tahun. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan 207 training yang terdiri dari 106 training internal dan 47 training eksternal. Training internal adalah kegiatan training yang diselenggarakan secara internal oleh Satuan kerja yang membawahkan fungsi training dengan peserta maupun pemateri berasal dari internal BSY. Sedangkan training eksternal adalah kegiatan training yang diikuti oleh karyawan BSY namun penyelenggara merupakan pihak lain. Lembaga penyelenggara kegiatan training eksternal yang sering diikuti antara lain: LPPI, Edukadin, Lembaga Certif, Yandora, Lembaga Prasetya Mulya, Dirjen Pajak, OJK, BI dan lembaga training lainnya.

Sejak adanya pandemi Covid-19, kegiatan training di tahun 2020 sebagian besar dilaksanakan dengan sistem online. Meskipun demikian terdapat pula beberapa kegiatan training yang dilaksanakan secara langsung tatap muka, itupun menggunakan protokol kesehatan yang ketat antara lain:

1. Pembatasan jumlah peserta training.
2. Pengaturan tempat training yang diberikan jarak antar peserta.
3. Pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan training kepada seluruh peserta.
4. Kegiatan makan maupun snack time dilakukan tanpa prasmanan (menggunakan box).

Pendidikan di BSY dilaksanakan secara berkelanjutan untuk semua level jabatan. Setiap karyawan paling sedikit mengikuti 1 (satu) pendidikan setiap tahun yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Berikut adalah uraian program training yang dibagi sesuai dengan bidangnya.

Tabel kegiatan training bidang pembukuan tahun 2020

1. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pembukuan

Tujuan adanya kegiatan training ini adalah untuk meningkatkan kompetensi karyawan pada bidang pembukuan mulai dari penyusunan rencana kerja hingga terkait pajak.

PELATIHAN / PENDIDIKAN	Int	Ext	Jml Peserta	BIAYA (Rp ribuan)
PEMBUKUAN				
Online Training Kebijakan Akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan dalam Pandemi Covid-19	-	√	6	1.845
Training Analisa Laporan Keuangan	√		33	12.006
IHT Bedah Neraca & Analisa Laporan Keuangan	√		80	82.199
Online Training Perpajakan		√	13	1.425
IHT Bedah Neraca & Analisa Laporan Keuangan Debitur untuk Wakil Kepala Cabang BSY	√		34	50.685
Penyusunan Rencana Bisnis BPR 2021	√		99	29.448
IHT Analisa Keuangan Debitur	√		37	17.352
Sharing Session Petugas Pembukuan	√		32	14.252

2. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perkreditan

Tujuan adanya kegiatan training ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pemberian kredit dengan tujuan kredit yang diberikan dengan tepat sasaran.

PELATIHAN / PENDIDIKAN	Int	Ext	Jml Peserta	BIAYA (Rp ribuan)
PERKREDITAN				-
Sosialisasi Pedoman Input Kredit Hapus Buku	√		65	38.411
Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 2019	√	-	80	13.093
Sosialisasi Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	√	-	3	102
Online Training Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak Covid-19	-	√	83	7.291
Sharing Session Penyelesaian Kredit Bermasalah (Lelang & Penagihan)	√	-	54	7.312
IHT Karyawan Baru (BSY Nextgen 63)	√	-	39	174.860
Studi Banding Penggunaan Aplikasi GreatDay HR Ke Kospin Surya Kencana & PT People Telligence	-	√	3	2.386
IHT Motivasi & Implementasi Penerapan SOP	√	-	741	40.570
IHT Refreshment Hak & Kewajiban Karyawan BSY	√	-	212	9.345
Training Penggunaan Aplikasi Greatday HR	√		1.138	5.412
IHT Karyawan Baru (BSY Nextgen 64)	√		26	121.817
Training Sistem Penggajian	-	√	3	500
Workshop Pajak Rampung	√	-	33	10.702
Online Training Key Performance Indikator (KPI)	-	√	1	2.220
Online Training Pendeteksian Atas Pemalsuan Tanda Tangan (Grafonomi)	-	√	28	2.937
On The Job Training Karyawan Baru	√	-	2	400
Seminar Motivational Leadership		√	24	7.860
Training Sertifikasi Direktur Tingkat 2	-	√	2	4.525
Webinar & E-Award Infobank	-	√	2	2.000
Studi Banding Karyawan Kantor Cabang Pekalongan dan Ajibarang ke Kantor Cabang Utama	√	-	2	300.000
Training Sertifikasi Profesi Direktur dan Komisariss BPR	-	√	2	11.400
Ujian Sertifikasi Komisariss & Direktur Tingkat 1		√	6	8.751
Uji Ulang Sertifikasi Profesi Direktur Tingkat 1	-	√	1	4.579
Uji Sertifikasi Direktur Tingkat 2	-	√	1	1.500

3. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepersonaliaan

Tujuan adanya kegiatan training ini adalah untuk meningkatkan kompetensi terkait sumber daya manusia (SDM).

PELATIHAN / PENDIDIKAN	Int	Ext	Jml Peserta	BIAYA (Rp ribuan)
PERSONALIA				
IHT Motivasi & Etos Kerja Wilayah	√		1.201	16.237
Workshop Penyusunan Modul Officer Development Program (ODP) I BSY	√		4	10.889
Sharing Session Wanita Karir BSY	√	-	150	3.809
IHT Karyawan Baru (BSY Nextgen 61)	√	-	31	147.613
Sosialisasi Asuransi Kesehatan <i>In Health</i>	√	-	211	12.510
BSY Development Program	√	-	207	359.789
Refreshment Ketentuan Pelaporan SPT E-Filing	√	-	45	4.680
IHT Karyawan Baru (BSY Nextgen 62)	√	-	34	95.513
Sosialisasi Pakta Integritas	√	-	1.285	689
Sharing Session PUSPO	√	-	41	47.442
IHT Karyawan Baru (BSY Nextgen 63)	√	-	39	174.860
Studi Banding Penggunaan Aplikasi GreatDay HR Ke Kospin Surya Kencana & PT People Telligence	-	√	3	2.386
IHT Motivasi & Implementasi Penerapan SOP	√	-	741	40.570
IHT Refreshment Hak & Kewajiban Karyawan BSY	√	-	212	9.345
Training Penggunaan Aplikasi <i>Greatday</i> HR	√		1.138	5.412
IHT Karyawan Baru (BSY Nextgen 64)	√		26	121.817
Training Sistem Penggajian	-	√	3	500
Workshop Pajak Rampung	√	-	33	10.702
Online Training Key Performance Indikator (KPI)	-	√	1	2.220
Online Training Pendeteksian Atas Pemalsuan Tanda Tangan (<i>Grafonomi</i>)	-	√	28	2.937
On The Job Training Karyawan Baru	√	-	2	400
Seminar <i>Motivational Leadership</i>		√	24	7.860
Training Sertifikasi Direktur Tingkat 2	-	√	2	4.525
Webinar & E-Award Infobank	-	√	2	2.000
Studi Banding Karyawan Kantor Cabang Pekalongan dan Ajibarang ke Kantor Cabang Utama	√	-	2	300.000
Training Sertifikasi Profesi Direktur dan Komisaris BPR	-	√	2	11.400
Ujian Sertifikasi Komisaris & Direktur Tingkat 1		√	6	8.751
Uji Ulang Sertifikasi Profesi Direktur Tingkat 1	-	√	1	4.579
Uji Sertifikasi Direktur Tingkat 2	-	√	1	1.500

4. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Operasional

Tujuan adanya pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional kerja dan memberikan service excellence untuk nasabah.

PELATIHAN / PENDIDIKAN	Int	Ext	Jml Peserta	BIAYA (Rp ribuan)
OPERASIONAL				
IHT Penyelesaian CIF Ganda	√		31	32.590
Refreshment Penggunaan Virtual Account Danamon	√	-	32	20.579
Pelatihan Dasar Perbankan BPR/BPRS	-	√	1	6.392
Pelatihan <i>Service Excellence 4.0</i> Berbasis <i>Smart Digital</i>	-	√	5	9.614
Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito Pada Sistem <i>Core Banking</i>	√	-	31	8.139
Online Training Webinar "Inovasi Layanan Keuangan"	-	√	24	1.227

IHT Operasional Untuk Teller & Petugas Operasional Kas	√	-	92	42.853
Training Pelaporan Transaksi Keuangan Perbankan	-	√	33	8.289
Training Operasional Petugas Kasir	√		31	15.752

5. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Keamanan Kantor

Tujuan adanya pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam sistem keamanan.

PELATIHAN / PENDIDIKAN	Int	Ext	Jml Peserta	BIAYA (Rp ribuan)
SATPAM				-
<i>Refreshment Company Profile BSY & Pembekalan Tupoksi Penjaga Malam BSY</i>	√	-	80	21.983

6. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknologi Informasi (TI)

Tujuan adanya pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi informasi demi peningkatan pelayanan dan *realtime online* data.

PELATIHAN / PENDIDIKAN	Int	Ext	Jml Peserta	BIAYA (Rp ribuan)
TEKNOLOGI INFORMASI				
Sosialisasi Teknis Penggunaan Aplikasi Zoom	√	-	15	360
Sosialisasi Aplikasi Trello	√	-	31	4.550
Sosialisasi BSY Mobile & Pelaksanaan <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP)	√	-	176	14.205
<i>Workshop Online Colecting Data</i> Undian BSY	√	-	32	1.617
Pelatihan Desain Autocad 2D & 3D Tahap 1	-	√	1	2.498

7. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Dana dan Marketing

Tujuan adanya pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam penggalan dan pengelolaan dana pihak ketiga.

PELATIHAN / PENDIDIKAN	Int	Ext	Jml Peserta	BIAYA (Rp ribuan)
DANA & MARKETING				
<i>Sharing Session Marketing Dana</i>	√	-	455	965
Webinar Inovasi Jualan <i>Online</i> untuk Mitra BSY	√	-	170	3.004
IHT Tata Cara Membaca Laporan Keuangan Publikasi Untuk Petugas Marketing	√	-	39	4.056
<i>Training Negotiation Power</i>	√	-	35	11.765

8. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepatuhan dan APU & PPT

Tujuan adanya kegiatan training ini adalah meningkatkan fungsi kepatuhan serta penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

PELATIHAN / PENDIDIKAN	Int	Ext	Jml Peserta	BIAYA (Rp ribuan)
KEPATUHAN				
Sosialisasi Penggolongan Risiko Nasabah dalam Rangka Penerapan APU & PPT	√	-	614	25.174
Diklat Manajemen Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi BPR	-	√	2	3.237
<i>Workshop</i> Penggunaan Aplikasi GoAML	-	√	5	220
Sosialisasi Perubahan Pedoman Penerapan Program APU & PPT	-	√	2	4.364
<i>Sharing Session</i> Pengawasan Fungsi Audit, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	√	-	38	4.783
Sosialisasi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>)	√	-	101	4.530
<i>Sharing Session</i> Fungsi Kepatuhan & Manajemen Risiko	√		21	11.393

9. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen Risiko

Tujuan adanya kegiatan training ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen risiko.

PELATIHAN / PENDIDIKAN	Int	Ext	Jml Peserta	BIAYA (Rp ribuan)
SOFTSKILL				
<i>Workshop Aplikasi Online</i> SIPRO untuk Menyusun Laporan Profil Risiko BPR		√	2	6.809
Training Pembekalan Manajemen Risiko Level 1	-	√	2	19.966
Training Strategi Pengelolaan Risiko BPR	-	√	6	752
Training Manajemen Risiko		√	6	746
Training Manajemen Risiko	√	-	39	16.715

Kegiatan Training Yang Diikuti Oleh Dewan Komisaris

Kegiatan training yang diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2020 antara lain:

1. *Workshop* penyusunan modul ODP I
2. Pelatihan Sertifikasi Direktur Tingkat 2

Kegiatan Training Yang Diikuti Oleh Direksi

Kegiatan training yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2020 antara lain:

1. Training Sertifikasi Direktur Tingkat 1.
2. Training Sertifikasi Direktur Tingkat 2.
3. Training Penyelesaian Masalah Kepailitan.
4. Training Manajemen Risiko.
5. *Workshop* Pelaporan PPAK Aplikasi GoAML.
6. Training Pembekalan Manajemen Risiko Level 1.
7. Webinar Memahami Kredit Mikro Untuk BPR.
8. Sosialisasi Asuransi Kesehatan In Health.
9. Webinar Inovasi Layanan Keuangan.
10. *Workshop* Penyusunan Modul ODP I BSY.

Kegiatan Training Yang Diikuti Oleh Sekretariat Perusahaan

Kegiatan training yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 antara lain adalah:

1. *Training Corporate Secretary*.
2. *Public Training Online "How To Be a Smart Secretary"*.
3. *Training Social Media for Brand Reputation*.
4. Pelatihan Desain Autocard 2D & 3D Tahap 1.
5. BSY *Development Program*.
6. Sosialisasi Pakta Integritas.
7. *Refresment* Ketentuan Pelaporan SPT E-Filing.
8. Sosialisasi Asuransi Kesehatan In Health.
9. IHT Motivasi & Implementasi Penerapan SOP.
10. Training Penggunaan Aplikasi GreatDay HR.
11. Sosialisasi Teknis Penggunaan Aplikasi Zoom.
12. Sosialisasi Aplikasi Trello.
13. Sosialisasi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*).

Kegiatan Training Yang Diikuti Oleh Satuan Kerja Audit Internal

Kegiatan training yang diikuti oleh SKAI selama tahun 2020 adalah:

1. *Sharing session* pengawasan fungsi audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko.
2. BSY *Development Program*.
3. Sosialisasi Pakta Integritas.
4. *Refresment* Ketentuan Pelaporan SPT E-Filing.
5. Sosialisasi Asuransi Kesehatan *In Health*.
6. IHT Motivasi & Implementasi Penerapan SOP.
7. Training Penggunaan Aplikasi *GreatDay HR*.
8. Sosialisasi Teknis Penggunaan Aplikasi Zoom.
9. Sosialisasi Aplikasi Trello.
10. Sosialisasi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*).

Kegiatan Training Yang Diikuti Oleh Komite

Kegiatan training yang diikuti oleh anggota Komite selama tahun 2020:

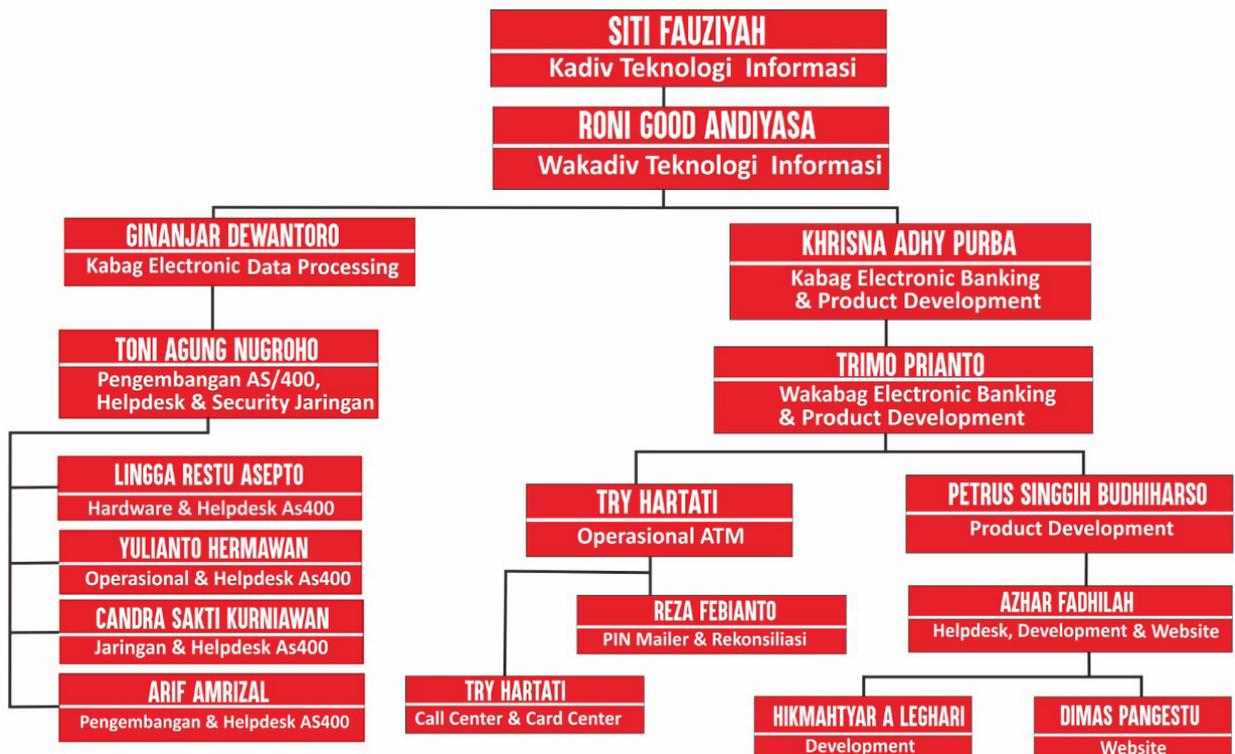
1. Sosialisasi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*).
2. *Sharing session* pengawasan fungsi audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko.
3. Sosialisasi Pakta Integritas.
4. Sosialisasi Asuransi Kesehatan In Health.



TEKNOLOGI INFORMASI



STRUKTUR ORGANISASI TEKNOLOGI INFORMASI



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Tata kelola TI dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelaksanaan internal kontrol dilakukan secara terpadu yang didukung Pengawasan dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang memiliki TI Auditor sendiri, dengan berdasarkan peraturan BI dan OJK maupun kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) internal yang meliputi:

1. Kebijakan TI Jangka Pendek dan Jangka Panjang.
2. SOP Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) yang mencakup :
 - a. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta Unit Kerja/ Bagian yang membawahi Teknologi Informasi (TI).
 - b. Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik.
 - c. Operasional Teknologi Informasi.
 - d. Jaringan Komunikasi
 - e. Pengamanan Informasi
 - f. Rencana Pemulihan Bencana
 - g. Audit Intern Teknologi Informasi
 - h. Kerjasama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi.

Direksi dan Komisaris berperan aktif dalam melaksanakan Tata Kelola TI dengan menyelenggarakan Forum IT *Steering committee* secara berkala, untuk memastikan seluruh proyek atau pekerjaan TI dapat berjalan secara efektif dan efisien.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Peningkatan kualitas teknologi dan sistem informasi BSY dilakukan untuk mendukung Visi dan Misi Bank. Proses peningkatan kualitas ini dilakukan pada bidang :

1. *Software*.
2. *Hardware*.
3. *Networking*.
4. *Network Security*.
5. *Business Support*.
6. Sumber Daya Manusia (SDM).
7. *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Bussiness Continuity Plan* (BCP).

SASARAN KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Terwujudnya layanan TI yang memiliki availibilitas dan reliabilitas yang tinggi demi terciptanya transparansi elektronik dalam mendukung bisnis Bank.

2. Terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas di dunia teknologi dan sistem informasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas penggunaan TI untuk kemajuan Bank.

PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. *ATM Issuer Jilid II (Penerbit Kartu ATM)*
Tindak lanjut izin issuer/penerbit kartu kredit dan kartu debit beserta implementasinya.
2. *Smart EDC*
Alat penunjang transaksi perbankan yang dilengkapi kode enkripsi yang dapat dibawa kemanapun oleh tim marketing dalam memudahkan pelayanan nasabah jemput bola.
3. *M-Banking*
Aplikasi transaksi perbankan menggunakan smart phone yang dilengkapi *security access* sehingga fleksibilitas nasabah dalam bertransaksi mudah dimanapun dan kapanpun.
4. *Virtual Account (VA) & Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Bank Permata sebagai Agregator
Akses informasi perusahaan dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi mobile untuk meningkatkan fleksibilitas akses informasi perusahaan.
5. *Management Information System (MIS)*
Akses informasi perusahaan dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi mobile untuk meningkatkan fleksibilitas akses informasi perusahaan.
6. *Business continuity*
Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang secara berkala harus dilaksanakan. Berdasarkan POJK Nomor 75/POJK.03/2016 uji coba DRP harus dilaksanakan minimal 1 x dalam 3 tahun dan pelaksanaan secara serentak di seluruh kantor kantor yang ada.

PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pemenuhan kebutuhan produk TI di setiap unit kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan nasabah beserta *stakeholder* lainnya terhadap bank.

2. Penyediaan informasi kepada pihak manajemen melalui *Management Information Systems (MIS)*.
3. Penanganan permasalahan infrastruktur TI yang terjadi di seluruh kantor BSY untuk menjamin keberlangsungan bisnis bank.
4. Penanganan keluhan *user* & nasabah melalui *Call Center* BSY.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur ruang mesin Data Center (DC) dan ruang *Disaster Recovery Center* (DRC).

TEKNOLOGI INFORMASI DI MASA DEPAN

BSY meyakini bahwa peningkatan kualitas teknologi dan sistem informasi dapat meningkatkan performa BSY dalam memberikan pelayanan terbaik bagi setiap nasabahnya. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh BSY adalah sebagai berikut.

1. Eksternal (terkait langsung dengan layanan nasabah)
 - a. **ATM Issuer (Penerbit Kartu ATM)**
BSY dalam melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debit mendapatkan persetujuan dari OJK dan BI.
 - b. **BSY TD (Transaksi Digital)**
Suatu alat transaksi terpadu yang digunakan marketing jempot bola yang dilengkapi *fingerprint*, *KTP reader* (sebagai *security* transaksi) dan printer berbasis android, dengan aplikasi ini dapat terhubung dengan *core banking* secara langsung (*real time online*) sehingga transaksi aman dan cepat, dengan fitur :
 - Cek saldo.
 - Pelayanan transaksi setoran Tabungan.
 - Transaksi penarikan Tabungan.
 - Pelayanan transaksi angsuran Kredit (setor rekening Tabungan).
 - Pelayanan transaksi PPOB (Biller).
 - Kasbon dan pengembalian kasbon petugas *marketing/Account Officer*.
 - Pemindahbukuan rekening.
 - Pembukaan rekening baru.
 - *Printing* struk transaksi (Nasabah akan mendapat langsung struk sebagai bukti transaksi, dengan printer yang terdapat pada smart EDC).
 - *Remittance and Destination* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang melalui Aplikasi BSY Transaksi Digital (BSY-TD).

c. M-Banking

Aplikasi transaksi perbankan menggunakan *smartphone* sehingga fleksibel dalam penggunaan dimanapun dan kapanpun yang dilengkapi *security access*.

2. Internal

Aplikasi *paperless* yang dikembangkan oleh internal BSY yang diperuntukan mempercepat proses internal kantor BSY. Aplikasi di dalamnya adalah:

- a. **E-Collect**, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengetahui Kredit yang diberikan beserta informasi detil nasabahnya.
- b. **E-Informasi**, yaitu aplikasi yang bertujuan untuk menginformasikan suku bunga simpanan dan informasi lainnya.
- c. **E-KTP**, yaitu aplikasi untuk melihat identitas calon nasabah yang terhubung langsung dengan Dindukcapil Pusat Jakarta.
- d. **E-Gaji**, yaitu aplikasi untuk memudahkan dalam pemrosesan pembayaran gaji karyawan BSY serta mempercepat pendistribusian struk gaji secara *digital/online*.
- e. **E-Petty Cash**, yaitu aplikasi untuk memudahkan memantau jalannya Kas Kecil kantor pusat ataupun kantor cabang dan kantor kas.
- f. **E-Dokumen** (E-Proposal & E-Laporan), yaitu aplikasi untuk memudahkan dalam persetujuan ajuan proposal/laporan sampai dengan tingkat Direksi serta memudahkan dalam mengontrol jalannya dokumen tersebut dan pengarsipan secara digital.
- g. **E-Monitoring** (Asuransi dan Sewa Gedung), Aplikasi untuk memudahkan monitoring jalannya asuransi baik kendaraan maupun, sewa menyewa gedung kantor pusat ataupun kantor cabang dan kantor kas.
- h. **E-Patuh**, yaitu aplikasi untuk memudahkan edukasi kepada karyawan terkait peraturan internal yang meliputi Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE), pedoman kerja, SOP, juknis serta pengarsipan secara digital.
- i. **E-Likuiditas** yang terdiri dari:
 - Likuiditas, yaitu aplikasi untuk memudahkan laporan dan kontrol keuangan kantor pusat dan kantor cabang.
 - Laporan kelebihan kas, yaitu aplikasi ini dibuat untuk memonitoring kelebihan kas (*Marketing*) di kantor pusat dan kantor cabang.
- j. **E-Marketing**, yaitu aplikasi untuk memonitoring perjalanan kasbon uang dan penggunaan slip

transaksi (kasbon slip) untuk marketing.

- k. **E-Inventory** yaitu Aplikasi untuk pengelolaan data aset tetap dan barang inventaris. .
3. Pemantauan dan perawatan perangkat keras dan jaringan secara berkala untuk meningkatkan optimalisasi proses bisnis bank.
4. Pengujian, pemantauan dan evaluasi prosedur *Disaster Recovery Plan* (DRP) secara berkala untuk memastikan reliabilitas dan availabilitas dari prosedur tersebut.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi, baik di internal maupun eksternal Bank.

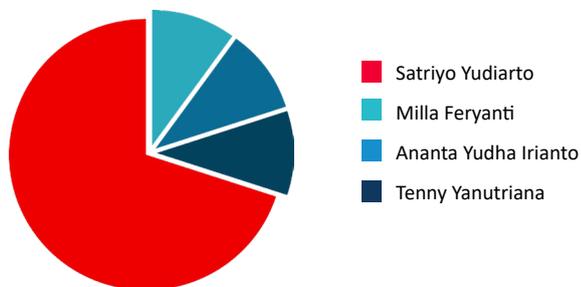
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2020

1. Pembuatan program *Year Of Year* untuk pelaporan Neraca serta Laba Rugi sebagai alat pembanding data keuangan per tahun.
2. Peningkatan keamanan jaringan dengan menerapkan *system* anti *brute force* dan *Distributed Denial of Service* (DDOS), serta pengaplikasian monitoring jaringan yang terhubung langsung dengan aplikasi telegram sebagai sarana pemantauan jaringan melalui *mobile banking*.
3. Perubahan perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif pada kredit dengan kriteria Dalam Pengawasan Khusus (DPK) sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.03/2018.
4. Pelaksanaan *Disaster Recovery Center* (DRP), sebagai bentuk perwujudan atas POJK No. 75/POJK.03/2016 Pasal 14 Ayat (3).
5. *Product & Development*
Beberapa sub Aplikasi dari Aplikasi *Papperless* sudah dapat diimplementasikan di Tahun 2020 diantaranya:
 - a. Uji coba transaksi ATM di internal BSY
 - b. Uji coba transaksi M-Banking di Internal BSY
 - c. Pembuatan aplikasi *E-Paperless* yaitu kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi di BSY yang bisa diakses melalui android dan *website* adalah :
 - *E-Pettycash*: Aplikasi yang berfungsi memantau transaksi kas kecil di kantor pusat, cabang dan kas.
 - E-Gaji: Aplikasi yang berfungsi memberikan informasi slip gaji masing-masing karyawan dengan pembatasan *username* dan *password*.
 - E-Gaji Pajak Rampung: Aplikasi yang berfungsi menghitung pajak rampung per masing-masing kantor dan konsolidasi baik

bulanan maupun tahunan.

- Aplikasi pencatatan Aset Tetap Inventaris (ATI) untuk memudahkan pendataan serta pencetakan label ATI secara sistematis.
- d. *Email* resmi BSY dengan domain suryayudha.id.
 - e. Penggunaan *mobile banking* BSY (BSY Mobile) khusus untuk internal karyawan BSY dalam rangka ujicoba mengembangkan layanan *mobile banking*.
 - f. Perluasan jaringan layanan pembayaran PPOB (*Payment Point Online Bank*) pada aplikasi BSY *Mobile*.
 - g. Pemasangan *IP Server Email* guna percepatan dan memperlancar jalannya komunikasi dengan internal maupun eksternal melalui surat elektronik (*Email*).

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PENGURUS



KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS

Pemegang Saham	%	Lembar	Nilai (Rp jutaan)
Tenny Yanutriana	10%	23.500	23.500

Kepemilikan saham pada Bank dan perusahaan lain:

Pemegang Saham	Nama BPR	Persentase
Tenny Yanutriana	PT Surya Yudha Banjarnegara	10 %
Emila Hayati	PT Surya Yudha Banjarnegara	5%
	PT BPR Eleska Artha Purwokerto	7,5%

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI

Sampai dengan saat ini tidak ada anggota direksi yang memiliki saham pada BPR maupun pada perusahaan lain.

DAFTAR ENTITAS ANAK

Sampai dengan saat ini BSY tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi sehingga tidak dapat menyajikan informasi nama entitas anak dan/atau asosiasi, persentase kepemilikan saham, keterangan bidang usaha dan status operasi.

STRUKTUR GRUP

Sampai saat ini BSY tidak tergabung dalam grup perusahaan manapun.

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

BSY tidak pernah melakukan tindakan korporasi (*corporate action*) sehingga tidak memiliki kronologi pencatatan saham pada bursa sampai dengan tahun buku 2020.

KRONOLOGI PENERBITAN /PENCATATAN EFEK LAINNYA

BSY tidak memiliki kronologi penerbitan/pencatatan efek lainnya sampai dengan tahun buku 2020.

NAMA & ALAMAT LEMBAGA/PROFESI PENUNJANG

BSY bekerjasama dengan lembaga/profesi penunjang diantaranya:

1. Kerjasama dalam hal audit laporan keuangan tahunan yaitu menggunakan jasa KAP Heliantono dan Rekan yang beralamat di Jl. Tegalsari Barat V No. 24 Semarang.
2. Kerjasama dengan Advokat dan Konsultan Hukum Kana dan Rekan yang beralamat di Jalan Balai Kelurahan No. 21 Arcawinangun Purwokerto Timur.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 2020

PENGHARGAAN

Selama tahun 2020, sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 maka tidak banyak penyelenggaraan turnamen baik kesenian, olah raga maupun lainnya. Meski demikian BSY masih mencatat perolehan penghargaan di tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel Prestasi di Bidang Olahraga

No	Tanggal	Nama/Team	Cabang Olahraga	Prestasi
1	10 Februari 2020	Tim tenis lapangan	Tenis Lapangan	Juara II Marga Nganjuk Open Turnamen tahun 2020

Kinerja Perusahaan

No	Tanggal	Nama/Team	Prestasi
1	16 Juni 2020	PT BPR Surya	Juara I Lomba Poster BPR/S yang diselenggarakan oleh Perbarindo
2.	1 Oktober 2020	Yudhakencana	Infobank Award dengan predikat sangat bagus untuk BPR beraset >Rp1T.

SERTIFIKASI TAHUN 2020

Selama tahun 2020 BSY tetap melaksanakan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi pengurus yang sebagian besar melalui sarana online.

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi	Tanggal Pelaksanaan	Masa Berlaku	Keterangan
1	Sri Wahyu Utami	Direktur Umum	Pelatihan Pembekalan Manajemen Risiko Level 1	17-19 Februari 2020	2020-2024	
2	Siti Fauziah	Kepala Divisi TI	Pelatihan Pembekalan Manajemen Risiko Level 1	17-19 Februari 2020	2020-2024	
3	Dicky Firman Tarigan	Komisaris Independen	Pelatihan Sertifikasi Direktur Tingkat 2	7 Maret 2020	-	Belum mengikuti ujian
4	Abdul Khoir Maradika Putra	Komisaris Independen	Pelatihan Jarak Jauh Sertifikasi Direktur Tingkat 1	22 September – 2 Oktober 2020	2020-2025	
5	Ananta Yudha Irianto	Kepala Divisi KMR	Pelatihan Jarak Jauh Sertifikasi Komisaris	22 September – 2 Oktober 2020	2020-2025	
6	Abdul Khoir Maradika Putra	Komisaris Independen	Pelatihan Jarak Jauh Sertifikasi Direktur Tingkat 2	21-22 November 2020	2020-2025	

JARINGAN KANTOR



Kantor Pusat

Rejasa Rt.03 Rw.03 Madukara, Banjarnegara 53482
Telp. (0286) 591662

Kas Banjarmangu

Jl. Sunan Gripit, Desa Gripit Rt.01 Rw.01 Banjarmangu,
Banjarnegara
Telp. 082.322.297.212

Kantor Cabang Pasar Besar

Jl. Letjend. Karjono No.43 Parakancangah Rt.05 Rw.09,
Banjarnegara
Telp. (0286) 592315

Kantor Cabang Singamerta

Desa Singamerta Rt.04 Rw.02 Sigaluh, Banjarnegara
Telp. (0286) 593802

Kas Tenggara

Desa Tenggara Rt.04 Rw.02 Sigaluh, Banjarnegara
Telp. (0286) 3399155

Kantor Cabang Pagedongan

Desa Pagedongan Rt.04 Rw.01 Pagedongan,
Banjarnegara
Telp.082.322.297.252

Kantor Cabang Purwonegoro

Jl. Raya Purwonegoro Rt.01 Rw.01 Purwanegara,
Banjarnegara
Telp. (0286) 5988607

Kas Bawang

Jl. Raya Binorong Rt. 01 Rw. 01 Desa Binorong, Bawang,
Banjarnegara
Telp. (0286) 5985636

Kas Wanadri

Desa Wanadri Rt.02 Rw.02 Bawang, Banjarnegara
Telp. 082136249944

Kantor Cabang Mandiraja

Desa Mandiraja Kulon Rt.02 Rw.03 Mandiraja,
Banjarnegara
Telp. (0286) 411443

Kantor Cabang Klampok

Jl. Raya Purwareja Klampok Rt.01 Rw.01 Klampok,
Banjarnegara
Telp. (0286) 479217

Kas Susukan

Jl. Raya Susukan Desa Susukan Rt.02 Rw.06 Susukan,
Banjarnegara
Telp (0286) 5213240



Kantor Cabang Wanadadi

Kemantren Rt.01 Rw.03 Wanadadi, Banjarnegara
Telp. (0286) 3398765

Kas Rakit

Jl. Raya Rakit Rt.02 Rt.03 Rakit, Banjarnegara
Telp. (0286) 5988946

Kantor Cabang Karangobar

Desa Leksana Rt.04 Rw.05 Karangobar, Banjarnegara
Telp. (0286) 5988020

Kas Pejawaran

Desa Penusupan Rt.02 Rw.04 Pejawaran, Banjarnegara
Telp. 081.126.152.12

Kantor Cabang Kalibening

Jl. Raya Kalibening Rt.02 Rw.03 Kalibening, Banjarnegara
Telp. (0286) 522304

Kas Pandanarum

Desa Pringamba Rt.01 Rw.01 Pandanarum,
Banjarnegara
Telp. 081.126.046.62

Kantor Cabang Wanayasa

Jl. Raya Wanayasa - Desa Wanayasa Rt.04 Rw.02,
Wanayasa, Banjarnegara
Telp.(0286) 5963585

PT BPR Surya Yudhakencana

Kas Sibebek

Jl. Raya Jatilawang - Petungkriyono, Desa Jatilawang
Rt.02 Rw.03, Wanayasa, Banjarnegara
Telp. 081.226.374.79

Kantor Cabang Pagentan

Jl. Raya Pagentan Rt.03 Rw.07 Desa Pagentan,
Banjarnegara
Telp. 082.892.031.747

Kantor Cabang Dieng

Desa Dieng Kulon Rt.01 Rw.01 Batur, Banjarnegara
Telp. (0286) 3342090

Kantor Cabang Batur

Jl. Raya Batur Rt.02 Rw.01 Batur, Banjarnegara
Telp. (0286) 5986229

Kantor Cabang Madukara

Desa Madukara Rt.03 Rw.03 Madukara, Banjarnegara
Telp. (0286) 5987026

Kantor Cabang Pekalongan

Jl. Raya Mandurorejo No. 504 Desa Nyamok, Kajen,
Pekalongan
Telp. (0285) 385322

Kas Paninggaran

Jl. Raya Paninggaran Dukuh Godang Rt.01 Rw.01
Paninggaran, Pekalongan
Telp. 081.127.311.4

Kas Bojong

Jl. Raya Bojong Rt.02 Rw.01 Desa Wiroditan, Bojong,
Pekalongan
Telp.(0285) 7831128

Kas Wiradesa

Jl. Mayjend. Sutoyo Rt.015 Rw.05 Desa Gumiwang,
Wiradesa, Pekalongan
Telp.(0285) 432533

Kantor Cabang Sragi

Jl. Raya Sragi No. 560 Rt.01 Rw.07, Sragi, Pekalongan
Telp. (0285) 5750961

Kas Kesesi

Jl. Raya Kesesi Rt.06 Rw.09 Kesesi, Pekalongan
Telp. (0285) 3830010

Kantor Cabang Kedungwuni

Jl. Raya Pekajangan No.53 RT 06 RW 03 Pekajangan,
Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
Telp. (0285) 7831288

Kas Wonopringgo

Jl. Raya Wonopringgo Rt.11 Rw.05 Desa Rowokembu,
Wonopringgo, Pekalongan
Telp. (0285) 7830177

Kas Doro

Jl. Ki Hajar Dewantara Rt.01 Rw.03, Doro, Pekalongan
Telp. (0285) 4483815

Kantor Cabang Purbalingga

Jl. S. Parman No. 129 Kedungmenjangan, Purbalingga
Telp. (0281) 894380

Kas Segamas

Kios K1 Blok A Pasar Segamas Jl. Mayjend Sungkono,
Kalikobang, Kalimanah, Purbalingga
Telp. (0281) 6597744

Kas Padamara

Jl. Raya Padamara Desa Padamara Rt.03 Rw.01
Padamara, Purbalingga
Telp. (0281) 6598542

Kas Kutasari

Jl. Raya Purbalingga-Tobong Rt.07 Rw.04 Kutasari,
Purbalingga
Telp. (0281) 6599295

Kas Kemangkon

Desa Panican Rt.07 Rw.02 Kemangkon, Purbalingga
Telp. (0281) 6591656

Kas Bojongsari

Jl. Raya Bojongsari Km.2 Desa Brobot Rt.014 Rw.04
Bojongsari, Purbalingga. Telp. (0281) 6597021

Kas Bukateja

Jl. Purwandaru No. 27 Rt.05 Rw.03 Desa Bukateja,
Bukateja, Purbalingga
Telp. (0286) 5211664

Kantor Cabang Punggelan

Desa Karang Sari Rt.04 Rt.01 Punggelan, Banjarnegara
Telp.082.322.297.218

Kantor Cabang Kaligondang

Desa Sinduraja Rt.01 Rw.01 Kaligondang, Purbalingga
Telp. (0281) 6591042

Kas Kalikajar

Jl. Raya Kalikajar Rt.02 Rw.06, Kalikajar, Kaligondang,
Purbalingga
Telp. (0281) 8901521

Kas Kejobong

Jl. Raya Kejobong Rt.02 Rw.01, Kejobong, Purbalingga
Telp. (0281) 8902933

Kantor Cabang Bobotsari

Jl. Kolonel Soegiri Rt.03 Rw.04 Desa Gandasuli,
Bobotsari, Purbalingga
Telp. (0281) 759403

Kas Karanganyar

Desa Karanganyar Rt.01 Rw.02 Karanganyar, Purbalingga
Telp.082.322.297.215

Kas Mrebet

Jl. Raya Pengalusan Rt.05 Rw.01 Desa Pengalusan,
Mrebet, Purbalingga
Telp. 082.138.480.998

Kantor Cabang Rembang

Jl. Raya Rembang-Purbalingga Rt.01 Rw.01 Desa Losari,
Rembang, Purbalingga
Telp. (0281) 6590538

Kas Karangmoncol

Desa Pekiringan Rt.03 Rw.09 Karangmoncol,
Purbalingga
Telp. (0281) 6590171

Kantor Cabang Karangreja

Desa Karangreja Rt.04 Rw.01 Karangreja, Purbalingga
Telp.(0281) 7700099

Kas Kutabawa

Jl. Raya Kutabawa Rt.04 Rw.01 Desa Kutabawa,
Karangreja, Purbalingga
Telp.085.640.453.047

Kantor Cabang Purwokerto

Jl. Jend Sudirman Timur No.1 Rt.05 Rw.03, Berkoh,
Purwokerto Selatan, Banyumas
Telp. (0281) 643582

Kas Pasar wage

Jl. Kombes Bambang Suprpto No.92 Rt.02 Rw.02
Purwokerto Wetan, Purwokerto Timur, Banyumas
Telp.(0281) 630661

Kas Karanglewas

Jl. Raya Kertawibawa Desa Karanggude Kulon Rt.03
Rw.01 Purwokerto Timur, Banyumas.
Telp. (0281) 642462

Kas Sokaraja

Jl. Let Jend Suprpto Rt.01 Rw.05 Desa Sokaraja Wetan,
Sokaraja, Banyumas
Telp. (0281) 6441563

Kas Kedungwuluh

Jl. Jend. Sutoyo Rt.04 Rw.01, Kedungwuluh, Purwokerto
Barat, Banyumas
Telp. (0281) 7773867

Kantor Cabang Baturraden

Jl. Raya Baturraden Desa Karangtengah Rt.04 Rw.05,
Baturraden, Banyumas
Telp. (0281) 6871129

Kas Pabuwaran

Jl. Raya Baturaden No.228, Desa Pabuwaran Rt.03
Rw.02, Purwokerto Utara, Banyumas
Telp. (0281) 6573139

Kas Dukuhwaluh

Jl. Raya Sunan Bonang Rt.02 Rw.10, Dukuhwaluh,
Banyumas
Telp. (0281) 6843749

Kas Sumbang

Jl. Raya Sumbang RT 007 RW 007 Desa Banteran,
Sumbang, Banyumas
Telp. (0281) 7775702

Kantor Cabang Ajibarang

Jl. Raya Ajibarang-Purwokerto RT.02 RW.06 Desa
Ajibarang Wetan, Ajibarang, Banyumas
Telp. (0281) 571459

Kas Cilongok

Jl. Raya Cilongok No.9 Desa Pernasidi Rt.03 Rw.03
Cilongok, Banyumas
Telp. (0281) 655795

Kas Pekuncen

Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu, Desa Banjaranyar Rt.03
Rw.07 Pekuncen, Banyumas
Telp. (0281) 5705009

Kas Wangon

Jl. Raya Wangon-Ajibarang Rt.04 Rw.02 Desa Banteran,
Wangon, Banyumas
Telp. (0281) 6575532

Kantor Kas Gumelar

Desa Gumelar Rt.08 Rw.01 Gumelar, Banyumas
Telp. (0281) 6575577

Kantor Cabang Banyumas

Jl. Gatot Subroto Rt.04 Rw.02 Kaliori, Kalibagor,
Banyumas
Telp. (0281) 796113

Kas Patikraja

Jl. Raya Notog RT 03 RW 02 Desa Patikraja, Patikraja,
Banyumas
Telp. (0281) 6844895

Kas Rawalo

Jl. HM. Bachroen Desa Rawalo Rt.01 Rw.01 Rawalo,
Banyumas
Telp. (0281) 6848120

Kas Jatilawang

Jl. Raya Jatilawang Desa Tunjung Rt.02 Rw.03,
Jatilawang, Banyumas
Telp. (0281) 6575554

Kas Kemranjen

Jl. Raya Buntu Gombang Rt.04 Rw.01 Desa Sidamulya,
Kemranjen, Banyumas
Telp. (0282) 5298853

Kantor Cabang Cilacap

Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.01 Rw.12 Gumilir, Cilacap
Utara, Cilacap
Telp. (0282) 542294

Kas Kesugihan

Jl. Gerilya No. 31 Rt.01 Rw.07 Kuripan, Kesugihan,
Cilacap
Telp.(0282) 5071431

Kas Pasar Gede

Jl. Kapt. P. Tendean Komplek Ruko Pelangi No. 9
Tegalreja, Cilacap Selatan, Cilacap
Telp.(0282) 5561835

Kas Jeruk Legi

Jl. Raya Jeruk Legi Rt.01 Rw.05, Desa Jeruk Legi Wetan,
Jeruk Legi, Cilacap
Telp. (0282) 5565665

Kas Kawunganten

Desa Kawunganten Rt.03 Rw.03 Kawunganten, Cilacap
Telp.(0280) 5264137

Kas Gandrungmangu

Jl. Gandrungmangu Ciloning RT 005 RW 001
Gandrungmangu, Cilacap
Telp. (0280) 5264347

Kantor Cabang Kroya

Jl. Jend Sudirman Rt.10 Rw.06 Kroya, Cilacap
Telp.(0282) 5295188

Kas Nusawungu

Jl. Raya Kroya-Nusawungu Rt.01 Rw.03 Desa Danasri,
Nusawungu, Cilacap
Telp. (0282) 5296911

Kas Adipala

Jl. Laut No. 8 Rt.01 Rw.03 Desa Adipala, Adipala, Cilacap
Telp. (0282) 6181248

Kas Sampang

Jl. Tugu Timur Rt.03 Rw.04 Desa Sampang, Sampang,
Cilacap
Telp.(0282) 6181006



BPR
BANK SURYA YUDHA
KANTOR PUSAT

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Bisnis BPR

Tinjauan Per Segmen Usaha

Kinerja Keuangan

Kemampuan Membayar Utang &
Tingkat Kolektibilitas Piutang

Struktur Modal & Kebijakan Struktur
Modal

Ikatan Material Investasi Barang Modal
Tahun 2020

Investasi Barang Modal
Direalisasikan Tahun 2020

Perbandingan Target dengan Realisasi
2020

Informasi & Fakta Material yang Terjadi
Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Prospek Usaha

Aspek Pemasaran 2020

Kebijakan Deviden

Program Kepemilikan Saham Oleh
Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/
MSOP)

Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum

Informasi Transaksi Material yang
Mengandung Benturan Kepentingan dan/
atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Perubahan Peraturan Perundang-
Undangan

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Informasi Kelangsungan Usaha

Literasi dan Inklusi Keuangan



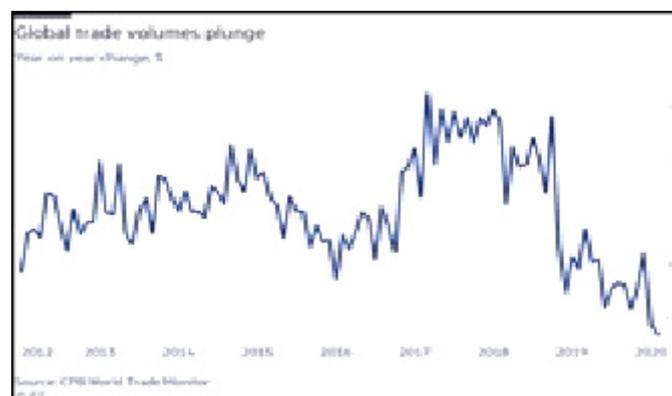
TINJAUAN BISNIS BPR

PEREKONOMIAN GLOBAL

Kondisi saat ini, memang berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Diawal-awal tahun 2020 sangat terasa betapa pandemi Covid-19 terus menyebar ke berbagai penjuru dunia yang mengakibatkan perekonomian dunia ikut terimbas karenanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan ketentuan yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Inti dari dikeluarkannya ketentuan ini adalah memberikan relaksasi kepada seluruh debitur perbankan yang terkena dampak untuk dapat melakukan restrukturisasi kreditnya.

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 ini sebesar 4%. Angka tersebut menguat bila dibandingkan dengan laju perekonomian global pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,3%. Namun demikian, di dalam laporan Proyeksi Ekonomi Global edisi Januari 2021 tersebut, Bank Dunia menilai kinerja perekonomian tahun ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi Covid-19 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal di kisaran 5%. Bank Dunia menyatakan, meski mengalami pemulihan, prospek perekonomian global ke depan masih diliputi ketidakpastian, namun proses vaksinasi serta pengelolaan pandemi yang efektif menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi ke depan. Menurut lembaga internasional tersebut, negara maju diproyeksi bakal pulih dan tumbuh di kisaran 3,3% pada tahun 2021 dan sebesar 3,5% di tahun 2022. Hal itu didukung oleh penanganan pandemi dan vaksinasi yang meluas bersamaan dengan kebijakan moneter yang akomodatif, mengimbangi kebijakan fiskal yang diproyeksi bakal kian berkurang.

Adapun untuk negara dan perekonomian berkembang, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bakal mencapai 5% di 2021 dan melemah menjadi 4,2 % di 2020. Pemulihan pun sebagian besar didukung oleh pertumbuhan ekonomi China yang bakal mengalami *rebound* pada tahun ini. Bila tidak menghitung pemulihan China, pertumbuhan ekonomi negara berkembang tahun ini diperkirakan bakal lebih moderat, yakni sebesar 3,5% baik di tahun 2021 maupun 2022. Meski mengalami pemulihan, *output agregat* dari kinerja perekonomian negara berkembang pada tahun 2022 mendarat masih berada di bawah level 6% yang merupakan proyeksi sebelum Covid-19.



Sumber : Financial Times, 2020

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi China akan tumbuh 8,1% pada 2021, dan 5,6% pada 2022. IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi China pada 2020 dari sebelumnya 1,9% yang dibuat pada Oktober lalu menjadi 2,3%. Basis ekonomi yang lebih tinggi itu menyeret perkiraan pertumbuhan ekonomi China turun pada tahun ini dari 8,2% menjadi 8,1%. Kendati demikian, China masih memimpin pertumbuhan di antara negara-negara besar dunia. Negeri Tirai Bambu adalah yang pertama kembali ke tingkat perkiraan pertumbuhan sebelum pandemi pada kuartal IV 2020.

Sementara itu, IMF juga memprediksi pertumbuhan pada 2021 untuk Amerika Serikat (AS) sebesar 5,1%, Uni Eropa 4,2%, Jepang 3,1%, Inggris 4,5%, dan 4,3% untuk semua negara maju. Aktivitas global akan tetap jauh di bawah proyeksi *World Economic Outlook* (WEO) sebelum Covid-19 pada Januari 2020. Pemulihan ekonomi akan berbeda-beda. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 5,5% pada 2021 dan 4,2% pada 2022.

Menurut IMF, perbedaan yang cukup besar diprediksi antara China dan ekonomi lain khususnya pasar negara berkembang. Langkah-langkah penahanan yang efektif, respons investasi publik yang kuat, dan dukungan likuiditas bank sentral telah memfasilitasi pemulihan China. Sejalan dengan pemulihan aktivitas global, volume perdagangan global diprediksi tumbuh 8,1% pada 2021, sebelum turun menjadi 6,3% pada 2022. Perdagangan jasa diprediksi akan pulih lebih lambat daripada volume barang, yang sejalan dengan lemahnya pariwisata lintas batas dan perjalanan bisnis sampai transmisi menurun. IMF menyimpulkan bahwa kerja sama multilateral yang kuat diperlukan untuk mengendalikan pandemi di dunia.

PEREKONOMIAN NASIONAL

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian meskipun mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19% (yoy) membaik dari pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49% (yoy). Tren perbaikan pada triwulan IV 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun 2020. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020, diprakirakan meningkat secara bertahap pada 2021.

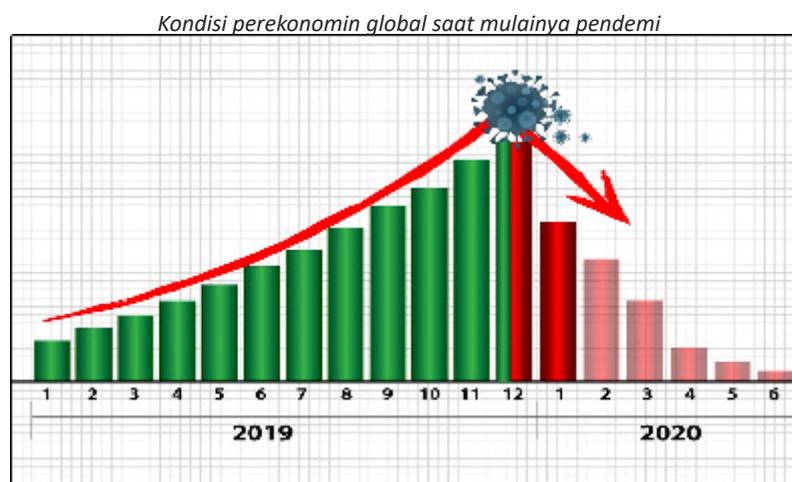
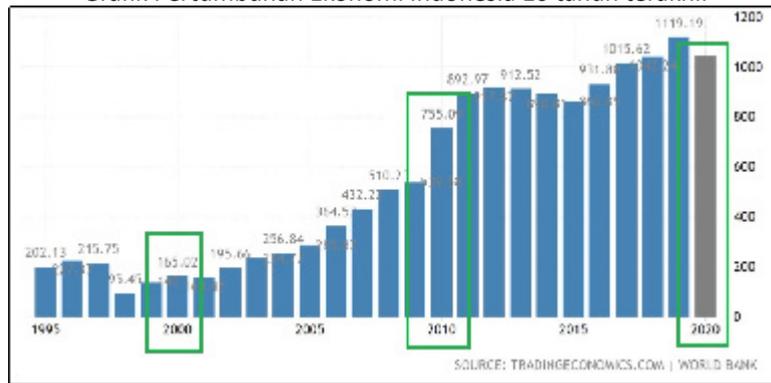


Illustration : by anonym from internet

Perbaikan ekonomi domestik triwulan IV 2020 ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus Pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga membaik pada triwulan IV 2020, yakni tumbuh -3,61% (yoy) dari -4,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Secara keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 2.63%. Pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan IV 2020, dari -6,48% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -6,15% (yoy), sehingga secara keseluruhan tahun mengalami kontraksi sebesar 4,95%. Sementara itu, net ekspor tercatat positif ditopang perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor di tengah masih terbatasnya kinerja impor.

Di sisi lapangan usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan pada triwulan IV 2020. LU yang terkait dengan kesehatan dan aktivitas *work from home* dan *school from home* tercatat tetap tumbuh positif dan melanjutkan perbaikan, seperti LU Informasi dan Komunikasi dan LU Jasa Kesehatan. LU Pertanian dan LU Pendidikan juga mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara itu, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian terus melanjutkan perbaikan, meski masih terkontraksi.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir



Dengan data-data dari BPS tersebut di atas, dapat disampaikan kondisi di lapangan bahwa pada posisi saat ini tren persebaran Covid-19 di beberapa negara mulai mengindikasikan ke arah penurunan, sehingga hal ini menumbuhkan optimisme pemulihan ekonomi akan dimulai tahun 2021 meskipun berakhirnya pandemi ini sulit dipastikan. Tentunya pemulihan ini didukung dengan berbagai stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Pemulihan ini diharapkan juga akan terjadi di Indonesia seiring dengan membaiknya perekonomian global. Struktur pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada permintaan domestik menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih rendah terkena ancaman resesi global. Dengan demikian, pemulihan pertumbuhan untuk kembali pada level pra-Covid akan lebih cepat. Melihat tren pertumbuhan periode 2015-2019 yang berada pada keseimbangan baru yaitu 5%, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat kembali pada kisaran 4,5 - 5,3% di tahun 2021. Inflasi sepanjang tahun 2019 sebesar 2,72% merupakan angka inflasi terendah selama 10 tahun terakhir sedangkan tahun 2020 sebesar 1,68% merupakan angka inflasi terendah sepanjang sejarah BPS. Kondisi berada dikisaran angka yang rendah yaitu 2,9%.

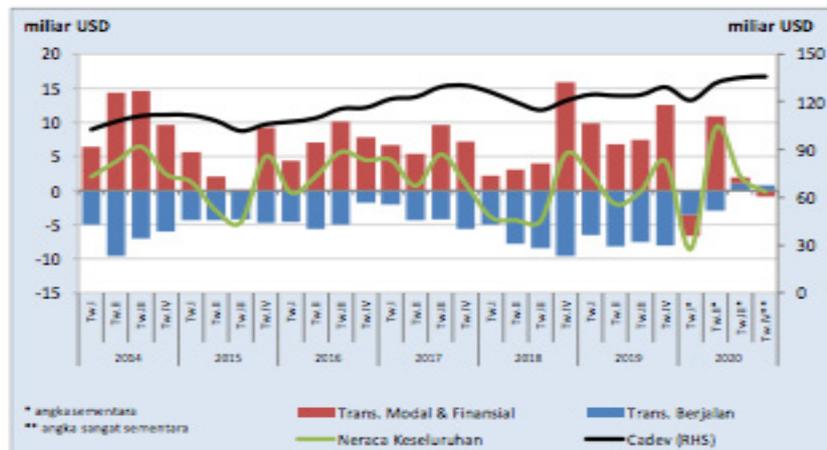
Di kuartal I 2020, inflasi tetap bertahan dikisaran yang rendah, maka diperkirakan tren ini akan terus berlanjut hingga 2021. Diperkirakan inflasi tahun 2021 dapat kembali terjaga dikisaran rendah dan stabil. Meskipun demikian, inflasi yang terus rendah perlu diwaspadai adanya penurunan permintaan, sehingga kebijakan perlu merespon perkembangan tersebut. Kinerja perdagangan yang surplus pada kuartal 1 ditengah wabah pandemi Covid-19 membawa optimisme ketahanan eksternal yang baik di tahun 2021. Atas kondisi tersebut neraca berjalan terhadap PDB pada tahun 2021 dapat dijaga kisaran rendah. Nilai tukar rupiah fluktuatif di masa pandemi dan bergerak menguat hingga Mei 2020. Diperkirakan di tahun 2021 kembali menguat, didukung faktor fundamental yang terjaga, terutama dikarenakan inflasi terjaga rendah dan membaiknya neraca perdagangan. Kebijakan moneter yang akomodatif perlu berlanjut di tahun 2021 sebagai langkah awal dalam meningkatkan kembali gairah perekonomian. Melalui kebijakan moneter ini diharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga yang terjaga serta keseimbangan neraca pembayaran yang positif dapat tercapai di tahun 2021. Kebijakan fiskal 2021 yang disusun harus memperkuat daya tahan ekonomi nasional yang mampu mengatasi berbagai risiko yang muncul sekaligus melindungi ekonomi negara dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi global, termasuk akibat bencana non alam seperti merebaknya virus corona. Tahun 2021 harus menjadi momentum dalam melaksanakan pemulihan sosial ekonomi dan meningkatkan fundamental ekonomi melalui reformasi kebijakan fiskal maupun moneter.

Neraca Pembayaran dan Nilai Tukar Rupiah

Menurut Bank Indonesia, kinerja positif transaksi berjalan diperkirakan berlanjut pada triwulan IV 2020, terutama didorong oleh surplus neraca barang yang meningkat. Neraca perdagangan pada triwulan IV 2020 mencatat surplus sebesar 8,3 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 8,0 miliar dolar AS. Ekspor di bulan Desember 2020 mencatat kenaikan tertinggi sejak 2013 mencapai 16,5 miliar dolar AS atau tumbuh 14,6% (yoy), sejalan dengan kenaikan harga komoditas dan permintaan terutama dari Tiongkok, AS, dan ASEAN. Secara keseluruhan tahun 2020, defisit transaksi berjalan diperkirakan sekitar 0,5% dari PDB. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik kembali berlanjut, tercermin dari investasi portofolio yang mencatat *net inflow* sebesar 2,1 miliar dolar AS pada triwulan IV 2020, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatat *net outflow* 1,7 miliar dolar AS. Memasuki awal tahun 2021, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik ini terus berlanjut dan mencapai 5,1 miliar dolar AS (per 19 Januari 2021), termasuk penerbitan obligasi global oleh Pemerintah. Dengan perkembangan ini, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2020 tetap tinggi, yakni 135,9 miliar dolar AS,

setara pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, defisit transaksi berjalan diperkirakan sekitar 1,0%-2,0% dari PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia.

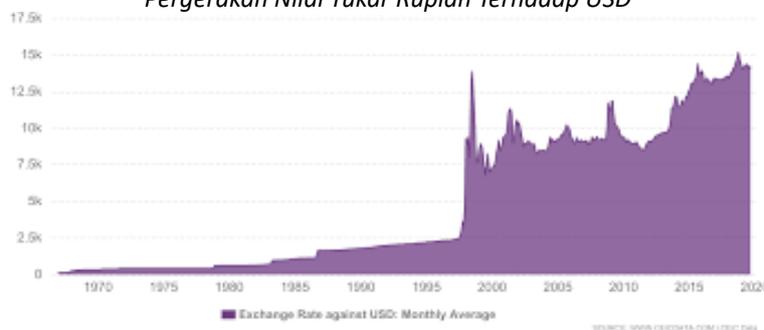
Neraca Pembayaran Indonesia Triw IV/2020



Sumber Bank Indonesia

Demikian pula terkait, nilai tukar Rupiah pada 20 Januari 2021 menguat 0,77% secara merata dan 0,14% secara *point to point* dibandingkan dengan level Desember 2020. Penguatan nilai tukar Rupiah didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Ke depan, Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar Rupiah berpotensi berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih *undervalued*. Hal ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang terjaga, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang besar. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD



Tidak hanya di Indonesia yang nilai tukar mata uangnya bergejolak, di negara lainpun, seperti: Colombia Peso turun 17,6%, Rusia Ruble turun 18,5%, Mexican Peso turun 25%, Argentina Peso turun 9,4%, Thai Baht turun 8,7%, dan Canadian Dollar turun 7,5%. Sebelum naiknya dolar karena dampak Covid-19, nilai tukar rupiah per dolar AS pada kisaran Rp14.000/US\$ dan saat pandemi Covid-19, rupiah sempat terdepresiasi hingga Rp.16.600/ per US\$ nya. Kurs rupiah akan terus berada pada posisi rentan selama penyebaran wabah Covid-19, yang menyebabkan kepanikan di pasar global yang membuat dana asing kabur serta tekanan likuiditas dan desakan untuk mendapatkan dolar membuat dolar lebih unggul dari segalanya. Fluktuasi rupiah, sebelum pandemi Covid-19 menurut sejumlah ekonom didorong sejumlah faktor baik eksternal dan internal. Pertama, ada kekhawatiran krisis keuangan yang terjadi di Argentina dan Turki menular ke negara berkembang yang mengalami defisit transaksi yang melebar, salah satunya Indonesia. Kedua, sentimen kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat (Fed). Ketiga, risiko perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta negara lainnya. Sedangkan faktor internal, Indonesia hadapi masalah defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan (CAD). Tercatat defisit transaksi berjalan sudah berjalan mencapai 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Inflasi dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

Inflasi tercatat rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2020 tercatat 0,28% (mtm), sehingga secara tahunan inflasi mencapai 1,59% (yoy). Inflasi inti tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, dalam kaitan ini adalah konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* meningkat terutama karena faktor musiman akibat kenaikan harga komoditas hortikultura seiring dengan berlalunya musim panen serta harga komoditas global yang meningkat. Inflasi kelompok *administered prices* juga meningkat didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara di tengah deflasi komoditas tarif listrik sejalan kebijakan penyesuaian tarif. Diperkirakan inflasi 2020 lebih rendah dari batas bawah target inflasi dan kembali ke sarasannya $3,0\% \pm 1\%$ pada 2021.



Sumber : Data Inflasi Bank Indonesia

Inflasi inti masih tercatat rendah. Inflasi inti menunjukkan perlambatan menjadi sebesar 1,67% (yoy) pada November 2020 dibandingkan inflasi inti Oktober 2020 sebesar 1,74% (yoy). Inflasi inti yang tetap rendah tidak terlepas dari pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target, harga komoditas dunia yang rendah, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Secara bulanan, inflasi inti pada November 2020 tercatat sebesar 0,06% (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan inflasi inti bulan Oktober 2020 sebesar 0,04% (mtm). Pencapaian ini dipengaruhi oleh kenaikan inflasi kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kesehatan, dan pendidikan, di tengah deflasi komoditas emas perhiasan sejalan dengan perlambatan harga emas dunia.

Pada bulan Desember 2020, Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan (BI 7-Day) pada posisi 3,75%. Keputusan tersebut, menurut Bank Indonesia konsisten dengan perkiraan agar inflasi tetap rendah dan dan stabilitas eksternal, termasuk di dalamnya agar nilai tukar rupiah tetap terjaga. Demikian juga dengan suku bunga *deposit facility* tetap bertahan pada posisi 3% dan suku bunga *lending facility* 4,5%. Total sejak 1 Desember 2019 hingga 17 Desember 2020, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan 125 basis poin.

Industri Perbankan Nasional

Secara berkelanjutan total aset perbankan terus meningkat dari tahun ke tahun, aset perbankan pada tahun 2020 mencapai Rp9.347.017 miliar meningkat sebesar 7,11% dari Rp8.726.355 miliar pada tahun 2019. Demikian pula posisi 2019 lebih meningkat sebagaimana tabel di bawah ini. Adapun pangsa pasar BPR konvensional menurun menjadi 1,66% dibanding tahun lalu yang mencapai 1,71%. Hal ini lebih disebabkan karena meningkatnya pangsa pasar dan pertumbuhan aset Bank Umum Syariah menjadi sebesar 4,25% meningkat dari 4,01% pada tahun 2018.

TABEL ASET INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL

Miliar Rp

Jenis Bank	2018	Pangsa thd total aset (%)	2019	Pangsa thd total aset (%)	2020	Pangsa thd total aset (%)
BU Konven	7.751.655	94,34	8.212.610	94,11	8.780.820	93,94
BU Syariah	316.691	3,85	350.364	4,01	397.072	4,25
BPR Konven	135.693	1,65	149.623	1,71	155.075	1,66
BPR Syariah	12.362	0,15	13.758	0,16	14.050	0,15
Total Aset	8.216.401	100	8.726.355	100	9.347.017	100

Sumber SPI-Vol.19 No.1 – Desember 2020

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Bank Umum konvensional menduduki pangsa paling kuat hingga mencapai 93,94% pada tahun 2020 sedangkan BPR konvensional hanya mencapai 1,66% relatif menurun. Dengan kondisi demikian tentunya kontribusi lembaga keuangan BPR terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional masih relatif kecil. Namun yang cukup menggembirakan adalah pertumbuhan aset Bank Umum Syariah yang pangasanya terus meningkat. Ini semua tidak lepas dari dorongan pemerintah dan Bank Indonesia terhadap industri perbankan syariah yang semakin menguat dari tahun ke tahun. Pada tanggal 12 Oktober 2020, telah di tandatangani kesepakatan pra merger antara 3 (tiga) bank syariah milik pemerintah yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BNI Syariah, dengan harapan pangsa pasar bank syariah semakin berkembang.

Industri keuangan syariah memiliki peluang yang besar untuk tumbuh di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Walaupun kondisi makro ekonomi Indonesia belum membaik, tapi pemerintah dalam hal ini telah mempersiapkan diri untuk menyongsong era baru. Layanan industri keuangan syariah juga semakin beragam. Meskipun demikian, industri keuangan syariah tidak dapat dibiarkan berkembang sendiri, namun perlu didorong dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah dan otoritas terkait. Untuk itu, Bank Indonesia menyiapkan strategi untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui 5 langkah yaitu:

Pertama, mendorong inovasi instrumen likuiditas dan keuangan syariah dalam semangat pendalaman pasar keuangan syariah. Upaya pendalaman pasar keuangan syariah juga didukung oleh penerbitan aturan terkait transaksi *hedging* syariah yang mendukung efisiensi pasar dan pengelolaan volatilitas.

Kedua, peningkatan sumber daya insani dengan memperkuat kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia di industri keuangan syariah dalam rangka mengoptimalkan alokasi sumber daya.

Ketiga, memperkuat kerangka kebijakan dan kerangka pengawasan terintegrasi dari ekonomi dan keuangan syariah. Koordinasi menjadi kunci utama, dimana otoritas terkait didorong untuk menyampaikan pandangan yang membangun dalam pengembangan produk untuk instrumen pasar keuangan syariah dan juga harmonisasi regulasi lintas sektor keuangan maupun sektor sosial.

Keempat, membangun struktur industri yang efisien dengan partisipasi aktif dalam formulasi arsitektur sistem keuangan syariah yang efisien, mendorong pasar untuk pengembangan sektor riil melalui formulasi model pembiayaan syariah yang optimal, dan merancang sistem informasi *Islamic Economic Super Corridor*.

Kelima, membangun aliansi strategis dengan stakeholder terkait untuk terus meningkatkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Selain pertumbuhan yang cukup signifikan dari sisi aset, stabilitas sistem keuangan Indonesia terlihat juga dari tingginya rasio kecukupan modal (*Capital Adequasy Ratio*—CAR) yang berada di level 25,06% melampaui ketentuan minimum 12% dan meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 19,87%.

Tabel

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(miliar Rupiah)

Pos Tertentu	Tahun		
	2018	2019	2020
Pembiayaan	9,084	9,943	10,681
Dana Pihak Ketiga	8,135	8,732	9,819
Aset	12,362	13,758	14,050
L/R tahun berjalan	174	262	224

Sumber SPI-Vol.19 No.1 – Desember 2020

Kinerja pembiayaan BPRS di tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,42% atau selama 3 tahun terakhir tumbuh rerata sebesar 8,44%. Secara absolut, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 9,46%. Walaupun pangsa BPR Syariah masih relatif kecil namun pertumbuhan aset rerata mencapai 6,71% melebihi pertumbuhan rerata jenis bank konven lainnya.

Kondisi-kondisi tersebut di atas yang menyebabkan salah satu alasan PSP BSY mengakuisisi PT BPR Eleska yang berkedudukan di Purwokerto yang akan dijadikan BPR syariah. Akuisisi tersebut telah disetujui oleh OJK sesuai surat No.S-219/KO.0302/2020 tanggal 27 April 2020.

Kredit

Kinerja kredit di tahun 2020 mengalami pertumbuhan walaupun tidak sepesat tahun sebelumnya. Khusus tahun 2020, rerata pertumbuhan kredit Bank Umum Konvensional hanya mencapai 1,50% dibanding dengan bank jenis lainnya. Untuk tahun ini, pertumbuhan kredit/pembiayaan dari bank syariah lebih menguat. Kondisi ini dimungkinkan karena konsep syariah adalah bagi hasil sehingga risiko kredit lebih mudah diantisipasi. Data-data tersebut dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel

KREDIT/PEMBIAYAAN YANG DISALURKAN

(miliar Rp)

Jenis Bank	2018	Pangsa thd total kredit (%)	2019	Pangsa thd total kredit (%)	2020	Pangsa thd total kredit (%)	Pertumb kredit (rerata - %)
BU Konven	5,092,584	94.27	5,391,847	94.00	5,237,027	93.43	1,50
BU Syariah	202,298	3.74	225,146	3.93	246,533	4.40	10,40
BPR Konven	98,220	1.82	108,784	1.90	110,770	1.98	6,29
BPR Syariah	9,084	0.17	9,943	0.17	10,681	0.19	8,44
Total	5,402,186	100	5,735,720	100	5,605,011	100	

Sumber SPI-Vol.19 No.1 – Desember 2020

Kondisi penyaluran kredit baru tumbuh positif pada triwulan IV-2020. Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan secara triwulanan (qtq) penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2020 tumbuh positif, meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru sebesar 25,4%. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit baru terindikasi terjadi pada jenis kredit modal kerja dan kredit konsumsi, tercermin dari nilai SBT masing-masing sebesar 25,6% dan 0,9%. Sementara itu, kredit investasi diindikasikan mengalami penurunan, tercermin dari nilai SBT yang negatif sebesar -10,6%. Secara sektoral, penyaluran kredit baru tertinggi terjadi pada sektor Pertanian, Perburuan & Kehutanan, dan sektor Transportasi, Pergudangan & Komunikasi dengan SBT masing-masing sebesar 29,3%.

Penyaluran kredit baru triwulan I 2021 diperkirakan meningkat karena didorong oleh kategori kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Prakiraan tersebut didapat dari survei perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang terindikasi dari SBT penyaluran kredit baru triwulan I 2021 sebesar 49,4%, meningkat dari 25,4% pada triwulan IV 2020.

Standar penyaluran kredit pada triwulan I 2021 diperkirakan tidak seketat periode sebelumnya. Hal itu terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) sebesar 0,4%, lebih rendah dibandingkan dengan 3,2% pada triwulan sebelumnya. Aspek

kebijakan penyaluran yang diperkirakan tidak seketat triwulan sebelumnya antara lain plafon kredit dan jangka waktu kredit. Hasil survei Bank Indonesia mengindikasikan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit untuk keseluruhan tahun 2021. Responden memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2021 sebesar 7,3% (yoy).

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa pandemi Covid-19 masih saja membayangi pertumbuhan kegiatan usaha perbankan, karena sampai saat ini belum ada yang dapat memprediksi kapan berakhirnya pandemi ini. Dari sisi perbankan masih menyikapi dengan “*wait and see*” menunggu hingga berakhirnya program stimulus pada bulan Maret 2022 sesuai dengan POJK No. 48/POJK.03/2020.

Tabel

PERTUMBUHAN JENIS PENGGUNAAN KREDIT									
(miliar)									
Jenis penggunaan	2018			2019			2020		
	BU	BUS	BPR	BU	BUS	BPR	BU	BUS	BPR
Modal Kerja	2,583,261	74,793	44,279	2,659,578	83,688	49,166	2,562,106	84,712	50,080
Investasi	1,340,576	51,541	7,385	1,515,085	55,264	8,327	1,512,022	58,327	8,515
Konsumsi	1,496,309	82,715	46,556	1,584,163	93,458	51,291	1,575,139	111,206	52,175
Sub Total	5,420,146	209,049	98,220	5,758,826	232,410	108,784	5,649,267	254,245	110,770

Sumber SPI-Vol.19 No.1 – Desember 2020

Berdasarkan jenis penggunaannya, Kredit Modal Kerja (KMK) secara absolut pada tahun 2020 mengalami penurunan -3,42% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai pertumbuhan 3,33%. Posisi nominal secara total KMK tahun 2020 tercatat Rp2,696,898 miliar menurun dibandingkan pada posisi tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp2,792,432 miliar. Adapun tahun 2018 tercatat sebesar Rp2,702,333 miliar. Kondisi ini lebih disebabkan menurunnya KYD KMK oleh Bank Umum yang hanya mencapai pertumbuhan sebesar -3,66% dibanding Bank Umum Syariah sebesar 1,22% dan BPR sebesar 1,86%. Demikian pula terkait dengan Kredit Investasi dan Konsumsi penurunan terjadi lebih karena kontribusi dari Bank Umum. Kontribusi terbesar penekan pertumbuhan KMK disebabkan karena menurunnya kredit kepada Industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu, perbankan sedang fokus melakukan restrukturisasi kredit. Diharapkan pada awal tahun 2021 kondisi usaha semakin membaik sehingga penyaluran kredit dapat bertumbuh seperti sedia kala.

Bila melihat data di atas, semua jenis bank mengalami peningkatan prosentase NPL, ini diakibatkan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Namun dengan dimulainya vaksinasi yang masif dilakukan oleh pemerintah diharapkan kesehatan masyarakat semakin meningkat yang dengan sendirinya segera dapat meningkatkan perputaran roda ekonomi.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV/2020 minus 2,19% namun DPK masyarakat justru meningkat dari Rp5.275.192 miliar menjadi Rp5.871.979 miliar atau meningkat sebesar 11,31%. Peningkatan tahun ini (YoY) lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya mencapai 7,30%, padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,97% sedikit melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,18%. Peningkatan DPK tersebut di atas lebih didominasi oleh giro sebesar 14,48%, Tabungan 11,01% dan Deposito 10,00%. Adapun meningkatnya DPK masyarakat, lebih disebabkan nasabah “*wait and see*” untuk tidak di investasikan terlebih dulu menunggu kondisi perekonomian stabil kembali. Dana pihak ketiga (DPK) rumah tangga di perbankan Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,69% (yoy). Kondisi ini, dapat menjadi ukuran bahwa masyarakat/nasabah masih percaya dengan lembaga perbankan.

Pertumbuhan DPK tahun 2021 diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) prakiraan penghimpunan DPK tahun 2021 sebesar 68,9%, positif meski lebih rendah dibandingkan 88,0% pada tahun sebelumnya. Optimisme prakiraan pertumbuhan DPK tersebut antara lain dipengaruhi oleh faktor suku bunga dan kondisi likuiditas bank.

Tabel

PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA									
(Miliar Rp)									
Jenis DPK	2018			2019			2020		
	BU/BPR	BUS/BPRS	Jumlah	BU/BPR	BUS/BPRS	Jumlah	BU/BPR	BUS/BPRS	Jumlah
Giro	972,798	24,760	997,558	1,065,635	37,419	1,103,054	1,222,436	40,298	1,262,734
Tabungan	1,630,058	92,941	1,722,999	1,744,467	105,691	1,850,158	1,927,977	125,897	2,053,874
Deposito	2,059,680	136,797	2,196,477	2,178,952	144,028	2,322,980	2,408,063	147,308	2,555,371
Total DPK	4,917,034			5,276,192			5,871,979		

Sumber SPI-Vol.19 No.1 – Desember 2020

PERAN DAN POSISI BSY PADA INDUSTRI BPR REGIONAL DAN NASIONAL

Letak Geografis Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971,01 Ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha). Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 Ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 Ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan secara langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; dan Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Peta Posisi Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah



Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7°12'–7°31' Lintang Selatan dan 109°20'10''–109°45'50'' Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah Barat yang membujur dari arah barat ke Timur, dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian antara 100-500 m dpl. Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten Banjarnegara masuk dalam 3 zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air. Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara berdasarkan prediksi (<https://banjarnegarakab.go.id>) tahun 2019 sebanyak 923.192 penduduk.

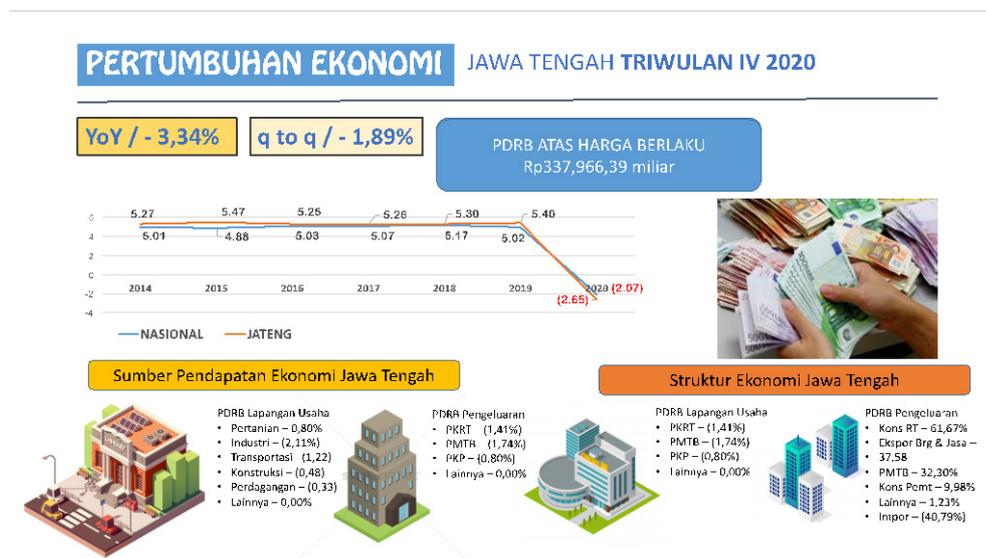
Dari kondisi tersebut di atas, BSY yang berkantor pusat di Kabupaten Banjarnegara telah membuka 30 kantor cabang dan 50 kantor kas meliputi Kabupaten Banjarnegara, Pekalongan, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap.

Prospek Usaha

1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah.

BSY optimis, walaupun kondisi perekonomian saat ini belum sepenuhnya pulih, namun BSY tetap yakin bahwa pertumbuhan bisnis di masa depan semakin cerah. Dengan di dukung manajemen bisnis yang baik, di dukung dengan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan pemerintah akan berdampak positif bagi prospek usaha BSY. Diharapkan dengan semakin besarnya alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa akan semakin mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di daerah dan desa.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami perbaikan pada triwulan IV 2020. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2021, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2020 tumbuh -3,34% (yoy), lebih baik dari pencapaian triwulan III 2020 sebesar -3,79% (yoy). Meningkatnya mobilitas masyarakat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Jawa Tengah. Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -2,19% (yoy) dan kawasan Jawa (-2,60%; yoy). Sementara itu, secara triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tumbuh -1,89% (qtq), tumbuh lebih rendah dibandingkan 4,79% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Kondisi perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong peningkatan aktivitas investasi dan ekspor luar negeri. Perbaikan kinerja investasi didorong peningkatan pembangunan infrastruktur pemerintah. Sementara peningkatan permintaan mendorong perbaikan ekspor luar negeri nonmigas Jawa Tengah terutama komoditas kayu dan barang dari kayu. Meski pandemi COVID-19 masih melanda global, permintaan produk furnitur dari Jawa Tengah justru mengalami peningkatan. Selain dari pembeli yang lama, berbagai pelaku usaha mencatat adanya penambahan pembeli baru dari berbagai negara dari kawasan Eropa, Timur Tengah, hingga Australia.

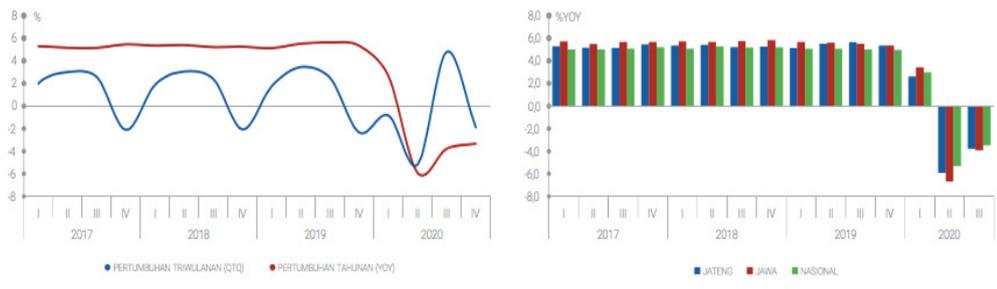


Sumber BPS Jawa Tengah (diolah)

Dengan perkembangan hingga triwulan IV 2020, perekonomian Jawa Tengah pada 2020 tumbuh -2,65% (yoy), atau lebih rendah dibanding tahun 2019 yang sebesar 5,40% (yoy). Sebagaimana perkiraan sebelumnya, wabah COVID-19 telah membuat seluruh elemen perekonomian mengalami pelemahan. Dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar pelemahan tersebut bersumber dari investasi dan konsumsi rumah tangga. Momen peningkatan investasi yang telah direncanakan di 2020 terhalang oleh pandemi COVID-19. Berbagai program strategis pemerintah yang dicanangkan di Jawa Tengah terpaksa ditunda dalam beberapa waktu. Investor pun menahan menanam modal ke Jawa Tengah tercermin dari penanaman modal asing (PMA) yang tumbuh -70,88% (yoy) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh -33,12% (yoy), selama 2020. Relokasi pabrik tekstil dari wilayah lain ke Jawa Tengah yang direncanakan pada akhir triwulan II 2020 tertunda hingga periode yang belum dapat ditentukan.

Pada aspek lapangan usaha, industri pengolahan memiliki andil terbesar terhadap pelemahan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020 diikuti sektor Perdagangan. Melemahnya permintaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, membuat produksi menjadi tidak optimal. Prompt Manufacturing Index (PMI) Jawa Tengah berada pada level kontraksi 35,80 selama tahun 2020 atau lebih rendah dari 53,57 pada 2019. Di sisi lain, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mampu tumbuh positif pada 2020. Pertumbuhan Pertanian terutama didorong kondisi iklim yang mendukung panen secara optimal. Hal ini juga didukung oleh relatif stabilnya permintaan bahan pangan dibandingkan kebutuhan masyarakat lainnya seperti sandang, perlengkapan rumah tangga, maupun transportasi di masa pandemi.

Grafik
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa dan Nasional



Sumber BPS diolah oleh Bank Indonesia Semarang

Memasuki triwulan I 2021, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan terus membaik. Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan pada triwulan I 2021 terutama didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor luar negeri. Prospek investasi baru ke Jawa Tengah diperkirakan akan terealisasi pada periode ini. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional akan semakin intens dilakukan di awal tahun 2021, termasuk pengembangan kawasan industri terpadu Batang. Ekspor luar negeri akan semakin meningkat seiring permintaan global yang semakin baik. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

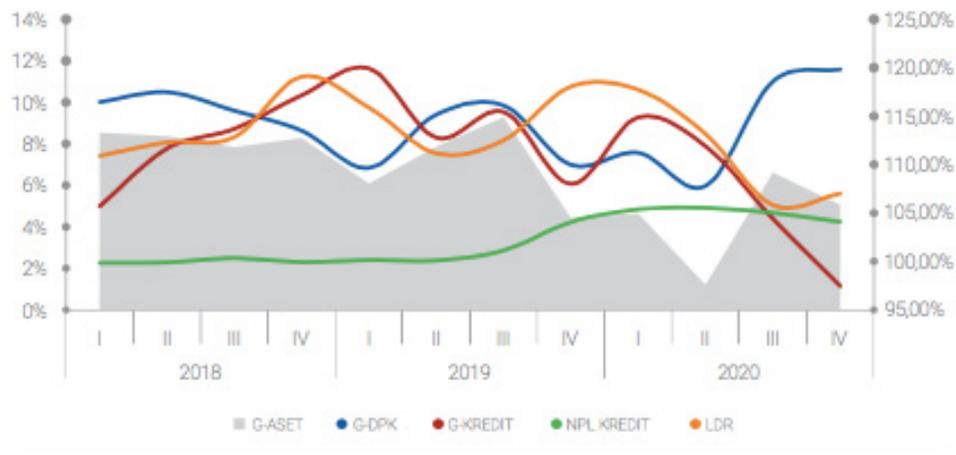
Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Daya beli konsumen terjaga ditopang oleh bantuan sosial dan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Optimisme peningkatan ekspor tersebut sejalan dengan karakteristik komoditas ekspor Jawa Tengah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, *furniture*, hingga makanan.

2. Perkembangan Kinerja Perbankan di Provinsi Jawa Tengah

Pada triwulan IV/2020, seluruh indikator perbankan di Jawa Tengah belum mengalami perbaikan kinerja kecuali DPK dan NPL. Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan tahunan (yoy) DPK sedikit meningkat meskipun secara nominal turun, sedangkan kinerja masih mengalami penurunan. Walaupun demikian porsi nominal kredit yang lebih tinggi dibandingkan nominal DPK berkontribusi dalam meningkatkan LDR dibandingkan triwulan sebelumnya. Kualitas penyaluran kredit relatif membaik, tercermin dari penurunan NPL.

Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah mencapai Rp364,9 Triliun pada triwulan IV/2020, tumbuh 1,15% (yoy), namun menurun dibandingkan tahun lalu 4,39% (yoy). Penurunan kinerja kredit juga terjadi pada provinsi lainnya di kawasan Jawa, khususnya provinsi DKI dan Jawa Timur yang telah mengalami perlambatan penyaluran kredit sejak triwulan II/2020. Capaian penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah maupun provinsi lainnya di kawasan Jawa pada triwulan laporan masih berada di bawah target penyaluran kredit yaitu 2-3%.

Grafik
Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah



Sumber Bank Indonesia Semarang

Rasio kredit NPL di Jawa Tengah masih terjaga sebesar 4,24% pada triwulan IV/2020, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya 4,67%, namun masih yang tertinggi di kawasan Jawa. Kontribusi utama penurunan NPL di Jawa Tengah disebabkan oleh membaiknya rasio NPL kredit modal kerja. Perbaikan kualitas kredit dimaksud terutama di dukung oleh meningkatnya restrukturisasi kredit modal kerja khususnya pada industri pengolahan.

DPK Jawa Tengah pada triwulan IV/2020 sebesar Rp341,04 Triliun, secara nominal lebih rendah dibandingkan triwulan III/2020 yang mencapai Rp343,9 Triliun namun secara tahunan tumbuh 11,59% (yoy) lebih tinggi dibanding triwulan lalu sebesar 11,00% (yoy). Akselerasi pertumbuhan ini sejalan dengan kinerja penghimpunan DPK perbankan di kawasan Jawa yang sebagian besar mencatatkan pertumbuhan di triwulan laporan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu.

Pertumbuhan DPK perbankan di Jawa Tengah adalah yang tertinggi di kawasan Jawa setelah Provinsi D.I Yogyakarta. Kinerja pertumbuhan DPK di kawasan Jawa maupun di tingkat nasional masih ditopang oleh simpanan tabungan yang meningkat, serta di dukung oleh simpanan deposito yang relatif membaik walau masih mencatatkan pertumbuhan yang rendah.

Aset perbankan pada triwulan IV/2020 tercatat sebesar Rp419,65 Triliun, tumbuh 5,05% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu 6,62% (yoy). Secara spasial pertumbuhan aset di Jawa Tengah adalah yang terendah kedua setelah Jawa Timur dibanding pertumbuhan aset di provinsi lain di pulau Jawa. Sementara itu, LDR sedikit meningkat dari 105,81% di triwulan lalu menjadi 107,01%. Peningkatan tersebut seiring dengan penurunan nominal DPK, sedangkan nominal kredit relatif stabil.

3. Perkembangan Kinerja BPR di Provinsi Jawa Tengah

Sejalan dengan kinerja perbankan secara umum, bisnis utama (*core business*) BPR di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga mencatatkan perlambatan pertumbuhan yang cukup dalam dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana tabel di bawah ini. Sebagai contoh; KYD hanya bertumbuh sebesar 4,35%, dari Rp26,912 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp28.082 miliar pada tahun 2020. Adapun Deposito, meningkat lebih tinggi dibanding pos lainnya dalam tabel di bawah ini. Yang menarik adalah walaupun secara nominal NPL terdapat peningkatan, namun secara persentase terdapat perlambatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 18,99% namun di tahun 2020 hanya mencapai 6,16%. Secara umum penyebab utama dari melambatnya pertumbuhan indikator umum BPR di Jawa Tengah adalah karena menyebarnya Covid-19 keseluruh sendi-sendi perekonomian masyarakat baik di tingkat global maupun daerah khususnya Jawa Tengah.

INDIKATOR UMUM BPR DI JAWA TENGAH						
Indikator	Nominal			Pertumbuhan % (YoY)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Total Aset (milyar Rp)	31,269	35,523	37,675	10.38	13.60	6.06
Kredit (milyar Rp)	23,620	26,912	28,082	12.40	13.94	4.35
Non Performing Loan (milyar Rp)	1,611	1,917	2,035	8.27	18.99	6.16
Dana Pihak Ketiga (milyar Rp)						
* Tabungan (milyar Rp)	10,520	11,631	12,189	12.41	10.56	4.80
* Deposito (milyar Rp)	13,207	15,107	16,232	10.10	14.39	7.45
Total DPK	23,727	26,738	28,421	11.11	12.69	6.29

Sumber SPI-Vol.19 No.1 – Desember 2020

Selain itu, dari tabel di bawah ini tercatat provinsi Jawa Tengah menduduki posisi tertinggi dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir dibanding dengan provinsi lainnya di pulau Jawa. Walaupun jumlah penduduk di provinsi Jawa Tengah (37 juta / 2020) pada urutan ketiga setelah provinsi Jawa Barat (50 juta) dan Jawa Timur (41 juta). Ini menunjukkan bahwa kinerja BPR di Jawa Tengah dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran kredit masih jauh lebih baik dari BPR lain yang berada di provinsi lain se-pulau Jawa.

DATA DPK DAN KREDIT BPR BERDASARKAN LOKASI PENGHIMPUNAN DAN KYD						
PROVINSI YANG BERLAKU DI PULAU JAWA						
(Miliar Rp)						
Provinsi	DANA PIHAK KETIGA			KREDIT YANG DIBERIKAN		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jawa Barat	12,742	13,665	13,847	12,554	13,848	13,223
Banten	2,763	3,377	3,161	3,393	3,991	3,982
DKI Jakarta	1,910	2,159	2,495	1,571	1,848	2,051
D.I. Yogyakarta	4,883	5,453	5,732	4,724	5,263	5,679
Jawa Tengah	23,726	26,738	28,422	23,620	26,912	28,082
Jawa Timur	9,304	10,144	10,787	9,836	10,797	19,841

Sumber SPI-Vol.19 No.1 – Desember 2020

Aset BPR

Aset BPR pada Desember 2020 tumbuh 6,06% (yoy) melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,60% (yoy). Perlambatan tersebut seiring dengan perlambatan pertumbuhan KYD maupun DPK pada periode laporan. Meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya, ketahanan BPR cukup solid di dukung dengan permodalan yang relatif meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.

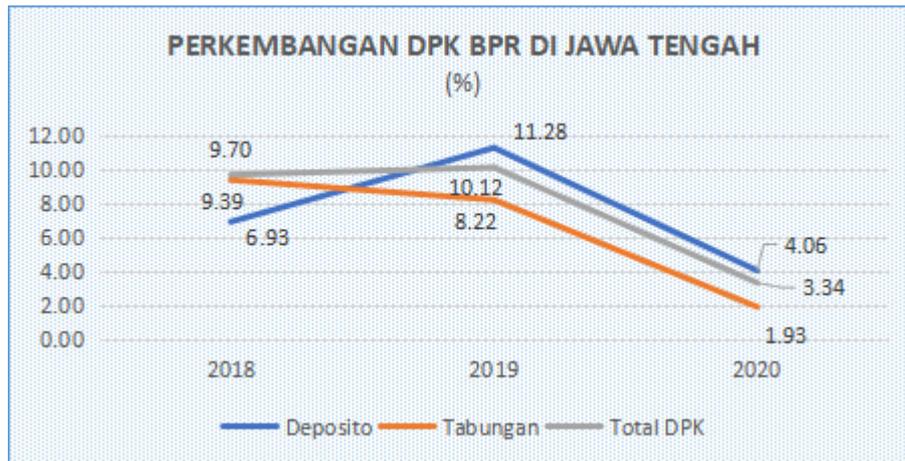
Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,36%) dengan porsi terbesar Jawa Tengah (24,29%) dan Jawa Barat (13,13%). Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi di pulau Jawa berada di wilayah DKI sebesar 10,94% meskipun hanya memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (2,01%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 6,06% melambat dari tahun sebelumnya sebesar 13,60% (yoy).

Sumber dan Penggunaan Dana BPR

DPK BPR pada Desember 2020 tumbuh 6,29% (yoy) mejadi Rp28.422 miliar melambat dibandingkan Desember 2019 sebesar 12,69% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 7,45% (yoy) dan 4,80% (yoy).

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada 2 hal yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 98,81% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 1,19% dari kredit BPR pada Desember 2020. Dilihat dari porsinya, Deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (57,11%) yang pada periode laporan tercatat melambat 5,92% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 11,26%.

Sebaran DPK BPR masih terkonsentrasi di Jawa sebesar Rp64.444 miliar (60,71%) dari total DPK sebesar Rp106.151 miliar. Di Jawa DPK posisi terbesar masih berada di provinsi Jawa Tengah (44,10%), Jawa Barat (21,49%), Jawa Timur (16,74%), DIY (8,89%), Banten (4,90%) dan DKI (3,87%). Sejalan dengan sebaran aset porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (24,29%) dan Jawa Barat (13,13%) dari total aset sebesar Rp155.075 miliar. Jawa Tengah mengalami peningkatan pertumbuhan 5,71% (yoy) sedangkan Jawa Barat mengalami penurunan pertumbuhan sebesar minus 0,51% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar 11,97% dan 9,19%.

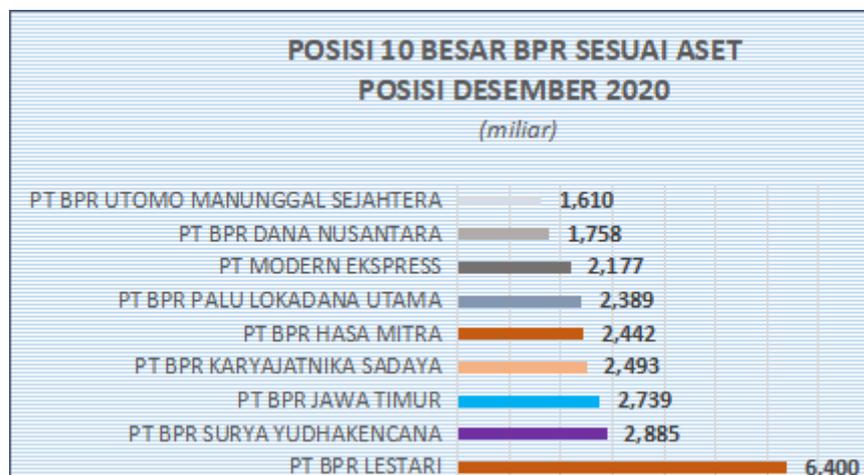


Kinerja kredit BPR di Jawa Tengah pada posisi Desember 2020 masih melambat. Penyaluran kredit di Jawa Tengah pada posisi ini sebesar Rp110.770 miliar, pertumbuhan posisi saat ini sebesar 1,79% lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 9,13% (yoy). Berdasarkan data lokasi Bank penyalur, Jawa Tengah masih memegang porsi teratas sebesar Rp28.082 miliar (25,35%) dari total kredit sebesar Rp110.770 miliar dibanding provinsi lainnya. Pertumbuhan pada posisi laporan saat ini hanya sebesar 4,17% melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,23% (yoy).

4. Perkembangan kinerja BSY

a. Posisi 10 (sepuluh) besar sesuai aset.

Posisi BSY pada bulan Desember 2020 menduduki ranking ke 3 dari 10 aset terbesar secara nasional meningkat dari posisi ke 5 pada Desember 2019. Demikian pula dari pangsa BSY dari total aset 10 besar dimaksud sebesar Rp33.881 miliar semakin meningkat menjadi 8,51% dari 7,60% Desember 2018. Kondisi ini disebabkan pertumbuhan DPK dan Kredit rata-rata 3 tahun terakhir (yoy) masing-masing sebesar 11,39% dan 12,23%.



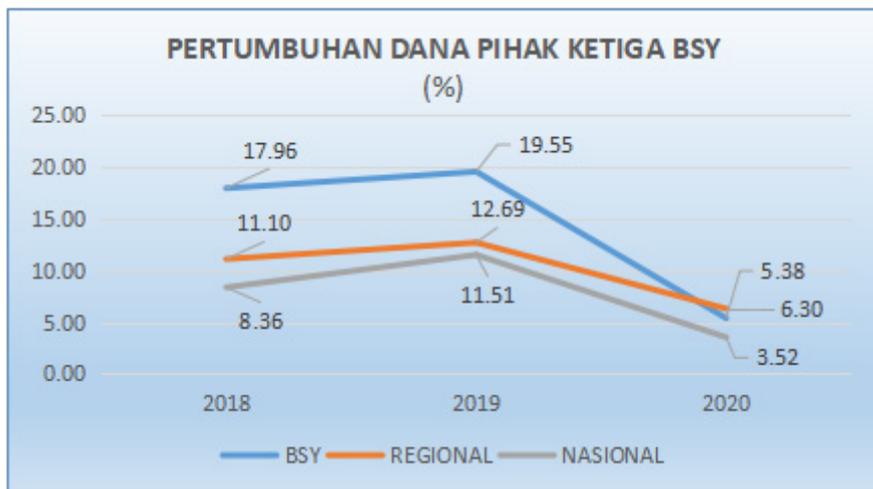
b. **Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)**

DPK BSY tahun 2020 bertumbuh menjadi sebesar Rp1.920 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.822 miliar (yoy). Pertumbuhan rata-rata selama 3 (tiga) tahun sebesar 14,30%. Secara rata-rata pertumbuhan BSY lebih tinggi dari BPR regional maupun nasional. Adapun regional secara rata-rata hanya bertumbuh 10,03% dan nasional 7,89%.

Tabel ...

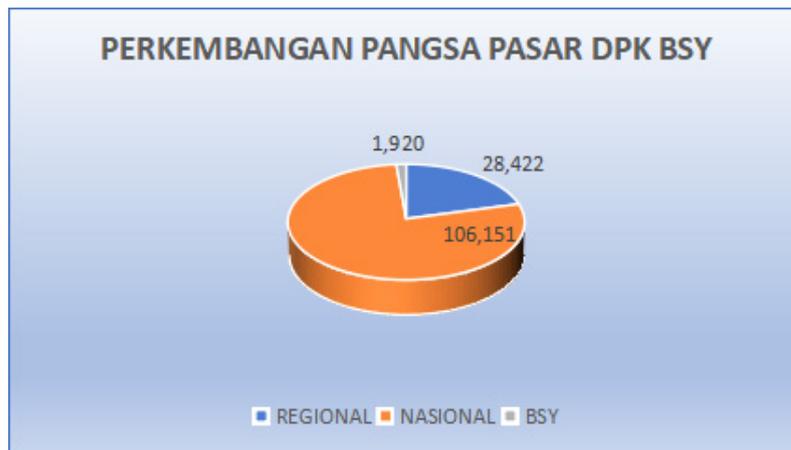
PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA BSY						
						(miliar/persen)
BPR	2018	2019	2020	Pertumbuhan		
				2018	2019	2020
REGIONAL	23.726	26.738	28.422	11,10	12,69	6,30
NASIONAL	91.956	102.538	106.151	8,36	11,51	3,52
BSY	1.524	1.822	1.920	17,96	19,55	5,38

Namun bila dilihat dari sisi pertumbuhan persentase dari tahun sebelumnya BSY mengalami penurunan pertumbuhan dari 19,55% menjadi 5,38% (yoy). Hal ini terjadi juga di BPR regional maupun nasional masing-masing sebesar 6,30% dan 3,52% sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini.



Dari sisi pangsa pasar DPK, posisi BSY terhadap BPR regional (Jawa Tengah) sebesar 6,76% sedangkan terhadap Nasional sebesar 1,81%, sebagaimana tabel di bawah ini :

PERKEMBANGAN PANGSA PASAR DPK BSY						
						(miliar/persen)
BPR	2018	2019	2020	Pangsa Pasar		
				2018	2019	2020
REGIONAL	23.726	26.738	28.422	6,42	6,81	6,76
NASIONAL	91.956	102.538	106.151	1,66	1,78	1,81
BSY	1.524	1.822	1.920			



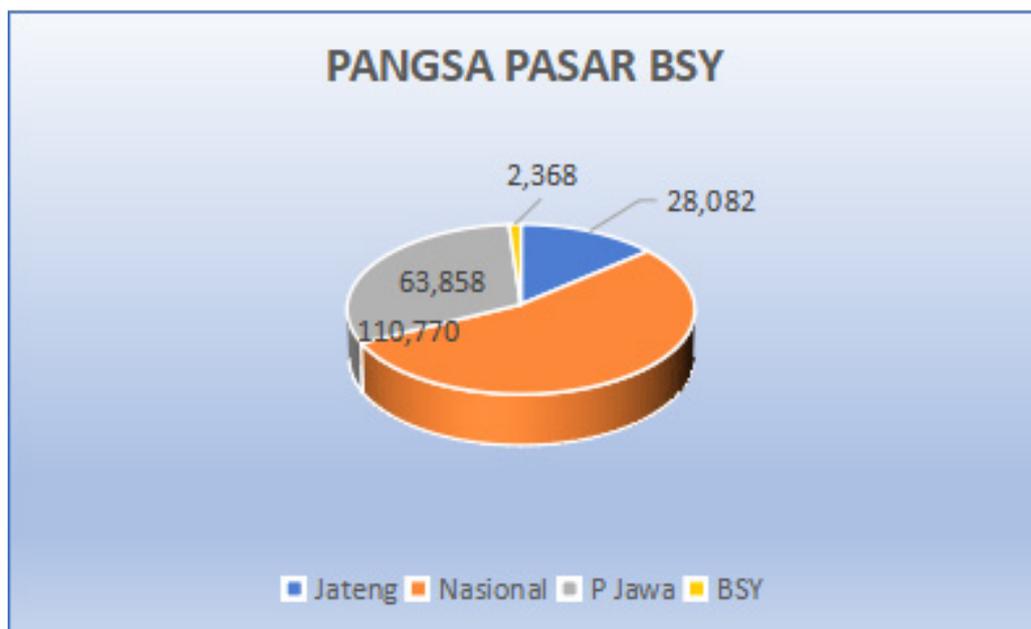
c. **Pertumbuhan Kredit Yang Disalurkan (KYD).**

1) **Kredit Yang Diberikan**

Pada akhir tahun 2020 seluruh indikator perbankan di Jawa Tengah belum mengalami perbaikan kinerja. Termasuk BSY, juga terkena imbasnya dari pandemi Covid-19 yang juga belum berakhir. Dibandingkan tahun sebelumnya pertumbuhan tahunan (yoy) KYD secara nominal menurun dari Rp2.420 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2.368 miliar atau menurun sebesar Rp53 miliar (-2,23%) pada posisi akhir tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini. Diikuti pula dengan menurunnya LDR menjadi 83,82% dari 86,45% pada tahun lalu.

Tabel

PERTUMBUHAN KYD & PANGSA PASAR BSY						
LOKASI	2018	2019	2020	(miliar / persen)		
				Pangsa BSY		
				2018	2019	2020
Jateng	23.620	26.912	28.082	8,56	8,99	8,43
Nasional	98.220	108.784	110.770	2,06	2,22	2,14
P Jawa	53.092	59.367	63.858	3,81	4,08	3,71
BSY	2.023	2.420	2.368			



PERTUMBUHAN KREDIT YANG DISALURKAN BSY						
(miliar / persen)						
LOKASI	2018	2019	2020	Pertumbuhan		
				2018	2019	2020
Jateng	23.620	26.912	28.082	12,40	13,94	4,35
Nasional	98.220	108.784	110.770	9,77	10,76	1,83
P Jawa	53.092	59.367	63.858	10,84	11,82	7,56
BSY	2.023	2.420	2.368	24,95	19,62	-2,15



TINJAUAN PER SEGMENT USAHA

SEGMENT USAHA PEMBIAYAAN

Tahun 2020 adalah tahun terberat setelah masa krisis moneter di tahun 1998. Pandemi Covid-19 yang terjadi memukul perekonomian Indonesia dengan sangat keras sehingga hampir seluruh perbankan di Indonesia mengalami fase berat untuk menjaga kestabilan tingkat kesehatannya. Adanya kebijakan nasional tentang pembatasan mobilitas manusia membuat kegiatan usaha melemah yang menyebabkan tingkat kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban pinjamannya menjadi berkurang atau bahkan hilang.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai stimulus dan relaksasi untuk mempertahankan perekonomian Indonesia dan menjaganya tetap stabil, namun dunia perbankan tetap harus bekerja ekstra mempertahankan kelangsungan usaha.

Di era perekonomian sulit ini, BSY tetap berupaya untuk mempertahankan rasio kredit bermasalah pada batas seminimal mungkin dan berupaya membantu masyarakat untuk dapat bangkit kembali membangun bisnis UMKM. Persaingan kredit yang masih sangat ketat tetap membuat BSY selaku pelaku perbankan harus pandai memanfaatkan situasi dan peluang sekecil mungkin guna mempertahankan kelangsungan perusahaan, khususnya di tengah pandemi seperti saat ini.

Pada tahun 2020 pelepasan kredit BSY berada pada angka Rp2.368 miliar, mengalami penurunan sebesar 2,17% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.420 miliar. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pandemi yang mengakibatkan permintaan kredit dari masyarakat dan dunia usaha tak terkecuali para pelaku UMKM mengalami perlambatan, atau bahkan tidak mampu beroperasi. Selain itu faktor kehati-hatian bank dalam menjaga risiko peningkatan rasio kredit bermasalah juga berpengaruh terhadap penurunan kredit di tahun 2020. Di sisi lain pertumbuhan kredit pada tahun 2020 sangat sulit dilakukan juga karena program restrukturisasi yang dijalankan oleh bank. Di tengah ketidakpastian yang tinggi masyarakat cenderung memilih menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya daripada menggunakan fasilitas kredit dari perbankan.

Dari penyaluran kredit pada tahun 2020 berdasarkan jenis penggunaannya prosentase terbesar dalam pembiayaannya yaitu dari Kredit Modal Kerja dengan persentase 70,41% dengan jumlah nominal yang disalurkan Rp1.667 miliar. Sedangkan untuk Kredit Investasi prosentase 11,63% dengan nominal Rp275 miliar dan untuk Kredit Konsumsi prosentase 17,95% dengan nominal Rp425 miliar. BSY dalam menyalurkan kredit dengan prinsip "One Day Service" yang memberikan layanan prima dengan proses yang cepat tetapi tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit.

Kredit Modal Kerja

Jumlah Kredit Modal Kerja pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.667.471 juta, meningkat 1,04% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.650.235 juta. Kredit modal kerja lebih berorientasi pada sektor UMKM maupun *corporate*. Di BSY sektor yang paling banyak dalam penyaluran kredit modal kerja adalah sektor industri, dengan kenaikan sebesar Rp45.365 juta atau sebesar 19,10% dari tahun 2019 yakni sebesar Rp237.483 juta. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya pemberian kredit untuk sektor industri seperti industri pengolahan kayu dimana untuk keperluan ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan domestik, sektor industri di dalamnya bisa meliputi industri properti dimana diketahui usaha konstruksi dan properti merupakan jenis usaha yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya seperti penyediaan tempat hunian maupun bangunan komersil seperti tempat perbelanjaan perkantoran dan sejenisnya. Selain itu untuk tahun 2020 BSY masih bekerjasama dengan beberapa BPR memberikan pinjaman kredit modal kerja dalam bentuk kredit sindikasi kepada beberapa nasabah.

NO	POS-POS	TAHUN (dalam jutaan Rp)		KENAIKAN
		2019	2020	
MODAL KERJA				
1	Pertanian	119.157	123.630	4.473
2	Industri	237.483	282.848	45.365
3	Perdagangan, restoran/ rumah makan & hotel/ penginapan	649.666	630.901	(18.764)
4	Jasa	579.945	558.222	(21.722)
5	Lainnya	63.986	71.869	7.883
Jumlah Kredit Modal Kerja		1.650.236	1.667.471	17.234,92

Kredit Investasi

Jumlah Investasi pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp275.527 juta, menurun 13,58% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp318.831 juta. Seperti telah diketahui pada tahun 2020 dampak pandemik secara tidak langsung sangat menghambat pertumbuhan kredit khususnya penggunaan untuk investasi terutama ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi, selain itu kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui insentif fiskal diharapkan dapat menjaga pertumbuhan kredit investasi kedepannya.

NO	POS-POS	TAHUN (dalam jutaan Rp)		Kenaikan
		2019	2020	
INVESTASI				
1	Pertanian	38.922	33.881	(5.041)
2	Industri	48.563	28.233	(20.330)
3	Perdagangan, restoran/rumah makan & hotel/ penginapan	78.929	68.662	(10.268)
4	Jasa	139.213	131.722	(7.491)
5	Lainnya	13.203	13.030	(174)
Jumlah Kredit Investasi		318.831	275.527	(43.304)

Kredit Konsumsi

Jumlah Kredit Konsumsi pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp425.211 juta, turun 5,85% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp451.608 juta. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan banyak debitur yang kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Dampaknya, kemampuan mereka membayar kembali pinjamannya juga menurun jauh. Secara umum kondisi perekonomian pada tahun 2020 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur sehingga mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

NO	POS-POS	TAHUN (dalam jutaan Rp)		Kenaikan
		2019	2020	
KONSUMSI				
1	Pertanian	16.472	19.563	3.091
2	Industri	3.966	5.065	1.099
3	Perdagangan, restoran/ rumah makan & hotel/ penginapan	56.909	64.248	7.339
4	Jasa	114.652	117.442	2.789
5	Lainnya	259.609	218.893	(40.716)
Jumlah Kredit Konsumsi		451.608	425.211	(26.398)

Jumlah Kredit Kepemilikan kendaraan bermotor pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp26.398 juta atau sebesar 7,22% dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang cenderung menurun akibat pandemi khususnya saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana hampir sebagian kegiatan perekonomian berhenti, selain itu dari faktor internal BSY lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan baru khususnya untuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor dan multiguna.

NO	POS-POS	TAHUN (dalam jutaan Rp)		Kenaikan
		2019	2020	
KONSUMSI				
1	Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor	115.084	132.700	17.615
2	Kredit Multiguna	336.524	292.511	(44.013)
Jumlah Kredit Konsumsi		451.608	425.211	(26.398)

DATA KREDIT YANG DIBERIKAN BERDASARKAN SEGMENT DAN SEKTOR EKONOMI

NO	POS-POS	TAHUN (dalam jutaan Rp)	
		2019	2020
	USAHA MIKRO		
1	Pertanian	144.671	129.523
2	Perindustrian	34.882	28.862
3	Perdagangan, restoran/rumah makan & hotel/ penginapan	410.280	245.814
4	Jasa-jasa	190.446	127.191
5	Lain-lain	90.903	44.345
	Jumlah Kredit Usaha Mikro	871.182	575.735
	USAHA KECIL		
1	Pertanian	20.879	31.052
2	Perindustrian	46.695	33.505
3	Perdagangan, restoran/rumah makan & hotel/ penginapan	158.457	197.730
4	Jasa-jasa	136.522	128.054
5	Lain-lain	41.009	25.066
	Jumlah Kredit Usaha Kecil	403.561	415.406
	USAHA MENENGAH		
1	Pertanian	7.197	8.768
2	Perindustrian	187.397	251.398
3	Perdagangan, restoran/rumah makan & hotel/ penginapan	209.202	285.653
4	Jasa-jasa	387.924	442.845
5	Lain-lain	14.854	35.918
	Jumlah Kredit Usaha Menengah	806.573	1.024.582
	USAHA MENENGAH		
1	Pertanian	1.805	7.731
2	Perindustrian	21.540	2.381
3	Perdagangan, restoran/rumah makan & hotel/ penginapan	7.064	34.614
4	Jasa-jasa	118.919	109.296
5	Lain-lain	190.032	198.462
	Jumlah Kredit	339.359	352.485

Sektor jasa menjadi sektor usaha terbesar di BSY dengan prosentase 34,09% atau sebesar Rp807.385 juta. Sektor jasa adalah bagian utama yang tidak bisa dilepaskan dari sistem perekonomian suatu daerah selain perdagangan dan industri. Sektor jasa merupakan salah satu sumber lapangan kerja. Sektor jasa berperan penting dalam peningkatan

daya saing industri, peran teknologi dan kualitas SDM merupakan kunci utama dalam peningkatan sektor jasa. Seiring dengan kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam pengembangan serta perbaikan infrastruktur turut andil dalam peningkatan di sektor jasa.

PEROLEHAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)

Walaupun dalam masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, perolehan dana pihak ketiga BSY mengalami kenaikan dibandingkan dengan perolehan tahun 2019 baik produk Tabungan maupun Deposito sehingga dapat dikatakan bahwa BSY memiliki kinerja yang baik dalam bidang dana walaupun dalam pemenuhan target Tabungan dan Deposito hanya Tabungan saja yang mencapai target di Tahun 2020. Dalam melakukan upaya perolehan dana pihak ketiga di masyarakat, BSY terus melakukan upaya mendapatkan nasabah baru secara berkesinambungan, dan meyakini bahwa apabila nasabah baru semakin bertambah, maka pengelolaan dana akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah nasabah baru. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan perolehan dana jangka panjang, baik dalam bentuk Tabungan berjangka maupun Deposito. Tabungan berjangka yang dimiliki BSY dengan pengendapan dana yang cukup lama antara lain berupa Tabungan Arisan Surya (36 bulan), Tabungan Hari Tua (60 bulan), Tabungan Umroh (12 sampai dengan 60 bulan) Tabungan Piknik (36 dan 60 bulan), atau dapat pula menggunakan Tabungan Surya berhadiah (jangka waktu minimalnya adalah 3 bulan).

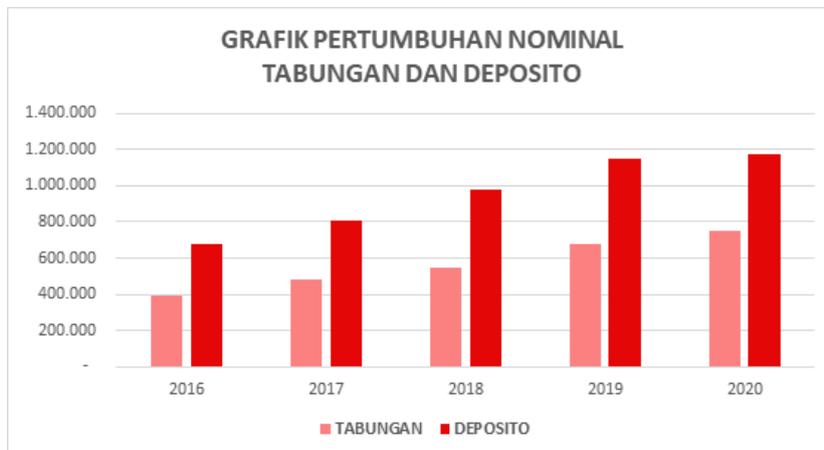
Tabel data nasabah tabungan dan deposito tahun 2016 s.d. 2020

KETERANGAN	NASABAH					PERTUMBUHAN (%)			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
TABUNGAN	179.702	209.773	234.470	256.631	269.030	16,73	11,77	9,45	4,83
DEPOSITO	8.616	9.694	10.778	11.655	12.027	17,44	11,18	8,13	3,19



Tabel data nominal tabungan dan deposito tahun 2016 s.d. 2020

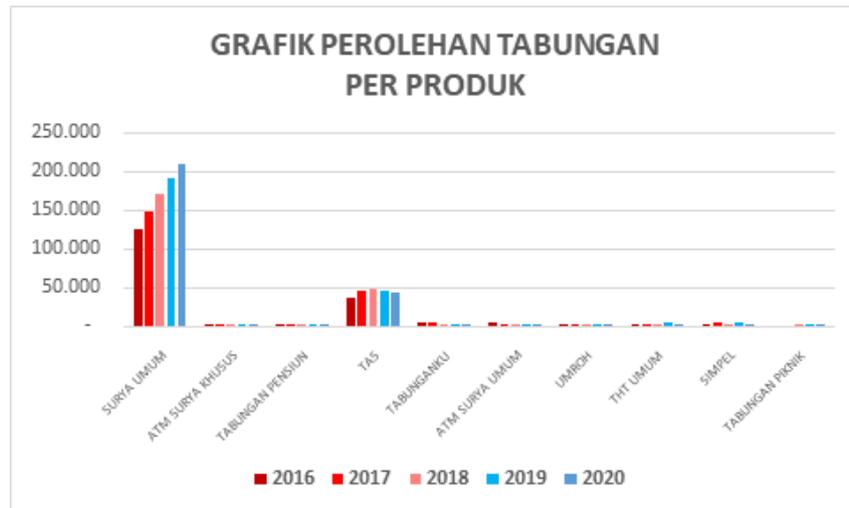
KETERANGAN	NOMINAL (dalam jutaan Rp)					PERTUMBUHAN (%)			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
TABUNGAN	396.360	483.801	545.989	674.404	749.556	22,05	12,85	23,51	11,14
DEPOSITO	679.476	808.422	977.680	1.147.622	1.170.018	18,97	20,93	17,38	1,95



Dari perolehan tabungan sebesar Rp674.404 juta di tahun 2019 naik menjadi Rp749.556 juta di tahun 2020 diikuti dengan kenaikan jumlah nasabah dari 256.631 nasabah di tahun 2019 menjadi 269.030 nasabah di tahun 2020, yang tumbuh sebesar 11,14%. Sedangkan perolehan deposito di tahun 2020 tumbuh sebesar 1,95% yaitu nominal deposito yang semula sebesar Rp1.147.622 juta di tahun 2019 naik menjadi Rp1.170.018 juta di tahun 2020 dengan jumlah nasabah di tahun 2019 sebanyak 11.655 nasabah, di tahun 2020 naik menjadi 12.027 nasabah. Pertumbuhan tabungan dan deposito di tahun 2020 terjadi karena adanya penambahan jumlah nasabah baru dan juga karena adanya peningkatan saldo tabungan berjangka.

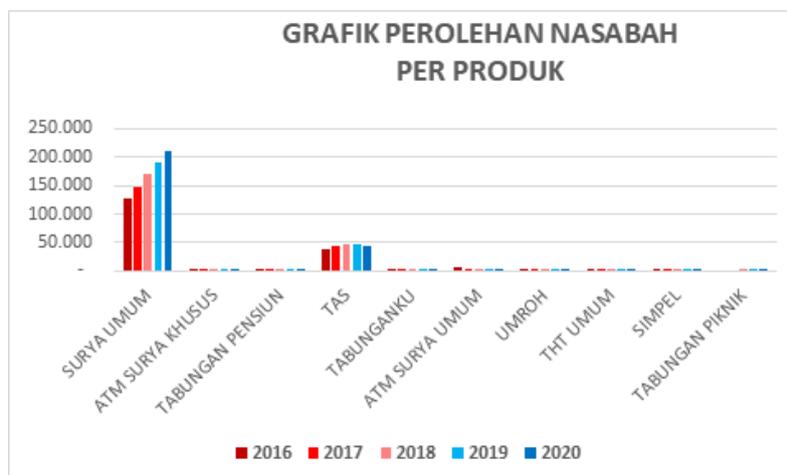
Tabel data nominal produk tabungan 2016 s.d. 2020

KETERANGAN	NOMINAL (dalam jutaan Rp)					PERTUMBUHAN (%)			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
TABUNGAN									
SURYA UMUM	278.466	346.537	401.861	482.754	546.537	24,44	15,96	20,12	13,21
ATM SURYA KHUSUS	24.703	16.604	18.955	30.683	42.974	-32,78	14,15	61,87	40,05
TABUNGAN PENSIUN	16.567	20.930	25.399	29.817	34.166	26,33	21,35	17,39	14,58
TAS	54.445	67.387	68.054	92.336	88.407	23,77	0,98	35,68	-4,25
TABUNGANKU	7.189	7.563	6.789	6.465	7.148	5,20	-10,23	-4,77	10,56
ATM SURYA UMUM	10.150	15.813	10.513	8.292	5.608	55,79	-33,51	-21,12	-32,36
UMROH	1.509	1.608	1.867	2.292	2.329	6,56	16,10	22,76	1,61
THT UMUM	3.117	6.711	11.224	16.442	12.622	115,30	67,24	46,48	-23,23
SIMPEL	210	633	578	635	604	201,42	-8,68	9,86	-4,88
TABUNGAN PIKNIK	0	0	746	4.683	9.157	0	100	527,74	95,53
TOTAL	396.360	483.801	545.989	674.404	749.556	22,05	12,85	23,51	11,14



Tabel data nasabah produk tabungan tahun 2016 s.d. 2020

KETERANGAN	JUMLAH NASABAH					PERTUMBUHAN (%)			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
TABUNGAN									
SURYA UMUM	126.193	147.294	170.878	191.477	209.547	16,72	16,01	12,05	9,43
ATM SURYA KHUSUS	1.036	1.131	1.290	1.379	1.374	9,16	14,05	6,89	-0,36
TABUNGAN PENSIUN	634	692	748	832	878	9,14	8,09	11,22	5,52
TAS	36.983	45.533	47.718	47.039	43.784	23,11	4,79	-1,42	-6,91
TABUNGANKU	4.630	3.872	3.458	3.183	2.791	-16,37	-10,69	-7,95	-12,31
ATM SURYA UMUM	5.662	3.738	2.686	1.975	1.490	-33,98	-28,14	-26,47	-24,55
UMROH	220	233	241	253	210	5,90	3,43	4,90	-16,90
THT UMUM	2.229	2.936	3.621	4.087	3.344	31,71	23,33	12,86	-18,10
SIMPEL	2.115	4.344	3.830	4.295	3.519	105,30	-11,83	12,14	-18,00
TABUNGAN PIKNIK	0	0	1.959	2.111	2.093	0	100	7,75	-0,85
TOTAL	179.702	209.773	234.470	256.631	269.030	16,73	11,77	9,45	4,83



1. Tabungan Surya

Tabungan Surya mengalami peningkatan sebesar 13,21% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perolehan Tabungan Surya sebesar Rp482.754 juta di tahun 2019 naik menjadi Rp546.537 juta di tahun 2020, dengan kenaikan nasabah dari 191.477 di tahun 2019 menjadi 209.547 di tahun 2020. Kenaikan perolehan Tabungan Surya terjadi karena adanya prospek nasabah baru secara terus menerus, terutama pada wilayah yang belum maksimal terjangkau pelayanan. Prospek nasabah baru dilakukan dengan menggunakan metode jemput bola tentunya dengan pengetatan protocol kesehatan karena masa pandemi.

2. ATM Surya Khusus

Tabungan ATM Surya Khusus mengalami peningkatan sebesar 40,05% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perolehan Tabungan ATM Surya Khusus sebesar Rp30.683 juta di tahun 2019 naik menjadi Rp42.974 juta di tahun 2020, namun ada penurunan jumlah nasabah dari 1.379 di tahun 2019 menjadi 1.374 di tahun 2020.

Pertumbuhan Tabungan ATM Surya Khusus dipengaruhi oleh adanya pembagian Uang Prestasi Kerja karyawan di akhir tahun 2020, karena produk tabungan ini adalah produk tabungan yang dikhususkan untuk penampungan gaji atau hak upah karyawan BSY.

3. Tabungan ATM Surya Umum

Tabungan ATM Surya Umum mengalami penurunan sebesar 32,36% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perolehan Tabungan ATM Surya Umum sebesar Rp8.292 juta di tahun 2019 turun menjadi Rp5.608 juta di tahun 2020, dengan penurunan jumlah nasabah dari 1.975 di tahun 2019 menjadi 1.490 di tahun 2020.

Produk ini di tahun 2020 mengalami penurunan karena BSY tidak dapat lagi melakukan pembukaan rekening Tabungan ATM karena terbentur ketentuan perizinan sebagai penerbit kartu ATM *issuer*.

4. Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun mengalami peningkatan sebesar 14,58% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perolehan Tabungan Pensiun sebesar Rp29.187 juta di tahun 2019 naik menjadi Rp34.166 juta di tahun 2020, dengan kenaikan nasabah dari 832 di tahun 2019 menjadi 878 di tahun 2020.

Sama halnya dengan Tabungan ATM Surya Khusus, kenaikan Tabungan Pensiun dikarenakan adanya kewajiban penyetoran setiap bulan sebesar 10% dari gaji/upah lainnya yang diterima karyawan. Selain itu peningkatan jumlah nasabah Tabungan Pensiun menunjukkan adanya peningkatan jumlah karyawan tetap di BSY.

5. Tabungan Arisan Surya (TAS)

TAS mengalami penurunan sebesar 4,25% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perolehan TAS sebesar Rp92.336 juta di tahun 2019 turun menjadi Rp88.407 juta di tahun 2020, dengan penurunan nasabah dari 47.039 di tahun 2019 menjadi 43.784 di tahun 2020.

Penurunan nominal TAS di tahun 2020 terjadi karena adanya kelompok TAS jatuh tempo sebanyak 93 kelompok.

6. Tabunganku

Tabunganku mengalami kenaikan sebesar 10,56% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perolehan Tabunganku sebesar Rp6.465 juta di tahun 2019 naik menjadi Rp7.148 juta di tahun 2020, namun untuk jumlah nasabah mengalami penurunan dari 3.183 di tahun 2019 menjadi 2.791 di tahun 2020.

Jumlah nasabah Tabunganku mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) sehingga sesuai intruksi OJK bahwa rekening Tabunganku yang ada di sekolah untuk dipindahkan ke rekening Tabungan Simpel.

7. Tabungan Umroh

Tabungan Umroh mengalami peningkatan sebesar 1,61% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perolehan Tabungan Umroh sebesar Rp2.292 juta di tahun 2019 naik menjadi Rp2.329 juta di tahun 2020, namun untuk jumlah nasabah mengalami penurunan dari 253 di tahun 2019 menjadi 210 di tahun 2020.

Peningkatan nominal Tabungan Umroh terjadi karena adanya setoran rutin setiap bulan dari para nasabahnya, dan Tabungan Umroh merupakan tabungan berjangka sehingga saldo tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Sedangkan penurunan jumlah nasabah terjadi karena terdapat nasabah yang jatuh tempo di tahun 2020, namun belum dapat ditutup dengan jumlah perolehan nasabah baru.

8. Tabungan Hari Tua (THT)

Tabungan Hari Tua mengalami penurunan sebesar 23,23% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perolehan THT sebesar Rp16.442 juta di tahun 2019 turun menjadi Rp12.662 juta di tahun 2020, diikuti dengan penurunan dari 4.087 di tahun 2019 menjadi 3.344 di tahun 2020.

Penurunan ini disebabkan karena di tahun 2020 terdapat Tabungan Hari Tua yang jatuh tempo namun belum dapat ditutup dengan jumlah perolehan nasabah baru.

9. Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)

Tabungan Hari Tua mengalami penurunan sebesar 23,23% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perolehan THT sebesar Rp16.442 juta di tahun 2019 turun menjadi Rp12.662 juta di tahun 2020, diikuti dengan penurunan dari 4.087 di tahun 2019 menjadi 3.344 di tahun 2020.

Penurunan ini disebabkan karena di tahun 2020 terdapat Tabungan Hari Tua yang jatuh tempo namun belum dapat ditutup dengan jumlah perolehan nasabah baru.

10. Tabungan Piknik

Tabungan Piknik mengalami kenaikan nominal sebesar 95,53% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perolehan Tabungan Piknik sebesar Rp4.683 juta di tahun 2019 naik menjadi Rp9.157 juta di tahun 2020, namun mengalami penurunan jumlah nasabah dari 2.111 di tahun 2019 menjadi 2.093 di tahun 2020.

Peningkatan nominal Tabungan Piknik terjadi karena adanya setoran rutin setiap bulan dari para nasabahnya, dan Tabungan Piknik merupakan tabungan berjangka sehingga saldo tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Sedangkan penurunan jumlah nasabah terjadi karena terdapat nasabah yang jatuh tempo di tahun 2020, namun belum dapat ditutup dengan jumlah perolehan nasabah baru.

11. Deposito

Produk Deposito mengalami pertumbuhan sebesar 1,95% dari tahun 2019 ke tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.395 juta dari perolehan Deposito sebesar Rp1.147.622 juta di tahun 2019 naik menjadi Rp1.170.018 juta di tahun 2020, dengan kenaikan nasabah dari 11.655 di tahun 2019 menjadi 12.027 di tahun 2020. Memang pertumbuhan untuk tahun 2020 tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya hal ini masih sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.

Walaupun pertumbuhan tidak *signifikan*, namun produk Deposito dapat terus tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah Deposito baru. BSY terus melakukan prospek nasabah baru, menawarkan adanya kelebihan dari produk Deposito Berhadiah.



KINERJA KEUANGAN

ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari Neraca dan Laba rugi. Laporan keuangan BSY untuk tahun buku 2020 diaudit oleh KAP Heliantono dan rekan. Dengan telah diauditnya laporan keuangan BSY maka dapat diyakini bahwa angka yang disajikan di Neraca dan Laba rugi adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan konsolidasi dimana kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual. Laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Tabel Aset BSY (dalam jutaan Rp)

KETERANGAN	REALISASI			PERTUMBUHAN (%)	
	2018	2019	2020	2019	2020
ASET	2.279.720	2.864.344	2.884.929	25,64	0,72

ASET

Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas. Aset disini merupakan sumber daya yang dimiliki BPR dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat di masa depan. Di tahun 2020 aset BSY adalah Rp2.884.929 juta. Aset terdiri dari kas, penempatan pada bank lain (PPBL), kredit yang diberikan, aset tetap dan inventaris, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Aset BSY di akhir tahun 2020 naik sebesar 0,72% atau naik sebesar Rp20.585 juta dibanding tahun 2019.

Tabel Aktiva BSY (dalam jutaan Rp)

Keterangan	2019	2020	Mutasi	%
Kas	15.743	18.206	2.463	15,65%
Penempatan Bank Lain	436.406	413.310	(23.096)	-5,29%
Netto Kredit yang diberikan	2.393.176	2.344.998	(48.178)	-2,01%
Kredit Yang Diberikan	2.420.675	2.368.208	(52.467)	-2,17%
Provisi Kredit Yang Diberikan	(27.508)	(23.214)	4.294	-15,61%
By Transaksi Kredit yang Diberikan	9	4	(5)	-55,56%
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(49.919)	(47.864)	2.055	-4,12%
AYDA	0	55.000	55.000	100,00%
Aktiva Tetap Inventaris	52.741	51.183	(1.558)	-2,95%
Akumulasi Penyusutan	(29.970)	(31.528)	(1.558)	5,20%
Aset tidak berwujud	2.236	2.339	103	4,61%
Akumulasi Penyusutan	(1.794)	(2.068)	(274)	15,27%
Aset lain-lain	45.725	81.353	35.628	77,92%
Total Aset	2.864.344	2.884.929	20.585	0,72%

1. Kas

Kas adalah seluruh uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Posisi kas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.206 juta, naik sebesar Rp2.463 juta atau 15,65% bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 yaitu Rp15.743 juta. Posisi kas terhadap jumlah aset bank adalah sebesar 0,63%. Menunjukkan bahwa BSY dalam pengelolaan kas bisa diukur secara efisien atas penggunaan terhadap aset sehingga dalam perputaran kas tetap terjaga dengan baik.
2. Penempatan Pada Bank Lain (PPBL)

Penanaman dana pada bank lain dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berjangka dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dan untuk menjaga likuiditas. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan.

Posisi Penempatan Pada Bank Lain, per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp413.310 juta, turun sebesar Rp23.096 juta atau kurang dari 5,29% dibanding dengan posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp436.406 juta, sedangkan posisi penempatan pada Bank lain terhadap jumlah Aset adalah sebesar 14,33%

Penempatan Pada Bank Lain BSY dilakukan antara lain dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito baik pada Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3. Kredit Yang Diberikan (netto)

Kredit adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan/ perjanjian pinjam meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dilihat dari jenis penggunaannya terdapat 3 (tiga) jenis kredit yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Kredit menurut kualitasnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu performing (kredit dengan kualitas lancar dan DPK) dan non performing (kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, macet).

Posisi Kredit Yang Diberikan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.344.998 juta, turun sebesar Rp48.178 juta atau kurang dari 2,01% dibanding dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp2.393.176, sedangkan posisi netto Kredit Yang Diberikan terhadap jumlah Aset sebesar 81,28%. Penurunan kredit disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga mempengaruhi pada perekonomian secara nasional.
4. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

PPAP dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi sehubungan dengan penanaman dana dalam bentuk kredit dan penempatan pada bank lain. Perhitungan PPAP yang dibentuk BPR sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK.

PPAP yang disajikan disini meliputi PPAP ABA dan PPAP Kredit. Posisi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.864 juta, turun sebesar Rp2.055 juta atau kurang dari 4,12% dibanding dengan posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp49.919 juta, sedangkan posisi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif terhadap Aset adalah sebesar 1,66%. Penurunan pembentukan PPAP disebabkan adanya penerapan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam POJK No.34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi BPR dampak penyebaran Corona virus Disease 2019 pada pasal 2 a. atas pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, dan BSY melakukan penerapan kebijakan tersebut pada PPAP umum KYD dan PPBL dalam akhir tahun 2020 tidak melakukan pembentukan.
5. Aktiva Tetap Inventaris (nilai buku)

Aktiva Tetap dan Inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki BPR meliputi tanah, bangunan dan inventaris. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dan disusutkan secara sistematis selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Aktiva Tetap dan Inventaris disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Posisi Aktiva tetap inventaris (nilai buku) per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp19.655 juta, turun sebesar Rp3.116 juta atau kurang dari 13,68% dibanding dengan posisi 31 Desember 2019 yaitu Rp22.771 juta, sedangkan posisi Aktiva Tetap Inventaris terhadap Aset sebesar 0,68%. Penurunan Aset Tetap Inventaris di tahun 2020 disebabkan adanya kebijakan Manajemen yang mengeluarkan ketentuan atas pemutihan ATI sesuai dengan Surat Edaran NO.24A/DIR/A/IV/2019 tentang Pengakuan Aset Tetap dan Inventaris, Penjualan, Pemindahan, Penghapusan dan

Pemutihan. Sehingga atas kebijakan tersebut untuk ATI yang rusak dan hilang di tahun 2020 dilakukan penghapusan ATI, disamping itu BSY tidak ada penambahan Aset Tetap Inventaris secara material.

6. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud dicatat sebesar harga perolehan dan disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Posisi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp271 juta, turun sebesar Rp171 juta atau kurang dari 38,69% dibanding dengan posisi 31 Desember 2019 yaitu Rp442 juta. Penurunan di tahun 2020 disebabkan tidak ada penambahan Aset Tidak Berwujud namun hanya melakukan penyusutan.

7. Aset Lain-Lain

Aset lain- lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok aset yang ada. Komponen aset lain- lain adalah pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka dan aset lainnya.

Posisi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp81.353 juta, naik sebesar Rp35.628 juta atau sekitar 77,92% dibanding dengan posisi 31 Desember 2019 yaitu Rp45.725 juta, sedangkan posisi Aset Lain-Lain terhadap total Aset sebesar 2,82%. Kenaikan aset lain-lain disebabkan adanya kebijakan penerapan stimulus kredit yang mengakibatkan PYAD naik.

KEWAJIBAN/LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS/KEWAJIBAN

Kewajiban disajikan sesuai urutan jatuh temponya. Kewajiban adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu. Pos-pos kewajiban yang dimiliki BPR terdiri dari kewajiban segera, utang bunga, utang pajak, simpanan pihak ketiga, simpanan dari bank lain dan pinjaman yang diterima.

Liabilitas BSY tahun 2020 sebesar Rp2.490.836 juta mengalami penurunan sebesar Rp1.602 juta atau kurang dari 0,06% dibanding liabilitas tahun 2019. Penurunan liabilitas di tahun 2020 disebabkan adanya penurunan pinjaman diterima dari bank lain.

Tabel Liabilitas & Ekuitas (dalam jutaan Rp)

Keterangan	2019	2020	Mutasi	Pencapaian (%)
Liabilitas				
Kewajiban Segera	9.874	10.975	1.101	11,15%
Utang Bunga	6.016	5.153	(863)	-14,35%
Utang Pajak	-	-	0	-
Netto Tabungan	674.383	749.536	75.153	11,14%
Tabungan	674.405	749.556	75.151	11,14%
Tabungan Biaya Transaksi	(22)	(20)	2	-9,09%
Netto Deposito	1.147.121	1.169.485	22.364	1,95%
Deposito	1.147.623	1.170.018	22.395	1,95%
Deposito Biaya Transaksi	(502)	(533)	(31)	6,18%
Simpanan dari Bank Lain	55.591	64.309	8.718	15,68%
Pinjaman Diterima	599.284	490.664	(108.620)	-18,12%
KWS lain lain	169	714	545	322,49%
Total Liabilitas	2.492.438	2.490.836	(1.602)	-0,06%

1. Kewajiban Segera

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Kewajiban segera terdiri dari kewajiban segera kepada pemerintah dan kewajiban segera lainnya seperti kewajiban segera ATM, kewajiban segera fee ATM dan titipan nasabah.

Pos Kewajiban Segera pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.975 juta naik sebesar Rp1.101 juta atau 11,15% dibanding tahun 2019 yaitu Rp9.874 juta. Kenaikan kewajiban segera disebabkan oleh naiknya kewajiban kepada pemerintah yaitu PPh pasal 4(2) dan PPh 25.

2. Utang Bunga

Utang bunga menyajikan kewajiban bunga yang timbul dari pengakuan biaya bunga, termasuk didalamnya bunga atas deposito yang telah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah. Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

Pos Utang Bunga per Desember 2020 sebesar Rp5.153 juta, mengalami penurunan sebesar Rp863 juta atau kurang dari 14,35% dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp6.016 juta. Penurunan utang bunga disebabkan adanya nominal pinjaman pada bank lain dan suku bunga dana pihak ketiga mengalami penurunan.

3. Utang Pajak

Utang pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang/ selisih kurang atas penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak. Utang pajak diakui sebesar jumlah yang harus dibayar ke kas negara.

Pada akhir tahun 2020 tidak terdapat utang pajak karena sesuai dengan PMK No.215 bahwa perhitungan pajak dihitung dari laba kotor akhir bulan dan pembayaran pajak sesuai dengan besarnya taksiran pajak sehingga tidak ada lagi kekurangan pembayaran pajak.

4. Tabungan (netto)

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito pihak ketiga. Saldo tabungan disajikan sejumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan. Saldo deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.

Pos Tabungan (netto) untuk posisi tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp749.536 juta meningkat sebesar Rp75.153 juta atau naik sekitar 11,14% jika dibandingkan nominal tabungan (netto) di tahun 2019 yang sebesar Rp674.383 juta.

5. Deposito

Pos Deposito (netto) untuk posisi tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.169.485 juta, meningkat sebesar Rp22.364 juta atau naik sekitar 1,95% jika dibandingkan nominal deposito (netto) di tahun 2019 yang sebesar Rp1.147.121 juta.

6. Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain dalam bentuk tabungan dan deposito.

Pos Simpanan dari Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp64.309 juta atau naik sebesar Rp8.718 juta dibanding tahun 2019 yaitu Rp55.591 juta. Kenaikan simpanan dari bank lain dalam bentuk deposito dan tabungan.

7. Pinjaman Diterima (netto)

Yang termasuk dalam pinjaman diterima disini adalah pinjaman yang diterima BPR baik itu dari bank umum maupun dari pihak ketiga dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai persyaratan perjanjian pinjaman. Bunga pinjaman yang diterima oleh BSY adalah tidak flat mengambang, dimana besarnya angsuran bunga dihitung dari bakidebet pinjaman dengan suku bunga berubah - ubah mengikuti suku bunga yang berlaku.

Pos Pinjaman Diterima untuk akhir tahun 2020 yaitu sebesar Rp490.664 juta, turun sebesar Rp108.620 juta atau kurang dari 18,12% jika dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu Rp599.284 juta. Pinjaman diterima mengalami penurunan dikarenakan BSY di tahun 2020 tidak ada penambahan pinjaman diterima dari bank lain sedangkan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan.

EKUITAS

Ekuitas di neraca disubklasifikasikan pada pos-pos ekuitas meliputi modal dasar, modal yang belum disetor, cadangan umum, laba tahun lalu, laba berjalan.

Pada tahun 2020, total Ekuitas tercatat sebesar Rp394.093 juta meningkat sebesar 5,97% dibanding tahun 2019 yang tercatat Rp371.906 juta.

Pada tahun 2020 tidak terdapat penambahan modal disetor, dari pembagian deviden.

Tabel Ekuitas BSY (dalam jutaan Rp)

Keterangan	2019	2020	Mutasi	(%)
Modal Dasar	300.000	300.000	0	0,00%
Modal yang Belum Disetor	(65.000)	(65.000)	0	0,00%
Cadangan Umum	47.000	47.000	0	0,00%
Laba yang Belum Ditentukan Tujuannya	89.906	112.093	22.187	24,68%
Total Ekuitas	371.906	394.093	22.187	5,97%

LAPORAN LABA RUGI

Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang dari kegiatan utama BPR dan kegiatan utama lainnya.

Pendapatan dibedakan antara pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

Sedangkan untuk pendapatan operasional itu sendiri terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.

Beban terdiri dari beban operasional dan beban non operasional.

Tabel Laba/Rugi BSY (dalam jutaan Rp)

Keterangan	2019	2020	Mutasi	Pencapaian (%)
Pendapatan				
Pendapatan Bunga	404.184	368.221	(35.963)	-8,90%
Pendapatan Operasional lainnya	22.289	29.872	7.583	34,02%
Pendapatan Non Operasional	808	527	(281)	-34,78%
Jumlah Pendapatan	427.281	398.620	(28.661)	-6,71%
Beban				
Beban Bunga	155.348	162.899	7.551	4,86%
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	17.561	10.949	(6.612)	-37,65%
Beban Pemasaran	6.203	5.488	(715)	-11,53%
Beban Penelitian dan Pengembangan	74	28	(46)	-62,16%
Biaya Administrasi Dan Umum	134.566	132.734	(1.832)	-1,36%
Beban Operasional Lainnya	5.677	5.462	(215)	-3,79%
Beban Non Operasional	1.415	1.184	(231)	-16,33%
Jumlah Beban	320.844	318.744	(2.100)	-0,65%
Laba Sebelum Pajak	106.437	79.876	(26.561)	-24,95%
Taksiran Pajak	26.784	17.689	(9.095)	-33,96%
Laba Setelah Pajak	79.653	62.187	(17.466)	-21,93%
Laba Per Saham	0,34	0,26	(0,08)	-23,53%

Pada tahun 2020, BSY membukukan laba bersih sebesar Rp62.187 juta atau turun sebesar 21,93% dari tahun 2019 yaitu Rp79.653 juta.

1. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana pada aset produktif, termasuk didalamnya pendapatan provisi. Pendapatan atas bunga kredit diakui secara akrual dan untuk provisi diamortisasi secara garis lurus.

Tahun 2020, BSY berhasil membukukan pendapatan bunga sebesar Rp368.221 juta, turun sebesar Rp35.963 juta atau kurang dari 8,90% dari tahun 2019 yaitu Rp404.184 juta. Penurunan pendapatan bunga di tahun 2020 disebabkan adanya kebijakan stimulus kredit dan penurunan penyaluran kredit.

2. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya diperoleh dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR. Pendapatan operasional lainnya terdiri dari pendapatan jasa transaksi, pendapatan operasional ATM, pendapatan hapus buku, pendapatan PPAP, pinalti pelunasan kredit.

Pendapatan Operasional BSY pada akhir tahun 2020 mencapai Rp29.872 juta, naik sebesar Rp7.583 juta atau 34,02% dibanding tahun 2019 yaitu Rp22.289 juta.

3. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional terdiri dari pendapatan atas selisih lebih kasir maupun marketing dan titipan transfer yang belum juga diketahui pemiliknya serta pinalty atas karyawan resign.

Pada tahun 2020 total Pendapatan Non Operasional Rp527 juta, turun sebesar Rp281 juta atau kurang dari 34,78% dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp808 juta.

4. Beban Bunga

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah sehubungan dengan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman.

Beban bunga diakui secara akrual. Termasuk dalam beban bunga adalah beban pembayaran premi penjaminan LPS. Realisasi Beban Bunga tahun 2020 Rp162.899 juta, meningkat sebesar Rp7.551 juta atau 4,86% dibanding tahun 2019 yaitu Rp155.348 juta, hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya simpanan nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito serta meningkatnya simpanan dari bank lain. Kenaikan simpanan menyebabkan beban bunga yang dikeluarkan bank juga bertambah.

5. Beban Penyisihan Aset Produktif

Beban Penyisihan Aset Produktif tahun 2020 sebesar Rp10.949 juta, turun sebesar Rp6.612 juta dari tahun 2019.

Beban PPAP meliputi PPAP atas kredit yang diberikan. Setiap bulan BPR menyesuaikan cadangan pembentukan PPAP dan atas kekurangan pembentukan PPAP tersebut, BPR akan mencatatnya dalam laporan labarugi. Pada posisi tahun 2020 BSY tidak melakukan pembentukan PPAP umum kredit dan PPAP PPBL sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh otoritas.

6. Beban Pemasaran

Beban pemasaran adalah beban yang dikeluarkan BPR dalam rangka sosialisasi produk/ promosi dan pemberian hadiah kepada nasabah yang tidak dapat diatribusikan secara langsung ke rekening nasabah. Beban Pemasaran tahun 2020 Rp5.488 juta, turun sebesar Rp715 juta atau kurang dari 11,53% dari tahun 2019. Dengan adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020 BSY lebih efisien dalam mengeluarkan beban pemasaran dalam bentuk promosi.

7. Beban Penelitian Dan Pengembangan

Beban penelitian dan pengembangan adalah beban yang dikeluarkan oleh BPR berkaitan dengan pengembangan ATM dan pengembangan produk lain. Beban Penelitian dan Pengembangan di tahun 2020 sebesar Rp28 juta, turun sebesar Rp46 juta dari tahun 2019.

8. Beban Administrasi Dan Umum

Beban administrasi dan umum adalah beban yang dikeluarkan BPR untuk mendukung kegiatan operasional BPR meliputi beban tenaga kerja, beban pendidikan, beban sewa, beban penyusutan, beban amortisasi aset tak berwujud, beban pemeliharaan, beban pajak dan beban barang dan jasa.

Beban Administrasi dan Umum tahun 2020 sebesar Rp132.734 juta, turun Rp1.832 juta atau kurang dari 1,36% dibanding tahun 2019 yaitu Rp134.566 juta. Penurunan beban administrasi dan umum dikarenakan adanya penurunan biaya Pendidikan dan biaya tenaga kerja lainnya.

9. Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya meliputi beban perlengkapan kantor, beban konsumsi, beban administrasi, beban

membership dan lainnya, termasuk beban pembayaran pungutan OJK.

Beban Operasional Lainnya tahun 2020 sebesar Rp5.462 juta, turun sebesar Rp215 juta atau kurang dari 3,79% dibandingkan tahun 2019 yaitu Rp5.677 juta.

10. Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah beban yang dikeluarkan oleh BPR yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional BPR, misalnya BNO atas kerugian ATI, BNO CSR, BNO sumbangan.

Beban Non Operasional di tahun 2020 adalah sebesar Rp1.184 juta, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp231 juta atau kurang dari 16,33% dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp1.415 juta.

11. Taksiran Pajak

Beban taksiran pajak adalah jumlah pajak penghasilan badan atas penghasilan BPR pada satu periode.

Jumlah pajak penghasilan badan untuk tahun 2020 turun sebesar Rp9.095 juta atau kurang dari 33,96% dari semula Rp26.784 juta di tahun 2019 menjadi Rp17.689 juta di tahun 2020. Penurunan Taksiran Pajak disebabkan karena terjadi penurunan laba di tahun 2020 dan penurunan tarif pajak dari 25% menjadi 22%.

ARUS KAS

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan Setara Kas akhir tahun 2020 sebesar Rp18.206 juta, naik sebesar Rp2.463 juta atau 15,65% terhadap Kas dan Setara Kas akhir tahun 2019 sebesar Rp15.743 juta.

Laporan Arus Kas (dalam jutaan Rp)

Keterangan	2019	2020
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	45.026	41.008
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(4.553)	1.455
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(34.990)	(40.000)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode	10.260	15.743
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode	15.743	18.206

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2020 sebesar Rp41.008 juta, turun sebesar Rp4.018 juta dibanding dengan tahun 2019 yaitu Rp45.026 juta.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun 2020 adalah sebesar Rp1.455 juta, naik sebesar Rp6.008 juta jika dibanding dengan tahun 2019.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Selama tahun 2020 arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp40.000 juta antara lain digunakan untuk pembayaran deviden.

REKENING ADMINISTRATIF

1. Pengakuan komitmen

- Fasilitas pinjaman yang diterima namun belum ditarik

Di tahun 2020 PT BPR Surya Yudhakencana tidak memiliki fasilitas kelonggaran tarik.

- Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik

Fasilitas kredit yang diberikan nasabah yang belum ditarik adalah berupa kredit rekening koran (RC), yaitu

kredit dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dimana fasilitas kredit yang ditarik minimal sebesar 10%. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik oleh nasabah di akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp35.257 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.245 juta atau 10,14% dari tahun 2019.

2. Pengakuan kontijensi

a. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

Pendapatan bunga dalam penyelesaian atas kredit yang diberikan di tahun 2020 adalah sebesar Rp51.581 juta, naik sebesar Rp10.255 juta atau 24,81% dari tahun 2019.

b. Aktiva produktif yang dihapusbukukan

Aktiva produktif yang dihapus buku di akhir tahun 2020 bersaldo Rp6.407 juta, turun sebesar Rp172 juta atau kurang dari 2,62% dibanding tahun 2019, yang berarti selama tahun 2020 penerimaan atas kredit hapus buku sebesar Rp172 juta.



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG & KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan membayar utang jangka pendek BSY dapat dilihat dari rasio likuiditasnya. Semakin tinggi likuiditas maka semakin baik, yang berarti BSY memiliki cukup aset likuid untuk membayar hutang jangka pendeknya. Sesuai ketentuan Bank Indonesia bahwa *cash rasio* dikatakan sehat jika $\geq 4,05\%$. *Cash rasio* dihitung dengan cara membandingkan antara aset likuid dengan utang jangka pendek. Aset likuid meliputi Kas, Tabungan dan Giro PPBL setelah memperhitungkan Tabungan dari bank lain dan Giro PPBL di bank lain yang menjadi jaminan *cash collateral*. Utang jangka pendek terdiri dari Simpanan Pihak Ketiga ditambah Kewajiban Segera yang harus segera dibayar. Setiap hari BSY memantau rasio likuiditas dan berusaha menjaga *cash rasio* dengan *best practice* 10%. Di tahun akhir tahun 2020 *cash rasio* BSY adalah 19,02%.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Non Performing Loan (NPL) atau Kredit Bermasalah merupakan salah satu indikator kunci menilai kinerja bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya tingkat kredit masalah dalam bank tersebut yang jika tidak segera ditangani maka akan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Peningkatan NPL jika dibiarkan akan memberikan pengaruh negatif pada bank. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki. Suku bunga kredit memang menjadi pendapatan utama bank, yang jika bank tidak lagi menerima angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikhawatirkan hal ini akan terus memperburuk kondisi keuangan bank, karena adanya sistem pencatatan bunga secara *accrual basis*. Melihat kasus seperti ini, maka pihak bank dituntut untuk selalu melakukan analisa kredit secara baik dan benar sehingga dapat memilih calon debitur/debitur yang pantas untuk menerima dana pinjaman dari bank.

Pada tahun 2020 nilai prosentase NPL BSY sebesar 6,20% dengan jumlah nominal Rp146.841 juta dari nilai outstanding Kredit Rp2.368.208 juta. Dari jumlah tersebut kami selalu berupaya mengatur strategi untuk menurunkan nilai prosentase NPL yang dicapai.

Tabel Data NPL Tahun 2020

NO	KETERANGAN	TAHUN 2020			% NPL GROSS (%)	%NPL NET (%)
		DEBITUR	NILAI BAKI DEBET (dalam jutaan Rp)	JUMLAH TUNGGAKA (Rp jutaan)		
1	Due 000 - 030 Hari (KOL 1)	18.514	2.023.892	56.166	85,46	85,46
2	Due 031 - 090 Hari (KOL 2)	3.601	197.474	13.626	8,33	8,31
3	Due 091 - 180 Hari (KOL 3)	35	927	172	0,03	0,04
4	Due 181 - 360 Hari (KOL 4)	77	4.758	1.569	0,20	0,18
5	Due > 360 Hari (KOL 5)	1.202	141.155	157.256	5,96	3,99
	TOTAL NPL	23.429	2.368.208	0	6,20	4,20

Kredit bermasalah BSY sampai dengan posisi per akhir 2019 adalah sebesar Rp135.445 juta sedangkan per akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp146.841 juta. Target yang diharapkan untuk dicapai per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp91.209 juta, namun penyelesaian kredit bermasalah justru meningkat sebesar Rp55.632 juta. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan ekonomi secara global yang terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia akibat dampak Covid-19. Pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan pemerintah sangat berdampak pada hampir sebagian besar sektor usaha, yang menyebabkan penurunan secara drastis tingkat pendapatan masyarakat dan juga berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit di sektor jasa keuangan.

Meskipun pemerintah telah berupaya menggunakan berbagai macam stimulus perekonomian untuk membuat perbankan tetap dapat berjalan di tengah terpaan badai perekonomian akibat pandemi Covid-19, namun kenaikan tingkat NPL di perbankan secara global tetap meningkat.

Tabel RBB Kredit Kepada Pihak Lain Bukan Bank/Masyarakat

Uraian	DES 2020 (dalam jutaan Rp)
Perkiraan NPL (%)	3,49
dengan rincian sbb:	
Kurang Lancar (%)	0,33
Diragukan (%)	0,32
Macet (%)	2,84
Baki Debet -> Lancar	1.885.167
Baki Debet -> DPK	637.878
Baki Debet -> Kurang Lancar	8.627
Baki Debet -> Diragukan	8.467
Baki Debet -> Macet	74.114

Faktor yang menyebabkan penurunan kredit bermasalah tidak tercapai antara lain:

1. Adanya penyesuaian perhitungan NPL disesuaikan dengan POJK No.33/ POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank yang berlaku mulai Desember 2019.
2. Terdapat debitur yang dalam penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana penggunaan awal.
3. Terdapat debitur yang mengalami penurunan usaha sehingga mengalami penurunan kemampuan membayar akibat pandemi Covid-19 kurang lebih sebesar Rp7,2 miliar.
4. Terdapat kredit macet yang sampai dengan akhir tahun 2020 belum tuntas penyelesaiannya karena masih menunggu proses lelang dan/atau penjualan agunan, diantaranya dengan total baki debit kredit Rp 52,6 miliar.

Langkah dan upaya yang dilakukan dalam menekan NPL di tahun 2020:

1. Melakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan POJK No 11 tahun 2020.
2. Memantau *Account Officer* (AO) di dalam menangani keterlambatan angsuran dalam batas 1 sampai dengan 3 bulan.
3. Apabila sampai 2 kali kunjungan tidak membuahkan hasil, maka dilakukan pengiriman surat peringatan dengan pemberitahuan akan dijualnya barang agunan milik debitur melalui legal advisor.
4. Melakukan *monitoring* kerja bagian PKB dan mengevaluasi hasil kinerja PKB di cabang maupun wilayah agar lebih maksimal dalam melakukan penagihan yang efektif sehingga dapat menurunkan NPL lebih cepat.
5. Melakukan negosiasi penyelesaian kredit bermasalah antara debitur beserta keluarganya dengan bank. Pihak bank mengarahkan debitur agar dengan sadar menjual barang agunannya sendiri atau pihak keluarga akan membantu menyelesaikan kredit bermasalah.
6. Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri setempat untuk memanggil para debitur bermasalah ke pengadilan agar mereka dapat segera menyelesaikan kewajibannya melalui gugatan sederhana.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di dalam penyelesaian kredit bermasalah dalam bentuk pendidikan, pelatihan maupun seminar untuk AO dan petugas PKB.
8. Melakukan lelang terhadap kredit-kredit bermasalah melalui badan lelang KPKNL sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah.
9. Pemetaan kredit bermasalah berdasarkan prioritas penanganan kredit bermasalah (mulai dari permasalahan terkecil dan mudah hingga permasalahan terbesar).
10. Melakukan penjualan agunan guna penyelesaian kredit bermasalah.

STRUKTUR MODAL & KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal (*leverage*) atau bisa juga disebut rasio hutang terhadap modal (*debt to equity*). Hutang yang diperhitungkan adalah hutang jangka panjang. Struktur modal digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, pengembangan usaha ataupun inventasi ke perusahaan lain. Semakin tinggi rasio *leverage* berarti bank lebih banyak menggunakan *debt financing* dibandingkan *equity financing*. Sebaliknya jika *leverage* semakin rendah mengindikasikan bank lebih banyak menggunakan *equity financing*. Struktur modal adalah penting dalam suatu perusahaan karena mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, resiko bisnis bahkan kelangsungan hidup perusahaan. Struktur modal yang efektif akan menciptakan perusahaan yang kuat dan stabil. Tujuan Bank dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Bank dapat tetap memberikan imbal hasil bagi para pemegang saham dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal.

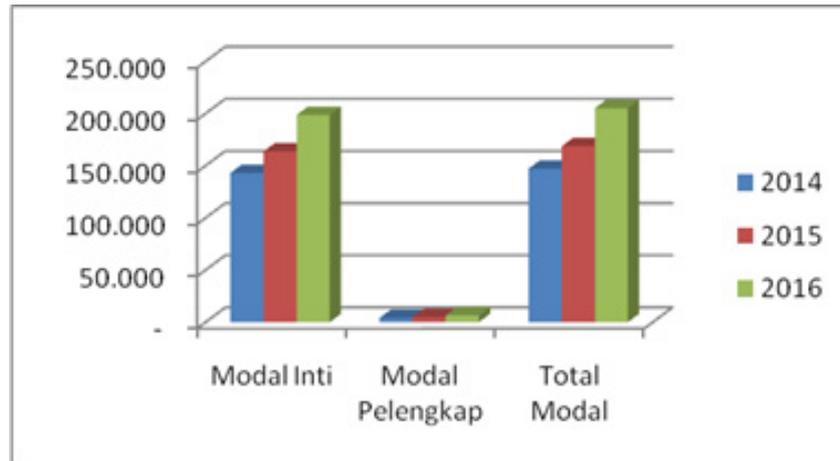
Hutang jangka panjang :

Deposito pihak ketiga JW>3 bln	287.296 juta
Deposito ABP + PYD >3 bln	542.902 juta
Kewajiban lain lain >3 bln	714 juta

BSY memiliki struktur modal yang kuat. Modal BSY sepenuhnya bersumber dari internal BSY yang dimiliki oleh para pemegang saham. Struktur modal BSY terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari Modal Disetor, Cadangan Umum, Laba Ditahan, Laba rugi Tahun Lalu dan Laba Tahun Berjalan (50%). Modal Pelengkap terdiri dari Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Umum (maksimum 1,25% dari ATMR).

Tabel komponen modal tahun 2019 dan 2020 (dalam jutaan Rp)

Komponen Modal	2019	2020
Modal inti		
Modal Disetor	235.000	235.000
Cadangan Umum	47.000	47.000
Laba Ditahan	10.253	49.906
Laba Tahun Berjalan (50%)	39.826	31.093
Jumlah Modal inti	332.079	362.999
Modal Pelengkap		
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	9.621	0
Jumlah Modal	341.700	362.999
Modal Inti Minimum (8% X ATMR)	186.192	92.220
Rasio Kecukupan Modal	14,68%	31,49%



Tabel Komposisi Modal

No	Nama	Modal Disetor 2019		Tambahkan	Modal Disetor 2020	
		Nominal	%		Nominal	%
1	Satriyo Yudiarto	164.500	70%	0	164.500	70%
2	Milla Feryanti	23.500	10%	0	23.500	10%
3	Ananta Yudha Irianto	23.500	10%	0	23.500	10%
4	Tenny Yanutriana	23.500	10%	0	23.500	10%
Jumlah		235.000	100%	0	235.000	100%

Di tahun 2020 tidak terdapat penambahan modal disetor dan cadangan umum.

Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS. Rencana permodalan BSY disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha, dan kebutuhan likuiditas.

Berdasarkan rasio kecukupan modal minimum, BSY berada pada posisi sehat yaitu 14,68% di tahun 2019 dan 31,49% di tahun 2020, dan secara kuantitas struktur modal bank menunjukkan pertambahan.

BSY memastikan memiliki kecukupan modal untuk dapat memitigasi risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. BSY mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) dalam melakukan perhitungan kecukupan modal.

Tabel Rasio Kecukupan Modal

KETERANGAN	2018	2019	2020
CAR	15,42%	14,68%	31,49%

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2020

Tahun 2020 BSY tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal sehingga tidak bisa memberikan penjelasan mengenai tujuan, sumber dana, mata uang denominasi dan langkah perencanaan perlindungan risiko.

INVESTASI BARANG MODAL DIREALISASIKAN TAHUN 2020

Tahun 2020, BSY tidak melakukan aktivitas investasi barang modal. Dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir meliputi jenis, tujuan dan nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun 2020.

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI 2020

PENCAPAIAN TARGET 2020

Secara umum pada tahun 2020, BSY telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja bank sebagai berikut.

KETERANGAN	REALISASI (dalam jutaan Rp)	TARGET (dalam jutaan Rp)	PENCAPAIAN (%)
TABUNGAN (netto)	749.536	714.836	104,85%
DEPOSITO (netto)	1.169.485	1.238.997	94,39%
KREDIT (netto)	2.344.998	2.574.467	91,09%
PENDAPATAN	398.620	465.803	85,58%
BIAYA	336.433	385.416	87,29%
LABA BERSIH	62.187	80.387	77,36%
ASSET	2.884.929	3.092.739	93,28%

1. Aset BSY pada tahun 2020 adalah sebesar Rp2.884.929 juta, apabila dibandingkan dengan posisi aset tahun 2019 sebesar Rp2.864.344 juta mengalami peningkatan sebesar Rp20.585 juta atau 0,72%, dengan proyeksi kenaikan aset di tahun 2020 sebesar 7,97% atau sebesar Rp3.092.739 juta. Pencapaian aset terhadap target di tahun 2020 adalah sebesar 93,28% yang berarti pencapaian aset belum sesuai target sebesar Rp207.810 juta atau kurang 6,72%.
2. Tahun 2019 posisi jumlah simpanan deposito BSY adalah sebesar Rp1.147.120 juta (netto) dengan proyeksi kenaikan sebesar 1,95% untuk tahun 2020. Target simpanan deposito pihak ketiga di akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp1.238.997 juta atau 8,01%. Di tahun 2020 posisi simpanan deposito tersebut telah berhasil mencapai angka Rp1.169.485 juta (netto). Pencapaian deposito terhadap target di tahun 2020 adalah sebesar 94,39% yang berarti realisasi deposito kurang dari target sebesar Rp69.512 juta atau 5,61%. Di tahun 2020, simpanan deposito telah mengalami peningkatan sebesar Rp22.365 juta atau sebesar 1,95% dibandingkan tahun 2019.
3. Tahun 2019 posisi jumlah simpanan tabungan BSY adalah sebesar Rp674.383 juta (netto) dengan proyeksi kenaikan sebesar 6,00% untuk tahun 2020. Target tabungan pihak ketiga di akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp714.836 juta. Di tahun 2020, posisi simpanan tabungan berhasil mencapai angka perolehan Rp749.536 juta (netto). Pencapaian tabungan terhadap target di tahun 2020 adalah sebesar 104,85% yang menunjukkan realisasi melebihi target sebesar Rp34.700 juta atau 4,85%. Dengan demikian, dalam jangka waktu satu tahun, yaitu selama tahun 2020, pos simpanan tabungan telah mengalami peningkatan sebesar Rp75.153 juta atau sebesar 11,14% dibandingkan tahun 2019.

4. Kredit yang berhasil disalurkan BSY sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp2.393.176 juta (netto) dengan proyeksi kenaikan sebesar 7,57% untuk tahun 2020. Target kredit di akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp2.574.467 juta. Di tahun 2020, posisi kredit adalah sebesar Rp2.344.998 juta (netto). Pencapaian kredit terhadap target adalah sebesar 91,09%, yang berarti kredit belum memenuhi target sebesar Rp229.469 juta atau kurang dari 8,91%. Di tahun 2020 kredit telah mengalami penurunan sebesar Rp48.178 juta atau kurang dari 2,01%.
5. Pendapatan BSY pada tahun 2019 adalah sebesar Rp427.282 juta. Target pendapatan di akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp465.803 juta. Realisasi pendapatan di tahun 2020 adalah sebesar Rp398.620 juta yang berarti realisasi pendapatan kurang dari target sebesar Rp67.183 juta atau 14,42%. Pencapaian pendapatan terhadap target adalah sebesar 85,58%. Di tahun 2020 telah terjadi penurunan perolehan pendapatan sebesar Rp28.662 juta atau kurang dari 6,71% dibanding tahun 2019.
6. Biaya yang dikeluarkan selama tahun 2019 sebesar Rp347.629 juta. Proyeksi biaya di tahun 2020 adalah sebesar Rp385.416 juta. Realisasi biaya di tahun 2020 adalah sebesar Rp336.433 juta. Pencapaian biaya terhadap target adalah sebesar 87,29%. Pada tahun 2020 telah terjadi penurunan pengeluaran biaya sebanyak Rp11.196 atau kurang dari 3,22% dibanding tahun 2019.
7. Laba setelah pajak untuk tahun 2019 adalah Rp79.653 juta, dengan target laba bersih untuk tahun 2020 adalah Rp80.387 juta. Di tahun 2020 perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp62.187 juta. Pencapaian laba terhadap target adalah sebesar 77,36 % yang berarti realisasi pencapaian laba kurang dari target sebesar Rp18.200 juta atau kurang dari 22,64 %. Selama tahun 2020 terjadi penurunan laba sebesar Rp17.466 juta atau kurang dari 21,93% dibandingkan dengan tahun 2019.

TARGET 2021

Pada akhir tahun 2020 BSY telah menentukan target untuk tahun 2021 yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). RBB menjadi acuan BPR dalam menjalankan kegiatan operasional di tahun 2021. Dalam menyusun RBB harus diperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. RBB yang disusun oleh BPR meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah dan rencana strategis jangka panjang. Rencana jangka pendek mencakup rencana BPR selama 1 tahun kedepan. Rencana jangka menengah mencakup rencana BPR untuk 3 tahun kedepan, sedangkan rencana strategis jangka panjang berisi rencana BPR untuk 5 tahun kedepan. Cakupan rencana bisnis bank meliputi ringkasan eksekutif, strategi bisnis dan kebijakan, proyeksi laporan keuangan, target rasio, rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana dalam bentuk kredit, rencana permodalan, rencana SDM, rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru, rencana pengembangan/ perubahan jaringan kantor dan informasi lainnya.

Berikut target keuangan BSY di tahun 2021 yang dituangkan di RBB :

1. Aset tumbuh sebesar 1,58% menjadi Rp2.930.514 juta
2. Tabungan ditargetkan sebesar 4% menjadi Rp779.551 juta
3. Deposito ditargetkan sebesar 4,5% menjadi Rp1.222.650 juta
4. Kredit tumbuh sebesar 2,5% menjadi Rp2.427.437 juta

Proyeksi rasio keuangan di tahun 2021 :

1. Rasio CAR 30,36%
2. NPL gross 4,95%
3. NPL nett 3,03%
4. Rasio ROA 2,84%
5. Rasio BOPO 79,43%
6. Cash Ratio 17,56%

INFORMASI & FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal Akuntan yang mempengaruhi kinerja BSY.

PROSPEK USAHA

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,4 - 5,8% dengan inflasi terjaga pada kisaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2020. Untuk mencapai hal itu diperlukan sinergitas, transformasi, dan inovasi serta jaminan kenyamanan dan kepastian lahan bagi investor. Proyeksi tersebut didasarkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2019 yang rata-rata 5,44 %. Pencapaian Jawa Tengah selama tiga triwulan pada 2019 terus meningkat, mulai dari 5,15% hingga 5,66% di triwulan keempat. Data ini menunjukkan konsistensi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di atas nasional setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Jawa Tengah bisa sesuai proyeksi mengingat didukung dengan kepemilikan sumber daya yang melimpah, misalnya menjadi salah satu lumbung pangan dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Belum lagi industri-industri yang menghasilkan produk andalan.

Namun, untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan berkualitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus disertai pula dengan inflasi yang rendah dan terkendali. Peran perbankan juga perlu lebih ditingkatkan terutama dalam pembiayaan infrastruktur strategis.

Dengan inovasi digital, diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antarpelaku ekonomi. Terdapat 3 (tiga) hal yang harus direalisasikan untuk menarik investor, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Ketiganya yakni aspek kewilayahan, aspek kecepatan dan kemudahan pelayanan tingkat daerah, serta kondusivitas.

RENCANA BISNIS BPR

Dengan berpedoman pada komitmen BSY dalam rangka penerapan Tata Kelola yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menggunakan kepekaan atas perkembangan ekonomi nasional dan regional Jawa Tengah, maka BSY menyusun dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

BSY tetap berkomitmen menggarap pasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan optimis untuk terus maju serta mempercepat laju bisnisnya. Hal ini didukung oleh kedekatan BSY dengan lingkungan dan masyarakat yang sejak lama terjalin. Meskipun demikian, ancaman pesaing tetap harus menjadi perhatian, terutama bank-bank umum sektor mikro yang merupakan pesaing utama BSY dalam penyaluran kredit dana murah. Oleh karena itu BSY harus mampu mempertahankan kedekatan emosional dengan para nasabahnya karena BSY lahir dan tumbuh di tengah lingkungan masyarakat daerah dan pedesaan yang masih menjunjung tinggi kekeluargaan, dan sudah sangat dikenal dekat sebagai BPR yang ikut serta membangun perekonomian daerah, terutama di wilayah kerja BSY sendiri. Sampai dengan saat ini, BSY masih menjadi bank kepercayaan masyarakat mikro kecil menengah di area kerja BSY sebagai BPR pilihan utama masyarakat.

Dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2020 dituangkan strategi yang akan dilakukan BSY untuk mempertahankan proses bisnisnya pada posisi teratas di Jawa Tengah yaitu dengan beberapa upaya sebagai berikut.

Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 tahun:

1. Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR.
2. Meningkatkan modal dasar.
3. Melakukan ekspansi wilayah kerja dengan pembukaan kantor cabang dan kas baru.
4. Melakukan penambahan jumlah SDM untuk mendukung adanya ekspansi wilayah.
5. Merencanakan pengadaan SDM yang dititik beratkan pada bidang pemasaran.
6. Menyediakan dana pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
7. Melakukan pengembangan produk berbasis teknologi informasi.
8. Menyempurnakan ketentuan dan meningkatkan penerapan manajemen terhadap 6 risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko strategik.
9. Melakukan penyesuaian kebijakan perkreditan sesuai dengan POJK No.33/POJK.03/2018 tertanggal 27 Desember 2018 mengenai Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang mulai diterapkan tanggal 1 Desember 2019.
10. Penyempurnaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) khususnya terkait dengan pengelompokan nasabah berdasar risiko.
11. Penyusunan program peningkatan budaya kerja oleh Forum Mitra Peningkatan Budaya Kerja guna meningkatkan budaya kepatuhan dan sadar risiko seluruh karyawan BPR.
12. Melakukan perubahan struktur organisasi pada susunan pengurus, susunan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, dan pejabat eksekutif.
13. Melakukan pengurangan dan pembelian ATI.
14. Melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan promosi perusahaan.
15. Perubahan sistem akuntansi biaya pendidikan dan CSR akan diubah menjadi accrual basis (sebelumnya *cash basis*).

Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 tahun:

1. Melakukan ekspansi wilayah kerja dengan pembukaan kantor cabang dan kas baru.
2. Meningkatkan penambahan jumlah SDM untuk mendukung adanya ekspansi wilayah.
3. Menyediakan dana pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4. Melakukan pengembangan produk berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatkan penerapan manajemen risiko terhadap 6 (enam) risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko strategik dan reputasi.

Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 tahun:

1. Melakukan ekspansi wilayah kerja dengan pembukaan kantor cabang dan kas baru.
2. Meningkatkan penambahan jumlah SDM untuk mendukung adanya ekspansi wilayah.
3. Menyediakan dana pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4. Melakukan pengembangan produk berbasis teknologi informasi.

ASPEK PEMASARAN 2020

Pemasaran produk dan layanan mempengaruhi jumlah dan loyalitas nasabah. BSY berusaha menyusun strategi dan program pemasaran sesuai dengan perkembangan bisnis. Karena dengan implementasi strategi dan program pemasaran yang tepat dapat mempertahankan loyalitas nasabah yang telah ada dan menarik minat nasabah baru. Pemasaran adalah salah satu kegiatan yang membantu dalam menciptakan nilai pada produk dan pelayanan yang dibuat. Kegiatan pemasaran merupakan ujung tombak keberhasilan bank untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan jasa yang ditawarkan.

Untuk menjamin efektivitas program pemasaran, BSY menggunakan pendekatan program yang bermacam-macam disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi pangsa pasar.

Sebagai bagian dari komunikasi BSY kepada masyarakat luas, salah satu sarana yang digunakan adalah dengan pemasangan iklan dan rilis di media massa, pengelolaan media sosial resmi milik BSY, serta pemasaran informasi terkini perusahaan melalui *website*.

Kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan keuangan yang semakin dinamis serta persaingan antar Bank yang semakin ketat mendorong BSY untuk menajamkan strategi dan program pemasaran dalam ekspansi maupun pengelolaan eksisting. BSY telah menetapkan Bagian Dana dan Bagian *Corporate Secretary Department* yang difokuskan dalam hal membuat program pemasaran yang sesuai dengan kondisi persaingan bisnis terkini terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai.

STRATEGI PEMASARAN

Prinsip dasar pemasaran yaitu menciptakan nilai tambah bagi nasabah (*customer added value*), keunggulan bersaing dibanding kompetitor (*competitive advantages*), dan fokus pemasaran pada segmen bisnis tertentu, juga tetap dipegang pada saat menetapkan strategi pemasaran yang dipilih.

Selain itu mengingat kembali tujuan utama adanya pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yaitu untuk dapat mempertahankan loyalitas nasabah yang telah ada dan menarik minat nasabah baru maka BSY menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

BSY berupaya memastikan tercapainya target kinerja di bidang penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, perolehan *fee based income*, *market share* dan pada akhirnya menciptakan kinerja keuangan yang berkelanjutan. BSY telah menyiapkan beberapa strategi pemasaran berupa langkah-langkah kreatif yang berkesinambungan untuk memaksimalkan potensi pasar ke depan.



Selain orientasi program-program pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BSY juga melakukan kombinasi pemasaran yang diterapkan meliputi:

1. *Corporate Branding*

BSY berpandangan bahwa melakukan usaha secara berkelanjutan untuk tetap menjaga ciri khas perusahaan adalah salah satu bentuk mempertahankan posisi khusus di hati masyarakat.

2. *Brand Activation*

BSY melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan di masyarakat.

3. *Media*

Sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan promosi yang dilakukan dalam bentuk *offline* maupun *online*.

4. *Channeling*

BSY melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan media, baik media cetak maupun elektronik, serta menjalin kerjasama dengan pihak *merchant*.

KEGIATAN PEMASARAN DI TAHUN 2020

Deposito dan Tabungan

Untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga di tahun 2020, BSY berupaya untuk menjaring nasabah baru sekaligus menjaga loyalitas nasabah melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Meng-*update* data deposan prima secara konsolidasi sebagai dasar monitoring atas pelayanan istimewa kepada para nasabah prioritas. Pelayanan yang kami diberikan antara lain ucapan selamat hari ulang tahun, ucapan selamat hari raya keagamaan dan pemberian hadiah pada saat hari-hari istimewa nasabah prioritas tersebut serta kunjungan rutin atau jamuan makan.
2. Penyelenggaraan undian simpanan tahunan dibarengi dengan pembagian hadiah yang menarik dan hiburan bagi masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bagi nasabah dan/atau masyarakat.

Pemasaran Kredit

Sebagai upaya penyaluran dana kepada masyarakat BSY melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Pelayanan jemput bola terhadap calon debitur dan memberikan penjelasan kepada calon debitur mengenai transparansi produk khususnya mengenai suku bunga Kredit.
2. Pelayanan untuk pencairan kredit dibuat secepat mungkin dan semudah mungkin tetapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudential*).
3. Memberikan hadiah bagi debitur dengan kategori lancar dan loyal terhadap BSY.
4. Melakukan penawaran kembali kredit untuk nasabah yang selama ini dinilai berpotensi, sehingga *outstanding* kredit tidak menurun dan nasabah tersebut tidak berpindah ke Bank lain.
5. Mengadakan promosi secara langsung melalui kegiatan grebek pasar atau sosialisasi ke instansi-instansi di lingkungan kerja BSY, ataupun melalui promosi menggunakan media massa, media elektronik atau media sosial.
6. Pemberian suku bunga yang kompetitif dan tanpa uang pelicin.
7. Peningkatan pangsa pasar dengan memperluas jaringan kantor BSY.
8. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta.
9. Memberikan fasilitas *bridging loan* kepada para pengusaha baik pemerintah maupun swasta.
10. Memberikan kredit bunga murah pada waktu-waktu tertentu dalam rangka promosi.

Pemasaran Citra Perusahaan

Untuk menjaga citra perusahaan yang telah terbentuk di masyarakat, BSY melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Pengundian hadiah simpanan untuk nasabah Tabungan dan Deposito.
2. Memasang media promosi seperti: umbul-umbul, baliho dan spanduk promosi di wilayah operasional bank. Termasuk promosi melalui media elektronik maupun sosial media.

3. Melakukan perbaikan dan penambahan papan reklame yang ditempatkan pada posisi yang strategis.
4. Memberikan sosialisasi mengenai keunggulan produk Tabungan, Deposito maupun Kredit milik BSY baik kepada masyarakat umum, instansi pemerintah maupun swasta.
5. Menjadi sponsor untuk acara pementasan musik, pagelaran kesenian maupun turnamen olah raga yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.
6. Memberikan bantuan sosial baik pada hari besar keagamaan maupun kegiatan-kegiatan lain.

KEBIJAKAN DEVIDEN

Persetujuan penggunaan laba ditahan tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang diadakan pada tanggal 23 April 2020. Dalam RUPS tersebut diputuskan untuk membagikan laba ditahan sebesar Rp40.000 juta kepada pemegang saham.

Kebijakan Dividen BSY mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pembagian Dividen harus melalui persetujuan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Penentuan jumlah dan pembayaran Dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DEVIDEN

Persetujuan penggunaan laba ditahan tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang diadakan pada tanggal 23 April 2020. Dalam RUPS tersebut diputuskan untuk membagikan laba ditahan sebesar Rp40.000 kepada pemegang saham.

Pembagian dividen selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tahun	Jumlah dividen (dalam jutaan Rp)	Jumlah dividen kas per saham	Tanggal Pembayaran
2020	40.000	235.000	23 April 2020
2019	75.000	235.000	6 Mei 2019
2018	60.000	195.000	2 Mei 2018
2017	50.000	165.000	3 Mei 2017
2016	35.000	135.000	30 April 2016

Pada tahun 2020 sesuai dengan hasil RUPS, para pemegang saham BSY menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp40.000 juta atau 50,21% dari laba bersih 2019 sebesar Rp79.653 juta, dengan jumlah saham sebanyak 235.000 lembar, maka dividen per lembar saham menjadi Rp170.212,76.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

BSY tidak melakukan penerbitan saham, sehingga tidak terdapat informasi mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP).

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

BSY tidak melakukan penerbitan saham, sehingga tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Selama tahun 2020 BSY tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam kegiatan usahanya, BSY melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Pihak-pihak berelasi BSY diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel data pihak berelasi dengan BSY

PIHAK BERELASI	SIFAT HUBUNGAN	SIFAT TRANSAKSI
PT Surya Yudha	Dimiliki oleh Komisaris Utama	Penempatan Dana
PT Surya Yudha Park	Dimiliki oleh Komisaris Utama	Kredit yang diberikan, Penempatan Dana
PT Surya Yudha Sejahtera	Dimiliki oleh Komisaris Utama	Penempatan Dana
Kospin Surya Kencana	Dimiliki oleh Komisaris Utama	Penempatan Dana
PT Kusuma Agung Sejahtera	Dimiliki oleh Komisaris Utama	Kredit yang diberikan, Penempatan Dana
PT BPR Eleska Artha	Dimiliki oleh Komisaris Utama	Kredit yang diberikan, Penempatan Dana
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif	Pengurus	Kredit yang diberikan, Penempatan dana.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tahun 2020, terdapat beberapa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan baik dari OJK maupun pemerintah yang berkaitan dengan BPR, yaitu:

POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

POJK ini mulai diberlakukan sejak 1 Desember 2021, dengan penetapan berupa:

1. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
2. PPAP Khusus ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas dalam perhatian khusus sebesar 3% (tiga persen) dari aset produktif setelah dikurangi nilai agunan.
 - b. Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari aset produktif setelah dikurangi nilai agunan.
 - c. Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari aset produktif setelah dikurangi nilai agunan.
 - d. Kualitas macet sebesar 100% (seratus persen) dari aset produktif setelah dikurangi nilai agunan.
3. Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. Sebesar 0,5% berlaku sejak 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
 - b. Sebesar 1% berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021.
 - c. Sebesar 3% berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.
4. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada kredit dengan kualitas macet untuk agunan kendaraan bermotor yang diikat fidusia.
 - a. Ditetapkan paling tinggi 50% dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 tahun sampai dengan 2 tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.
 - b. Tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 2 tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.
5. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada kredit dengan kualitas macet untuk agunan tanah dan/atau bangunan.
 - a. Ditetapkan paling tinggi 50% dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 tahun sampai dengan 4 tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.
 - b. Tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 4 tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.
6. Penempatan dana pada bank lain dalam bentuk giro dianggap sebagai aset produktif sehingga dalam pelaksanaannya terdapat penyisihan penghapusan aset produktif untuk giro.

Implementasi di tahun 2020 adalah adalah peningkatan pembentukan PPAP di tanggal 1 Desember 2020 untuk kualitas kredit DPK dari 0,5% menjadi 1%. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap nilai agunan yang diperhiungkan sebagai pengurang pembentukan PPAP.

POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang dipertegas dengan SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Perubahan dengan adanya POJK ini adalah:

1. Pelaporan laporan bulanan yang semula secara online ke Bank Indonesia menjadi ke OJK melalui sistem APOLO.
2. Laporan Bulanan dilaporkan dalam rupiah penuh.
3. Penyampaian Laporan Bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Laporan Bulanan memuat informasi meliputi data pokok, Laporan Posisi Keuangan, Rekening Administratif, Laba Rugi, Informasi terkait BMPK dan Rasio Keuangan Triwulanan.

SEOJK No. 24/SEOJK.03/2019 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR.

Atas pemberlakuan SEOJK tersebut berpengaruh terhadap perhitungan rasio CAR/KPMM Bank. Dalam perhitungan ATMR, kredit di kategorikan sesuai dengan jenis agunannya dengan bobot risiko yang berbeda untuk masing masing agunan.

PMK No.215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Bank.

Bank menerapkan PMK No.215/PMK.03/2018 sejak masa November 2019 dimana pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh Bank yang sebelumnya diperhitungkan setiap triwulanan menjadi diperhitungkan setiap bulan dari laba kotor berjalan sehingga perhitungan atas pembayaran pajak lebih akurat dan riil.

POJK No. 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

POJK ini diterbitkan dalam rangka memberikan stimulus perekonomian nasional akibat dampak penyebaran Covid-19 dengan memberikan kesempatan kepada perbankan untuk memberikan kebijakan khusus terhadap debitur yang terdampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Bentuk implementasi dari adanya POJK ini, BSY menyusun dan menerbitkan:

1. Surat Keputusan (SK) Direksi No. 10/KEP/DIR/A/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020 yang diubah dengan SK Direksi No.13/KEP/DIR/A/IV/2020 tertanggal 8 April tentang Penerapan Stimulus Perekonomian sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 di PT BPR Surya Yudhakenca; dan
2. Surat Edaran (SE) Direksi No. 23/SE/DIR/A/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020 yang telah diubah dengan SE Direksi No. 33/SE/DIR/A/V/2020 tertanggal 28 Mei 2020 tentang Restrukturisasi Kredit yang Terdampak Penyebaran Covid-19.

POJK No. 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank.

POJK ini berisi pemberian kewenangan kepada OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada Bank untuk melakukan dan/atau menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

POJK ini berisi tentang layanan yang dapat dilakukan oleh OJK dalam rangka menjalankan kewenangannya dalam mencegah tindakan kerugian konsumen lembaga jasa keuangan, dan melakukan pelayanan pengaduan konsumen. Adapun layanan yang diberikan antara lain:

1. Layanan penerimaan informasi.
2. Layanan pemberian informasi.
3. Layanan pengaduan.

POJK No. 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Relaksasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan.

POJK ini mengatur tentang pemberian kebijakan relaksasi kepada BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan dimaksud terdiri dari:

1. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;
2. Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;
3. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau
4. Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2020 dapat disediakan sebesar kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Bentuk implementasi dari adanya POJK ini, BSY menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 17A/KEP/DIR/A/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Sebagai Dampak Penyebaran Covid-19 Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional di PT BPR Surya Yudhakencana.

POJK No. 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ke-3 atas POJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

POJK ini menyempurnakan pedoman tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda dengan menambahkan mekanisme penundaan penagihan sanksi administratif.

POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

POJK ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan dari POJK No. 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*.

POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Usaha Jasa.

POJK ini mengatur tentang adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, sebagai salah satu alternatif menyelesaikan sengketa antara Sektor Jasa Keuangan dengan konsumennya di luar pengadilan. POJK ini juga disusun dalam rangka penerapan perlindungan konsumen, khususnya dalam hal penyelesaian pengaduan.

POJK No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat

POJK ini merupakan pengganti POJK No.20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan terhadap 6 aspek kelembagaan dengan tujuan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan melalui pendirian BPR

secara lebih selektif, menciptakan proses perizinan BPR yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPR, serta menghadirkan kelembagaan BPR yang lebih tertata dan kuat.

POJK No. 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

POJK ini merupakan penyempurnaan dan perubahan atas POJK sebelumnya tentang SLIK dengan memperluas cakupan pelapor dan pengembangan sistem layanan informasi keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PERPU ini dibuat sebagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Adapun kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh BSY adalah:

1. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
 - a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
2. Wajib Pajak dalam negeri:
 - a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2).

Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Keputusan Menteri Kesehatan ini dibuat sebagai panduan bagi tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi, atau disebut juga *New Normal*.

Bentuk implementasi dari adanya peraturan ini, BSY menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 18/KEP/DIR/A/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020 yang diubah dengan SK Direksi No. 47/KEP/DIR/A/XI/2020 tertanggal 22 Juni 2020 tentang Panduan *New Normal*, Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kerja BSY.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/PMK.05/2020 dan 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan menteri ini dibuat dalam rangka memberikan panduan pemberian subsidi bunga bagi debitur melalui perbankan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

Bentuk implementasi dari adanya peraturan ini, BSY menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 34/KEP/DIR/A/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga Kredit UMKM.



Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Undang-undang ini berisi ketentuan tentang perubahan pengenaan bea meterai yang semula Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mulai tahun 2021.

Bentuk implementasi dari adanya peraturan ini, BSY menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 51/KEP/DIR/A/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pengenaan Bea Meterai Pada Dokumen Perusahaan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pandemi Covid-19 yang tidak hanya berimbas ke dunia perbankan namun semua sektor ekonomi dan di semua lini. Di tahun 2020 terdapat perubahan kebijakan akuntansi sebagai upaya dari Otoritas Keuangan untuk menjaga kondisi keuangan perbankan.

Adapun kebijakan akuntansi yang diberlakukan pemerintah di tahun 2020 adalah:

1. Kebijakan melakukan restrukturisasi kredit dan menetapkan kualitas kredit menjadi Lancar sampai dengan Maret 2022.
2. Kebijakan untuk tidak membentuk PPPAP untuk Aset Produktif dengan kualitas Lancar.



3. Kebijakan untuk mengeluarkan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dari perhitungan ATMR.
4. Kebijakan membentuk Cadangan Biaya Pendidikan kurang dari 5%.

Dan BSY selama tahun 2020 menggunakan kebijakan tersebut dengan tidak membentuk PPAP untuk Aset Produktif kualitas Lancar, dan hanya membentuk cadangan biaya pendidikan sebesar 2,5%. Selibhnya mengikuti peraturan OJK yang berlaku.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Di tahun 2020, pandemi Covid-19 sangat berpengaruh signifikan terhadap kehidupan perekonomian dunia. Pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan di Indonesia sangat berdampak kepada sebagian besar sektor usaha nasional yang pasti berdampak pada tingkat kemampuan pengembalian hutang masyarakat. Perbankan sebagai salah satu penopang perekonomian sudah pasti sangat terpengaruh dengan situasi perekonomian yang sulit.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai macam stimulus perekonomian melalui sektor perbankan sebagai upaya menjaga perekonomian Nasional, namun tahun 2020 benar-benar tahun yang sulit dan status pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha perbankan, begitu juga BSY.

Di akhir tahun 2020, TKS BSY masih tergolong sehat meskipun mengalami penurunan dari sisi kualitas Aset Produktif. Informasi penting lain yang menggambarkan kondisi kelangsungan usaha BSY sebagai berikut.

1. Berdasarkan perhitungan manajemen pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, BSY memiliki rasio kecukupan penyediaan modal minimum (KPMM) masing-masing sebesar 14,68% dan 31,49%.
2. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 Bank memiliki rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan (APYD) terhadap jumlah aset produktif yang dituangkan dalam rasio KAP masing-masing sebesar 4,19% dan 5,22%.
3. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, rasio piutang, pinjaman dan pembiayaan yang nonperforming (*gross*) terhadap jumlah piutang, dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar 5,59% dan 6,20%, sedangkan rasio piutang, dan pembiayaan yang *non-performing (nett)* terhadap jumlah piutang, pinjaman dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar 3,96% dan 4,20%.

ASUMSI DASAR KELANGSUNGAN USAHA

Asumsi tersebut berlandaskan pada posisi BSY, jika dilihat dari analisis SWOT.

Strength (kekuatan) BSY:

1. Merupakan BPR terbesar di Jawa Tengah dilihat dari total aset yang dimiliki dan mendapat peringkat satu dibidangnya.
2. Memiliki jaringan (*market share*) yang luas dari kantor cabang dan kantor kas yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.
3. *Brand image, respect dan trust* telah terbangun di masyarakat.
4. Memiliki SDM yang loyal dan berkomitmen tinggi serta teknologi informasi terkini.
5. Adanya layanan jemput bola kepada para nasabahnya.
6. Rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual dengan proses cepat dan bunga simpanan lebih tinggi.

Weakness (kelemahan) BSY:

1. Masih kurangnya pelatihan terhadap SDM mengikuti kebutuhan skill saat ini.
2. Adanya permasalahan operasional yang cukup tinggi yang dinilai mengganggu kenyamanan nasabah.
3. Terbatasnya layanan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu).
4. Suku bunga pelepasan dana kredit yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum sektor mikro yang mulai banyak mengucurkan dana murah.
5. Masih tingginya pengalokasian penyaluran dana pada kredit konsumtif sehingga sangat rawan terhadap kemungkinan kredit macet ketika iklim ekonomi sedang krisis dan nilai tukar mata uang yang fluktuatif.
6. BSY belum menjadi bank pilihan utama bagi sebagian masyarakat karena strategi inovasi yang terbatas.

Opportunities (peluang) BSY:

1. Pertumbuhan pasar keuangan yang semakin tinggi.
2. Perusahaan pesaing sudah merasa puas diri.

3. Kecenderungan pola hidup masyarakat yang konsumtif, yang membuat kebutuhan dan keinginan masyarakat akan pelayanan jasa keuangan semakin tinggi.
4. Adanya perubahan peraturan pemerintah yang menguntungkan terhadap bisnis jasa keuangan khususnya sektor mikro.
5. Pencanangan adanya edukasi perbankan bagi masyarakat, memungkinkan dunia perbankan bertarung secara kompetitif untuk berebut nasabah.
6. Banyaknya perusahaan perbankan yang berinvestasi menggunakan kerjasama *linkage* dengan BPR.

Threat (ancaman) BSY:

1. Perkembangan dunia bisnis semakin kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi membuat competitor semakin berinovasi.
2. Mudahnya bank asing membuka unit layanan jasa keuangan di daerah-daerah.
3. Adanya kebijakan pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan biaya sangat murah.
4. Masyarakat cenderung meminati layanan perbankan yang simple dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah yang menggiurkan.
5. Inflasi yang meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank.

PELAKSANAAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Meskipun di tahun 2020 seluruh dunia dinyatakan dalam status pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan pembatasan aktivitas khususnya yang melibatkan banyak orang, juga membatasi mobilitas manusia, namun pelaksanaan literasi keuangan tetap berjalan. Di akhir tahun 2019, BSY telah menyusun rencana pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan yang dilaporkan kepada OJK. Kemudian terhadap implementasi dari rencana tersebut dilaporkan pula secara semesteran kepada OJK.

Kegiatan literasi dan inklusi keuangan merupakan program OJK yang bertujuan untuk mengenalkan masyarakat terhadap akses layanan keuangan demi meningkatkan pemerataan ekonomi. Selama tahun 2020 BSY telah melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat di wilayah kerja BSY. Kegiatan literasi di tahun 2020 ditujukan untuk berbagai pihak menyeluruh di semua wilayah kerja BSY.

Adapun kegiatan literasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 antara lain:

1. Sosialisasi pengelolaan usaha untuk para pedagang.
2. Sosialisasi produk-produk BSY.
3. Gerakan gemar menabung untuk pelajar.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Direksi

Penilaian Penerapan Tata Kelola Untuk Tahun 2019

Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris dan Direksi

Komite Audit

Komite Pemantau Risiko

Komite - komite di Bawah Direksi

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Keterbukaan Informasi

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Kepatuhan

Akuntan Publik

Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian Intern

Corporate Social Responsibility (CSR)

Perkara Penting Yang Dihadapi Tahun 2020

Akses Informasi & Data

Kode Etik Perusahaan

Whistle Blowing System

Kebijakan Keberagaman Komposisi

Dewan Komisaris dan Direksi



DEWAN KOMISARIS



Dewan Komisaris adalah Organ BPR yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan nasihat yang dimaksud dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Menurut UU no. 40 tahun 2007, pasal 117:

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman dan Etika Kerja antara lain:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal,

- hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Yang dimaksud dengan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank adalah hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih LPS, dan/atau dicabut izin usahanya.
 7. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
 9. Dewan Komisaris wajib:
 - a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 - b. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS.
 10. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 11. Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Bank pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.
 12. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Meski belum genap dua tahun, namun kinerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah berjalan cukup baik dan telah sesuai dengan pedoman tata tertib kerja komite, mengingat bahwa kedua komite tersebut baru terbentuk di awal tahun 2017.

Namun demikian kedepan masih terdapat beberapa hal yang wajib ditingkatkan khususnya mengenai:

1. Jadwal rapat rutin dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko terkait penerapannya di masing-masing unit kerja.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (BOARD CHARTER)

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilakukan pengesahan pada bulan September 2016.

Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah:

1. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
2. Komisaris Independen
3. Masa Jabatan Dewan Komisaris
4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
5. Kewajiban, Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris
6. Wewenang Dewan Komisaris
7. Aspek Transparansi Dewan Komisaris
8. Larangan bagi Dewan Komisaris
9. Gaji/Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris
10. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris
11. Etika Kerja Dewan Komisaris
12. Waktu Kerja Dewan Komisaris
13. Rapat Dewan Komisaris

KOMISARIS INDEPENDEN

BPR wajib memiliki Komisaris Independen guna menjaga independensi Dewan Komisaris dan menghindari adanya benturan kepentingan, serta untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif. Keberadaan Komisaris Independen juga dimaksudkan untuk menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Komisaris Independen BSY di akhir tahun 2020 belum memenuhi persyaratan jumlah yang diatur dalam ketentuan Tata Kelola BPR yang menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada. Jumlah Komisaris Independen BSY di akhir tahun 2020 adalah 3 orang karena salah satu komisaris independen dalam proses persetujuan menjadi direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Syarat dan kriteria Komisaris Independen

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

2. Apabila Komisaris Independen adalah mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank, maka yang bersangkutan harus menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun, kecuali bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank yang melakukan fungsi pengawasan.
3. Komisaris Independen wajib menandatangani Surat Pernyataan Independensi sesuai *draft* yang dikeluarkan oleh OJK.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Masing-masing Dewan Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan untuk menunjukkan independensi Dewan Komisaris yaitu bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.



DIREKSI



Direksi adalah Organ BPR yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen dan pengelolannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan, serta Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BSY sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi telah diatur dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada satu pun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dalam hal kebijakan BSY yang bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada karyawan melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui surat keputusan, surat edaran, surat pemberitahuan maupun sarana komunikasi internal lainnya.

Secara umum pembagian tugas Direksi dibagi sebagai berikut:

Jabatan	Bidang Tugas
Direktur Utama	Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta pemantauan pengelolaan BPR
Direktur Umum	Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta pemantauan pengelolaan dalam bidang finance, operasional, teknologi informasi, umum, dana dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Direktur Kredit	Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta pemantauan pengelolaan dalam bidang Kredit.
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memimpin, merumuskan dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam penerapan kepatuhan perbankan dan manajemen risiko sesuai regulasi perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membawahi bidang satuan pengamanan, training, kepatuhan dan manajemen risiko. (karena Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Masih Dalam Proses Persetujuan OJK maka fungsi kepatuhan dibawahkan oleh Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama)..

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD CHARTER)

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilakukan pengesahan pada bulan September 2016.

Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah:

1. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi
2. Masa Jabatan Direksi
3. Rangkap Jabatan Direksi
4. Kewajiban, Tugas dan Tanggungjawab Direksi
5. Wewenang Direksi
6. Aspek Transparansi Direksi
7. Larangan bagi Direksi
8. Direktur Kepatuhan
9. Gaji dan Tunjangan Direksi
10. Orientasi dan Pelatihan Direksi
11. Etika Kerja Direksi
12. Cuti dan Waktu Kerja Direksi
13. Rapat Direksi



PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA UNTUK TAHUN 2019

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, BSY melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola setiap tahunnya.

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,09	Sangat Baik (setelah penerapan manajemen risiko)
Analisis	

- Adapun dari hasil penilaian beberapa faktor masih terdapat kekurangan, diantaranya:
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite**
Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem audit dan manajemen risiko BPR agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku dan terdapat adanya bentuk pelaporan tertulis atas hasil kinerja komite.
 - Penerapan fungsi kepatuhan**
Di tahun 2019, BSY belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang terlihat dari peningkatan data *fraud* dan pelanggaran *Code Of Conduct*.
 - Penerapan manajemen risiko.**
BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan OJK.
- Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan OJK.



KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PROSEDUR PENERAPAN REMUNERASI

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan, kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Perusahaan memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan tanggung jawab dan capaian kerja masing-masing. Besaran remunerasi ditetapkan untuk menjaga mekanisme *check and balance* antara kedua organ perusahaan tersebut agar tetap terjaga. Mekanisme penilaian kinerja Direksi ditetapkan dari target pencapaian Direksi yang dikaitkan dengan laba yang dihasilkan dan pengembangan usaha.

Tabel Nominal Gaji dan Honorarium Pengurus

Jabatan	Orang	Remunerasi Selama 1 Tahun (dalam jutaan Rp)	Keterangan
Dewan Komisaris	4	2.283	Gaji dan honorarium serta bonus tahunan dan THR
Direksi	4	3.433	
TOTAL	8	5.716	

*) salah satu dari dewan komisaris independen telah mendapatkan remunerasi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sejak Oktober 2020.

REMUNERASI DAN FASILITAS BAGI PENGURUS

Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

1. Fasilitas kesehatan melalui asuransi kesehatan (BPJS) termasuk untuk istri dan anak yang masih menjadi tanggungan.
2. Fasilitas kesehatan melalui asuransi Mandiri In Health.
3. Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).
4. Fasilitas rumah dinas atau tunjangan biaya sewa rumah dinas.
5. Fasilitas kendaraan dinas.
6. Fasilitas tunjangan biaya komunikasi (pulsa).
7. Fasilitas kunjungan sosial budaya ke luar negeri (di tahun 2020 tidak diberikan akibat adanya Pandemi Covid-19).
8. Fasilitas tunjangan pakaian kerja.
9. Fasilitas tunjangan pembelian *make up* kit khusus untuk Dewan Komisaris berjenis kelamin perempuan.
10. Fasilitas perlengkapan kerja seperti laptop, buku agenda, kartu nama, ID *card*.
11. Fasilitas perlengkapan kantor yaitu meja, kursi dan *line* telepon.
12. Fasilitas uang perjalanan dinas.

Fasilitas Bagi Direksi

1. Fasilitas kesehatan melalui asuransi kesehatan (BPJS) termasuk untuk istri dan anak yang masih menjadi tanggungan.
2. Fasilitas kesehatan melalui asuransi Mandiri In Health.

3. Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).
4. Fasilitas cuti tahunan.
5. Fasilitas rumah dinas atau tunjangan biaya sewa rumah dinas.
6. Fasilitas kendaraan dinas.
7. Fasilitas tunjangan biaya komunikasi (pulsar).
8. Fasilitas kunjungan sosial budaya ke luar negeri (di tahun 2020 tidak diberikan akibat adanya Pandemi Covid-19).
9. Fasilitas tunjangan pakaian kerja.
10. Fasilitas tunjangan pembelian *make up kit* khusus untuk Direksi berjenis kelamin perempuan.
11. Fasilitas perlengkapan kerja seperti laptop, buku agenda, kartu nama, ID card.
12. Fasilitas perlengkapan kantor yaitu meja, kursi dan *line telepon*.
13. Fasilitas tunjangan biaya pernikahan pertama.
14. Fasilitas tunjangan biaya persalinan sampai dengan anak kedua.
15. Fasilitas tunjangan biaya pembangunan rumah pertama.
16. Fasilitas tunjangan kenaikan haji sebanyak 50% dari ONH Reguler setelah masa kerja minimal 10 tahun.
17. Fasilitas uang perjalanan dinas.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH DALAM SKALA PERBANDINGAN

Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	12,91	:	1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,36	:	1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,98	:	1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,34	:	1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	2,06	:	1



FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan dan membahas hal-hal yang memerlukan arahan serta rekomendasi Dewan Komisaris. Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal.

No.	Nama Dewan Komisaris	Tingkat Kehadiran
1.	Emila Hayati	100%
2.	Tenny Yanutriana	50%
3.	Abdul Khoir Maradika Putra	20%
4.	Dicky Firman Tarigan	100%
5.	Hadi Supeno	75%

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat gabungan.

No.	Nama Dewan Komisaris	Tingkat Kehadiran
1.	Emila Hayati	92%
2.	Tenny Yanutriana	30%
3.	Abdul Khoir Maradika Putra	59%
4.	Dicky Firman Tarigan	75%
5.	Hadi Supeno	47%

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun atau pada setiap waktu jika dianggap perlu oleh salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris BSY telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali, yang rinciannya sebagai berikut.

No.	Hari, Tanggal Rapat	Peserta	Materi Pembahasan
1	Rabu, 19 Februari 2020	1. Tenny Yanutriana 2. Emila Hayati 3. Abdul Khoir M.P 4. Dicky F Tarigan	Evaluasi Kinerja Tahun 2019.
2	Kamis, 23 Juli 2020	1. Emila Hayati 2. Hadi Supeno 3. Dicky F Tarigan	Pembagian Tugas Anggota Dewan komisaris atas Penyelesaian Kredit Bermasalah Plafon Besar.
3	Selasa, 28 Juli 2020	1. Tenny Yanutriana 2. Emila Hayati 3. Hadi Supeno 4. Dicky F Tarigan	Laporan atas Kunjungan Debitur atas nama Bagus Yuliawan.
4	Jumat, 14 Agustus 2020	1. Emila Hayati 2. Dicky F Tarigan 3. Hadi Supeno	Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris atas nama Leonard Paul Nangin.
5	Rabu, 4 November 2020	1. Emila Hayati 2. Tenny Yanutriana 3. Hadi Supeno 4. Dicky F Tarigan	1. Rencana Bisnis BPR 2. Isu-isu strategis 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategi 4. Evaluasi Realisasi rencana Bisnis BPR

RAPAT DIREKSI

Direksi mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan untuk melakukan koordinasi antar anggota Direksi, membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi dan membahas kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Selain itu, Direksi juga melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris, dan para Pejabat Eksekutif untuk membahas perkembangan BPR.

Rapat Direksi diselenggarakan minimal sebulan sekali. Rapat internal Direksi merupakan forum dan sekaligus mekanisme bagi pengambilan keputusan secara kolektif. Selain itu, Direksi mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris untuk membahas kinerja BPR.

No	Nama Direksi	Jabatan	Tingkat
1.	Sugeng Riyanto	Direktur Utama	79,5 %
2.	Sri Wahyu Utami	Direktur Umum	72,3 %
3.	Wahjoe Roekmono	Direktur Kredit	61,4 %

Selama tahun 2020 Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.

Rapat gabungan

No.	Hari, Tanggal Rapat	Peserta	Materi Pembahasan
1	Selasa, 7 Januari 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2019 & RBB tahun 2020. Tindak Lanjut Penyaluran Dana LPDB. Laporan Sistem layanan Informasi keuangan (SLIK).
2	Rabu, 15 Januari 2020	Panitia Program CSR dan Direksi.	Program CSR – Beasiswa BSY.
3	Jumat, 17 Januari 2020	Kepala cabang/bagian, kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Rapat Koordinasi.
4	Rabu, 22 Januari 2020	Kepala cabang/bagian, kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Pinjaman dari LPDB. Surat Perjanjian Kredit (SPK). Penyaluran Dana. Kredit Bermasalah.
5	Rabu, 5 Februari 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Evaluasi Kinerja bulan Januari 2020 .
6	Rabu, 12 Februari 2020	Kepala cabang/bagian, kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Pembahasan Perkreditan.
7	Jumat, 14 Februari 2020	Kepala cabang/bagian, kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Pembahasan kredit Bermasalah Plafon di atas Rp5M.

8	Jumat, 21 Februari 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Jangka Waktu Kontrak Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko.
9	Jumat. 28 Februari 2020	Kepala seksi, kepala bagian, kepala/wakil kepala divisi dan Direksi.	Perubahan Input Transaksi untuk Kantor Pusat.
10	Jumat, 28 Februari 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Kredit Bermasalah Kantor Cabang Purwokerto .
11	Senin, 2 Maret 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Evaluasi kerja.
12	Selasa, 3 Maret 2020	Kepala bagian, kepala divisi dan Direksi.	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
13	Senin, 9 Maret 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Kinerja dan Struktur Organisasi BSY.
14	Rabu, 11 Maret 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Evaluasi kerja.
15	Senin, 16 Maret 2020	Kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Kredit bermasalah Kantor Cabang Purwokerto.
16	Senin, 16 Maret 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya mencegah penyebaran Covid-19. 2. Mengatasi kredit bermasalah. 3. Operasional yang hati-hati, yang patuh sesuai SOP.
17	Rabu, 18 Maret 2020	Satgas PKB, kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Evaluasi kerja.
18	Senin, 23 Maret 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi BSY. 2. Langkah penanganan dan meminimalisir penularan Covid-19.
19	Kamis, 26 Maret 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan Presiden mengenai Kebijakan Perekonomian sebagai Dampak Covid-19.
20	Senin, 30 Maret 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Kredit Debitur Cabang Ajibarang.
21	Kamis, 2 April 2020	Kepala seksi, kepala bagian, kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Pembahasan Stimulus Pemerintah terkait Perpajakan.
22	Senin, 20 April 2020	Wakil kepala bagian, wakil kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan menjelang hari Raya Idul Fitri. 2. Bantuan Dana dalam rangka pencegahan Covid-19.

23	Rabu, 22 April 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Rapat koordinasi.
24	Selasa, 28 April 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Likuiditas dan Restrukturisasi Kredit.
25	Kamis, 30 April 2020	Kepala bagian, kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris	Koordinasi sistem kerja bank.
26	Senin, 4 Mei 2020	Pejabat Surya Yudha Grup, Direksi dan Dewan Komisaris BSY.	Program CSR BSY Grup.
27	Selasa, 5 Mei 2020	Satuan kerja (Satker) PKB, SKAI, KMT Direksi dan Dewan Komisaris.	Penyelesaian Hukum atas Kredit Debitur Kantor Cabang Purwokerto.
28	Rabu, 6 Mei 2020	Kepala cabang, Wakil kepala divisi dan Direksi.	Reorganisasi.
29	Rabu, 6 Mei 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Koordinasi Terkait Stimulus POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Kebijakan Perekonomian.
30	Senin, 11 Mei 2020	Kepala cabang/bagian, kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Kantor Cabang Mandiraja dan Banyumas. 2. Rencana RUPSLB atas Perubahan Susunan Pengurus BSY. 3. BPR Eleska. 4. Agunan Kredit Bermasalah.
31	Selasa, 12 Mei 2020	Kepala cabang/bagian, kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah kios Pasar Ikan. 2. Masalah Debitur Kantor Cabang Mandiraja. 3. Kredit bermasalah.
32	Rabu, 13 Mei 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Evaluasi kerja.
33	Kamis, 14 Mei 2020	Satker PKB, Direksi dan Dewan Komisaris.	Gugus Tugas Penyelesaian Kredit Bermasalah.
34	Kamis, 14 Mei 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra RUPSLB terkait perubahan susunan pengurus BSY. 2. Rating BPR berdasarkan aset.
35	Jumat, 15 Mei 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuan Uang Prestasi Kerja Kantor Cabang Kaligondang. 2. Konsep RUPSLB terkait perubahan susunan pengurus BSY.

36	Selasa, 19 Mei 2020	Satker PKB, SKAI, Direksi dan Dewan Komisaris.	Hasil Kinerja Penyelesaian Kredit Bermasalah.
37	Kamis, 28 Mei 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Perubahan Susunan Pengurus BSY Grup.
38	Selasa, 2 Juni 2020	Wakil kepala bagian, kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>On the job training</i> Komisaris Independen. 2. Pengambilan Data <i>Finger Print</i>. 3. Pengambilalihan BPR Eleska Artha Purwokerto.
39	Kamis, 4 Juni 2020	Satker SKAI, Komite Audit & Pemantau Risiko, Direksi, Dewan Komisaris	Koordinasi antara BSY Grup.
40	Senin, 8 Juni 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Perubahan Susunan Pengurus.
41	Selasa, 9 Juni 2020	Kapala kas, kepala cabang, kepala/wakil kepala wilayah, SKAI, Direksi dan Dewan Komisaris.	Evaluasi kerja.
42	Rabu, 10 Juni 2020	PUSPO, kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Sharing Session Puspo.
43	Jumat, 12 Juni 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reorganisasi. 2. Pembagian tugas Komisaris dan Direksi.
44	Jumat, 12 Juni 2020	Kepala/wakil kepala bagian, kepala/wakil kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klasifikasi gudang. 2. Fasilitas kerja karyawan.
45	Senin, 15 Juni 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Evaluasi Restrukturisasi Kredit.
46	Selasa, 16 Juni 2020	Kepala/wakil kepala wilayah, Komite Audit dan Pemantau Risiko, SKAI, Direksi dan Dewan Komisaris.	Evaluasi kerja.
47	Rabu, 17 Juni 2020	Direksi dan Komisaris	Evaluasi kerja.
48	Senin, 22 Juni 2020	Kepala/wakil kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris	Evaluasi kerja.
49	Rabu, 24 Juni 2020	Kepala bagian, kepala/wakil kepala divisi, Komite Audit & Pemantau Risiko, Direksi dan Dewan Komisaris.	Penyampaian Hasil Pertemuan mengenai <i>Co-Branding</i> dengan Bank Jateng.

50	Sabtu, 27 Juni 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rush</i> dan Likuiditas. 2. Pembagian tugas Dewan Komisaris. 3. Pengamanan dokumen. 4. Kerja sama dengan Bank Jateng 5. <i>Greeting</i> dan <i>jingle</i> BSY. 6. <i>Coution Notices</i> BSY. 7. Standar kebersihan dan kerapihan kantor. 8. Komite Audit & SKAI. 9. <i>Loan Committee</i>. 10. Pekan Olah Raga BSY.
51	Senin, 29 Juni 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Jatuh tempo jabatan Bp. Sugeng Riyanto selaku Direktur Utama BSY.
52	Sabtu, 11 Juli 2020	Kepala/wakil kepala seksi dana, kepala/wakil kepala bagian, kepala/wakil kepala wilayah, kepala/wakil kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Tindak lanjut rapat Sabtu, 27 Juni 2020 mengenai Existensi BSY.
53	Senin, 13 Juli 2020	Wakil kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Personalia dan Kompensasi.
54	Rabu, 15 Juli 2020	Kepala/wakil kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Pembahasan Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
55	Rabu, 22 Juli 2020	Kepala divisi, kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Pembahasan Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Plafon Besar.
56	Rabu-Kamis, 5-6 Agustus 2020	PUSPO dan Direksi.	<i>Sharing session</i> PUSPO bulan Agustus 2020.
57	Kamis, 6 Agustus 2020	Kepala bagian, kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Pelantikan Pejabat dan Sugeng Rawuh Bp. Ananta.
58	Senin, 10 Agustus 2020	Kepala/wakil kepala bagian, kepala/wakil kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Persiapan kegiatan Sugeng Rawuh Bp. Ananta dan Pelantikan Pejabat BSY Grup .
59	Selasa, 11 Agustus 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Diskusi Peran BPR/S dalam Program PEN, Pemenuhan Modal Inti BPR/S dan Wacana <i>Investment Company</i> .
60	Kamis, 13 Agustus 2020	Kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris	<i>Holdering Company</i> Surya Yudha.
61	Selasa, 1 September 2020	Kepala vivisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Pembahasan kredit dengan plafon di atas Rp5M.
62	Rabu, 2 September 2020	Kepala cabang/bagian, kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah dan Direksi.	<i>Refreshment</i> Hak dan Kewajiban Karyawan.

63	Selasa, 8 September 2020	Kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Pertemuan dengan BPRS MCI Yogyakarta.
64	Kamis, 10 September 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Negosiasi Lanjutan atas Tebus Tunai Agunan Debitur Kantor Cabang Banyumas.
65	Kamis, 10 September 2020	Direksi dan Dewan Komisaris	Negosiasi Jual Beli Agunan Debitur Kantor Cabang Banyumas.
66	Kamis, 10 September 2020	Kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Langkah Penyelesaian Kredit Bermasalah Kantor Cabang Banyumas.
67	Jumat, 11 September 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Perhitungan Kewajiban Debitur Kantor Cabang Banyumas.
68	Jumat, 11 September 2020	Direksi.	Ajuan Kredit Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha beras (PERPADI) Banjarnegara.
69	Kamis, 23 September 2020	PUSPO, kepala kas, kepala wilayah X dan Direksi.	Analisa Keuangan Kas Sampang Cabang Kroya.
70	Senin, 5 Oktober 2020	Kepala cabang, kepala divisi dan Direksi.	1.Restrukturisasi Kredit. 2.SDM.
71	Jumat, 9 Oktober 2020	Kepala cabang/bagian, kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala cabang, Direksi dan Dewan Komisaris.	<i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan OJK Tahun 2020.
72	Kamis, 15 Oktober 2020	Kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Komite Audit & Pemantau Risiko, Direksi dan Dewan Komisaris.	Tindak Lanjut Penyelesaian Kredit Debitur Kantor Cabang Banyumas.
73	Kamis, 15 Oktober 2020	Direksi dan Dewan Komisaris.	Pembahasan surat dari OJK terkait tanggapan atas rencana sewa lahan AYDA oleh Pemda Banyumas.
74	Rabu, 4 November 2020	Wakil kepala bagian, kepala/wakil kepala divisi, Direksi dan Dewan Komisaris.	Pembahasan terkait perkreditan.
75	Jumat, 6 November 2020	Panitia Undian Simpanan 2020 dan Direksi.	Persiapan Undian Simpanan 2020.
76	Senin, 9 November 2020	Kaepala cabang/bagian, kepala/wakil kepala divisi, kepala/wakil kepala wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Evaluasi Kerja 2020 dan Rencana Kerja 2021.

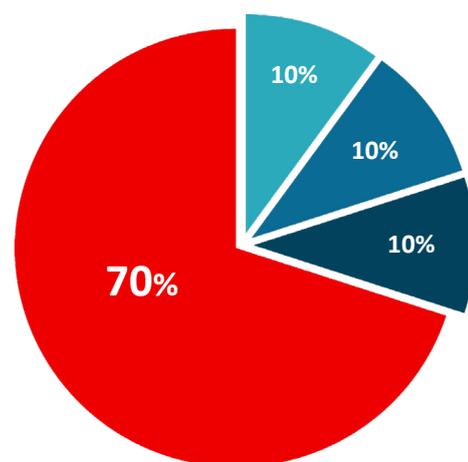
77	Senin, 9 November 2020	Kepala bagian, kepala/wakil kepala divisi Direksi dan Dewan Komisaris.	Evaluasi Kinerja Tahun 2020 dan Rencana kerja Tahun 2021.
78	Senin, 9 November 2020	Panitia Undian Simpanan 2020 dan Direksi.	Cek Lokasi dan Persiapan Undian Simpanan 2020.
79	Selasa, 10 November 2020	Kepala divisi, Komite Audit & pemantau Risiko, Direksi dan Dewan Komisaris.	1.SOP Kepatuhan. 2.Stimulus kredit. 3.Kredit dengan plafon di atas Rp5M.
80	Rabu, 11 November 2020	Direktur Utama dan Komisaris Utama.	Evaluasi Kinerja BPR/S tahun 2020 oleh OJK.
81	Senin, 16 November 2020	Komite Audit & Pemantau Risiko, Legal Advisor, Kepala divisi/wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Gelar Perkara kredit debitur Kantor Cabang Banyumas dan Pagentan.
82	Selasa, 1 Desember 2020	Kepala divisi/wilayah, Direksi dan Dewan Komisaris.	Pembahasan Surat Tanggapan dari PT Damai Indo Properti.
83	Selasa, 1 Desember 2020	Satker SDM, kepala divisi dan Direksi	Pembahasan Reorganisasi.
84	Kamis, 3 Desember 2020	Panitia Undian Berhadiah 2020 dan Direksi.	Persiapan Undian Simpanan Tahun 2020.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA & PENGENDALI

Sampai dengan tahun 2020, jumlah Pemegang Saham BSY masih belum mengalami perubahan yaitu sebanyak 4 orang pribadi.

Pemegang Saham mayoritas adalah Satriyo Yudiarto dengan komposisi kepemilikan sebesar 70%, sedangkan sebesar 30% lainnya dimiliki oleh 3 pemegang saham lain dengan masing-masing persentase kepemilikan sebesar 10%.

Komposisi pemegang saham



- Satriyo Yudiarto
- Milla Feryanti
- Ananta Yudha Irianto
- Tenny Yanutriana

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham selama periode 2020 sebagai berikut.

Nama	Hubungan Keluarga						Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain					
	Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Sebagai Pemegang Saham		Sebagai Dewan Komisaris		Sebagai Direksi	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris												
Tenny Yanutriana	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√
Emila Hayati	√	-	√	-	-	√	√	-	√	-	-	√
Abdul Khoir Maradika Putra	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hadi Supeno	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√
Dicky Firman Tarigan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Direksi												
Sugeng Riyanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Wahjoe Roekmono	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Sri Wahyu Utami	√	-	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√

KOMITE AUDIT

Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dengan berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut.

1. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang BPR.
2. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
3. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.20/KEP/DIR/A/VIII/2019 dan No.4/DEKOM/VIII/2019 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko tanggal 26 Agustus 2019.

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen yang bertugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit terdiri dari :

1. Ketua : Dicky F. Tarigan (komisaris independen)
2. Anggota : Hantoro Hilarius Luturmele
3. Anggota : Leonard Paul Nangin

Kualifikasi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No.3/KEP/DK/XII/2018 yang disahkan tanggal 31 Desember 2018 dan merupakan perubahan atas pedoman sebelumnya.

Anggota Komite Audit ditetapkan secara intern perusahaan namun mengacu pula kepada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola BPR, yaitu:

1. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 komite lainnya pada Perseroan.
2. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
3. Anggota Komite wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Anggota Komite wajib memahami laporan keuangan, bisnis perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BPR, proses audit, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Anggota Komite wajib mematuhi Kode Etik BPR dan Kode Etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh BPR.
6. Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Komite wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
8. Anggota Komite bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BPR dalam waktu 6 bulan terakhir.
9. Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BPR dalam waktu 6 bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
10. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 bulan.
11. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 10 tersebut di atas tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang bertugas melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 bulan.
12. Anggota Komite tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada BPR.
13. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham BPR baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa okum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
14. Anggota Komite tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali dan anggota Komite tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, serta Kode Etik Komite Audit diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Penunjang Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir 1 tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK.
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan BPR kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BPR.
4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee* untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPR.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BPR.
8. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.
9. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

NILAI DAN ETIKA KERJA KOMITE AUDIT

Nilai-nilai dan Etika Kerja Komite Audit adalah:

1. Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
3. Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
4. Anggota Komite harus obyektif, jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Bank.
6. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Komite maka anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan.
7. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Komite Audit berusaha menjalankan tugas semaksimal mungkin di tahun 2020. Adapun beberapa hasil kerja Komite Audit di tahun 2020 antara lain :

1. Melakukan analisa terhadap laporan kegiatan SKAI dan memberikan saran agar kinerja SKAI lebih ditingkatkan, khususnya dalam pembuatan laporan hasil evaluasi yang harus memuat saran tentang perbaikan yang harus dilakukan oleh unit kerja objek pemeriksaan dan juga dibuat ranking untuk unit kerja yang terbaik.
2. Melakukan rapat bersama dengan SKAI terkait:
 - a. Hasil pemeriksaan dan hal lain yang dinilai mempunyai indikasi kelemahan sistem pengendalian internal dan penerapan terhadap ketentuan yang berlaku.
 - b. Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Audit.
 - c. Hambatan yang dihadapi atas pelaksanaan tugas SKAI.
3. Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Kantor Akuntan Publik (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lainnya, khususnya yang merupakan komitmen Direksi kepada otoritas agar dipenuhi sesuai kesepakatan.
4. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan dan memberikan rekomendasi dalam proses pemilihan akuntan publik.
5. Melakukan penelaahan independensi objektivitas akuntan publik dan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik.

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE AUDIT

Anggota Komite wajib hadir setiap hari kerja dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Komite dapat melakukan rapat setiap waktu namun setidaknya 4 kali dalam satu tahun. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selain Komite Audit, Dewan Komisaris memiliki Komite Pemantau Risiko yang juga dibentuk untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Bank.

Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko dengan berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut.

1. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang BPR.
2. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
3. Peraturan OJK No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
4. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
5. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.20/KEP/DIR/A/VIII/2019 dan No.4/DEKOM/VIII/2019 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko tanggal 26 Agustus 2019.

KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen yang bertugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko terdiri dari :

1. Ketua : Dicky F. Tarigan (komisaris independen)
2. Anggota : Hantoro Hilarius Luturmele
3. Anggota : Leonard Paul Nangin

Kualifikasi, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No.4/KEP/DK/XII/2018 yang disahkan tanggal 31 Desember 2018 dan merupakan perubahan atas pedoman sebelumnya.

Kualifikasi anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan secara intern perusahaan namun mengacu pula kepada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola BPR, yaitu:

PT BPR Surya Yudhacencana

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Bank.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan atau manajemen risiko sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Peraturan OJK yang mengatur persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko.
 - b. Mampu bekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perbankan dan peraturan lainnya khusus yang berkaitan dengan aktivitas Bank, penerapan tata kelola dan manajemen risiko.
3. Persyaratan Independensi
 - a. Merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
 - c. Dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit kepada Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko, serta Kode Etik Komite Pemantau Risiko diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Penunjang Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yaitu:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, antara lain :
 - a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri dari risiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi dan risiko stratejik.
 - b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
 - d. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas kebijakan umum perkreditan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh regulator yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank.
4. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

NILAI DAN ETIKA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Nilai-nilai dan Etika Kerja Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
3. Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

4. Anggota Komite harus obyektif, jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Bank.
6. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Komite maka anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan.
7. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko telah berusaha menjalankan tugas semaksimal mungkin di tahun 2020. Adapun beberapa hasil kerja Komite Pemantau Risiko di tahun 2020 antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SMR) khususnya terkait penerapan manajemen risiko dengan hasil bahwa telah dilakukan penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko dan melakukan manajemen risiko meskipun sebagian besar masih berjalan di ranah risiko kredit, untuk itu kedepan masih perlu ditingkatkan lagi efektivitasnya dalam penerapan kebijakan manajemen risiko tersebut.
2. Melakukan kajian terhadap kebijakan Tata Kelola Bank yang disusun oleh Direksi. Saat ini Direksi telah menyusun kebijakan Tata Kelola yang disesuaikan dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang penerapannya terhadap Risiko Kepatuhan antara lain:
 - a. Penyesuaian jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan semenda sampai dengan derajat kedua.
 - c. Direksi telah membentuk SKAI, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

- d. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
 - e. Direksi, Dewan Komisaris dan Komite telah mempunyai Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
 - f. Memantau penerapan POJK tentang BMPK.
 - g. Melakukan evaluasi atas pantauan terhadap kebijakan-kebijakan lainnya yang disesuaikan dengan POJK.
3. Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan risiko antara lain di bidang operasional dan kepatuhan yang hasilnya telah dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Anggota Komite wajib hadir setiap hari kerja dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Komite dapat melakukan rapat setiap waktu namun setidaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE KREDIT (LOAN COMMITTEE)

Komite Kredit (*Loan Committee*) adalah komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan Kredit untuk jumlah dan jenis Kredit yang ditetapkan. Komite Kredit dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan arah kebijakan Perkreditan BSY sekaligus mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan Kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Fungsi pokok Komite Kredit adalah :

1. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.

2. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan.

Keanggotaan Komite Kredit berbeda-beda sesuai dengan kewenangan persetujuan kredit.

Penyelenggaraan Rapat Komite Kredit

1. Permohonan kredit beserta semua kelengkapan yang sudah disusun dalam file kredit harus diajukan kepada Komite Kredit sampai dengan pejabat Komite Kredit tertinggi yang memiliki wewenang memutuskan kredit sesuai dengan jumlah permohonan plafon kredit yang bersangkutan.
2. Keputusan persetujuan atas permohonan kredit akan dilakukan oleh Komite Kredit dalam rapat komite di tingkat batas kewenangan persetujuan kredit.
3. Semua anggota Komite Kredit harus hadir dalam rapat, apabila diperlukan bagian *supporting* lain dapat dimintakan hadir untuk memberikan pertimbangan dan masukan kepada Komite Kredit.
4. Apabila terdapat pejabat Komite Kredit berhalangan hadir dan tidak ada pengganti sementara pejabat yang bersangkutan, maka:
 - a. Berhalangan hadir 1 (satu) hari kerja, tetap harus menunggu kehadiran pejabat Komite Kredit tersebut; dan
 - b. Berhalangan hadir lebih dari 1 (satu) hari kerja, maka permohonan kredit diajukan kepada Komite Kredit yang lebih tinggi.
5. Pelaksanaan rapat Komite Kredit wajib didokumentasikan dan disimpan dengan baik.
6. Seluruh anggota Komite Kredit wajib memberikan pertimbangan dalam memberikan persetujuan kredit.
7. Petugas AO dan pejabat terkait harus memperhatikan dan menindaklanjuti setiap tanggapan atau persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pejabat Komite Kredit.
8. Dalam upaya pengendalian risiko penyaluran kredit, rapat Komite Kredit wajib memperhatikan Rekomendasi Dewan Komisaris dan Opini Kepatuhan dan Rekomendasi Manajemen Risiko dari Satuan kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
9. Komite Kredit membubuhkan tanda tangan pada Lembar Persetujuan apabila permohonan kredit disetujui.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi atau disebut juga *Information Technology Steering Committee* (ITSC) dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan teknologi informasi agar sesuai dengan ketentuan. Guna mendukung implementasi di bidang teknologi informasi, BSY telah memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi yang bertugas untuk melakukan tinjauan, monitoring, penyesuaian, menentukan prioritas pekerjaan, dan mengarahkan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi. Bank memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi. Komite Pengarah Teknologi Informasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/15/PBI/2007, pada pasal 7 poin 1 yang menyebutkan bahwa Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
4. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank.
5. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
6. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatannya.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Komite Pengarah Teknologi Informasi terkini dibentuk berdasarkan Surat Edaran (SE) Direksi No.49/SE/DIR/A/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019.

Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari unsur Manajemen, Operasional, Teknologi Informasi sebagai berikut :

1. Manajemen yaitu Direktur yang membawahkan Satker fungsi teknologi informasi.
2. Teknologi Informasi terdiri dari kepala divisi dan kepala bagian Satker yang membawahkan fungsi teknologi informasi.
3. Operasional merupakan perwakilan *user* terkait yang memiliki kewenangan (kepala/wakil kepala divisi/wilayah dan kepala bagian/cabang).

Komite Pengarah Teknologi Informasi BSY dalam menjalankan aktivitasnya telah dilengkapi dengan wewenang dan tanggungjawabnya antara lain sebagai berikut.

1. Menentukan aturan dan tujuan Komite Pengarah Teknologi Informasi.
2. Menentukan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang teknologi informasi.
3. Menentukan prioritas pekerjaan.
4. Melakukan tinjauan dan evaluasi kemajuan proyek.
5. Menentukan anggaran proyek dan evaluasi biaya proyek.
6. Menyelesaikan isu dan masalah yang muncul sehubungan dengan pengembangan proyek atau setelah proyek diimplementasikan.
7. Memastikan kelancaran koordinasi dengan bagian operasioan, legal dan lain-lain yang terkait sehingga saat proyek diimplementasikan semua dan dapat berjalan lancar baik dari sisi teknologi informasi, operasional, prosedur, persiapan di lapangan.
8. Tugas dan tanggungjawab sesuai dengan pasal 7 PBI Nomor 9/15/PBI/2007.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka penerapan Manajemen Risiko BPR sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015.

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko BSY dibentuk sesuai SK No. 26/DIR/SK/III/17 tanggal 25 Maret 2017.

Adapun anggota Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Direktur Kepatuhan.
2. Direktur Umum.
3. Direktur Kredit.
4. Kepala Divisi Operasional dan Dana.
5. Kepala Wilayah.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.

2. Perbaiki atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental.
3. Pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
4. Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Manajemen Risiko harus mencerminkan suatu kesepakatan diantara para anggota Komite.

FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) dijalankan oleh sekretaris pada bagian sekretariat. BSY memiliki bagian sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) personil yaitu seorang sebagai sekretaris komisaris, dan seorang sekretaris direksi.

PROFIL SEKRETARIS

Rani Purwandari (Sekretaris Dewan Komisaris)

Kewarganegaraan dan domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Widya Wiwaha tahun 2007.

Perjalanan Karir

Meniti karir di BSY sejak tahun 2007. Menjabat sebagai sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2015, sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi (2008-2015), Administrasi Kredit (2007-2008).

Kartika Puspitawati (Sekretaris Direksi)

Kewarganegaraan dan domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012.

Perjalanan Karir

Meniti karir di BSY sejak tahun 2012. Menjabat sebagai sekretaris Dewan Direksi sejak tahun 2015, sebelumnya menjabat sebagai Administrasi Kredit Cabang Utama (2012-2015).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sekretaris Dewan Komisaris

1. Mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya operasional di CSD, dengan mengembangkan dan meningkatkan kerja sama serta komunikasi di bagian tersebut dengan baik untuk mencapai hasil kerja yang optimal, efektif dan efisien.
2. Mengatur dan mengawasi cara kerja dan tata tertib yang dilakukan oleh karyawan di jajarannya.
3. Memonitoring semua kegiatan yang berkenaan dengan korespondensi, agenda/kegiatan Direksi dan Komisaris.
4. Mengelola rapat direksi dan komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Menangani tugas dan pekerjaan Direksi serta Komisaris sesuai perintah.
6. Menginformasikan seluruh kondisi perusahaan dan lapangan yang diketahui kepada Direksi dan Komisaris serta memantau informasi perbankan melalui internet.
7. Menerima tamu untuk Direksi baik tamu kunjungan maupun studi banding termasuk segala kebutuhan yang diperlukan.
8. Membantu penyusunan:
 - a. Rencana Bisnis Bank
 - b. Laporan Tahunan Perusahaan.
 - c. Laporan Realisasi Bisnis Bank per semester oleh Direksi.
 - d. Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank per semester oleh Komisaris.
9. Memeriksa kliping dan surat kabar yang berkaitan dalam bidang ekonomi dan perbankan.
10. Bertanggung jawab terhadap kelancaran kinerja *marketing communication* yang mencakup *Corporate Branding* dan Media.
11. Berkoordinasi dengan bagian/cabang terkait pelaksanaan *Brand Activation*.
12. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal BSY yang terkait dengan pengembangan dan operasional Bagian CSD.
13. Memeriksa dan mengesahkan seluruh formulir termasuk *design* atau slip yang terkait dengan Bagian CSD.

14. Bertanggung jawab atas pembuatan *content planner* untuk media sosial BSY dan melakukan evaluasi atau rekap setiap akhir bulan.
 15. Bertanggung Jawab atas perhitungan lembur karyawan di jajarannya.
 16. Memberikan motivasi kerja kepada karyawan di jajarannya.
 17. Menilai prestasi kerja karyawan di jajarannya serta melaporkan hasil kinerja Bagian CSD kepada Direksi di setiap bulannya
 18. Bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangan User ID untuk akses dalam program AS-400 Aplikasi WINcore.
 19. Mengadakan meeting dengan seluruh karyawan di jajarannya minimum 1 (satu) minggu sekali.
 20. Membuat laporan pending maksimal tanggal 7 setiap bulannya.
 21. Membuat laporan hasil kerja dan rencana kerja CSD kepada pimpinan di atasnya.
 22. Bertanggung jawab terhadap perawatan inventaris kantor yang dipergunakan.
 23. Melaksanakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan.
4. Menangani tugas dan pekerjaan Direksi atas petunjuk dan perintah Direksi.
 5. Mengatur perjalanan dinas Direksi.
 6. Menginformasikan seluruh kondisi perusahaan dan lapangan yang diketahui kepada Direksi.
 7. Mengelola rapat Direksi, mulai dari membuat pengumuman rapat melalui pesan singkat (*whatsapp*), membuat absen dan notulen rapat yang kemudian dicetak dan disahkan Direksi.
 8. Memantau informasi perbankan melalui internet.
 9. Menerima tamu untuk Direksi baik tamu kunjungan maupun studi banding termasuk segala kebutuhan yang diperlukan.
 10. Bertanggungjawab terhadap perawatan inventaris kantor yang dipergunakan.
 11. Melaksanakan sistem dan prosedur yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan.

KETERBUKAAN INFORMASI

BSY secara berkala menyampaikan informasi atau laporan dalam upaya memenuhi persyaratan keterbukaan informasi, antara lain:

Sekretaris Direksi

1. Menangani tugas yang berkenaan dengan korespondensi antara lain:
 - a. Mengadministrasikan dan mengerjakan seluruh administrasi Direksi.
 - b. Mengarsip semua dokumen Direksi.
 - c. Bertanggung jawab atas semua surat masuk.
 - d. Bertanggung jawab atas surat keluar yang berkaitan dengan Direksi.
 - e. Bertanggung jawab atas semua kerapihan register surat keluar dan masuk.
 - f. Menutup semua buku register pada saat akhir bulan.
2. Mencatat dan mengatur jadwal kegiatan Direksi.
3. Membuat kliping dari surat kabar yang berkaitan dalam bidang ekonomi dan perbankan.

JENIS PELAPORAN 2019	JUMLAH
Daftar Pelaporan Kepada Regulator	
Pelaporan Kepada OJK	134 laporan
Pelaporan Kepada BI	15 laporan
TOTAL	163 laporan
Daftar Pelaporan Kepada Pihak Afiliasi	
LPS	10 laporan
Kantor Pajak	1 Laporan
PPATK	1 laporan
Bank Linkage	10 Laporan
TOTAL	22 Laporan

Daftar Pelaporan ke OJK

Selama tahun 2020 BSY telah mengirimkan laporan-laporan kepada OJK dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Laporan	Tanggal Pelaporan
1	Laporan Peserta Tabunganku Desember 2019.	3 Januari 2020
2	Penyampaian Bukti Pengumuman Penutupan Kantor Sementara.	6 Januari 2020
3	Penyampaian Perkembangan Program Simpel dan Bank Goes To School Periode Desember 2019.	7 Januari 2020
4	a. Laporan Pokok Hasil Audit Intern 2019. b. Laporan Hasil Kaji Ulang Terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.	8 Januari 2020
5	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Umum Posisi Agustus 2019.	8 Januari 2020

6	Kelengkapan Data Pendukung Rencana Pembukuan Kantor Cabang Karanglewas.	13 Januari 2020
7	Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan Kembali Kantor.	13 Januari 2020
8	Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data Tahun 2019.	14 Januari 2020
9	Penyampaian Revisi Pedoman Kebijakan Perkreditan BSY (PKPB).	14 Januari 2020
10	Laporan Struktur Kelompok Usaha.	15 Januari 2020
11	Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas Bawang.	16 Januari 2020
12	Penyampaian Laporan Pelaksanaan kegiatan Edukasi Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat Periode Tahun 2019 Semester II.	22 Januari 2020
13	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inklusi Keuangan Tahun 2019 Semester II.	22 Januari 2020
14	Penyampaian Laporan Profil Risiko BPR Semester II Tahun 2019.	24 Januari 2020
15	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Umum Posisi Tanggal 31 Agustus 2019.	27 Januari 2020
16	Penyampaian <i>Update Proses Development</i> ATM Issuer BSY.	27 Januari 2020
17	Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Kas Bawang.	3 Februari 2020
18	Laporan Tabunganku Januari 2020.	3 Februari 2020
19	Laporan Tabungan Simpel Januari 2020.	7 Februari 2020
20	Laporan Kedudukan Sebagai Pejabat Eksekutif a.n Dhiyah Nurhayati.	10 Februari 2020
21	Laporan Pengawasan RBB Juli - Desember 2020.	13 Februari 2020
22	Tanggapan Penyampaian Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2020.	21 Februari 2020
23	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Umum Posisi Tanggal 31 Agustus 2019.	28 Februari 2020
24	Laporan Peserta Tabunganku Februari 2020.	2 Maret 2020
25	Penyampaian Laporan Tabungan Simpel Februari 2020.	2 Maret 2020
26	Laporan Pengangkatan Kembali Anggota Komisaris PT BPR Surya Yudhakencana a.n Emila Hayati.	12 Maret 2020
27	Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas Sokaraja.	16 Maret 2020
28	Perubahan Ketentuan Penerapan Program APU PPT.	18 Maret 2020
29	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Andri Mulyanto Kepala Cabang Ajibarang.	26 Maret 2020
30	Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi dan Komisaris a.n : a. Hadi Supeno (Komisaris Independen); b. Wahjoe Roekmono (Direktur Kredit).	26 Maret 2020
31	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n : a. Wahyono Dwi Kristianto (Kepala Cabang Bobotsari); b. Heri Djatmiko (Kepala Cabang Rembang).	27 Maret 2020
32	Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Kas Sokaraja.	30 Maret 2020
33	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan OJK Posisi Tanggal 30 Agustus 2019 (Per Maret 2020).	30 Maret 2020
34	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Teknologi Informasi.	30 Maret 2020
35	Penyampaian Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Tahun 2019.	31 Maret 2020
36	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Prapto Oktariato (Kepala Divisi Kredit).	31 Maret 2020

37	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n : a. Gurita Nursetyawan(Kepala Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah); b. Tri Budiyanto (Wakil Kepala Wilayah VIII); c. Kholis Nur Amni (Kepala Cabang Baturraden); d. Sigit Dwi Sarwoko (Kepala Cabang Purwokerto); e. Azhar Fathudin (Kepala Cabang Utama).	31 Maret 2020
38	Laporan Pesert Produk Tabunganku Maret 2020.	31 Maret 2020
39	Penyampaian Laporan Pengaduan Nasabah.	31 Maret 2020
40	Penyampaian Bukti Pengumuman Penutupan Kantor Sementara .	8 April 2020
41	Penyampaian Laporan Perkembangan Program Simpel dan Bank <i>Goes To School</i> Periode Maret 2020.	9 April 2020
42	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Sutarjo (Kepala Divisi Kredit).	13 April 2020
43	Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan Kembali Kantor.	13 April 2020
44	Penyampaian Kronologi Penanganan Nasabah Kredit a.n Musripah.	16 April 2020
45	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Umum Posisi Tanggal 31 Agustus 2019 (April 2020).	22 April 2020
46	Penyampaian Kronologi Nasabah a.n Ari Leksono Putra.	24 April 2020
47	Pengiriman Revisi Daftar Isian Calon Komisaris Independen BSY.	27 April 2020
48	Permohonan Pindah Alamat Kantor Cabang Ajibarang.	28 April 2020
49	Penyampaian Informasi Kontrak KAP Yang Melakukan Pemeriksaan dari BSY.	28 April 2020
50	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Umum Posisi Tanggal 31 Agustus 2019.	28 April 2020
51	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n : a. Dhiah Nurhayati (Wakil Kepala Divisi Operasional dan Dana); b. Sri Murwati (Kepala Bagian <i>Operational Development</i>); c. Aulia Dewi R. (Kepala Bagian Operasional Pusat).	28 April 2020
52	Laporan Keuangan Publikasi Triwulan IV Tahun 2019.	29 April 2020
53	Laporan Keuangan Publikasi Trwulan I Tahun 2020.	29 April 2020
54	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n: a. Tri Budiyanto (Kepala Wilayah VIII); b. Denis Dwi Adi Saputra (Kepala Cabang Cilacap).	30 April 2020
55	Laporan Tabunganku April 2020.	4 Mei 2020
56	Penyampaian Laporan Simpel Bulan April 2020.	8 Mei 2020
57	Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Cabang Ajibarang.	11 Mei 2020
58	Penyampaian <i>Update Proses Development ATM Issuer</i> BSY Bulan April 2020.	11 Mei 2020
59	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n : a. Sutarjo (Kepala Divisi Kredit). b. Prpto Oktariantio (Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Training).	15 Mei 2020
60	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Dhiah Nurhayati (Wakil Kepala Divisi <i>Finance, Operational Development and Funding</i>).	15 Mei 2020
61	Penyampaian <i>Update Proses ATM Issuer</i> BSY.	19 Mei 2020
62	Penyampaian Revisi Laporan Rencana Edukasi Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat Periode Tahun 2020.	20 Mei 2020
63	Informasi Pejabat Eksekutif a.n Gurita Nursetyawan.	20 Mei 2020

64	Informasi Email Perihal Registrasi SIGAP.	20 Mei 2020
65	Permohonan Persetujuan Calon Anggota Komisaris dan Direksi BSY a.n : a. Tenny Yanutriana (Komisaris); b. Emila Hayati (Komisaris Utama); c. Abdul Khoir M.P. (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).	26 Mei 2020
66	Laporan Pengangkatan Anggota Komisaris dan Direksi: a. Hadi Supeno (Komisaris Independen); b. Wahjoe Roekmono (Direktur Kredit).	27 Mei 2020
67	Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas Karanglewas .	27 Mei 2020
68	Pemberitahuan Hari Kerja BSY dengan Pelayanan Terbatas.	29 Mei 2020
69	Laporan Tabunganku Mei 2020.	4 Juni 2020
70	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern.	8 Juni 2020
71	Penyampaian Laporan Perkembangan Simpel Mei 2020.	8 Juni 2020
72	Penyampaian <i>Action Plan</i> dan Realisasi Penurunan NPL.	11 Juni 2020
73	Permohonan Revisi RBB Tahun 2020 (Ke-2).	19 Juni 2020
74	Laporan Pengangkatan Pengangkatan Pejabat a.n : a. Wahyu Adi Wibowo (Kepala Cabang Banyumas); b. M. Nur (Kepala Bagian pada Satuan Kerja Manajemen Risiko); c. Sri Murwati (Kepala Bagian pada Satuan Kerja Kepatuhan).	23 Juni 2020
75	Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2019.	25 Juni 2020
76	Penyampaian Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh KAP.	25 Juni 2020
77	Penyampaian Laporan Tahunan 2019.	29 Juni 2020
78	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Nurhadi (Kadiv Kredit).	30 Juni 2020
79	Laporan Pengangkatan Kembali Direksi a.n Sugeng Riyanto (Direktur Utama).	3 Juli 2020
80	Penyampaian Pengaduan Nasabah April - Juni 2020.	3 Juli 2020
81	Laporan Peserta Tabunganku Juni 2020.	3 Juli 2020
82	Pemberitahuan Jam Kerja PT BPR Surya Yudhakencana.	7 Juli 2020
83	Laporan Perkembangan Simpel Bank <i>Goes To School</i> .	8 Juli 2020
84	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat Periode Tahun 2020 Semester I.	14 Juli 2020
85	Laporan Keuangan Publikasi Triwulan II Tahun 2020.	14 Juli 2020
86	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Sasi Adiarto (Kepala Cabang Klampok).	14 Juli 2020
87	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inklusi Keuangan Tahun 2020 Semester I.	15 Juli 2020
88	Laporan Publikasi Keuangan Triwulan II Tahun 2020.	15 Juli 2020
89	Surat Pernyataan Daftar Negara Tujuan Pelaporan (SIPINA).	15 Juli 2020
90	Penyampaian Laporan Profil Risiko BPR Semester I Tahun 2020.	24 Juli 2020
91	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Wirawan Kurniaji (Kepala Cabang Baturraden).	27 Juli 2020
92	Pemberitahuan Hari dan Jam Kerja BSY.	29 Juli 2020
93	Laporan Tabunganku Agustus 2020.	4 Agustus 2020
94	Pemberitahuan Hari Kerja Khusus Bulan Agustus 2020 BSY.	6 Agustus 2020

95	Rencana Pindah Kantor Kas Karanglewas.	6 Agustus 2020
96	Penyampaian Laporan Perkembangan Simpel Juli 2020.	7 Agustus 2020
97	Penyampaian Laporan Data Simpel.	14 Agustus 2020
98	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n : a. Ananta Yudha Irianto (Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko); b. Prpto Oktarianto (Kepala Divisi Training, Penelitian dan Pengembangan).	18 Agustus 2020
99	Laporan Pengawasan RBB BSY Januari - Juni 2020.	25 Agustus 2020
100	Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Kas Karanglewas.	31 Agustus 2020
101	Rencana Pindah Alamat Kas Bojongsari.	31 Agustus 2020
102	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n : a. Susi Faiqoh (Kepala Divisi SDM). b. Dhiah Nurhayati (Kepala Divisi Pembukuan, <i>Treasury</i> dan Dana).	
103	Laporan Peserta Tabunganku Periode Agustus 2020.	4 September 2020
104	Laporan Perkembangan Simpel Agustus 2020.	8 September 2020
105	Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Kas Bojongsari.	14 September 2020
106	Laporan Rencana Penambahan Layanan Transaksi Elektronik Menggunakan <i>Smartphone</i> dan Mesin ATM <i>On Us</i> .	17 September 2020
107	Laporan Peserta Tabunganku September 2020.	2 Oktober 2020
108	Permohonan Persetujuan Penggunaan Lahan AYDA.	2 Oktober 2020
109	Penyampaian Laporan Simpel Bulanan dan Simpel <i>Goes To School</i> .	6 Oktober 2020
110	Pemberitahuan Hari Kerja dan Rencana Penutupan Sementara Kantor BSY Di Luar Hari Libur Resmi Tahun 2020.	9 Oktober 2020
111	Penyampaian Risalah <i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan Umum Tahun 2020.	21 Oktober 2020
112	Laporan Pengangkatan Dewan Komisaris BSY.	26 Oktober 2020
113	Publikasi Triwulan III Tahun 2020.	26 Oktober 2020
114	Penyampaian Hasil Tidak Lanjut Atas Pemeriksaan Umum PT BPR Surya Yudhakencana.	27 Oktober 2020
115	Permohonan Perubahan <i>Deadline</i> Tanggapan Pemeriksaan Umum PT BPR Surya Yudhakencana.	27 Oktober 2020
116	Pemberitahuan Perubahan Hari dan Jam Kerja PT BPR Surya Yudhakencana.	27 Oktober 2020
117	Penyampaian Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Periode Juli - September 2020.	28 Oktober 2020
118	Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n : a. Dhiah Nurhayati (Kepala Divisi Pembukuan dan Dana); b. Sri Murwati (Kepala Divisi Operasional dan <i>Treasury</i>); c. Nur Alam Rudwiyansah (Kepala Cabang Karangobar); d. Rojikin (Kepala Cabang Kalibening); e. Prawoto (Kepala Cabang PHBKIS).	2 November 2020
119	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Umum Tahun 2020 (RUPS Tanggal 27 Oktober 2020).	2 November 2020
120	Penyampaian Laporan Perkembangan Program Simpel Periode Oktober 2020.	6 November 2020
121	Penyampaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum BSY.	10 November 2020
122	Pengiriman Dokumen Kelengkapan Perubahan Anggota Komite Penjunjung Dewan Komisaris.	11 November 2020
123	Laporan Peserta Produk Tabunganku.	23 November 2020

124	Penyampaian Laporan Rencana Edukasi Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat Periode 2021.	23 November 2020
125	Penyampaian Laporan Rencana Kegiatan Inklusi Keuangan Tahun 2021.	23 November 2020
126	Laporan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Pada PT BPR Surya Yudhakencana.	24 November 2020
127	Penyampaian <i>Update Proses Development ATM Issuer</i> Periode Oktober 2020.	28 November 2020
128	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Umum.	30 November 2020
129	Permohonan Perubahan <i>Deadline</i> Tanggapan OJK.	30 November 2020
130	Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas Wanadri.	1 Desember 2020
131	Laporan Peserta Produk Tabunganku November 2020.	1 Desember 2020
132	Rencana Melakukan Kegiatan Operasional Di Luar Hari Kerja Operasional dan Hari Libur Nasional.	4 Desember 2020
133	Penyampaian Laporan Perkembangan Program Simpel November 2020.	7 Desember 2020
134	Penyampaian Kelengkapan Persyaratan Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.	7 Desember 2020

DAFTAR PELAPORAN KE BI

Selama tahun 2020 BSY telah mengirimkan laporan-laporan kepada Bank Indonesia (BI) dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Laporan	Tanggal Pelaporan
1	Laporan Peserta Tabunganku Desember 2019.	3 Januari 2020
2	Penyampaian <i>Update Proses Development ATM Issuer</i> BSY.	27 Januari 2020
3	Laporan Tabunganku Januari 2020.	3 Februari 2020
4	Laporan Peserta Tabunganku Februari 2020.	2 Maret 2020
5	Penyampaian <i>Update Proses Development ATM Issuer</i> BSY.	12 Maret 2020
6	Laporan Peserta Produk Tabunganku Maret 2020.	31 Maret 2020
7	Penyampaian <i>Development API ATM Issuer</i> Maret 2020.	31 Maret 2020
8	Laporan Tabunganku April 2020.	4 Mei 2020
9	Penyampaian <i>Update Proses Development ATM Issuer</i> BSY April 2020.	11 Mei 2020
10	Penyampaian <i>Update Proses Development ATM Issuer</i> BSY Mei 2020.	3 Juni 2020
11	Laporan Tabunganku Mei 2020.	4 Juni 2020
12	Laporan Peserta Tabunganku Juni 2020.	3 Juli 2020
13	Kelengkapan Dokumen Persyaratan BSY Sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.	8 Juli 2020
14	Penyampaian <i>Update Proses Development ATM Issuer</i> Periode Juli 2020.	6 Agustus 2020
15	Penyampaian <i>Update Proses Development ATM Issuer</i> Oktober 2020.	28 November 2020

DAFTAR PELAPORAN KE PIHAK AFILIASI

Selama tahun 2020 BSY telah mengirimkan laporan-laporan kepada pihak afiliasi dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Laporan	Tgl/Periode Laporan	Instansi Tujuan
1	Pembayaran Premi LPS.	20 Januari 2020	LPS
2	Laporan Bulanan Desember 2019.	21 Januari 2020	LPS
3	Penyampaian Surat Pernyataan.	31 Januari 2020	LPS
4	Laporan Keuangan Tahunan 2019.	15 April 2020	LPS
5	Laporan Audited 2019.	22 April 2020	LPS
6	Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta.	4 Juni 2020	Kapolri c.q. Kepala Detasemen 88
7	Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta.	19 Juni 2020	Kapolri c.q. Kepala Detasemen 88
8	Surat Pengantar Dokumen (Laporan Tahunan 2019).	1 Juli 2020	KEB Hana Indonesia (Bank Linkage)
9	Surat Pengantar Dokumen (Laporan Tahunan 2019).	1 Juli 2020	Bank Jateng (Bank Linkage)
10	Surat Pengantar Dokumen (Laporan Tahunan 2019).	1 Juli 2020	LPDB
11	Surat Pengantar Dokumen (Laporan Tahunan 2019).	1 Juli 2020	LPS
12	Surat Pengantar Dokumen (Laporan Tahunan 2019).	1 Juli 2020	CIMB Niaga (Bank Linkage)
13	Surat Pengantar Dokumen (Laporan Tahunan 2019).	1 Juli 2020	BJB (Bank Linkage)
14	Surat Pengantar Dokumen (Laporan Tahunan 2019).	1 Juli 2020	Danamon (Bank Linkage)
15	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	1 Juli 2020	KEB Hana Indonesia (Bank Linkage)
16	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	1 Juli 2020	Danamon (Bank Linkage)
17	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	1 Juli 2020	BJB (Bank Linkage)
18	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	1 Juli 2020	LPDB
19	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	1 Juli 2020	CIMB Niaga (Bank Linkage)
20	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	1 Juli 2020	Bank Jateng (Bank Linkage)
21	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	1 Juli 2020	LPS
22	Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta.	10 Juli 2020	Kapolri c.q. Kepala Detasemen 88
23	Surat Pengantar Surat Pernyataan a.n Hadi Supeno Sebagai Komisaris.	13 Juli 2020	LPS
24	Pembayaran Premi LPS.	14 Juli 2020	LPS
25	Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta.	24 Agustus 2020	Kapolri c.q Kepala Detasemen 88
26	Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta.	4 September 2020	Kapolri c.q Kepala Detasemen 88
27	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	11 November 2020	Bank Jateng
28	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	11 November 2020	Danamon
29	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	11 November 2020	BJB

30	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	11 November 2020	CIMB Niaga
31	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	11 November 2020	LPDB
32	Pemberitahuan Perubahan Pengurus.	11 November 2020	KEB Hana Ind
33	Permohonan Kebijakan Suku Bunga Giro.	21 Desember 2020	Bank Jateng
34	Penyampaian Surat Pernyataan LPS.	23 Desember 2020	LPS

Dalam hal keterbukaan informasi, BSY juga menggunakan jasa media massa dalam pembuatan berita atau *pers release* diantaranya:

No	Rilis	Media	Terbit
1	Bank Surya Yudha Undi Puluhan Hadiah	Suara Merdeka	2 Januari 2020
2	BSY Semprotkan Disinfektan Massal	Suara Merdeka	13 April 2020
3	BSY Peduli Gelar Penyemprotan Disinfektan	Suara Merdeka	21 April 2020
4	BPR Surya Yudha Salurkan Bantuan Peralatan Medis	Suara Merdeka	29 April 2020
5	BPR Bank Surya Yudha Group Bukukan Laba Rp 127,177 Miliar	Suara Merdeka	30 April 2020
6	Laporan Publikasi Keuangan BSY	Suara Merdeka	30 April 2020
7	Bank Jateng Percayakan Rp 75 Miliar ke BSY	Suara Merdeka	28 Mei 2020
8	Jadikan <i>New Normal</i> Sebagai <i>New Income</i>	Suara Merdeka	27 Juli 2020
9	Pak Ananta, Pilot Pengendali Baru Surya Yudha Group	Suara Merdeka	19 Agustus 2020
10	BPR Bank Surya Yudha Bagi-Bagi Hadiah	Suara Merdeka & Radar Banyumas	30 Desember 2020

RAPAT UMUM PEMENANG SAHAM (RUPS)

Selama tahun 2020 BSY telah melakukan 16 kali RUPS yang terdiri dari 1 kali RUPS Tahunan dan 15 kali RUPS Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut.

No	Pelaksanaan	Waktu	Keputusan RUPS/RUPSLB	Keterangan
1	Jumat, 14 Februari 2020	08.00-18.00 WIB	Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan plafon di atas Rp5M.	Telah dilaksanakan
2	Kamis, 5 Maret 2020	09.00-10.00 WIB	Pengangkatan kembali Anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Telah dilaksanakan
3	Senin, 23 Maret 2020	10.30-12.00 WIB	Penetapan gaji Pengurus 2020.	Telah dilaksanakan
4	Jumat, 3 April 2020	09.00-12.00 WIB	Fasilitas Kerja dan Kesejahteraan Pengurus.	Telah dilaksanakan

5	Kamis, 23 April 2020	09.00-11.00 WIB	1. Laporan Pertanggung jawaban Direksi Perseroan. 2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun 2019. 3. Pengambilan Deviden sebesar Rp40M.	Telah dilaksanakan
6	Senin, 4 Mei 2020	09.00-10.00 WIB	Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan
7	Senin, 18 Mei 2020	15.00-16.00 WIB	Pengesahan perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Telah dilaksanakan
8	Senin, 15 Juni 2020	10.00-11.00 WIB	Penetapan Gaji Pengurus 2020.	Telah dilaksanakan
9	Senin, 29 Juni 2020	08.00-09.00 WIB	Pengangkatan kembali Anggota Direksi Perseroan.	Telah dilaksanakan
10	Sabtu, 11 Juli 2020	13.00-17.45 WIB	<i>Next Generation</i> PT BPR Surya Yudhakencana.	Telah dilaksanakan
11	Selasa, 14 Juli 2020	09.00-10.00 WIB	Pemberian Uang Prestasi Kerja Semester I Tahun 2020 untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan
12	Jumat, 25 September 2020	10.00-12.00 WIB	Memo Dewan Komisaris No.33/MDK/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 perihal Susunan Pengurus (Direksi).	Telah dilaksanakan
13	Selasa, 20 Oktober 2020	13.00-15.00 WIB	Pengesahan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Telah dilaksanakan
14	Selasa, 27 Oktober 2020	08.00-09.00 WIB	Evaluasi terhadap Pemberian Remunerasi Kepada Anggota Direksi.	Telah dilaksanakan
15	Rabu, 18 November 2020	08.00-10.00 WIB	Rekomendasi Ketua Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit tentang Penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.	Telah dilaksanakan
16	Jumat, 18 Desember 2020	09.00-11.00 WIB	Pemberian Uang Prestasi Kerja Tahun 2020 untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan



SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh Kepala Divisi dan Wakil Kepala Divisi dimana kedudukan sesuai dengan Struktur Organisasi yaitu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsinya, SKAI wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris. Satuan Kerja Audit Intern terbagi menjadi 2 tim yaitu Tim A dan Tim B yang dipimpin oleh kepala Divisi dimana masing-masing tim terdiri dari 5 orang personil tim A dan 4 orang personil tim B.

STRUKTUR ORGANISASI SKAI

Satuan Kerja Audit Intern terbagi menjadi 2 (dua) tim yaitu Tim A dan Tim B yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dengan tim terdiri dari 4 (empat) orang personil tim A dan 5 (lima) orang personil tim B.

Tim A

1. Suroso, S.E
2. Budi Mulyanto
3. Nurdi Wardianto, S.E
4. Adi Setiawan Lastariadi
5. Perdana Bagus S, S.Si

Tim B

6. Aan Adriana, A.Md
7. Hariyadi Wahyu T, A.Md
8. Eko Diastuti, S.Si
9. Rifki Purnomo



Profil Pejabat SKAI

Andi Pratiswo, Kepala Divisi
Menjabat sebagai Kepala Divisi SKAI berdasarkan SK No. 19/DIR/Prs/IV/18 tanggal 13 April 2018. Lahir di Banjarnegara 26 November 1978, memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMK Cokroaminoto Banjarnegara lulus pada tahun 1999. Bergabung dengan BSY pada bulan Maret 2000.

Wirasto, Wakil Kepala Divisi
Menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi SKAI berdasarkan SK No 19/DIR/HRD/III/19 tanggal 1 Maret 2019. Lahir di Sragen 12 Desember 1979, memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 STIE LPI Makasar lulus pada tahun 2004. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei 2007.

Suroso, Kepala Bagian SKAI Tim A

Menjabat sebagai Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Intern berdasarkan SK No. 398/DIR/HRD/V/18 25 Mei 2018. Lahir di Banjarnegara 29 September 1974, memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Jurusan Manajemen UPN Jogjakarta lulus pada tahun 1998. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni 1999.

Aan Adriana, Kepala Bagian SKAI Tim B

Menjabat sebagai Kepala Bagian SKAI Tim B berdasarkan SK No 20/DIR/HRD/III/19 tanggal 1 Maret 2019. Lahir di Banjarnegara 14 Desember 1971, memiliki latar belakang pendidikan terakhir D3 Manajemen Informatika STIMIK AKAKOM Jogjakarta lulus pada tahun 1996. Bergabung dengan BSY pada bulan Maret 2003.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Adapun tugas dan tanggung jawab SKAI, meliputi :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BSY yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya SKAI memiliki wewenang, antara lain :

1. Memiliki akses penuh dan tidak terbatas atas segala data dan informasi perusahaan untuk keperluan proses audit.
2. Melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap sistem kerja pada semua unit kegiatan di lingkungan BSY.
3. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi audit intern secara independen.
4. Memperoleh penjelasan dari semua level manajemen berkenaan dengan pelaksanaan tugas SKAI.
5. Mendapatkan akses kepada pihak ekstern, yaitu nasabah ataupun pihak lain untuk melakukan verifikasi dalam bentuk wawancara maupun pemeriksaan lainnya dalam rangka proses audit.

6. Menyampaikan laporan hasil audit, termasuk hambatan dan tindak lanjut yang telah, sedang, dan atau belum dilakukan manajemen kepada Direksi tembusan kepada Dewan Komisaris.

LAPORAN HASIL AUDIT TAHUN 2020

Kinerja yang dicapai oleh Bagian SKAI pada tahun 2020 antara lain :

1. SKAI Tim A telah melakukan pemeriksaan rutin pada 13 Kantor Cabang dan 26 Kantor Kas.
2. SKAI Tim B telah melakukan pemeriksaan rutin pada 15 Kantor Cabang dan 20 Kantor Kas.
3. SKAI Tim A dan Tim B telah melakukan pemeriksaan rutin pada 1 Kantor Pusat (18 Bagian), 2 Cabang dan 4 Kantor Kas.
4. Telah membuat 30 buah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan sasaran pada Bagian Umum, Personalia, Pembukuan, Tabungan, Deposito, Kasir, APU PPT dan Kredit.
5. Pada tahun 2020 belum sepenuhnya membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dengan metode *Risk Based Audit* (RBA) untuk seluruh cabang yang diperiksa, dimana baru membuat 13 buah pelaporan, namun pada prinsipnya telah menerapkan metode RBA dalam pelaksanaannya.
6. Telah melakukan pemeriksaan pada Bagian Teknologi Informasi pada tanggal 4 sampai dengan 15 Februari 2020 dan membuat hasil laporan khusus pemeriksaan Teknologi Informasi Kantor Pusat Banjarnegara.
7. Telah membuat bukti temuan dan bukti koreksi atas Laporan Hasil pemeriksaan tersebut diatas dengan tanggapan pimpinan cabang/bagian yang diperiksa.
8. Memberikan saran atas hasil temuan pemeriksaan untuk melakukan koreksi sesuai SOP.
9. Melakukan pemantauan dan pengecekan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern maupun ekstern (OJK).
10. Telah melakukan pemeriksaan sidak dan pemeriksaan malam.
11. Telah melakukan pemeriksaan khusus.
12. Memberikan materi pendidikan untuk karyawan baru mengenai tugas SKAI dan contoh kasus penyimpangan sebagai bentuk pembelajaran.
13. Memberikan materi pendidikan kepada petugas perkreditan tentang contoh kasus-kasus yang

terjadi dari hasil pemeriksaan SKAI agar tidak terjadi di kantor cabang/bagian/kas lain.

14. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran SOP dalam hal pelanggaran atas kode etik karyawan Bank.
15. Telah membuat pelaporan ke OJK meliputi :
 - a. Laporan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2020.
 - b. Laporan audit intern teknologi informasi tahun 2020.

KEPATUHAN

Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku merupakan aspek yang sangat penting. Dimana BPR merupakan industri keuangan yang menerapkan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu kepatuhan merupakan tanggungjawab seluruh individu BPR yang harus dapat diwujudkan menjadi budaya kepatuhan. BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan intern, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR. Selain itu Direksi juga bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada BPR, dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Penerapan fungsi kepatuhan BPR secara struktural dilakukan dengan diangkatnya Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dibentuknya Satuan Kerja Kepatuhan.

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penerapan fungsi kepatuhan BPR secara struktural dilakukan dengan diangkatnya Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dibentuknya Satuan Kerja Kepatuhan.

Fungsi Kepatuhan BSY dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Kepatuhan Wilayah yang berada di bawah naungan Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun tugas dan fungsi kepatuhan adalah membantu perusahaan dalam penilaian independen terhadap kegiatan manajemen perusahaan telah dilakukan secara patuh terhadap peraturan, ekonomis, efisien dan efektif serta menciptakan budaya kepatuhan.

STRUKTUR ORGANISASI KEPATUHAN

Fungsi kepatuhan BSY dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Kepatuhan Wilayah di bawah tanggung jawab Divisi KMR (Kepatuhan dan Manajemen Risiko). Selain dibentuknya Satuan Kerja Kepatuhan di kantor pusat sebagai pelaksana teknis penerapan fungsi kepatuhan secara menyeluruh, BSY juga memiliki petugas kepatuhan wilayah yang bertugas dan ditempatkan di seluruh kantor wilayah BSY untuk membantu menjalankan fungsi kepatuhan di seluruh kantor BSY sesuai yang dibawahkan kantor wilayahnya masing-masing, di bawah koordinasi Satuan Kerja Kepatuhan.

Petugas kepatuhan wilayah juga merangkap sebagai pelaksana manajemen risiko wilayah yang disebut sebagai Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko Wilayah (KMW).



TEKNIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab melakukan pemantauan dan wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Penerapan fungsi kepatuhan terkait pemenuhan komitmen atas penyelesaian hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan Direksi melaporkan tindak lanjut pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu juga melaporkan secara rutin Laporan terkait pelaksanaan fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2020

Kepatuhan BSY terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan, perjanjian dan komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau otoritas lainnya diwujudkan dengan pelaksanaan peran Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan didukung oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Kepatuhan Wilayah yang berkoordinasi dengan seluruh unit kerja yang ada di perusahaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.

Di tahun 2020 karena adanya perubahan pengurus BSY dimana terdapat periode belum terdapat anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang secara sah menjabat karena proses perizinan pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan belum selesai. Oleh karena hal tersebut maka koordinasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan oleh Kepala Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Menyusun ketentuan sesuai dengan tata urutan peraturan perundangan terkait seluruh ketentuan intern yang dikeluarkan BSY yang harus dikinikan sesuai dengan perubahan peraturan dari otoritas.
2. Melakukan pengkajian atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
3. Memberikan opini kepatuhan terhadap penyimpangan dari pedoman pelaksanaan kerja yang berlaku. Opini Kepatuhan yang dikeluarkan selama tahun 2020 berjumlah 5 (lima) opini.

4. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya.
5. Menyampaikan laporan kepatuhan secara tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Laporan Kepatuhan) dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Menyampaikan Laporan dan *Self Assessment* Tata Kelola secara tahunan.
7. Menjalankan fungsi penanggung jawab pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).
8. .Melaporkan secara rutin pelaporan yang harus dilakukan terkait penerapan APU dan PPT.
9. Mereview kebijakan dan prosedur yang terkait dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan budaya kepatuhan.
11. Mengevaluasi fungsi kepatuhan di kegiatan bisnis Bank dan kinerja unit kerja di bawah koordinasinya.
12. Melakukan monitoring dan sosialisasi atas terbitnya ketentuan internal dan atau eksternal kepada seluruh jajaran karyawan.
13. Memastikan terpenuhinya komitmen atas Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau otoritas lainnya sesuai batas waktu yang ditentukan.
14. Menyusun program kerja dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan perusahaan sesuai dengan budaya kerja yang telah disepakati bersama
15. Melakukan visitasi, *coaching* dan *counseling* kepada satuan-satuan kerja

PENERAPAN ANIT PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

BSY terus melakukan penyempurnaan dalam penerapan APU dan PPT khususnya terkait kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang telah dikinikn dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, BSY juga telah melakukan:

1. Pelatihan dan sosialisasi APU PPT secara rutin setiap tahunnya.
2. Membuat dan mengadministrasikan daftar nama nasabah yang mirip dengan nama teroris.
3. Melakukan kewajiban pelaporan kepada PPAK berupa:
 - a. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan/ atau Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
 - b. Laporan triwulanan pengguna jasa baru.
4. Pengkinian data nasabah secara berkelanjutan dan melaporkan rencana dan tindak lanjut pengkinia data kepada OJK.
5. Pengkinian terhadap dokumen-dokumen dan ketentuan Penerapan APU PPT disesuaikan dengan Peraturan OJK terbaru.

Tabel data jumlah pelaporan LTKT dan LTKM tahun 2020

Laporan	Jumlah
LTKT	195
LTKM	2

AKUNTAN PUBLIK

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dimana dijelaskan bahwa bagi BPR yang mempunyai total aset lebih besar atau sama dengan Rp10 miliar harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan BSY periode akhir tahun senantiasa diaudit oleh audit eksternal yang mempunyai kredibilitas dan memiliki peran untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan bank.

Audit kantor akuntan publik memiliki fungsi untuk melakukan audit laporan keuangan bank serta menguji pengendalian internal. Adapun ruang lingkup pekerjaan audit meliputi Laporan Keuangan, Pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern, Pembukuan dan Operasi BPR.

Berikut kami sajikan informasi mengenai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap BSY.

JUMLAH PERIODE KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DAN AKUNTAN PUBLIK (AP)

Berikut KAP dan AP yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan BSY tahun buku selama 3 (tiga) tahun.

Periode	Nama KAP	Periode KAP	Alamat	Akuntan
2018	KAP Heliantono dan rekan	1	Jl. Tegalsari Barat V No. 24 Semarang	Drs. Sugandhi, CPA No izin Akuntan Publik AP. 1417
2019	KAP Heliantono dan rekan	1	Jl. Tegalsari Barat V No. 24 Semarang	Junadi, SE, M.Si, Ak, CPA No izin Akuntan Publik AP. 1417
2020	KAP Heliantono dan rekan	1	Jl. Tegalsari Barat V No. 24 Semarang	Junadi, SE, M.Si, Ak, CPA No izin Akuntan Publik AP. 1417

HASIL PEMERIKSAAN

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tahun	Opini
2018	Laporan keuangan konsolidasi disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
2019	Laporan keuangan konsolidasi disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
2020	Laporan keuangan konsolidasi disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

FEE JASA AUDIT

Sebagai informasi, berikut adalah *fee* jasa audit 3 (tiga) tahun terakhir.

Tahun	Fee Audit * include PPN (Rp jutaan)
2018	50
2019	55
2020	55

Seluruh KAP dan AP di atas tidak mendahulukan jasa lain selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada BSY.

MANAJEMEN RISIKO

Acuan dasar penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR No.13/POJK.03/2015.

Manajemen Risiko diterapkan melalui suatu kerangka kerja dan Tata Kelola Manajemen Risiko dan mengikuti tahapan proses manajemen risiko yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada semua jenjang organisasi.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi dan rencana strategik Bank serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas fungsional Bank.

BSY telah melakukan penyusunan kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko sejak tahun 2017 guna memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan Manajemen Risiko yang telah disusun BSY telah memuat antara lain :

1. Ruang Lingkup Manajemen Risiko.
2. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang meliputi :
 - a. Kebijakan Manajemen Risiko.
 - b. Prosedur Manajemen Risiko.
 - c. Penetapan Limit Risiko.
4. Kecukupan Proses dan Sistem.
 - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
 - b. Sistem informasi Manajemen Risiko.
5. Sistem Pengendalian Intern.
6. Profil Risiko:
 - a. Manajemen Risiko Kredit.
 - b. Manajemen Risiko Operasional.
 - c. Manajemen Risiko Kepatuhan.

d. Manajemen Risiko Likuiditas.

e. Manajemen Risiko Reputasi.

f. Manajemen Risiko Strategik.

7. Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru.

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi BSY terus melengkapi kebijakan pengelolaan risiko yang diperlukan melalui penyusunan dan pemberlakuan berbagai kebijakan dan prosedur yang terkait implementasi Tata Kelola.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Fungsi pengelolaan Manajemen Risiko BSY dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko Wilayah di bawah tanggung jawab Divisi KMR (Kepatuhan dan Manajemen Risiko).

Selain dibentuknya Satuan Kerja Manajemen Risiko di kantor pusat sebagai pelaksana teknis penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, BSY juga memiliki petugas manajemen risiko wilayah yang bertugas dan ditempatkan di seluruh kantor wilayah BSY untuk membantu menjalankan manajemen risiko di seluruh kantor BSY sesuai yang dibawahkan kantor wilayahnya masing-masing, di bawah koordinasi Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Petugas manajemen risiko wilayah juga merangkap sebagai pelaksana fungsi kepatuhan wilayah yang disebut sebagai Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko Wilayah (KMW).

Terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, BSY juga memiliki :

1. Komite Manajemen Risiko yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas kebijakan mengenai Manajemen Risiko di BSY.
2. Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan penerapan Manajemen Risiko Bank.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2020

Penerapan manajemen risiko BSY di tahun 2020 diantaranya:

1. Melakukan penerapan Manajemen Risiko terhadap 6 risiko yaitu:

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjamannya kepada Bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan Bank.

Aktivitas manajemen risiko Kredit yang diterapkan oleh BSY di tahun 2019 adalah:

- Mengawal proses penyesuaian perhitungan PPAP sesuai POJK No.33/POJK.03/2018 dan POJK No. 11/POJK.03/2020.
- Memberikan masukan dan pertimbangan risiko kepada Komite Kredit dalam memutuskan pemberian, perpanjangan, ataupun pengurangan fasilitas Kredit kepada debitur.
- Melaksanakan fungsi *credit review* dalam memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu proposal Kredit.
- Melakukan analisa risiko kredit terhadap pengajuan kredit kewenangan kepala wilayah sampai dengan Direksi.
- Bersama tim kredit turut serta dalam melakukan survei terhadap pengajuan kredit dalam rangka mitigasi risiko.
- Memantau proses kelengkapan dokumen kredit sebelum dan setelah pencairan, termasuk proses pengikatan agunan.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan stimulus kredit terdampak Covid-19.

Usaha-usaha yang dilakukan secara khusus untuk mengelola risiko Kredit di tahun 2020 adalah:

- Memantau *Account Officer* (AO) dalam menangani keterlambatan angsuran dalam batas 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan.
- Melakukan kunjungan langsung ke rumah debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran.
- Mengirimkan surat peringatan penjualan agunan.
- Melakukan pengawasan dan mengevaluasi

hasil kerja petugas Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB).

- Melakukan negosiasi penyelesaian Kredit bermasalah dengan debitur beserta penjamin.
- Melakukan gugatan sederhana bekerjasama dengan Pengadilan Negeri di semua wilayah operasional BSY.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama bagi petugas *Account Officer* (AO) dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) melalui kegiatan pendidikan, pelatihan maupun seminar.
- Melakukan lelang terhadap kredit-kredit bermasalah melalui badan lelang KPKNL.
- Bekerjasama dengan pihak Kepolisian guna melakukan tindakan preventif dalam hal terjadi penggelapan/kehilangan agunan (terutama kendaraan bermotor).
- Pemetaan Kredit bermasalah berdasarkan prioritas penanganan Kredit bermasalah.
- Melakukan penjualan agunan.
- Menyusun profil risiko kredit setiap semester.
- Memantau kredit-kredit yang diberikan stimulus akibat pandemi Covid-19.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan bagian melekat dalam aktivitas perbankan sehari-hari yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegagalan sistem, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian Bank sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank.

Aktivitas Manajemen Risiko untuk mengantisipasi risiko operasional di tahun 2020 adalah:

- Meningkatkan fungsi pengawasan melekat pimpinan satuan kerja.
- Meregister seluruh kesalahan operasional transaksi dan permohonan pembukaan *flag* pada menu sistem *core banking* yang berhubungan dengan perbaikan transaksi.
- Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengamanan dan pengendalian transaksi.
- Melakukan proses pengendalian intern yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

- Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko operasional.
- Mengadministrasikan data histori risiko operasional untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.
- Menyusun profil risiko operasional setiap semester.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum, yaitu perilaku BPR yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku BPR yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Tujuan utama manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko kepatuhan yang berpotensi terjadi.

Aktivitas Manajemen Risiko untuk mengantisipasi risiko kepatuhan di tahun 2020 adalah:

- Melakukan tinjauan SOP (*Standard Operating Procedure*) terhadap seluruh produk dan bagian di BPR disesuaikan dengan kondisi terkini BPR.
- Mengkomunikasikan kebijakan baik intern maupun ekstern kepada seluruh karyawan pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan kajian terhadap seluruh konsep kebijakan dan ketentuan yang akan ditetapkan dan memastikan bahwa seluruh konsep tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memasukkan materi Pedoman Kode Etik dan Tata Perilaku ke dalam *In House Training* (IHT) Next Gen (karyawan baru).
- Membuat *timeline* daftar kewajiban bulanan yang harus dilaksanakan, terutama kewajiban terkait kewajiban dengan pihak ekstern, yang kemudian dikirimkan kepada seluruh kantor BSY.
- Melakukan pengecekan terhadap dokumen pengajuan Kredit sebelum pencairan

dengan plafon kewenangan kepala wilayah ke atas dengan memberikan opini kepatuhan dan rekomendasi manajemen risiko.

- Melakukan kunjungan ke kantor-kantor bagian/cabang/kas untuk meninjau kembali tingkat kepatuhan kantor tersebut terhadap ketentuan yang berlaku.
- Menyusun profil risiko kepatuhan setiap semester.

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR. Tujuan utama Manajemen Risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan BPR dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. BPR perlu memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan. Risiko likuiditas disebut juga sebagai Risiko derajat kedua (*second tier risk*) karena sering ditimbulkan oleh Risiko lain, antara lain Risiko kredit dan Risiko reputasi. Risiko ini juga sangat terkait dengan faktor eksternal antara lain kondisi makro ekonomi dan kebijakan yang berpengaruh pada ketersediaan sumber dana dan/atau likuiditas pasar.

Aktivitas Manajemen Risiko untuk mengantisipasi risiko likuiditas di tahun 2020 adalah:

- Meningkatkan fungsi pemantauan dan monitoring terhadap dana bank yang ditempatkan pada lembaga perbankan lain.
- Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengendalian pelepasan kredit (kredit yang diberikan) terhadap total dana pihak ketiga.
- Menetapkan kebijakan likuiditas dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko likuiditas.

- Mengadministrasikan data histori risiko likuiditas untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.
 - Menyusun profil risiko likuiditas setiap semester.
- e. Risiko Reputasi
- Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR. Tujuan utama penerapan Manajemen Risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari Risiko reputasi BPR. Risiko reputasi merupakan Risiko yang tidak berdiri sendiri, melainkan Risiko derajat kedua (*second tier risk*) yaitu Risiko yang terjadi karena dipicu oleh Risiko lain seperti Risiko kredit, Risiko likuiditas, atau Risiko operasional. Dengan demikian, dalam menilai Risiko reputasi perlu dipahami keterkaitan antara Risiko reputasi dan Risiko lainnya.
- Menetapkan kebijakan reputasi dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko reputasi.
 - Mengadministrasikan pengaduan nasabah dan tindak lanjut pengaduan nasabah secara rutin.
 - Melakukan laporan publikasi keuangan secara rutin pertahun dan tri wulanan.
 - Transparansi produk dan layanan BPR melalui media cetak maupun elektronik serta melalui kegiatan sosialisasi kepada nasabah dan mitra bisnis BPR.
 - Mengadministrasikan data histori risiko reputasi untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.
 - Menyusun profil risiko reputasi setiap semester.

- f. Risiko Reputasi
- Risiko strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik penting karena kelemahan BPR dalam mengelola Risiko strategik dapat menurunkan posisi kompetitif BPR di industri serta berpotensi memicu kegagalan bisnis BPR secara keseluruhan. Risiko strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penerapan Manajemen Risiko strategik bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Aktivitas Manajemen Risiko untuk mengantisipasi risiko strategik di tahun 2020 adalah:
- Menetapkan kebijakan strategik yang tercermin dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko strategik.
 - Mengadministrasikan data histori risiko strategik dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.
 - Menyusun profil risiko strategik setiap semester.



LAPORAN PROFIL RISIKO TAHUN 2020

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Sedang	Memadai	2
Risiko Operasional	Rendah	Memadai	2
Risiko Kepatuhan	Rendah	Memadai	2
Risiko Likuiditas	Rendah	Memadai	2
Risiko Reputasi	Sangat Rendah	Memadai	1
Risiko Strategik	Rendah	Memadai	2
Peringkat Risiko			2 (rendah)

Dari hasil analisis terhadap hasil *self-assessment* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa profil risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian manajemen.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem pengendalian intern keuangan dan operasional yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berdasarkan *best proactive* yang meliputi:

1. Keefektifan dan efisiensi operasional, meliputi pencapaian tujuan atau target termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas dan keamanan sumber daya (aset).
2. Pelaporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya
3. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan sudah dipatuhi dengan semestinya.

Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan kegiatan mengamati, meneliti proses kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa, mencegah, dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI INTERNASIONAL (COSO)

1. Prosedur analitis terdiri dari kegiatan yang mempelajari dan membandingkan data yang

memiliki hubungan untuk menghasilkan bukti analitis.

2. Menginspeksi yaitu meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau pemeriksaan secara mendalam atas dokumen catatan atau pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud, dengan cara ini auditor dapat membuktikan keaslian suatu dokumen.
3. Mengkonfirmasi yaitu suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independent dari luar perusahaan.
4. Mengajukan pertanyaan, dimana hal ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis yaitu pertanyaan bisa dilakukan kepada sumber intern pada perusahaan atau pada pihak luar.
5. Menghitung dengan prosedur yang paling umum dilakukan yaitu :
 - a. Melakukan perhitungan fisik atas barang-barang berwujud.
 - b. Menghitung dokumen bernomor tercetak. Tindakan yang pertama dimaksudkan untuk mengevaluasi bukti fisik dari jumlah yang ada sedangkan yang kedua merupakan cara untuk mengevaluasi bukti dokumen khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan catatan akuntansi.

6. Menelusuri kegiatan yang biasa dilakukan yaitu:
 - a. Memilih dokumen yang di buat pada saat transaksi terjadi.
 - b. Menentukan bahwa dokumen pada transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat dalam catatan akuntansi.
 7. Mencocokkan ke dokumen, meliputi :
 - a. Memilih jurnal tertentu dalam catatan akuntansi.
 - b. Mendapatkan dan menginspeksi dokumen yang menjadi dasar pembuatan jurnal tersebut untuk menentukan validasi dan ketelitian transaksi yang dicatat.
 8. Mengamati aktivitas kegiatan rutin dari suatu tipe transaksi.
 9. Melakukan ulang, auditor juga bisa melakukan ulang beberapa aspek dalam proses transaksi tertentu untuk memastikan bahwa proses yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan pengendalian yang telah ditetapkan.
 10. Teknik audit berbantu komputer, apabila catatan akuntansi dilaksanakan dalam media elektronik maka auditor perlu menggunakan komputer dalam menggunakan berbagai prosedur audit di atas.
2. Pengamanan atas harta perusahaan dan sistem pencatatan yaitu bentuk fisik dari harta perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, dan rusak karena kecerobohan, kecuali hal-hal tersebut dilindungi dengan pengawasan yang cukup memadai. Hal yang sama akan terjadi dengan harta perusahaan yang tidak berbentuk fisik seperti piutang, dokumen-dokumen penting, dan catatan lainnya, sehingga harus dilakukan peningkatan sistem pengamanan harta perusahaan tertentu dan catatan atau dokumen penting lainnya. Dengan sistem komputer, jumlah data yang tersimpan dalam file *magnetic tape* juga dapat dicuri dan dimusnahkan, sehingga pengawasan dan pengamanan atas sistem komputerisasi harus dilakukan dengan ketat.
 3. Mempromosikan efisiensi dalam bidang operasional yaitu pengawasan yang berada dalam organisasi perusahaan bertujuan untuk menghindari duplikasi pekerjaan, melindungi segala hal yang mempengaruhi bidang usaha, dan hal-hal lain atas penggunaan sumber-sumber dalam perusahaan yang tidak efisien.
 4. Menyarankan dipatuhinya semua kebijaksanaan tertulis yaitu manajemen mempunyai suatu misi yang ingin dicapai dengan sistem dan prosedur, serta peraturan-peraturan perusahaan. Sistem pengendalian internal diciptakan agar dapat dilakukan oleh semua karyawan.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Tersedia data yang dapat dipercaya yaitu manajemen harus mempunyai sumber informasi yang akurat atas kegiatan operasional perusahaan, beragam informasi dengan cakupan yang luas akan sangat membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat.

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan tetap dan karyawan kontrak yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya.

Internal <i>Fraud</i> Dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Karyawan Tetap		Karyawan Tidak Tetap Kontrak	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	12	15	1	-
Selesai	-	-	-	-	12	15	1	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wujud komitmen BSY untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Melalui program-program CSR, BSY telah turut berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, BSY berharap dapat membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan melalui pelaksanaan program-program CSR, karena masyarakatlah yang membesarkan nama BSY.

Dalam perkembangannya BSY terus menerus berupaya menyempurnakan dan mengembangkan program-program CSR agar dapat lebih memberikan dampak positif bagi BSY sendiri maupun masyarakat di sekitar.

KEBIJAKAN CSR BSY

Kebijakan CSR BSY tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No. 17/KEP/DIR/A/VII/2019 tentang Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) tertanggal 15 Juli 2019. Pedoman Kebijakan Program CSR merupakan bentuk komitmen tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kebijakan dan kegiatan operasionalnya terhadap masyarakat maupun lingkungan melalui pengelolaan yang transparan, beretika dan tentunya saling memberikan manfaat (*fair shared value*) yang berkelanjutan, sehingga dapat dikomunikasikan dengan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi yang efektif.

Dalam hal mengintegrasikan program CSR ke dalam kegiatan bisnis perusahaan, maka BSY berkomitmen untuk:

1. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal terutama pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keselamatan, keagamaan, sosial budaya, pelestarian lingkungan, nasionalisme, seni dan olahraga serta nasionalisme/patriotisme.

2. Memberikan manfaat pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat luas melalui meningkatkan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
3. Memprioritaskan penerima manfaat ataupun kontribusi di wilayah terdekat operasional perusahaan, ataupun yang berkaitan langsung dengan dampak aktivitas perusahaan.
4. Meningkatkan reputasi positif perusahaan, efisiensi dan pertumbuhan usaha.

Sasaran :

Menjadi BPR Regional di Jawa Tengah yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan hidup untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Langkah mencapai sasaran :

1. Melaksanakan komitmen dalam pelaksanaan program CSR yang akan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan.
2. Melaksanakan tanggung jawab dan kepedulian sosial serta lingkungan sebagai bentuk peran serta aktif dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
3. Membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung tujuan perusahaan menjadi bank terkemuka di daerah dengan membangun citra dan reputasi yang baik.

PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Terdapat 7 (tujuh) prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penyusunan program CSR, yaitu:

1. Akuntabilitas
Hasi pelaksanaan kegiatan terhadap masyarakat, ekonomi dan lingkungan hidup harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi
Terdapat transparansi terhadap keputusan dan kegiatan perusahaan yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan hidup.
3. Perilaku Etis
Perilaku didasarkan pada kejujuran, keadilan dan integritas; sebagai bentuk kepedulian terhadap manusia, hewan, dan lingkungan hidup. Menunjukkan komitmen untuk menangani dampak kegiatan dan keputusan yang diambil.

4. Menghormati Kepentingan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).
Menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Menghormati Aturan Hukum
Menerima bahwa menghormati aturan hukum adalah keharusan (*mandatory*).
6. Menghormati Norma-Norma Perilaku Internasional
Menghormati norma-norma perilaku internasional, sambil berpegang pada prinsip menghormati peraturan hukum.
7. Menghormati Hak Asasi Manusia
Menghargai hak asasi manusia dan mengakui pentingnya hak asasi manusia maupun universalitas hak asasi manusia.

PENGUKURAN KEBERHASILAN CSR

Program CSR dinilai berhasil apabila:

1. Mampu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari produk, jasa, proses bisnis serta keputusan perusahaan.
2. Memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan (aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup).
3. Sesuai karakteristik organisasi, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat setempat serta kearifan lokal.
4. Terintegrasi antara perencanaan dengan implementasinya.
5. Memenuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak pada setiap tahapannya.
7. Mampu mendorong pihak lain dalam lingkaran pengaruhnya (*sphere of influence*) untuk juga berperilaku bertanggung jawab sosial.
8. Merupakan proses perbaikan terus-menerus (*continues improvement*).

KOMUNIKASI DAN INFORMASI CSR

Perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh publik; dan melakukan komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), dengan tujuan:

1. Menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*):
 - a. Mengenai prioritas, strategi dan kinerja tanggung jawab sosialnya;

- b. Dalam bentuk Laporan CSR yang termuat dalam Laporan Tahunan dan/atau dalam bentuk lainnya seperti materi di *website* perusahaan dan sebagainya.
3. Memperoleh informasi, masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

DANA CSR

Sebagai wujud komitmen BSY dalam menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian strategi inti, perusahaan secara konsisten menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Di tahun 2020 BSY mengalokasikan dana CSR sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Adapun dana CSR tahun 2020 yang telah disalurkan sebagai berikut.

Kegiatan CSR	Biaya (dalam jutaan Rp)
Kepedulian terhadap lingkungan	24.030
Pengembangan sosial kemasyarakatan	
a. Bidang rohani	282.600
b. Bidang kesehatan masyarakat	12.555
c. Bidang sosial	79.689
TOTAL	398.874

PELAKSANAAN PROGRAM CSR Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup

BSY berupaya untuk berperan aktif langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui beberapa hal sebagai berikut:

Adanya surat himbauan dari Direksi mengenai:

1. Surat Edaran Direksi No. 4/SE/DIR/A/I/2020 Efisiensi Penggunaan Energi dan Upaya *Zero Wasted* yang berisi:
 - a. Upaya penghematan listrik dengan cara:
 - Mematikan penerangan dan perangkat elektronik pada ruang rapat yang tidak digunakan.
 - Menyalakan lampu kamar mandi seperlunya, atau dimatikan jika kamar mandi tidak digunakan.
 - Penggunaan AC pada ruang kerja seperlunya, AC harus dalam keadaan mati bila ruang tersebut tidak sedang digunakan.
 - Lampu teras dan lampu taman wajib dimatikan pada pagi hari.
 - Pengecekan panel dan instalasi listrik wajib dilakukan secara berkala.

- b. Konsumsi air

Dalam keseharian kami selalu menghimbau karyawan untuk melakukan penghematan air dengan cara:

 - Menggunakan air seperlunya.
 - Membuka kran separuh putaran sehingga air yang keluar tidak berlebihan.
 - Mengganti kran, *shower* yang bocor atau tidak bekerja dengan baik.
 - Merawat peralatan pipa air, kran dan penampungan air dengan baik.
 - Memperbaiki kebocoran atau rembesan dari kran, wastafel & *closet*.
 - Memperbaiki instalasi pipa air yang rusak.
- c. Efisiensi penggunaan kertas (*paperless*) dengan cara:
 - Mempergunakan kembali kertas bekas (kertas yang satu sisi bagiannya pernah dipakai namun sisi yang lain masih bersih dan bisa digunakan untuk mencetak) untuk pengajuan berkas yang masih bersifat *draft*.
 - Meminimalisir penggunaan tisu. Kantor hanya menyediakan tisu pada tempat-tempat tertentu misalnya seperti kamar mandi, ruang tamu, ruang rapat dan ruang kerja Direksi serta Komisariss.
 - Pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk *paperless*.
- d. Pengurangan sampah plastik dengan cara:
 - Tidak menyediakan air minum kemasan sekali pakai pada acara rapat dan kegiatan training internal.
 - Menyediakan galon air minum dan gelas di setiap ruang kerja dan ruang rapat.
 - Bungkus cinderamata diupayakan tidak menggunakan bungkus plastik.
 - Penyediaan tempat sampah, peralatan kerja dan hiasan ruangan diupayakan tidak berbahan plastik.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

BSY berkomitmen untuk memperlakukan tenaga kerja (karyawan) sebagai aset yang berharga bagi perusahaan dengan beberapa kebijakan yang dilakukan terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja tahun 2020 diantaranya:

1. Memberikan upah dan gaji di atas batas UMR masing-masing Kabupaten dimana terdapat kantor BSY.

2. Melakukan penilaian kerja secara berkala sebagai dasar penentuan *reward and punishment* dan jenjang karir.
3. Memberikan hak cuti sesuai dengan ketentuan Kementerian Tenaga Kerja yaitu 12 hari dalam 1 tahun.
4. Mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat internal maupun eksternal untuk meningkatkan kompetensi seluruh karyawan.
5. Mengikutsertakan para karyawannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.
6. Mengikutsertakan para karyawannya dalam program persiapan pensiun yaitu melalui fasilitas JHT (Jaminan Hari Tua) melalui BPJS ketenagakerjaan dan juga kepesertaan pada Tabungan Pensiun dalam internal BSY sendiri.
7. Mengadakan medical check up rutin tahunan bagi pejabat yang berusia 40 tahun ke atas.
8. Mendatangkan secara rutin petugas cek kesehatan mata gratis untuk para karyawan.
9. Membuat dan memasang poster indikator urine di seluruh kamar mandi kantor BSY.
10. Mengadakan kegiatan olah raga rutin mingguan untuk para karyawan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Faktor kunci untuk keberhasilan dan keberlanjutan Perusahaan di masa yang akan datang adalah membangun rasa kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ini dilakukan dengan program pengembangan masyarakat yang kuat dan partisipatif. Berikut adalah aktivitas Tanggung Jawab Sosial BSY yang di kelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang yaitu bidang rohani, kesehatan dan sosial.

1. Bidang Rohani
 - a. Turut serta dalam perayaan Hari Raya Idul Adha dengan menyumbangkan hewan kurban berupa kambing, yang dilakukan oleh masing-masing kantor baik kantor cabang maupun kantor kas, dengan jumlah kurang lebih 80 ekor.
 - b. Pemberian bantuan dana untuk TPQ dan pembangunan dan renovasi tempat ibadah di wilayah kerja BSY.
 - c. Pemberian bantuan dana terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka perayaan Hari Besar Keagamaan.

2. Bidang Kesehatan
 - Bantuan alat kesehatan untuk rumah sakit/ puskesmas.
3. Bidang Sosial
 - a. Bantuan berupa santunan kepada yayasan-yayasan sosial yang berada di wilayah kerja BSY.
 - b. Bantuan kepada warga kurang mampu di wilayah kerja BSY.
 - c. Bantuan korban bencana alam.
 - d. Bantuan sosial berupa pemberian sembako bagi masyarakat yang menjadi korban PHK akibat penutupan/pengurangan tenaga kerja sejumlah industri di wilayah kerja BSY.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Nasabah

BSY berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabahnya, oleh karena itu BSY melakukan hal-hal terkait dengan bentuk tanggung jawab sosial pada tahun 2020 berupa:

1. Adanya bentuk pelayanan terhadap pengaduan nasabah baik secara lisan melalui *Call Center* maupun secara tertulis melalui formulir pengaduan nasabah dan/atau surat tertulis, dan melakukan penyelesaian sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Mengadakan program rutin tahunan terencana dalam bentuk pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasabah dan/atau masyarakat di wilayah kerja BSY.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI TAHUN 2020

Dari jumlah nasabah sebanyak 305.079 nasabah, terdapat perkara hukum yang dihadapi BSY pada tahun 2020 seluruhnya sebagai berikut.

PERKARA HUKUM

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai	6	1
Dalam proses penyelesaian	3	-
Total	9	1

PERKARA YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Hingga 31 Desember 2020 BSY tidak memiliki entitas anak, maka tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh entitas anak yang dapat diungkapkan.

PERKARA YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENJABAT DI TAHUN 2020

Selama periode tahun 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSY yang sedang menjabat memiliki perkara hukum penting terkait perdata maupun pidana.

SANKSI ADMINISTRASI

Di tahun 2020 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan kepada BSY.

AKSES INFORMASI DAN DATA

BSY menggunakan media cetak seperti koran sebagai media informasi terkini yang dapat diakses nasabah dengan mudah. Selain itu BSY juga memanfaatkan media *online* seperti website dan sosial media sebagai perantara dengan masyarakat luas untuk mengakses informasi dan data BPR. Media ini dinilai efektif dan efisien karena memiliki massa yang tidak terbatas dan mampu mencakup target pasar BPR. Dengan media ini BSY dapat dengan mudah melakukan pembaharuan data sesuai dengan kondisi BPR saat ini. Selain itu nasabah juga dapat dengan mudah mengakses informasi data perusahaan dimanapun dan kapanpun. Adapun beberapa informasi dan data dapat diakses melalui website BSY www.suryayudha.id dan instagram @bprbsy.

KODE ETIK PERUSAHAAN

Manajemen BSY sangat peduli terhadap risiko adanya benturan kepentingan, oleh karena itu di tahun 2016 BSY menyusun Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*).

BSY sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Tata Kelola sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi perusahaan. Penyusunan *Code of Conduct* ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan nilai-nilai dalam Budaya Kerja BSY ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika bisnis dan tata perilaku.

BSY mengakui bahwa karyawan adalah manusia yang tidak dapat selalu berlaku sempurna dan seringkali dihadapkan pada situasi dimana kepentingan pribadinya bertolak belakang dengan kepentingan BPR. Situasi tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi BPR, namun juga berimplikasi pada reputasi, integritas dan kehormatan karyawan itu sendiri, oleh karena itu dibutuhkan pedoman etika bisnis dan tata perilaku sebagai panduan dalam bertindak.

Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris termasuk perangkatnya, Direksi dan karyawan dalam mengelola BPR guna mencapai visi, misi dan tujuan BPR melalui peningkatan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada BPR. Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) berlaku bagi semua level organisasi.

Di tahun 2020 dilakukan pengkinian terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yaitu diterbitkan sebagai Surat Keputusan (SK) Direksi No. 19/KEP/DIR/A/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020.

MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Penerapan *Code of Conduct* ini dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan visi dan misi Bank.
2. Dijadikan kriteria dalam menilai apakah individu di dalam Bank telah berperilaku sesuai dengan yang diinginkan Bank, atau menyimpang dari peraturan tersebut.
3. Menjabarkan tata nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh individu dalam Bank pada pelaksanaan tugasnya.
4. Menjadi acuan perilaku seluruh individu Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholders*.
5. Menjelaskan secara terperinci tentang standar etika agar seluruh individu dalam Bank dapat menilai segala bentuk kegiatan yang diinginkan, dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bank secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh *stakeholders*, sehingga pada akhirnya akan terwujud standar kerja yang maksimal dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku bagi Bank.
2. Meminimalisir segala risiko yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan maupun mitigasi akibat kelalaian yang dilakukan.
3. Menjabarkan tata nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti dalam melaksanakan tugas.
4. Menjadi acuan perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholders*.
5. Menjelaskan secara rinci standar etika agar dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.
6. Dalam jangka panjang diharapkan dapat mendorong perbaikan terhadap pelayanan mutu, pengelolaan Bank, pengembangan nilai Bank, dan pada akhirnya menuju pada peningkatan reputasi dan citra Bank.

STANDAR ETIKA BISNIS

Mendukung Budaya Kerja Perusahaan

Implementasi:

1. Memiliki sikap yang berani untuk berkata dan bertindak yang benar, sesuai dengan etika perusahaan dan nilai moral yang berlaku di masyarakat.
2. Memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang merupakan kewajiban setiap karyawan.
3. Memiliki wawasan, sikap dan pandangan yang jauh ke depan untuk membangun perusahaan ke arah yang lebih baik.
4. Konsisten dalam melaksanakan tugas, tepat waktu, serta menjunjung tinggi dan menaati Kode Etik Perbankan serta Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku.
5. Bekerja dengan mengutamakan *teamwork* dengan metode dan tujuan yang disepakati bersama, untuk kepentingan perusahaan.
6. Bersikap objektif, yang berlandaskan kejujuran dan tidak memihak kecuali kepada kebenaran.
7. Rasa memiliki yang tinggi dan cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi lingkungan kerja.
8. Dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) orang isteri/suami.

Perlakuan Adil Kepada Seluruh Karyawan

BPR memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan dalam berkarir dan mengembangkan diri serta menjalankan sistem penilaian kinerja yang adil.

Implementasi:

1. Penilaian kinerja karyawan didasarkan pada kompetensi dan prestasi kerja serta tidak dipengaruhi oleh subyektifitas.
2. Tidak ada perbedaan dalam kesempatan berkarir baik untuk karyawan laki-laki maupun perempuan.
3. Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban untuk karyawan laki-laki maupun perempuan, perbedaan hanya berdasarkan pada level jabatan yang dimiliki.

Anti Diskriminasi dan Pelecehan

BPR tidak mentolerir (*zero tolerance*) segala tindakan diskriminasi dan pelecehan yang didasari oleh perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, jabatan maupun kapabilitas dalam bentuk apapun. Segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan di tempat kerja akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Implementasi:

1. Di dalam Perjanjian Kerja Bersama pembuatan asusila maupun menjurus asusila baik di lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan seperti pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan perbuatan menyerang, menganiaya, mengancam atasan atau sesama karyawan dan/atau keluarganya termasuk kategori pelanggaran berat.
2. Dilarang mengejek/menghina karyawan lain, baik sengaja maupun tidak, dalam bentuk perkataan mengomentari bentuk fisik seseorang (*body shaming*), maupun perkataan lainnya yang dapat berpengaruh terhadap masalah mental karyawan lain, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bahkan keributan dalam lingkungan kerja.
3. Dilarang melakukan tindakan asusila antara lain pelecehan seksual, perzinahan, pemerkosaan atau tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan atau kesusilaan baik dengan sesama karyawan maupun pihak lain.

Keamanan Di Tempat Kerja

BPR mengutamakan keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja, yang harus didukung oleh seluruh karyawan dengan menjaga kesehatan, kebersihan dan kedisiplinan agar terhindar dari risiko di lingkungan kerja.

Implementasi:

1. BPR memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama melalui penerapan prosedur tata tertib keselamatan kerja, kesehatan & kebersihan, serta keamanan.
2. Upaya perlindungan kerja ditujukan agar karyawan terhindar dari risiko kerja dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif.
3. Dilarang pinjam meminjam uang secara pribadi atau meminta bantuan yang dapat menimbulkan risiko kerugian bagi karyawan lainnya atau perusahaan atau bertujuan mencari keuntungan pribadi.

Penggunaan Fasilitas Perusahaan

BPR menyediakan peralatan dan fasilitas kerja yang memadai dan hanya dapat digunakan oleh karyawan untuk mendukung pekerjaan.

Implementasi:

Peralatan dan fasilitas yang disediakan digunakan karyawan hanya saat melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan BPR, serta wajib mengikuti prosedur yang berlaku.

Aktivitas Di Luar Perusahaan

Karyawan dalam kapasitasnya sebagai individu dapat berpartisipasi sebagai anggota suatu organisasi/asosiasi maupun kegiatan lain di luar BPR yang tidak mengganggu kinerja dan konsentrasinya dalam bekerja.

Implementasi:

1. Karyawan sebagai warga negara juga memiliki kebebasan dalam berpolitik namun tidak diperkenankan menjadi pengurus/anggota partai politik.
2. Dilarang melakukan/menjalankan usaha/bisnis pribadi, dan tidak menggunakan kontak telepon/media sosial yang terdaftar dalam database karyawan BSY dalam membantu mempromosikan usaha/bisnis.
Karyawan diperbolehkan membantu usaha/bisnis keluarga/orang tua/saudara/teman/usaha dengan ketentuan :
 - a. Hanya sebatas membantu promosi dan wajib mencantumkan *contact person* (nomor dan nama yang dapat dihubungi) pemilik/pengelola bisnis tersebut.
 - b. Tidak terlibat dalam proses jual beli, menerima order dan melakukan pembayaran atas transaksi keuangannya.
 - c. Dilakukan di luar jam kerja perusahaan.

d. Tidak mengganggu fokus dalam bekerja.

e. Tidak mengurangi produktivitas kerja.

3. Dilarang melakukan aktivitas lain atau permainan sejenis apapun yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, antara lain mabuk minuman keras, memakai narkoba, perjudian sejenisnya.

Pengelolaan dan Pengamanan Informasi

Seluruh informasi milik BPR berstatus *proprietary right* (hak kepemilikan perusahaan yang tidak bisa dimiliki pihak lain tanpa izin).

Implementasi:

1. Setiap karyawan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Karyawan tidak berhak dan tidak diperkenankan menyebarkan informasi perusahaan dan nasabah kepada pihak ketiga dalam kondisi apapun, kecuali memperoleh persetujuan dan kesepakatan dari pejabat yang berwenang dan/atau diperbolehkan oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku.
3. Setiap karyawan yang memiliki akses terhadap informasi sensitif perusahaan dilarang untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak lain (*insider information*).
4. Karyawan wajib menyimpan informasi rahasia di tempat yang aman agar tidak memungkinkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan/atau tidak berwenang dapat melihat, mengetahui, mencatat dan/atau menggandakan informasi tersebut.
5. Pembuatan, pencatatan, dan/atau pelaporan informasi mempertimbangkan aspek kelengkapan, akurasi, kerahasiaan, dan kebenaran informasi, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan menghindari terjadinya hal-hal yang menyesatkan bagi pengguna informasi atau menyebabkan terjadinya kesalahan pengambilan keputusan.

Hubungan dengan Nasabah

BPR berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT).

Implementasi:

1. BPR berkomitmen untuk memberikan layanan prima kepada nasabah tanpa dipengaruhi oleh jumlah simpanan atau pinjaman nasabah, suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan usia.
2. Penyampaian produk dan jasa perbankan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Petugas BPR wajib melayani nasabah secara profesional dan menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Bank berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT).

Implementasi:

1. Dalam melakukan transaksi dengan nasabah, karyawan wajib mendahulukan prinsip kehati-hatian.
2. Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan APU dan PPT baik dalam proses KYC terhadap nasabah maupun dalam pelaporannya.

Hubungan dengan Regulator

Hubungan antara BPR dengan rekanan berdasarkan perjanjian yang wajar (*arm's length*), efisiensi dan adil (*fair practices*). Rekanan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Implementasi:

Hubungan dengan regulator dilakukan secara transparan, wajar, respek, profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyuapan, Manipulasi dan Korupsi

BPR tidak mentolerir (*zero tolerance*) segala bentuk penyuapan, manipulasi dan korupsi. Tindak pelanggaran atas hal tersebut akan diproses secara perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi:

1. Karyawan tidak diperkenankan untuk menawarkan dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada/dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi kedua belah pihak.
2. Karyawan tidak diperkenankan melakukan manipulasi dalam bentuk apapun.

Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Karyawan dilarang memberikan dan/atau menerima hadiah kepada/dari nasabah, rekanan atau pejabat pemerintah yang berpotensi mempengaruhi keputusan bisnis.

Implementasi:

1. Dilarang untuk memberi dan/atau menerima segala bentuk hadiah dari pihak-pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi terkait dengan pekerjaan atau jabatannya.
2. Apabila pemberian/penerimaan dari hadiah pihak lain tidak memungkinkan untuk dihindari, maka karyawan tersebut harus melakukan deklarasi secara tertulis kepada atasan.
3. Pemberian hadiah dapat dilakukan sepanjang untuk membina hubungan baik (*good will*) dengan sepengetahuan perusahaan.
4. Hadiah/pemberian balas jasa dalam bentuk uang tunai dalam jumlah berapapun tidak diperkenankan.
5. Dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk uang maupun natura/kenikmatan, antara lain melakukan foya-foya (bersenang-senang) di tempat hiburan secara vulgar atas fasilitas dari rekanan dan/atau nasabah.



STANDAR PERILAKU DALAM BEKERJA

Jujur

DO's	DON'Ts
1. Berani berkata dan bertindak yang benar sesuai etika dan ketentuan yang berlaku.	1. Melakukan manipulasi dan korupsi.
2. Bersikap terbuka terhadap kesalahan yang dilakukan.	2. Memungkiri kesalahan yang telah dilakukan dan cenderung selalu menyalahkan orang lain.
3. Terbuka dan transparan dalam memberikan penjelasan tentang produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah/calon nasabah.	3. Memberikan janji yang muluk dan tidak realistis kepada nasabah/calon nasabah.

Tanggungjawab

DO's	DON'Ts
1. Berusaha dan bekerja keras dalam memberikan kontribusi positif bagi perusahaan.	1. Menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan.
2. Mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar.	2. Takut menghadapi risiko yang mungkin timbul dari keputusan atau tindakan.
3. Bertindak sesuai janji dan perkataan.	3. Tidak konsekuen antara perkataan dengan perbuatan.

Visioner

DO's	DON'Ts
1. Bersikap terbuka terhadap perubahan.	1. Menyenangi kebiasaan rutin dan menolak perubahan yang lebih baik.
2. Memperhitungkan risiko dari setiap keputusan yang diambil.	2. Merasa cepat puas dengan kondisi yang telah dicapai.
3. Menangkap peluang yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja.	3. Selalu menunggu perintah dan petunjuk dalam bekerja.

Disiplin

DO's	DON'Ts
1. Bersikap terbuka terhadap perubahan.	1. Menyenangi kebiasaan rutin dan menolak perubahan yang lebih baik.
2. Memperhitungkan risiko dari setiap keputusan yang diambil.	2. Merasa cepat puas dengan kondisi yang telah dicapai.
3. Menangkap peluang yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja.	3. Selalu menunggu perintah dan petunjuk dalam bekerja.

Kerjasama

DO's	DON'Ts
1. Melakukan pembagian dan pendelegasian tugas dengan baik dan tepat.	1. Merasa bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa perlu bantuan dari orang lain.
2. Menjalani komunikasi yang baik dengan semua pihak.	2. Menganggap diri paling benar dan menyalahkan orang lain.
3. Bekerja dengan metode dan tujuan yang disepakati bersama.	3. Bekerja hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri.

Adil

DO's	DON'Ts
1. Pemberian kompensasi sesuai dengan kinerja.	1. Penilaian kinerja berdasarkan subjektivitas.
2. Adanya persamaan hak dan kewajiban pada setiap level jabatan.	2. Memberikan pekerjaan lebih berat kepada laki-laki daripada perempuan.
3. Menjalankan kewajiban terlebih dahulu baru kemudian menuntut hak sesuai porsinya.	3. Memberikan banyak kewajiban namun tidak diimbangi dengan hak yang sesuai.

Peduli

DO's	DON'Ts
1. Cepat tanggap terhadap kondisi dan situasi lingkungan kerja.	1. Bekerja tanpa menghiraukan kepentingan orang lain
2. Aktif berpartisipasi dalam mencapai tujuan perusahaan.	2. Bekerja dengan tujuan hanya untuk menyelesaikan tugas tanpa memperdulikan hal lain.
3. Berusaha ingin tahu dan mau membantu terhadap pekerjaan rekan kerja tanpa meninggalkan pekerjaan sendiri.	3. Lebih suka menyibukkan diri sendiri sehingga jarang berinteraksi.



BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah situasi dimana karyawan Bank karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan.

Benturan kepentingan timbul karena adanya perbedaan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank harus mendahulukan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lainnya, oleh karena itu dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tersebut.

Berikut adalah tindakan-tindakan yang harus dihindari karena dapat menimbulkan benturan kepentingan:

1. Mengambil atau meminta sesuatu (uang, barang, peluang bisnis) dari nasabah, penyedia jasa untuk kepentingan pribadi dalam proses transaksi antara Perusahaan dengan nasabah dan penyedia jasa.
2. Menawarkan, memberikan, ataupun menerima hadiah dan hiburan/perjamuan (*entertainment*) diluar batas kewajaran dari atau kepada pihak ketiga (nasabah, rekanan).
3. Menyalahgunakan sumber daya atau wewenang sehingga dapat mencemarkan nama baik dan reputasi Bank.
4. Memanfaatkan aset Bank untuk kepentingan pribadi, atau menggunakan fasilitas perusahaan dan jam kerja untuk menjalankan usahanya sendiri.
5. Melakukan pekerjaan diluar pekerjaan pokok pada Bank yang dapat mendorong pada kegiatan untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif.
6. Menggunakan peralatan dan perlengkapan Bank untuk terlibat dalam pengelolaan perusahaan pesaing.
7. Mencari "kesempatan dalam kesempitan" dalam transaksi dengan nasabah, yaitu melakukan transaksi tidak langsung dengan nasabah atau menggunakan perantara sehingga nasabah tidak benar-benar dikenali dan terjadi transaksi yang fiktif.
8. Mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang diperoleh karena jabatannya di Bank, sedangkan informasi tersebut bukan merupakan informasi umum.
9. Bersikap subyektif dan mudah dipengaruhi oleh rekanan atau calon rekanan untuk memenuhi kepentingannya yang tidak sesuai kepentingan dan ketentuan internal Bank.

Pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak yang terlibat dalam benturan kepentingan dilarang turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Jika terjadi benturan kepentingan, keputusan harus dilakukan oleh pihak/pejabat lainnya atau pejabat satu level di atasnya.
2. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan, harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
3. Keputusan yang mengandung benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat dan dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan setiap akhir tahun untuk pelaporan pelaksanaan Tata Kelola.

UPAYA PENEGAKKAN

1. Setiap individu Bank harus melaporkan setiap fakta penyimpangan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku kepada SKAI dan kepada pimpinan yang bersangkutan.
2. Apabila penyimpangan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku dilakukan oleh pimpinan, maka pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan dengan level yang lebih tinggi lagi.
3. Identitas pelapor akan dilindungi oleh perusahaan.
4. SKAI dan pimpinan yang menerima laporan, segera adanya penyimpangan, akan menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
5. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.
6. Individu Bank yang terbukti melakukan penyimpangan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
7. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung.

PENYEBARLUASAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

1. Penyebaran Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*) pertama kali didistribusikan kepada seluruh bagian, cabang dan kas oleh Bagian Kepatuhan Kantor Pusat.
2. Pengenalan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*) pertama kali kepada seluruh karyawan dilakukan melalui sosialisasi kepada seluruh pejabat wilayah, pimpinan bagian dan cabang yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan, dimana selanjutnya masing-masing pimpinan bagian dan cabang menyampaikan kepada seluruh jajaran di bawahnya.
3. Seluruh pertanyaan seputar Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*) dapat disampaikan kepada pimpinan masing-masing.
4. Setiap karyawan wajib membaca dan memahami isi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku yang didokumentasikan oleh Bagian Personalia.
5. Pelaksanakan sosialisasi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku dilakukan kepada seluruh karyawan oleh Pimpinan Cabang masing-masing didampingi oleh Bagian Kepatuhan, dan masing-masing pimpinan menandatangani surat pernyataan pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku.

JENIS SANKSI

Bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada oknum pejabat/karyawan yang melakukan pelanggaran *Code of Conduct*, diatur secara tegas sebagai berikut.

1. Memberikan teguran secara lisan.
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis secara bertingkat.
3. Memberikan sanksi dalam bentuk scorsing secara bertahap.
4. Penurunan pangkat.
5. Pemberhentian dengan hormat.
6. Pemberhentian dengan tidak hormat.
7. Melakukan tindakan hukum lainnya.

JUMLAH PELANGGARAN

Jumlah pelanggaran terhadap *Code of Conduct* di tahun 2020 :

Permasalahan Hukum	Perdata
Selesai	99
Dalam proses penyelesaian internal	-
Belum diupayakan penyelesaian	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistle Blowing adalah pemberian informasi tentang terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis, perbuatan tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan BPR maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang dilakukan oleh karyawan atau pengurus BPR. Pemberian informasi ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*). Pelaksanaan *whistleblowing system* BSY tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No. 50/DIR/SK/V/17 tentang Kebijakan Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, BSY mendorong partisipasi para karyawan untuk memanfaatkan jalur penyelesaian internal dalam pelaporan pelanggaran di lingkungan perusahaan serta mempertimbangkan secara seksama sebelum memutuskan untuk melakukan pemanfaatan jalur eksternal.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas BSY menyusun kebijakan yang mengatur tentang hak setiap karyawan untuk menyampaikan penyimpangan yang dilakukan oleh atasan atau sesama karyawan lainnya dengan tetap memberikan perlindungan bagi pelapor. Tujuan ditetapkannya kebijakan ini adalah:

1. Sebagai sarana dan prasarana bagi pihak manapun baik internal maupun eksternal BPR untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan BPR.
2. Membantu BPR dalam menerapkan sistem pengendalian fraud dan merupakan implementasi dari prinsip Tata Kelola.
3. Tersedianya kesempatan menangani pelanggaran secara internal dan secara kekeluargaan.

4. Mengurangi risiko yang dihadapi BPR baik secara finansial maupun reputasi.
5. Mendorong peran serta para karyawan BPR maupun pihak eksternal lain untuk menjaga aset maupun nama baik BPR.
6. Menerapkan budaya kerja BPR dan diharapkan dapat mencegah karyawan BPR melakukan pelanggaran.

MEKANISME PELAPORAN

Penyampaian Laporan

1. Pelapor (*whistle blower*) dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran baik secara lisan maupun tertulis kepada *whistle blowing officer*.
2. Pihak-pihak yang menerima laporan harus segera menanggapi dengan serius dengan tetap memegang prinsip yang objektif. Jika memungkinkan, sebelum melaporkan penyimpangan, pelapor mengkomunikasikan atau mengingatkan terlebih dahulu masalah tersebut dengan pihak yang akan dilaporkan menggunakan bahasa yang halus dan cara yang baik untuk mengantisipasi kesalahan persepsi atas suatu keadaan yang dianggap penyimpangan oleh pelapor, kecuali perbuatan dari terlapor dianggap berpotensi membahayakan Bank.
3. Pelapor harus mengumpulkan data sebanyak mungkin sebagai bukti dan jika perlu dengan menghadirkan saksi-saksi.
4. Laporan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut.
 - a. Identitas terlapor.
 - b. Uraian pelanggaran yang dilakukan.
 - c. Pihak yang terlibat (bila ada) dan kantornya.
 - d. Tempat dan waktu kejadian.
 - e. Dokumen pendukung/bukti lainnya.
 - f. Identitas pelapor.

Penanganan Laporan

1. *Whistle blowing officer* berkewajiban merahasiakan pelapor, mengadakan investigasi dan memutuskan layak atau tidaknya laporan tersebut diproses lebih lanjut ke tahap investigasi atau diteruskan kepada pihak yang tepat.
2. Jangka waktu untuk mendapatkan tanggapan atas laporan yang diterima adalah 15 hari kerja sejak diterimanya laporan.
3. Untuk memperlancar proses tindak lanjut atas tindak pelanggaran yang dilaporkan, *whistle blowing officer* dapat meminta tambahan informasi dengan melakukan wawancara langsung dengan pelapor.

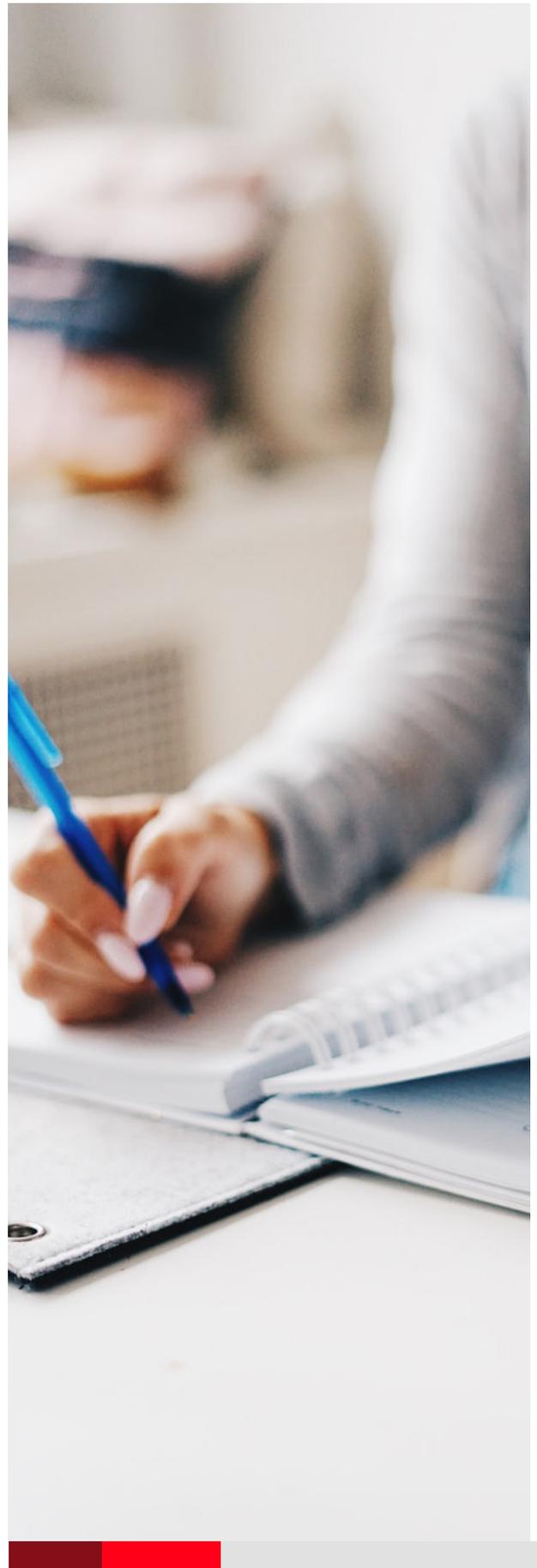
4. Proses investigasi dilakukan dengan memegang asas praduga tak bersalah dan objektif.
5. Laporan hasil investigasi dilaporkan disertai dengan bukti pendukung dilaporkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara berkala setiap bulan atau setiap kali terdapat perkembangan terhadap kasus yang ditangani.
6. Laporan hasil investigasi tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan pemberian sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
7. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan pemberian sanksi dilakukan oleh pihak yang netral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Kepada pelapor diberikan hak untuk memantau perkembangan tindak lanjut tindakan pelanggaran yang dilaporkan.
9. *Whistle blowing officer* wajib untuk menjaga kerahasiaan laporan dan prosesnya serta mendokumentasikan setiap laporan yang diterima termasuk keputusan yang diambil.

Perlindungan Terhadap Pelapor

1. Manajemen memberikan kekebalan sanksi administratif bagi pelapor yang beriktikad baik, kecuali bila pelapor merupakan aktor intelektual dalam kasus yang akan dilaporkan dan melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Apabila pelapor mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan atas laporan yang dibuatnya, maka pelapor dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada penanggung jawab *whistle blowing* melalui SKAI.
3. Permintaan perlindungan dapat disampaikan melalui surat maupun *email*.
4. Bentuk perlindungan terhadap pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Contoh: perlindungan hukum apabila terjadi tindak kekerasan terhadap pelapor.
5. Pemberian perlindungan terhadap pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.
6. Perlindungan tidak diberikan atau dihentikan apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan merupakan fitnah/laporan palsu, atau mempunyai tujuan yang menyimpang dari tujuan kebijakan *whistle blowing*.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

1. Penanggung jawab *whistle blowing system* adalah Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung jawab *whistle blowing system*, Direktur Utama menunjuk Pejabat SKAI sebagai pemegang fungsi *whistle blowing officer*.
2. *Whistle blowing officer* adalah petugas penanganan pengaduan di Bank yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, *whistle blowing officer* harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Mempunyai integritas.
 - b. Mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat menjaga rahasia yang dipercayakan.
 - c. Mampu bersikap tegas dan objektif.
 - d. Mampu menangani masalah dengan baik.
3. *Whistle blowing officer* berada di bawah pengawasan Komite Audit dan wajib memberikan
4. Tugas dan wewenang *whistle blowing officer*:
 - a. Tugas
 - Mengelola pelaksanaan *whistle blowing system*.
 - Mengkoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui *whistle blowing system*.
 - Menkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap pihak pelapor dengan unit terkait.
 - Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui *whistle blowing system*.
 - Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas pelaksanaan *whistle blowing system* di Bank.
 - b. Wewenang
 - Memberikan usulan kepada penanggung jawab *whistle blowing system* terkait dengan tindak lanjut penanganan laporan.
 - Menetapkan tindak lanjut atas laporan, khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan SKAI.
 - Memberikan usulan kepada penanggung jawab *whistle blowing system* mengenai permintaan perlindungan dari pelapor.
 - Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *whistle blowing system*.



HADIAH DAN SANKSI

1. Manajemen dapat mempertimbangkan *reward* bagi karyawan yang menjadi *whistle blower* (pelapor) berdasarkan rekomendasi dari pihak yang mendapatkan laporan dan pihak yang melakukan investigasi (*whistle blowing officer*).
2. Pelapor yang terbukti melakukan fitnah atau memberikan laporan palsu maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan manajemen
3. Putusan/sanksi terhadap karyawan yang terbukti bersalah maupun karyawan yang membuat laporan palsu dilakukan oleh Direktur Utama.
4. Bagi *whistle blowing officer* yang terbukti tidak dapat menjaga kerahasiaan atas laporan yang diterima akan dikenakan sanksi minimal berupa teguran tertulis dan maksimal penurunan *grade*.

JUMLAH LAPORAN YANG MASUK DI TAHUN 2020

Pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) pelaporan yang masuk melalui mekanisme ini.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi keahlian/ pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas BSY. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BSY memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi BSY.

Informasi lengkap Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada profil perusahaan.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Kompetensi Pendidikan
Emila Hayati	Komisaris	Perempuan	55	Manajemen
Tenny Yanutriana	Komisaris	Perempuan	39	Magister Manajemen
Abdul Khoir Maradika Putra	Komisaris Independen	Laki-laki	49	Hukum
Dicky Firman Tarigan	Komisaris Independen	Laki-laki	62	Hukum
Hadi Supeno	Komisaris Independen	Laki-laki	61	Magister Administrasi Publik

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Kompetensi Pendidikan
Sugeng Riyanto	Direktur Utama	Laki-laki	46	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Wahjoe Roekmono	Direktur Kredit	Laki-laki	53	Akuntansi
Sri Wahyu Utami	Direktur Umum	Perempuan	55	Akuntansi

INFORMASI KEUANGAN



BPR. BANK SURYA YUDHA

Mitra Menjadi Sukses



LAPORAN AUDITOR INDEPENDENT 2020

**PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA
BANJARNEGARA - JATENG**

Hunting (0286) 591662

BSY Call Center (0286) 595000

www.suryayudha.id

E-mail: sekretariatbsy@gmail.com

PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN BERAKHIR - PADA 31 DESEMBER 2020	
• Surat Pernyataan Direksi	
• Laporan Auditor Independen	
• Neraca	1
• Laporan Laba Rugi	2
• Laporan Perubahan Ekuitas	3
• Laporan Arus Kas	4
• Catatan Atas Laporan Keuangan	5-27
ANALISA LAPORAN KEUANGAN	
• Laporan Komitmen dan Kontinjensi	28
• Perhitungan Kualitas Aset Produktif	29
• Perhitungan ATMR	30
• Perhitungan KPMM	31
• Perhitungan Rentabilitas	32
• Perhitungan Analisa Likuiditas	33
LAMPIRAN	
• Daftar Aset Tetap	Lampiran I
• Surat Pernyataan Upload	

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



BPR. **BANK SURYA YUDHA**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugeng Riyanto
Alamat Kantor : Rejasa 3/3 Banjarnegara
Alamat domisili sesuai KTP atau
kartu identitas lain : Rejasa 2/4 Banjarnegara
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA;
2. Laporan Keuangan PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern pada PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Banjarnegara, 10 Maret 2021

Atas nama dan mewakili Direksi, *ry*



Sugeng Riyanto
Direktur Utama

BPR BANK SURYA YUDHA

Rejasa, Banjarnegara, Jawa Tengah Indonesia 53482
Telp. (0286) 591662 (hunting), Fax. (0286) 591808
Call Center (0286) 595000
Email: pusat@suryayudha.com

www.banksuryayudha.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



HELIANTONO & REKAN

Parker Randall International

Registered Public Accountants

Aminta Plaza, 7 Floor # 704 Jl. TB Simatupang Kav . 10
Jakarta Selatan 12310 Indonesia
Branch : Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo
Semarang : Jl. Tegalsari Barat V No. 24 Semarang 50251
T / F : (+62 24) 850 5830 ,(+62 24) 766 76109
E : juna@heliantonorekan.com

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00045/3.0217/AU.2/07/1417-2/1/III/2021

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di atas, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



HELIANTONO & REKAN

Parker Randall International

Registered Public Accountants

Opini

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

HELIANTONO & REKAN

Kantor Akuntan Publik

JUNADI, SE, M.Si, Ak, CPA, BKP

Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP.1417

Nomor Registrasi KAP : KEP-785/KM.I/2010

Semarang, 10 Maret 2021



Scan QR untuk memastikan keaslian LAI

LAPORAN KEUANGAN

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA**NERACA**

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

U R A I A N	Catatan	2020	2019
A S E T			
Kas	3, 2a	18.206.412.000	15.743.120.450
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	4	71.057.442.201	35.000.971.253
Giro Pada Bank Lain	5	353.964.917.766	393.288.486.032
PPAP Penempatan Giro Pada Bank Lain		-	(1.896.138.644)
Penempatan Pada Bank Lain Selain Giro	6	59.345.427.143	43.117.511.812
PPAP Penempatan Pada Bank Lain		-	(145.491.312)
		59.345.427.143	42.972.020.500
Kredit Yang Diberikan	7	2.344.998.025.582	2.393.175.762.549
PPAP Kredit Yang Diberikan		(47.864.294.001)	(47.877.200.173)
		2.297.133.731.581	2.345.298.562.376
Agunan Yang Diambil Alih	8	55.000.000.000	-
Aset Tetap	9	51.183.065.234	52.741.211.113
Akumulasi Penyusutan		(31.527.861.386)	(29.969.826.827)
		19.655.203.848	22.771.384.286
Aset Tidak Berwujud	10	2.338.904.000	2.235.804.000
Akumulasi Amortisasi		(2.068.427.650)	(1.794.116.289)
		270.476.350	441.687.711
Aset Lain-lain	11	10.295.536.925	10.723.698.882
JUMLAH ASET		2.884.929.147.814	2.864.343.792.846
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	12	10.974.990.835	9.874.469.298
Hutang Bunga	13	5.152.658.948	6.016.274.736
Hutang Pajak	14	-	-
Simpanan			
Tabungan	15	749.535.537.380	674.383.134.006
Deposito Berjangka	16	1.169.485.184.476	1.147.120.351.098
Simpanan Dari Bank Lain	17	64.309.253.967	55.590.631.191
Pinjaman Diterima	18	490.664.468.428	599.283.695.024
Kewajiban Lain - lain	19	713.881.610	168.971.187
JUMLAH KEWAJIBAN		2.490.835.975.644	2.492.437.526.540
EKUITAS			
Modal Saham:	20		
Modal dasar sejumlah 300.000 lembar saham, telah ditempatkan dan disetor penuh 235.000 lembar saham tahun 2020 dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham.		235.000.000.000	235.000.000.000
Saldo Laba	21		
Cadangan Umum		47.000.000.000	47.000.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya		112.093.172.170	89.906.266.306
		159.093.172.170	136.906.266.306
JUMLAH EKUITAS		394.093.172.170	371.906.266.306
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.884.929.147.814	2.864.343.792.846

*Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan*

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

U R A I A N	Catatan	2020	2019
Pendapatan Bunga			
Bunga Kontraktual	22	345.154.155.394	378.701.915.920
Pendapatan Provisi	22	23.066.969.648	25.481.822.636
Jumlah Pendapatan Bunga		368.221.125.042	404.183.738.556
Beban Bunga			
Bunga Kontraktual	23	157.219.959.543	150.629.651.067
Amortisasi Beban Transaksi	23	5.678.682.632	4.718.899.674
Jumlah Beban Bunga		162.898.642.175	155.348.550.741
Pendapatan Bunga - Bersih		205.322.482.867	248.835.187.815
Pendapatan Operasional Lainnya	24	29.871.648.634	22.289.415.700
Jumlah Pendapatan Operasional		235.194.131.501	271.124.603.515
Beban Operasional			
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	25	10.948.983.086	17.561.007.018
Beban Pemasaran	26	5.487.735.229	6.203.300.165
Beban Administrasi dan Umum	27	132.761.890.496	134.639.842.691
Beban Operasional Lainnya	28	5.462.412.452	5.677.049.733
Jumlah Beban Operasional		154.661.021.263	164.081.199.607
Laba Operasional		80.533.110.238	107.043.403.908
Pendapatan Non Operasional	29	527.552.031	808.388.862
Beban Non Operasional	30	(1.184.081.571)	(1.414.747.332)
Laba Sebelum Pajak		79.876.580.698	106.437.045.438
Taksiran Pajak Penghasilan	31	(17.689.674.834)	(26.784.260.933)
Laba Bersih Tahun Berjalan		62.186.905.864	79.652.784.505

*Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan*

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

URAIAN	Modal saham	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
		Cadangan Umum	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Saldo per 01 Januari 2019	195.000.000.000	39.000.000.000	93.243.054.010	327.243.054.010
Dividen	-	-	(75.000.000.000)	(75.000.000.000)
Cadangan	-	8.000.000.000	(8.000.000.000)	-
Tambahan Modal	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000
Tax Amnesty	-	-	-	-
Koreksi Laba	-	-	10.427.791	10.427.791
Laba bersih tahun 2019	-	-	79.652.784.505	79.652.784.505
Saldo per 31 Desember 2019	235.000.000.000	47.000.000.000	89.906.266.306	371.906.266.306
Dividen	-	-	(40.000.000.000)	(40.000.000.000)
Cadangan	-	-	-	-
Tambahan Modal	-	-	-	-
Koreksi Kelebihan Pajak Terutang Pajak Penghasilan 2020	-	-	-	-
Tax Amnesty	-	-	-	-
Koreksi Laba	-	-	-	-
Laba bersih tahun 2020	-	-	62.186.905.864	62.186.905.864
Saldo per 31 Desember 2020	235.000.000.000	47.000.000.000	112.093.172.170	394.093.172.170

*Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan*

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

URAIAN	Catatan	2020	2019
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI			
Laba Bersih	LR	62.186.905.864	79.652.784.505
Penyesuaian laba menjadi kas bersih dari aktivitas operasi :			
Penyusutan Aset Tetap	9	1.558.034.559	3.944.345.375
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	10	274.311.361	164.972.456
Koreksi Laba ditahan	LPE	-	10.427.791
PPAP Penempatan Pada Bank Lain Giro	5	(1.896.138.644)	1.896.138.644
Cadangan PPAP Penempatan	6	(145.491.312)	(151.163.501)
PPAP Kredit yang Diberikan	7	(12.906.172)	13.543.861.516
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi :			
Pendapatan Yang Akan Diterima	4	(36.056.470.948)	(7.837.424.204)
Giro pada Bank Lain	5	39.323.568.266	(203.447.502.176)
Penempatan pada Bank Lain	6	(16.227.915.331)	16.213.450.690
Kredit Yang Diberikan	7	48.177.736.967	(396.293.802.125)
Agunan Diambil Alih	8	(55.000.000.000)	-
Aset Lain-lain	8	428.161.957	(2.620.561.521)
Kewajiban Segera dibayar	11	1.100.521.537	919.110.568
Hutang Bunga	12	(863.615.788)	1.524.394.345
Hutang Pajak	13	-	(1.108.374.849)
Tabungan	14	75.152.403.374	128.430.561.721
Deposito Berjangka	15	22.364.833.378	169.817.135.240
Simpanan dari Bank Lain	16	8.718.622.776	15.289.530.871
Pinjaman yang Diterima	17	(108.619.226.596)	224.928.536.162
Kewajiban Lain - lain	18	544.910.423	159.878.597
Arus Kas diperoleh dari Aktivitas Operasi		41.008.245.671	45.036.300.105
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian Aset Tetap	9	1.558.145.879	(4.202.864.605)
Pembelian Aset Tidak Berwujud	10	(103.100.000)	(350.000.000)
Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi		1.455.045.879	(4.552.864.605)
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Setoran Modal	21	-	40.000.000.000
Pembayaran Dividen	21	(40.000.000.000)	(75.000.000.000)
Penambahan Cadangan		-	8.000.000.000
Alokasi Laba Ke Cadangan		-	(8.000.000.000)
Pendanaan		(40.000.000.000)	(35.000.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		2.463.291.550	5.483.435.500
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	3	15.743.120.450	10.259.684.950
Kas dan Setara kas pada Akhir Periode	3	18.206.412.000	15.743.120.450

*Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT BPR Surya Yudhakencana (Perusahaan) berkedudukan di Rejasa, Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah, berdasarkan Akta Notaris Susanti, S.H, No. 94 tanggal 10 Januari 1991 di Kota Surabaya. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Sopan, S.H. Notaris di Kabupaten Banyumas, Purwokerto dengan Nomor : 155 tahun 2020 tertanggal 22 Oktober 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Surya Yudhakencana. Pemberitahuan Perubahan Akta tersebut telah di terima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan dengan nomor : AHU-AH.01-03-0401235 tertanggal 23 Oktober 2020.

b. Legalitas dan Perizinan Lainnya

Perusahaan telah memiliki perizinan sebagai berikut :

- Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.460.033.2-529.000
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) : 606/11/2000
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Kep.066/KM.13/92
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 11.09.1.64.00689

c. Jangka Waktu

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu Tujuh Puluh Lima Tahun.

d. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas tersebut di atas disebutkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha adalah :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito berjangka dan Tabungan.
- Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.
- Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat BI, deposito berjangka atau tabungan pada bank lain.

e. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Notaris Sopan, SH Nomor : 155 tahun 2020 tertanggal 22 Oktober 2020 susunan dewan komisaris dan direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Emila Hayati
- Komisaris : Tenny Yanutriana, MBA.
- Komisaris Independen : Hadi Supeno
- Komisaris Independen : Abdul Khoir Maradika Putra, S.H
- Komisaris Independen dan
Ketua Komite Audit dan
Pemantauan Resiko : Dicky Firman Tarigan

Anggota Direksi

- Direktur Utama : Sugeng Riyanto, S.E.
- Direktur Umum : Dra. Ec. Sri Wahyu Utami, AK
- Direktur Kredit : Wahjoe Roekmono, S.E

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali Laporan arus kas dan efek-efek tertentu yang dinyatakan sebesar nilai wajar, aset yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi dan tanah serta bangunan tertentu yang telah dinilai kembali.

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan giro pada bank lain yang tidak dijadikan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

b. Penyisihan Kerugian Aset Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Aset Produktif terdiri dari penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan yang diberikan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit (piutang dan pembiayaan).

Penyisihan kerugian aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif serta komitmen dan kontinjensi pada akhir tahun. Dalam menentukan jumlah keseluruhan penyisihan kerugian tersebut, Bank menggunakan ketentuan Bank Indonesia tentang pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif sebagai pedoman.

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif adalah sebagai berikut :

1. Umum, Sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari Aset Produktif yang digolongkan lancar.

2. Khusus, sekurang-kurangnya sebesar :

- a. 1% dari Aset Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- b. 10% dari Aset Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- c. 50% dari Aset Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan;
- d. 100% dari Aset Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan;

Saldo aset produktif dikurangi dari masing-masing penyisihan kerugian pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena sudah tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapuskan dicatat sebagai pendapatan operasional pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif selama tahun berjalan.

c. Kas

Kas seluruh uang kertas dan uang logam rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

d. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan digunakan untuk menampung semua transaksi penarikan dan penyetoran dana baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank-bank lain sebagai rekening giro. Jasa giro diakui sebagai pendapatan bunga kontraktual penempatan pada bank lain.

e. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada lainnya untuk menampung dana pada bank lain dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis, yang dimaksud untuk memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Penyisihan kerugian dibentuk untuk penempatan pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito dan giro.

f. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomi aset tetap .

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada pasal 11 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009 yang mengatur tentang Pengelompokan Jenis-jenis Harta Berwujud sebagai berikut :

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Aset Tetap (Lanjutan)

<u>Jenis Aset</u>	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Tarif (Metode Garis Lurus)</u>	<u>Tarif (Metode Garis Menurun)</u>
<u>Bukan Bangunan :</u>			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
<u>Bangunan:</u>			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban dalam laporan keuangan pada saat terjadinya. Penggantian dan perbaikan dalam jumlah material dan dapat memperpanjang masa manfaat aset atau dapat memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu, dikapitalisasi. Apabila aset tetap dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan. Laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

g. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka (disajikan dalam akun aset lain-lain) diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

h. Kewajiban Segera

Kewajiban segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank.

i. Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan bunga, diakui pada saat terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang bersama; atau selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

j. Pendapatan Operasi Utama Lainnya

Pendapatan operasi utama lainnya merupakan bagi hasil dari penempatan pada bank lain.

k. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadi.

l. Imbalan Kerja

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) No. 23 yang mengatur tentang akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja, manajemen belum mencadangkan atas biaya tersebut pada tahun 2019. Namun demikian, manajemen tetap melakukan pembayaran (imbalan kerja) terkait kewajiban kepada karyawan. Pada tahun 2019 perusahaan belum menggunakan jasa aktuarial, untuk menghitung ada beban imbalan pasca kerja dan kewajiban imbalan pasca kerja secara tepat.

m. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang tertuang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

n. Perlakuan Pajak Tangguhan

Bank belum menerapkan SAK ETAP No.24 tentang perlakuan akuntansi pajak tangguhan pada tahun 2019 sehingga perusahaan belum memperhitungkan atas pajak tangguhan tersebut. Pada tahun 2019 tidak diperhitungkan adanya pajak tangguhan, karena penyebab timbulnya Pajak Tangguhan berasal dari beda temporer yaitu adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap berwujud, penyisihan beban imbalan pasca kerja. Sedangkan pada tahun 2019, perusahaan belum menggunakan jasa aktuaria untuk memperoleh jumlah kewajiban imbalan pasca kerja.

o. Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan menggunakan basis estimasian dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari faktor masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik perusahaan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

Penyisihan Kerugian

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dievaluasi penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 2b.

Kondisi spesifik debitur atau counterparty yang mengalami penurunan nilai dipertimbangkan dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan debitur atau counterparty dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima dan disetujui secara independen oleh *Credit Risk Management Unit*.

Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam aset keuangan dengan karakteristik risiko yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk perhitungan cadangan kerugian counterparty tertentu dan asumsi model serta parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kerugian.

Penyusutan

Perusahaan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, perusahaan mereview umur manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Lihat catatan 9.f aset tetap yang mengungkapkan besarnya beban dan akumulasi penyusutan.

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akunbilitas Publik (SAK-ETAP) bab. 28 mengenai "pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa", pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa digambarkan sebagai berikut :

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);
2. Perusahaan asosiasi (associated company);
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam 3) atau 4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan, baik dengan persyaratan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang normal sebagaimana dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

3. KAS DAN SETARA KAS

	2020	2019
Kas		
• Kas besar	18.111.912.000	15.712.620.450
• Kas kecil	63.500.000	30.500.000
• Kas ATM	31.000.000	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	18.206.412.000	15.743.120.450

4. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

	2020	2019
• Bunga dari Penempatan Bank Lain	83.988.798	48.206.256
• Bunga Kredit Yang Diberikan	70.973.453.403	34.952.764.997
Jumlah Pendapatan Bunga Yang Masih Akan Diterima	71.057.442.201	35.000.971.253

5. GIRO PADA BANK LAIN

	2020	2019
• Bank Danamon Indonesia AC. 0023260805	66.188.182.399	22.676.282.259
• Bank CIMB Niaga AC.800039717300	14.271.704.846	15.523.755.310
• Bank CIMB Niaga (Cab PBG) AC.800138391400	1.344.195	1.504.195
• Bank CIMB Niaga (Cab PWT) AC.800138390200	1.310.023	1.105.023
• Bank CIMB Niaga (Cab CLP) AC.800138386900	1.392.256	982.256
• Bank HANA	1.337.019	8.734.913
• Bank HANA	857.805.616	857.805.616
• Bank Bukopin	23.209.419.064	23.412.733.659
• Bank BJB AC.0059809415001	2.968.917	14.248.687
• Bank BCA AC. 357.04.99997	2.583.415.257	3.641.357.823
• Bank J Trust AC. 14000001946730002	-	4.418.836
• Bank Mandiri Kry	1.532.000	1.304.000
• Bank Syariah Mandiri AC.7036112225	2.788.194.714	1.123.651.786
• Bank Syariah Mandiri AC.7036111873	57.950.108	57.780.873
• Bank Muamalat PKL	1.075.966	1.055.966
• Bank Muamalat Srg	1.010.000	1.090.000
• Bank Muamalat Kdi	1.070.000	-
• Bank Muamalat Indonesia AC. 5450959503	1.717.376	15.932.626
• Jateng	238.992.323.627	250.944.742.204
• Bank Permata	5.001.164.383	-
• BNI	-	75.000.000.000
Jumlah	353.964.917.766	393.288.486.032
PPAP Giro	-	(1.896.138.644)
Giro - PPAP	353.964.917.766	391.392.347.388

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2020	2019
TABUNGAN		
• Bank BNI PWT	1.093.819	1.177.313
• Bank BNI AJB	1.170.000	1.290.000
• Bank BNI CLP	1.524.518	992.955
• Bank Mandiri AC. 139-00-9999900-9	14.893.985.013	6.514.931.955
• Bank Jateng PBG No. Rek- 3027150909	1.167.101	1.180.263
• BNI BNA AC. 0221366124	477.596.231	395.635.172
• BPR Surya Yudha Kretek	16.928.727	80.335.126
• BPR Lestari Bali	1.961.734	15.676.969.028
DEPOSITO		
• Bank BNI	-	245.000.000
• Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	100.000.000	100.000.000
• Bank BJB	8.850.000.000	9.100.000.000
• BPR Surya Yudha Kretek	17.000.000.000	2.000.000.000
• BPR Parasahabat Bekasi	-	2.000.000.000
• BPR Modern Express	5.000.000.000	5.000.000.000
• PD BPR Serang	-	2.000.000.000
• PT BPR Palu Lokadana Utama	5.000.000.000	-
• PT BPR Eleska Artha	1.000.000.000	-
• PT BPR Lestari Bali	5.000.000.000	-
• PT BPR Modern Semarang	2.000.000.000	-
Jumlah	59.345.427.143	43.117.511.812
Penyisihan Kerugian	-	(145.491.312)
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	59.345.427.143	42.972.020.500

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, kolektibilitas atas seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 digolongkan lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

	2020	2019
a. Jenis Penggunaan		
• Kredit Modal Kerja	1.667.470.737.531	1.650.235.822.095
• Kredit Investasi	275.526.911.355	318.830.747.347
• Kredit Konsumsi	425.210.668.248	451.608.475.784
• Provisi Ditangguhkan	(23.214.737.788)	(27.508.166.650)
• Biaya transaksi	4.446.236	8.883.973
Jumlah	2.344.998.025.582	2.393.175.762.549
Penyisihan Kerugian	(47.864.294.001)	(47.877.200.173)
Jumlah Kredit Yang Diberikan	2.297.133.731.581	2.345.298.562.376

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

b. Kolektibilitas

• Lancar	2.023.892.850.712	1.588.850.780.367
• Dalam Perhatian Khusus	197.474.128.199	696.378.409.581
• Kurang Lancar	927.199.577	6.431.232.115
• Diragukan	4.758.177.369	50.572.354.586
• Macet	141.155.961.277	78.442.268.577
	2.368.208.317.134	2.420.675.045.226
• Provisi Ditangguhkan	(23.214.737.788)	(27.508.166.650)
• Biaya transaksi	4.446.236	8.883.973
	2.344.998.025.582	2.393.175.762.549
• PPAP Umum	-	(7.579.688.705)
• PPAP Khusus	(47.864.294.001)	(40.297.511.468)
	2.297.133.731.581	2.345.298.562.376

c. Berdasarkan Hubungan

	2020	2019
• Pihak Terkait	65.207.148.350	61.412.528.700
• Pihak Lain	2.303.001.168.784	2.359.262.516.526
• Provisi Ditangguhkan	(23.214.737.788)	(27.508.166.650)
• Biaya transaksi	4.446.236	8.883.973
Jumlah	2.344.998.025.582	2.393.175.762.549
Jumlah Penyisihan Kerugian	(47.864.294.001)	(47.877.200.173)
Jumlah Kredit Yang Diberikan	2.297.133.731.581	2.345.298.562.376

Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

No	Nama	2020	2019
		Baki debit	Baki debit
1	Abdul Khoir Maradika Putra	289.722.050	313.055.450
2	Abdul Khoir Maradika Putra	-	17.000.000
3	Dicky Firman Tarigan	213.499.700	274.499.900
4	Tenny Yanutriana	14.999.900	5.628.800
5	Sugeng Riyanto	163.888.600	197.222.200
6	Sri Wahyu Utami	5.250.000	-
7	Eko Hartono	240.333.050	268.333.250
8	Saryono	176.666.200	196.666.600
9	Agus Budiyanto	204.166.300	229.166.500
10	Agus Budiyanto	13.000.000	-
11	Handi Ria Purnama Putra	45.000.000	51.000.000
12	Kondang	146.052.600	-
13	Ananta Yudha Irianto	30.187.500	-
14	Andi Pratiswo	55.332.100	63.332.500
15	Andi Pratiswo	-	5.000.000
16	Wirasto	51.250.000	66.250.000
17	Wahyu Adi Wibowo	24.166.200	29.166.600
18	Agung Sindhi Nugroho	45.660.600	52.966.800
19	Tri Budiyanto	333.332.500	359.999.500
	<i>Jumlah dipindahkan</i>	2.052.507.300	2.129.288.100

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

No	Nama	2020	2019
		Baki debit	Baki debit
	<i>Jumlah pindahan</i>	2.052.507.300	2.129.288.100
20	Tri Budiyanto	39.250.000	42.250.000
21	Agung Nugroho Saefurochman	291.666.500	314.999.900
22	Mochamad Makhmuri	10.000.000	17.500.000
23	Galih Setyo Wicaksono	138.832.600	155.833.000
24	Gilang Purnomo	63.750.000	23.000.000
25	Slamet Riyadi	32.300.000	46.000.000
26	Sandhy Wijaya	12.500.000	20.000.000
27	Ahmad Zaenudin	88.332.700	108.333.100
28	Sigit Dwi Sarwoko	76.735.800	45.833.200
29	Ariyanto	39.375.000	45.000.000
30	Ikhwan Rudiyanto	41.250.000	56.250.000
31	Dian Agung Sasongko	174.999.500	194.999.900
32	Thofik Hidayat	15.277.700	23.611.100
33	Muhamad Nur	53.666.200	67.666.600
34	Zaenal Abidin	21.874.600	25.000.000
35	Ginancar Dewantoro	20.951.200	32.380.000
36	Khrisna Adhy Purba	118.999.400	128.333.000
37	Khrisna Adhy Purba	18.332.750	19.666.550
38	Suroso	59.999.750	75.999.950
39	Aan Adriana	104.166.200	123.397.400
40	Aris Purwanto	86.666.400	-
41	Bondan Wahyu Nirboyo	10.757.800	21.920.850
42	Prapto Oktariato	11.829.750	15.254.100
43	Wirasto	6.500.000	-
44	Elly Karya Astuti	451.249.900	475.000.000
45	Dyah Windarti Moertiningsih	230.317.050	353.277.350
46	Agus Prijono	80.433.000	106.666.300
47	Momo Al Sutarmo	25.000.000	24.763.200
48	Benyamin P Tarigan	231.944.300	236.111.000
49	Benyamin P Tarigan	134.930.500	140.972.200
50	Emi Sulistyoningsih	12.459.600	15.980.800
51	Widiarto	205.000.000	188.000.000
52	Ratna Setiyawati Purnomo	8.457.700	11.958.100
53	Dewa Ridho Auditya	490.000.000	490.000.000
54	Faiz Hendra Wahyu Wijaya	15.209.650	-
55	Yuni Astuti	4.000.000	-
56	Kusuma Agung Sejahtera, PT	23.000.000.000	23.000.000.000
57	Surya Yudha Park	1.900.000.000	-
58	Kusuma Agung Sejahtera, PT	2.000.000.000	2.000.000.000
59	Kusuma Agung Sejahtera, PT	17.500.000.000	17.500.000.000
60	Kusuma Agung Sejahtera, PT	77.625.500	128.842.000
61	Surya Yudha Park	6.000.000.000	10.000.000.000
62	Surya Yudha Park	9.250.000.000	2.000.000.000
63	Wahyu Rukmono	-	5.899.700
64	Agus Budi Santoso	-	5.004.100
65	Agus Budi Santoso	-	61.679.450
	<i>Jumlah pindahan</i>	65.207.148.350	60.476.670.950

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

No	Nama	2020	2019
		Baki debit	Baki debit
	<i>Jumlah pindahan</i>	65.207.148.350	60.476.670.950
65	Joko Prastyo	-	15.333.300
66	Eling Sucipto	-	9.499.600
67	Zaenal Faizdin	-	9.999.400
68	Teguh Santosa	-	40.821.850
69	Teguh Miswanto	-	275.499.900
70	Teguh Miswanto	-	100.000.000
71	Mardhianto Eka Pratomo	-	296.666.600
72	Mardhianto Eka Pratomo	-	24.000.000
73	Eni Mulyati	-	3.000.000
74	Sugiarto	-	15.023.250
75	Vinna Vistryanni	-	5.097.700
76	Supriyadi	-	140.916.150
Jumlah Kredit Terkait		65.207.148.350	61.412.528.700

Mutasi PPAP:

Saldo awal	47.877.200.173	34.333.338.657
Kelebihan PPAP	(10.961.889.258)	(2.097.896.260)
Penyisihan selama tahun berjalan	10.948.983.086	15.641.757.776
Saldo Akhir	47.864.294.001	47.877.200.173

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

8. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2020	2019
• Agunan yang Diambil Alih	55.000.000.000	-
Jumlah Aset Tidak Berwujud	55.000.000.000	-

Daftar AYDA per 31 Desember 2020 :

No	No. SPK	Nama Debitur	Lokasi	Nominal
1	108111003453	Yuda Wijaya	Tanah di Sokaraja Purwokerto	30.000.000.000
2	108111003151	Yuda Wijaya	Hotel di Sokaraja Purwokerto	25.000.000.000
Jumlah				55.000.000.000

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

9. ASET TETAP

	2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan				
Tanah	1.823.750.000	-	-	1.823.750.000
Bangunan	7.102.164.600	-	-	7.102.164.600
Kendaraan	16.296.872.100	1.081.000.000	314.600.000	17.063.272.100
Inventaris	27.518.424.413	844.082.575	3.168.628.454	25.193.878.534
Jumlah Harga Perolehan	52.741.211.113	1.925.082.575	3.483.228.454	51.183.065.234
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	2.027.048.715	355.108.236	-	2.382.156.951
Kendaraan	8.545.595.793	1.640.284.687	314.599.998	9.871.280.482
Inventaris	19.397.182.319	2.990.932.871	3.113.691.237	19.274.423.953
Jumlah Akm. Penyusutan	29.969.826.827	4.986.325.794	3.428.291.235	31.527.861.386
Jumlah	22.771.384.286			19.655.203.848

	2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan				
Tanah	966.900.000	856.850.000	-	1.823.750.000
Bangunan	7.102.164.600	-	-	7.102.164.600
Kendaraan	14.689.537.100	5.433.647.500	3.826.312.500	16.296.872.100
Inventaris	25.779.744.808	2.152.878.795	414.199.190	27.518.424.413
Jumlah Harga Perolehan	48.538.346.508	8.443.376.295	4.240.511.690	52.741.211.113
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	1.671.940.479	355.108.236	-	2.027.048.715
Kendaraan	7.762.353.066	1.542.703.543	759.460.816	8.545.595.793
Inventaris	16.591.187.907	3.044.402.280	238.407.868	19.397.182.319
Jumlah Akm. Penyusutan	26.025.481.452	4.942.214.059	997.868.684	29.969.826.827
Jumlah	22.512.865.056			22.771.384.286

10. ASET TIDAK BERWUJUD

	2020	2019
• Aset Tidak Berwujud	2.338.904.000	2.235.804.000
• Akumulasi Amortisasi	(2.068.427.650)	(1.794.116.289)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	270.476.350	441.687.711

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

11. ASET LAIN-LAIN

	2020	2019
• Persediaan Buku Angsuran	13.088.400	13.185.600
• Persediaan Buku Tabungan Surya	13.675.500	8.842.500
• Persediaan Buku TAS	15.664.500	24.213.000
• Persediaan Buku Tabunganku	7.615.500	7.939.500
• Persediaan Buku Tabungan ATM	12.384.000	13.560.000
• Persediaan Buku Tabungan Umroh	6.621.000	6.739.500
• Persediaan Buku THT Umum	7.689.000	8.725.500
• Persediaan Buku Tabungan Simple	11.274.000	11.637.000
• Persediaan Buku Tabungan Piknik	11.584.500	11.773.500
• Persediaan Token SMS	7.448.628	5.088.028
• Persediaan Bilyet Deposito	10.809.000	8.280.000
• Persediaan Barang Promosi	680.356.466	866.786.162
• Persediaan Barang Cetak	383.060.825	373.381.950
• Persediaan Alat Tulis	51.793.750	60.863.800
• Persediaan Kertas Signature & Overly	20.160.000	22.320.000
• Persediaan Seragam	24.273.000	94.340.990
• Persediaan ID Card	6.081.750	2.047.750
• Sewa Dibayar Dimuka	6.650.692.061	7.522.357.134
• Materai	8.526.000	12.234.000
• Hak ATM	39.189.535	124.208.804
• Deposit PPOB	93.182.510	151.663.664
• Lainnya (Uang Muka)	2.220.367.000	1.373.510.500
Jumlah Aset Lain-lain	10.295.536.925	10.723.698.882

12. KEWAJIBAN SEGERA

	2020	2019
• PPh Psl. 21	895.991.835	1.370.052.840
• PPh Psl. 23	721.877	1.521.673
• PPh Psl. 4 (2) Final	1.691.599.910	1.771.098.225
• PPh Psl. 25 Masa Desember	4.826.203.253	3.260.615.986
• ATM	437.902.489	230.764.387
• Fee ATM	3.991.000	2.912.500
• Fee Purchase	4.971.000	4.507.000
• Administrasi ATM	4.429.910	5.017.350
• Titipan Plus	-	-
• Pulsa PPOB	15.692.337	11.212.699
• Titipan Transfer	226.731.580	290.586.100
• Titipan Uang Muka Kendaraan	9.000.000	-
• Titipan Angsuran Diterima Dimuka	2.635.028.997	2.673.847.427
• Titipan Proses SHM	2.000.000	2.000.000
• Payment	396.953	-
• Fee Payment	2.750	-
• To Up	1.790.000	-
• Fee Top Up	51.000	-
• Lainnya	218.485.944	250.333.111
Jumlah Kewajiban Segera	10.974.990.835	9.874.469.298

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

13. HUTANG BUNGA

	2020	2019
• Bunga Tabungan Pihak Ketiga	-	22.460
• Budep Pihak Ketiga	3.656.396.940	4.150.602.500
• Budep Jt. Tempo Belum Diambil	18.698.481	26.942.858
• Budep Bank Lain Belum Jatuh Tempo	216.747.750	200.905.815
• Budep Bank Lain Jatuh Tempo Belum Diambil	-	-
• Bunga Pinjaman Bank	1.188.933.370	1.553.356.659
• Bunga Pinjaman Bukan Bank	71.882.407	84.444.444
Jumlah Hutang Bunga	5.152.658.948	6.016.274.736

14. HUTANG PAJAK

	2020	2019
• PPh ps 29	-	-
Jumlah Hutang Pajak	-	-

15. TABUNGAN

	2020	2019
• Tabungan Surya Umum	546.537.655.480	482.754.918.199
• Tabungan Pensiun	34.166.199.180	29.817.726.197
• Tabungan Hari Tua (THT) Umum	12.622.344.236	16.442.835.090
• Tabungan Arisan Surya (TAS)	88.407.313.450	92.336.722.250
• Tabungan TabunganKu	7.148.393.016	6.465.084.345
• Tabungan ATM Surya Umum	5.608.056.488	8.292.159.970
• Tabungan ATM Surya Khusus	42.974.813.663	30.683.867.122
• Tabungan Simpel	604.737.196	635.425.201
• Tabungan Piknik	9.157.541.653	4.683.511.174
• Tabungan Umroh	2.329.148.954	2.292.742.245
Jumlah	749.556.203.316	674.404.991.793
• Beban Transaksi	(20.665.936)	(21.857.787)
Jumlah Tabungan	749.535.537.380	674.383.134.006

16. DEPOSITO BERJANGKA

a. Berdasarkan Keterkaitan

	2020	2019
• Pihak Terkait Dengan Bank	119.765.350.686	104.913.790.322
• Pihak Tidak Terkait Dengan Bank	1.050.252.870.004	1.042.708.812.698
	1.170.018.220.690	1.147.622.603.020
• Beban Transaksi	(533.036.214)	(502.251.922)
Jumlah	1.169.485.184.476	1.147.120.351.098

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

16. DEPOSITO BERJANGKA (Lanjutan)

b. Berdasarkan Jangka Waktu

		2020	2019
• 1 bulan	tingkat bunga 0 -10,5%	270.608.367.354	241.232.649.842
• 3 bulan	tingkat bunga 0,25 -9,25%	285.916.210.924	338.100.676.027
• 6 bulan	tingkat bunga 0,25-9%	218.767.021.181	215.879.955.546
• 12 bulan	tingkat bunga 0,25-9,5%	394.476.621.231	352.359.321.605
• >= 36 bulan	tingkat bunga 0,5%	250.000.000	50.000.000
		1.170.018.220.690	1.147.622.603.020
• Beban Transaksi		(533.036.214)	(502.251.922)
Jumlah Deposito Berjangka		1.169.485.184.476	1.147.120.351.098

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2020	2019
Tabungan		
• PT. BPR Surya Yudha Kertek	440.427	631.191
• PT. BPR Mandiri Artha Abadi	27.725	-
• PT BPR Gamon	506.880	-
• PT BPR Cemerlang	25.180	-
• PT BPR Sejahtera Batam	107.310	-
• PT BPR Bank Klaten Perseroda	186.072.335	-
• PT BPR Banda Raya	25.045	-
• PT BPR BKK Lasem	25.075	-
• PT BPR Hidup Artha Graha	25.000	-
• PT BPR Kepri Bintan	50.000	-
• PT BPR Mertoyudan	1.001.610	-
• PT BPR Eleska Artha	847.414.175	-
Jumlah	1.035.720.762	631.191
Deposito		
• PD BPR BKK Lasem	8.000.000.000	8.000.000.000
• PD BPR BKK Wonogiri	10.000.000.000	7.000.000.000
• PT BPR Mertoyudan	1.000.000.000	600.000.000
• PT BPR Sejahtera Batam	12.000.000.000	9.500.000.000
• PT BPR Terabina Seraya Mulia	2.076.181.500	2.000.000.000
• PT. BPR Weleri Makmur	-	2.000.000.000
• PT BPR Surya Yudha	5.000.000.000	2.000.000.000
• PT BPR Lestari Jakarta	-	1.000.000.000
• PT BPR Cemerlang Kapuas Makmur	800.000.000	800.000.000
• PT BPR Mandiri Artha Abadi	2.000.000.000	5.000.000.000
• PT BPR Muncul Artha Sejahtera	1.905.416.660	2.000.000.000
• PD BPR Artha Perwira	1.000.000.000	3.000.000.000
• PT BPR Mranggen Mitrapersada	2.000.000.000	2.000.000.000
• PT BPR Gamon	2.000.000.000	2.000.000.000
• PT BPR Hidup Artha Graha	2.000.000.000	-
• PT BPR Kepri Bintan	2.000.000.000	-
<i>Jumlah dipindahkan</i>	51.781.598.160	46.900.000.000

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN (Lanjutan)

Deposito

<i>Jumlah pindahan</i>	51.781.598.160	46.900.000.000
• PT BPR Eleska Artha	-	290.000.000
• PT BPR Central Sejahtera	1.036.801.945	2.000.000.000
• PT BPR Banda Raya	4.000.000.000	4.000.000.000
• PT BPR Bank Klaten Perseroda	5.000.000.000	-
• PT BPR Asia Sejahtera	1.455.133.100	1.400.000.000
• PT BPR Agung Sejahtera	-	1.000.000.000
Jumlah	63.273.533.205	55.590.000.000

Jumlah Simpanan Dari Bank Lain

64.309.253.967 **55.590.631.191**

18. PINJAMAN DITERIMA

Pihak Bank

	2020	2019
• Bank CIMB Niaga	128.549.999.995	188.549.999.995
• Bank Jateng	168.671.645.841	138.587.645.846
• Bank BJB	65.416.666.671	102.500.000.008
• Bank Danamon	23.370.962.258	28.962.464.750
• Hana Bank	20.236.977.273	26.767.276.658
	406.246.252.038	485.367.387.257

Pihak Non Bank

• LPDB	87.458.333.000	118.000.000.000
	493.704.585.038	603.367.387.257
• Provisi	(566.389.577)	(590.922.280)
• Beban Transaksi	(2.473.727.033)	(3.492.769.953)

Jumlah Pinjaman Diterima

490.664.468.428 **599.283.695.024**

Perusahaan telah mendapatkan fasilitas pinjaman sebagai berikut :

1. PT Bank CIMB Niaga, Tbk

No	PK	Tanggal PK	Sifat Kredit	Plafon	Jangka Waktu	Jatuh
1	2	27/05/2015	EXECUTING	17.000.000.000	60 Bulan	28/02/2021
2	2	27/05/2015	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	29/04/2021
3	2	27/05/2015	EXECUTING	8.000.000.000	60 Bulan	17/06/2021
4	42	28/07/2016	EXECUTING	5.000.000.000	60 Bulan	04/10/2021
5	42	28/07/2016	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	29/11/2021
6	42	28/07/2016	EXECUTING	7.000.000.000	60 Bulan	31/01/2022
7	42	28/07/2016	EXECUTING	8.000.000.000	60 Bulan	31/03/2022
8	42	28/07/2016	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	16/05/2022
9	42	28/07/2016	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	26/05/2022
10	930	31/05/2017	EXECUTING	25.000.000.000	60 Bulan	15/06/2022
11	930	31/05/2017	EXECUTING	5.000.000.000	60 Bulan	28/09/2022
12	930	31/05/2017	EXECUTING	20.000.000.000	60 Bulan	22/12/2022
13	0419	19/04/2018	EXECUTING	20.000.000.000	60 Bulan	26/4/2023
14	0419	19/04/2018	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	14/5/2023
15	0419	19/04/2018	EXECUTING	15.000.000.000	60 Bulan	30/5/2023
16	0419	19/04/2018	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	7/6/2023
17	0419	19/04/2018	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	29/8/2023
18	0419	19/04/2018	EXECUTING	15.000.000.000	60 Bulan	23/11/2023
19	0419	19/04/2018	EXECUTING	35.000.000.000	60 Bulan	06/03/2024
20	0583	20/5/2019	EXECUTING	50.000.000.000	60 Bulan	21/05/2024

300.000.000.000 Suku Bunga 9%, 9.25%, 9.7%, 10% dan 10.5%

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

18. PINJAMAN DITERIMA (Lanjutan)

Dengan Pinjaman :

1. Fidusia atas tagihan pinjaman kepada endusernya termasuk hasil penjualan jaminan yang diberikan enduser kepada peminjam, minimal sebesar plafon pinjaman.

2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

No	PK	Tanggal PK	Sifat Kredit	Plafon	Jangka Waktu	Jatuh
1	37	20/07/2017	EXECUTING	575.000.000	48 Bulan	29/09/2021
2	37	20/07/2017	EXECUTING	1.730.000.000	60 Bulan	29/09/2022
3	37	20/07/2017	EXECUTING	5.000.000.000	60 Bulan	22/12/2022
4	37	20/07/2017	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	26/03/2023
5	37	20/07/2017	EXECUTING	15.000.000.000	48 Bulan	14/05/2022
6	37	20/07/2017	EXECUTING	15.000.000.000	48 Bulan	24/05/2022
7	4	2/4/2019	EXECUTING	50.000.000.000	60 Bulan	4/04/2024
8	46	27/5/2019	EXECUTING	75.000.000.000	60 Bulan	27/05/2024
9	5	27/5/2020	EXECUTING	75.000.000.000	60 Bulan	27/05/2025
				247.305.000.000	Suku Bunga 9 %	

Dengan Jaminan :

1. Jaminan Utama berupa piutang atau kredit yang diberikan dengan kolektibilitas lancar yang diikatkan secara fidusia minimal 100% dari limit kredit yang diberikan.
2. Jaminan Tambahan berupa Cash Collateral sebesar minimal 2,5% dari plafond kredit dan Surat Akse yang ditandatangani oleh pengurus/direksi.

3. PT Bank BJB

No	SPK	Tanggal PK	Sifat Kredit	Plafon	Jangka Waktu	Jatuh Tempo
1	152	18/05/2015	EXECUTING	5.000.000.000	60 Bulan	28/04/2021
2	152	18/05/2015	EXECUTING	30.000.000.000	60 Bulan	18/05/2021
3	112	28/09/2016	EXECUTING	5.000.000.000	60 Bulan	30/09/2021
4	112	28/09/2016	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	31/03/2022
5	112	28/09/2016	EXECUTING	20.000.000.000	60 Bulan	24/05/2022
6	112	28/09/2016	EXECUTING	15.000.000.000	60 Bulan	16/06/2022
7	11	06/03/2018	EXECUTING	15.000.000.000	60 Bulan	20/03/2023
8	11	06/03/2018	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	11/05/2023
9	11	06/03/2018	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	20/05/2023
10	11	06/03/2018	EXECUTING	10.000.000.000	60 Bulan	06/06/2023
11	11	06/03/2018	EXECUTING	15.000.000.000	60 Bulan	20/11/2023
12	11	06/03/2018	EXECUTING	30.000.000.000	60 Bulan	15/2/2024
				175.000.000.000	Suku Bunga 9%, 9.25% & 9.5%	

Dengan Jaminan sebagai berikut :

- a Segala Kekayaan Debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak
- b Cash Collateral minimal 5% dari Outstanding berupa deposito berjangka pada Bank BJB
- c Piutang Lancar PT. BPR Surya Yudhakencana yang tidak memiliki tunggakan pembayaran sebesar 100%

4. Hana Bank

No	SPK	Tanggal PK	Sifat Kredit	Plafon	Jangka Waktu	Jatuh Tempo
1	18	08/06/2018	WCI	15.000.000.000	60 Bulan	12/07/2023
2	18	08/06/2018	WCI	10.000.000.000	60 Bulan	30/07/2023
3	18	08/06/2018	WCI	10.000.000.000	60 Bulan	31/08/2023
				35.000.000.000	Suku Bunga 9.5%	

Dengan Jaminan sebagai berikut :

- a Berupa piutang dagang senilai Rp75.000.085.385 dan lain sebagainya ternyata dalam daftar piutang PT. BPR Surya Yudhakencana pertanggal 31 Mei 2018.
- b Jaminan-jaminan tambahan yang dianggap cukup memuaskan oleh bank.

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

18. PINJAMAN DITERIMA (Lanjutan)

5. Danamon

No	SPK	Tanggal PK	Sifat Kredit	Plafon	Jangka Waktu	Jatuh Tempo
1	62	06/05/2019	EXECUTING	32.000.000.000	60 Bulan	06/05/2024
				32.000.000.000	Suku Bunga 9%	

6. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)

No	SPK	Tanggal PK	Sifat Kredit	Plafon	Jan	Jatuh Tempo
1	393/SP3/LPDB/2015	14/01/2016	EXECUTING	30.000.000.000	60	25/01/2021
2	393/SP3/LPDB/2015	03/05/2016	EXECUTING	30.000.000.000	60	25/05/2021
3	138/SP3/LPDB/2019	17/12/2019	EXECUTING	90.000.000.000	60	25/01/2025
4	138/SP3/LPDB/2019	17/12/2019	EXECUTING	10.000.000.000	60	25/01/2025
				160.000.000.000	Suku Bunga 4% , 5%	

19. KEWAJIBAN LAIN - LAIN

	2020	2019
• RRP Lainnya	576.888.818	168.971.187
• Titipan Karyawan Resign	136.992.792	-
Jumlah Kewajiban Lain - lain	713.881.610	168.971.187

20. MODAL SAHAM

Sesuai Akta No. 112 tahun 2019 tertanggal 18 Juni 2019, dalam Anggaran Dasar Perusahaan disebutkan bahwa modal Perusahaan berjumlah Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 235.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima milyar rupiah), terbagi atas 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal @Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pemegang Saham	2020			2019		
	Lembar	%	Nominal	Lembar	%	Nominal
Tuan Satriyo Yudiarto	164.500	70%	164.500.000.000	164.500	70%	164.500.000.000
Nyonya Milla Feryanti	23.500	10%	23.500.000.000	23.500	10%	23.500.000.000
Tuan Ananta Yudha Irianto	23.500	10%	23.500.000.000	23.500	10%	23.500.000.000
Nyonya Tenny Yanutriana	23.500	10%	23.500.000.000	23.500	10%	23.500.000.000
Jumlah Saham	235.000	100%	235.000.000.000	235.000	100%	235.000.000.000

21. SALDO LABA

	2020	2019
Terdiri dari:		
Cadangan Umum:		
Saldo awal	47.000.000.000	39.000.000.000
Alokasi dari laba	-	8.000.000.000
Jumlah	47.000.000.000	47.000.000.000

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

21. SALDO LABA (Lanjutan)

	2020	2019
Saldo awal	89.906.266.306	93.243.054.010
Dividen	(40.000.000.000)	(75.000.000.000)
Cadangan	-	(8.000.000.000)
Koreksi Kelebihan Pajak Terutang Pajak Penghasilan	-	-
Koreksi Laba	-	10.427.791
Laba bersih tahun berjalan	62.186.905.864	79.652.784.505
Jumlah	112.093.172.170	89.906.266.306
Total saldo laba	159.093.172.170	136.906.266.306

22. PENDAPATAN BUNGA

	2020	2019
Bunga Dari Kredit Yang Diberikan:		
• Pendapatan Bunga Kredit Umum	278.989.928.590	321.221.654.156
• Pendapatan Bunga Kredit Motor & Mobil	19.897.681.795	13.538.903.819
• Pendapatan Bunga Kredit Pegawai	23.092.829.379	27.476.538.650
• Pendapatan Bunga Kredit	1.162.082.570	-
• Biaya Transaksi	(29.437.737)	(41.116.027)
Bunga Dari Penempatan Bank Lain:		
• Pendapatan Bunga Giro	19.698.863.011	14.132.669.868
• Pendapatan Bunga Tabungan	544.003.668	753.177.709
• Pendapatan Bunga Deposito	1.798.204.118	1.620.087.745
Sub Jumlah	345.154.155.394	378.701.915.920
Pendapatan Provisi		
• Pendapatan Provisi Bunga Kredit Umum	20.530.404.631	23.242.635.220
• Pendapatan Provisi Bunga Kredit Motor & Mobil	1.223.248.082	1.507.966.179
• Pendapatan Provisi Bunga Kredit Pegawai	1.313.316.935	731.221.237
Sub Jumlah	23.066.969.648	25.481.822.636
Jumlah Pendapatan Bunga	368.221.125.042	404.183.738.556

23. BEBAN BUNGA

	2020	2019
Pihak Bank		
• Bunga Tabungan	39.061.750	886.885
• Bunga Deposito	4.395.841.390	4.517.584.285
• Bunga Pinjaman	41.884.607.729	43.626.040.097
• Provisi Pinjaman	212.032.703	186.878.563
• Bunga pinjaman biaya transaksi	46.203.312	104.667.487
Pihak Non Bank		
• Bunga Tabungan	15.129.433.239	12.395.033.198
• Bunga Deposito	86.724.679.310	85.492.484.600
• Bunga Pinjaman LPDB	5.157.353.544	1.225.277.781
• Fee Penjamin LPS	3.888.982.581	3.372.344.221
Sub Jumlah	157.478.195.558	150.921.197.117

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

23. BEBAN BUNGA (lanjutan)

• Biaya Bunga Tabungan Biaya Transaksi	3.442.950.926	3.080.935.770
• Biaya Bunga Deposito Biaya Transaksi	968.156.083	866.334.501
• Biaya Bunga LPDB Biaya Transaksi	1.009.339.608	480.083.353
Sub Jumlah	5.420.446.617	4.427.353.624
Jumlah Beban Bunga	162.898.642.175	155.348.550.741

24. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2020	2019
• Pendapatan Operasional PPOB	100.476.457	99.927.601
• Pendapatan PO Fee PPOB ATM & Mbanking	850.089	-
• Pendapatan Operasional Lainnya	15.628.625.538	19.204.007.965
• Pendapatan Operasional Pemulihan PPAP PPBL	2.041.629.956	174.274.099
• Pendapatan Operasional Pemulihan PPAP KYD	10.961.889.258	2.097.896.260
• Pendapatan Operasional ATM	97.040.890	131.999.987
• Pendapatan Jasa Transaksi	867.141.946	439.804.638
• Pendapatan Penerimaan Kredit Hapus Buku	172.290.500	141.505.150
• Pendapatan Bunga Hapus Buku	1.704.000	-
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	29.871.648.634	22.289.415.700

25. BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

	2020	2019
• Beban Kredit Yang Diberikan	10.948.983.086	15.641.757.776
• Beban Penempatan Pada Bank Lain	-	1.919.249.242
Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	10.948.983.086	17.561.007.018

26. BEBAN PEMASARAN

	2020	2019
• Beban Promosi	5.487.735.229	6.203.300.165
Jumlah Beban Pemasaran	5.487.735.229	6.203.300.165

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

a. BEBAN TENAGA KERJA

	2020	2019
• Beban Gaji/Upah	73.666.002.077	71.061.679.155
• Beban Tunjangan PPh	2.601.141.250	2.701.833.020
• Beban Honorarium	2.682.340.835	2.896.967.872
• Beban Tunjangan Jamsostek (BPJS)	3.536.503.577	3.499.796.831
<i>Jumlah dipindahkan</i>	82.485.987.739	80.160.276.878

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)

<i>Jumlah pindahan</i>	82.485.987.739	80.160.276.878
• Beban Kesehatan	2.412.560.649	1.920.802.778
• Beban Lembur	843.086.000	1.170.735.000
• Beban THR	6.246.823.725	5.859.526.900
• Beban Tunjangan Persalinan/Haji/Rumah/Nikah	459.061.901	460.223.200
• Beban Seragam	684.864.745	527.216.270
• Beban Pesangon	25.000.000	145.000.000
• Beban Extra Gaji (Prestasi Karyawan)	12.312.321.516	15.007.548.278
• Beban Tunjangan Keahlian	120.600.000	115.800.000
• Beban Tunjangan Kemahalan	73.050.000	70.050.000
Jumlah Beban Tenaga Kerja	105.663.356.275	105.437.179.304
b. BEBAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN		
	2020	2019
• Beban Penelitian & Pengembangan	28.005.355	73.672.500
Jumlah Beban Penelitian & Pengembangan	28.005.355	73.672.500
c. BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	2020	2019
• Beban Pendidikan	2.314.996.250	4.099.379.025
Jumlah Beban Pendidikan dan Pelatihan	2.314.996.250	4.099.379.025
d. BEBAN SEWA		
	2020	2019
• Beban Sewa Gedung	5.721.757.470	5.126.189.526
• Beban Sewa Lainnya	222.839.601	149.917.991
Jumlah Beban Sewa	5.944.597.071	5.276.107.517
e. BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP		
	2020	2019
• Beban Penyusutan Aset Tetap Berwujud	4.986.325.794	4.942.214.059
• Beban Penyusutan Aset Tetap Tidak Berwujud	171.211.365	164.972.456
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	5.157.537.159	5.107.186.515
f. BEBAN PREMI ASURANSI		
	2020	2019
• Beban Premi Asuransi	340.115.798	355.137.887
Jumlah Beban Premi Asuransi	340.115.798	355.137.887

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)

g. BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

	2020	2019
• Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaran	924.499.901	2.772.035.423
• Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Non Kendaran	3.125.688.345	925.738.338
Jumlah Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	4.050.188.246	3.697.773.761

h. BEBAN BARANG DAN JASA

	2020	2019
• Beban Telepon	1.733.127.119	1.854.956.836
• Beban Listrik/Gas/Air	1.462.768.372	1.658.243.213
• Beban Alat Tulis Kantor	834.533.750	840.596.439
• Beban Percetakan	617.537.245	757.340.400
• Beban Perjalanan	2.669.001.555	3.281.096.800
• Beban Langganan	117.208.880	110.763.200
• Beban Penginapan	7.242.500	14.075.000
• Beban Konsultan	493.469.384	469.067.765
• Beban Jasa Keamanan	345.334.040	375.588.418
• Beban Expedisi	75.364.350	84.253.700
• Beban Jasa Lainnya (Penagihan)	451.961.501	713.150.261
Jumlah Beban Barang dan Jasa	8.807.548.696	10.159.132.032

i. BEBAN PAJAK (NON PAJAK PENGHASILAN)

	2020	2019
• Beban Retribusi dan Reklame	196.393.158	195.008.871
• Beban PBB	33.995.578	29.766.816
• Beban Pajak Kendaraan	222.931.150	207.264.575
• Beban Pajak Air Bawah Tanah	2.225.760	2.233.888
Jumlah Beban Pajak (Non Pajak Penghasilan)	455.545.646	434.274.150

Jumlah Beban Administrasi dan Umum

132.761.890.496	134.639.842.691
------------------------	------------------------

28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2020	2019
• Beban Administrasi	60.183.500	97.286.471
• Beban Membership	61.500.000	60.400.000
• Beban Administrasi ATM	69.874.975	77.880.118
• Beban Perlengkapan Kantor	1.310.583.204	1.859.004.629
• Beban Konsumsi	2.053.233.775	2.323.388.150
• Lainnya	1.907.036.998	1.259.090.365
Jumlah Beban Operasional Lainnya	5.462.412.452	5.677.049.733

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

29. PENDAPATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

	2020	2019
• Pendapatan Laba Penjualan Aset Tetap	124.140.017	219.504.500
• Pendapatan Non Operasional Lainnya	403.412.014	588.884.362
Jumlah Pendapatan Non Operasional Lainnya	527.552.031	808.388.862

30. BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

	2020	2019
• Beban Penjualan/Kehilangan Aset Tetap	36.340.409	33.958.354
• Beban CSR	398.874.200	602.595.900
• Beban Sumbangan	268.209.700	182.846.000
• Lainnya	480.657.262	595.347.078
Jumlah Beban Non Operasional Lainnya	1.184.081.571	1.414.747.332

31. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

	2020	2019
• Taksiran Pajak Penghasilan	17.689.674.834	26.784.260.933
Jumlah Pajak Penghasilan	17.689.674.834	26.784.260.933
Perhitungan Pajak Penghasilan:		
• Laba Komersial	79.876.580.698	106.437.045.438
• Koreksi Fiskal Positif :		
- Beban Non Operasional - CSR	398.874.200	602.595.900
- Beban Penyusutan Sedan	-	1.406.250
- Beban Penyusutan HP	455.006	580.144
- Sumbangan	268.209.700	182.846.000
- Denda pajak	7.947.279	-
• Koreksi Fiskal Positif :		
- Kredit hapus buku	(144.454.000)	(87.430.000)
• Koreksi Fiskal Negatif :		
• Penghasilan Kena Pajak (PKP)	80.407.612.883	107.137.043.732
Taksiran Pajak Penghasilan		
22% x 80.407.612.883	17.689.674.834	26.784.260.933
PPh Pasal 25	(17.689.674.834)	(26.784.260.933)
PPh PS 29	0	-

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

32. RASIO-RASIO KEUANGAN

Rasio Likuiditas:

Adalah Kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.

• Loan To Deposit Ratio	=	$\frac{\text{Kredit Diberikan}}{\text{Dana Yang Diterima}}$	=	$\frac{2.368.208.317.134}{2.825.476.079.987}$	=	83,82%
• Cash Ratio	=	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	=	$\frac{367.256.563.864}{1.930.549.414.841}$	=	19,02%

Rasio Profitabilitas:

Adalah rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi

• Return on Asset	=	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	=	$\frac{79.876.580.698}{2.829.635.936.343}$	=	2,82%
• Return on Equity	=	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Modal}}$	=	$\frac{79.876.580.698}{360.067.127.788}$	=	22,18%

Rasio Solvabilitas

Adalah gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang secara tepat waktu.

Rasio Biaya

• BOPO	=	$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	=	$\frac{317.559.663.438}{398.092.773.676}$	=	79,77%
---------------	---	--	---	---	---	--------

Aktiva Produktif

• NPL Gross	=	$\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$	=	$\frac{146.841.338.223}{2.368.208.317.134}$	=	6,20%
• NPL Netto	=	$\frac{\text{Krd Bermasalah-PPAP Khusus}}{\text{Total Kredit}}$	=	$\frac{99.573.567.196}{2.368.208.317.134}$	=	4,20%

ANALISA KEUANGAN

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

	<u>2020</u>
KOMITMEN	
Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-
1. Bank BJB	
2. Bank CIMB Niaga	
Komitmen - bersih	<u>-</u>
KONTINJENSI	
Tagihan Kontinjensi	-
Pendapatan bunga dalam penyelesaian:	
Bunga kredit umum	49.449.754.812
Bunga kredit pegawai	1.808.361.901
Bunga kredit motor	203.703.882
Bunga kredit mobil	119.277.865
Fasilitas kredit kepada nasabah belum ditarik	35.257.176.215
Aset produktif yang dihapusbukukan	11.185.783.198
Kontinjensi - bersih	<u><u>98.024.057.873</u></u>

*Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan*

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
ANALISA ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

KUALITAS ASET PRODUKTIF			
KETERANGAN	2020		
	KREDIT	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	SALDO
1. ASET PRODUKTIF			
- Lancar	2.023.892.850.712	413.310.344.909	2.437.203.195.621
- Dalam Perhatian Khusus	197.474.128.199	-	197.474.128.199
- Kurang Lancar	927.199.577	-	927.199.577
- Diragukan	4.758.177.369	-	4.758.177.369
- Macet	141.155.961.277	-	141.155.961.277
J U M L A H	2.368.208.317.134	413.310.344.909	2.781.518.662.043
2. ASET PRODUKTIF YANG DIKLASIFIKASIKAN			
- Kurang Lancar (50%)	463.599.789	-	463.599.789
- Diragukan (75%)	3.568.633.027	-	3.568.633.027
- Macet (100%)	141.155.961.277	-	141.155.961.277
J U M L A H	145.188.194.092	-	145.188.194.092
3. PPAPWD (setelah dikurangi agunan)			
- Lancar (1%)	-	-	-
- Dalam Perhatian Khusus 0,5%)	596.522.974	-	596.522.974
- Kurang Lancar (50%)	21.997.775	-	21.997.775
- Diragukan (75%)	507.805.875	-	507.805.875
- Macet (100%)	46.737.967.377	-	46.737.967.377
J U M L A H	47.864.294.001	-	47.864.294.001
PPAP BANK	47.864.294.001	-	47.864.294.001
3. RASIO-RASIO			
Aset produktif yg diklasifikasikan			
----- x 100% =			5,22%
Aset produktif			
Penyisihan pengh.aset produktif			
----- x 100% =			100,00%
PPAP Yang Wajib Dibentuk			
Non Performing Loan - Bruto =	<u>KL + DRG + MCT</u>		6,20%
	TOTAL KREDIT		
Non Performing Loan - Netto =	<u>KL + DRG + MCT - PPAP KHUSUS</u>		4,20%
	TOTAL KREDIT		

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	PPAP KHUSUS	Nominal setelah dikurangi PPAP Khusus	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
1	2	3	3	5	6	7
1	Kas	18.206.412.000			0%	-
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)				0%	-
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit	86.856.016.314		86.856.016.314	0%	-
4	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan				0%	-
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR			-	15%	-
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	413.310.344.909		413.310.344.909	20%	82.662.068.982
7	Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah				20%	-
	a. Kredit kepada bank lain					
	b. Kredit kepada Pemerintah Daerah					
	c. Bagian Kredit yang dijamin oleh bank lain					
	d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah					
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit				20%	-
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia	1.265.861.251.104	172.437.598	1.265.688.813.506	30%	379.706.644.052
10	Kredit Kepada BUMN / BUMD				50%	-
11	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%	200.693.304.955	336.073.423	200.357.231.532	50%	100.178.615.766
12	Kredit kepada Pegawai/Pensiunan yang memenuhi persyaratan	21.023.176.884	29.633.620	20.993.543.264	50%	10.496.771.632
13	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	405.578.083.046	228.444.633	405.349.638.413	50%	202.674.819.207
14	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	80.561.805.041	303.050.426	80.258.754.615	70%	56.181.128.231
15	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	137.580.277.482	36.415.235	137.543.862.247	70%	96.280.703.573
16	Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	27.157.834.993	412.500	27.157.422.493	100%	27.157.422.493
17	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	142.896.567.315	46.757.826.566	96.138.740.749	100%	96.138.740.749
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo					
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet					
18	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	19.925.680.198			100%	19.925.680.198
19	Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-			100%	-
20	Aset lainnya selain angka 1 s.d 19	81.352.979.126		81.352.979.126	100%	81.352.979.126
	Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum					
	Selisih lebih PPAP Umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap -/-					
	Jumlah ATMR					1.152.755.574.008

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

MODAL	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	JUMLAH
I MODAL INTI		-
1.1 Modal Disetor	235.000.000.000	235.000.000.000
1.2 Modal Sumbangan	-	-
1.3 Dana Setoran Modal	-	-
1.4 Cadangan Umum	47.000.000.000	47.000.000.000
1.5 Cadangan Tujuan	-	-
1.6 Rugi/Laba Tahun-tahun Lalu	49.906.266.306	49.906.266.306
1.7 Laba Tahun Berjalan Setelah Dikurangi Kekurangan PPAP (Max. 50% Setelah Dikurangi Taksiran Hutang PPh)	62.186.905.864	31.093.452.932
JUMLAH MODAL INTI	394.093.172.170	362.999.719.238
II MODAL PELENGKAP		
2.1 Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	-	-
2.2 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Umum (Max. 1,25% dari ATMR)	-	-
2.3 Modal Pinjaman	-	-
2.4 Pinjaman Subordinasi	-	-
JUMLAH MODAL PELENGKAP		-
JUMLAH MODAL		362.999.719.238
MODAL MINIMUM (12% X ATMR)	1.152.755.574.008	138.330.668.881
JUMLAH KELEBIHAN MODAL		224.669.050.357
RASIO KPMM (CAR) = $\frac{\text{JUMLAH MODAL} \times 100\%}{\text{ATMR}}$	= $\frac{362.999.719.238}{1.152.755.574.008}$ =	31,49

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
PERHITUNGAN RENTABILITAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

DATA LAPORAN 12 BULAN TERAKHIR	TOTAL ASSET	LABA/RUGI KOTOR MUTASI	TOTAL MODAL	BIAYA OPERASIONAL MUTASI	PENDAPATAN OPERASIONAL MUTASI
1 BULAN : Januari 2020	2.873.836.598.405	3.577.014.698	382.930.402.342	35.107.053.957	38.752.650.259
1 BULAN : Februari 2020	2.882.925.750.917	8.857.029.311	385.628.756.199	29.180.674.720	38.148.226.400
1 BULAN : Maret 2020	2.850.835.592.633	4.853.478.514	387.483.221.979	29.886.731.970	34.740.427.841
1 BULAN : April 2020	2.743.573.661.751	899.599.872	346.253.402.472	32.034.184.341	32.936.175.766
1 BULAN : Mei 2020	2.817.855.196.458	17.566.331.345	345.850.113.265	21.360.269.838	39.000.784.277
1 BULAN : Juni 2020	2.810.284.059.841	843.826.446	346.179.205.579	28.562.907.561	29.465.145.950
1 BULAN : Juli 2020	2.794.385.574.148	2.720.912.290	347.240.361.372	27.098.025.485	29.893.907.138
1 BULAN : Agustus 2020	2.804.150.725.022	3.344.579.225	348.541.150.990	25.271.473.445	28.693.483.164
1 BULAN : September 2020	2.816.211.611.089	5.930.789.577	350.852.259.005	25.094.852.573	31.268.813.037
1 BULAN : Oktober 2020	2.822.545.938.505	187.465.348	356.515.093.722	29.514.086.720	29.777.246.698
1 BULAN : November 2020	2.854.097.379.531	9.689.298.744	360.331.847.300	24.045.143.689	33.790.616.965
1 BULAN : Desember 2020	2.884.929.147.814	21.406.255.328	362.999.719.238	10.404.259.139	31.625.296.181
Jumlah 12 Bulan	33.955.631.236.114	79.876.580.698	4.320.805.533.459	317.559.663.438	398.092.773.676
Rata-rata 12 bulan	2.829.635.936.343		360.067.127.788		

Rasio-rasio

- a. Rasio L/R 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha 12 bulan terakhir (%) **ROA** **2,82%**
- b. Rasio L/R 12 bulan terakhir terhadap rata-rata modal 12 bulan terakhir (%) **ROE** **22,18%**
- c. Rasio jumlah biaya operasional 12 bulan terakhir terhadap jumlah pendapatan operasional 12 bulan terakhir (%) **BOPO** **79,77%**

PT BPR SURYA YUDHAKENCANA
ANALISA LIKUIDITAS (CASH RATIO AND LOAN TO DEPOSIT RATIO)
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

POS-POS NERACA	Posisi
	31 Desember 2020
	Saldo
1.ALAT LIKUID	
a.Kas	18.206.412.000
b.Antar Bank Aktiva	
- Giro	334.690.445.483
- Tabungan	15.395.427.143
- (-/- tabungan ABP)	(1.035.720.762)
Jumlah	367.256.563.864
2.HUTANG LANCAR	
a.Kewajiban Segera	10.974.990.835
b.Simpanan Pihak ketiga	
- Tabungan	749.556.203.316
- Deposito Berjangka	1.170.018.220.690
Jumlah	1.930.549.414.841
Cash Ratio = $\frac{367.256.563.864}{1.930.549.414.841} \times 100\%$	19,02%
(Rasio Alat likuid thd Hutang lancar)	
1.Simpanan Pihak ke III	
a. Deposito Berjangka	1.170.018.220.690
b.Tabungan	749.556.203.316
2.Pinjaman diterima bukan dari Bank lebih dari 3 bulan *)	87.458.333.000
3.Deposito dan pinjaman diterima dari Bank lebih dari 3 bulan	455.443.603.743
4.Bank Indonesia	-
5.Modal Pinjaman	-
6.Modal Inti	362.999.719.238
Jumlah dana yang diterima	2.825.476.079.987
7.Aktiva Produktif	
a.Kredit yang di berikan	2.368.208.317.134
b.Kredit yg di berikan kepada bank lain	
c.lainnya	413.310.344.909
Jumlah Aktiva produktif	2.781.518.662.043
LDR = $\frac{2.368.208.317.134}{2.825.476.079.987} \times 100\%$	83,82%
(Rasio kredit thd Dana yang diterima)	

LAMPIRAN

**DAFTAR REKAP AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS
PT. PBR SUPRA YUDHA KENCANA
BULAN DESEMBER 2020**

NO	KABANG	JENIS AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS	30/12/2019	2020	KOR (+)	KOR (-)	MASUK PEROLEHAN				S/D SANGG	S/D PERNY	DESEMBER	PEROLEHAN TAHUN 2020		JUNILAH	PERANGKAT 2020		KOR (+) TH LALU	PROGRES	PENJUALAN	JUNILAH	AKUM PERNY S/D SANGG	NILAI BUKU
							PENIND-(-)	PENIND-(-)	PENGHRSN	PENJUALAN				KOR (+)	KOR (-)		PENANGK-(-)	PENIND-(-)						
1	CAB. PASIR BESAR	ASET TETAP & INVENTARIS																						
		TRANKH																						
		GEUDUNG																						
		JML. ASET TTP THN & GEUDUNG	169.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KEMBARAHAN	169.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN KAWAJOR	160.902.998	9.623.000	-	-	23.989.000	4.772.144	6.073.034	204.751.818	169.739.998	516.982	5.309.123	23.681.483	4.772.138	17	6.073.028	10.245.184	13.883.383	15.882.238	169.739.998	15.882.238	2	
		KOMPUTER & SEBELIANYA	160.903.800	-	-	-	-	-	750.000	99.647.105	30.833	609.999	2.798.888	2.798.888	-	-	749.999	36.488.265	3.827.238	3.827.238	160.903.800	3.827.238	1	
		LAINNYA	42.315.900	-	-	-	-	-	-	38.689.397	23.239	23.239	-	-	-	-	-	-	-	-	42.315.900	20.122.170	1	
		JUNILAH INVENTARIS	492.722.298	3.623.000	-	-	23.989.000	4.772.144	6.823.034	518.721.118	479.284.481	802.714	5.331.987	23.681.483	4.772.138	17	6.823.027	11.538.185	486.586.848	20.122.170	492.722.298	486.586.848	20.122.170	
		JUNILAH AIT	492.722.298	3.623.000	-	-	23.989.000	4.772.144	6.823.034	518.721.118	479.284.481	802.714	5.331.987	23.681.483	4.772.138	17	6.823.027	11.538.185	486.586.848	20.122.170	492.722.298	486.586.848	20.122.170	
		ASET TIDAK BERWALID	6.823.000	-	-	-	-	-	-	6.823.000	4.278.481	20.887	518.340	-	-	-	-	-	-	-	-	6.823.000	100.879	1
		TOTAL	499.545.298	3.623.000	-	-	23.989.000	4.772.144	6.823.034	525.543.118	479.279.152	823.601	5.331.987	23.681.483	4.772.138	17	6.823.027	11.538.185	486.586.848	20.222.748	499.545.298	486.586.848	20.222.748	
2	CAB. PROSEDONGAN	ASET TETAP & INVENTARIS																						
		TRANKH																						
		GEUDUNG																						
		JML. ASET TTP THN & GEUDUNG	37.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KEMBARAHAN	37.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN KAWAJOR	117.195.600	945.000	-	-	100.000.000	16.900.000	16.900.000	136.045.900	74.029.313	606.887	5.120.004	99.999.999	16.899.999	-	-	-	-	-	117.195.600	112.373.342	6.106.688	1
		KOMPUTER & SEBELIANYA	61.883.900	-	-	-	-	-	-	45.457.013	81.628	8.411.473	1.224.999	1.224.999	1.224.999	-	-	-	-	-	61.883.900	109.627.724	26.618.266	1
		LAINNYA	338.878.332	-	-	-	-	-	-	338.878.332	28.481.639	166.795	338.878.332	-	-	-	-	-	-	-	338.878.332	338.878.332	6.873.393	1
		JUNILAH INVENTARIS	235.507.482	11.640.000	-	-	121.020.590	16.128.000	16.128.000	185.131.235	121.020.590	2.020.844	344.839	55.847.783	121.020.370	-	-	-	-	-	235.507.482	505.974.824	63.029.286	1
		JUNILAH AIT	235.507.482	11.640.000	-	-	121.020.590	16.128.000	16.128.000	185.131.235	121.020.590	2.020.844	344.839	55.847.783	121.020.370	-	-	-	-	-	235.507.482	505.974.824	63.029.286	1
		ASET TIDAK BERWALID	293.800	-	-	-	-	-	-	293.800	205.887	6.223	74.888	-	-	-	-	-	-	-	-	293.800	187.48	1
		TOTAL	235.846.282	11.640.000	-	-	121.020.590	16.128.000	16.128.000	345.193.222	185.257.240	2.026.783	344.839	55.922.667	121.020.370	16.128.000	-	-	-	-	-	235.846.282	506.155.773	63.042.042
3	CAB. KLAMPOR	ASET TETAP & INVENTARIS																						
		TRANKH																						
		GEUDUNG																						
		JML. ASET TTP THN & GEUDUNG	206.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KEMBARAHAN	206.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN KAWAJOR	289.851.218	11.873.100	-	-	3.000.000	41.005.780	41.005.780	328.243.94	229.282.477	1.183.341	9.217.432	41.008.740	-	-	-	-	-	-	289.851.218	292.648.94	337.841.85	1
		KOMPUTER & SEBELIANYA	102.128.800	-	-	-	-	-	-	102.128.800	82.028.782	320	11.121.412	11.121.412	-	-	-	-	-	-	102.128.800	111.888.024	72.820.082	1
		LAINNYA	784.888.882	11.873.100	-	-	3.000.000	41.005.780	41.005.780	834.176.822	535.879.484	4.358.786	4.358.786	41.008.740	-	-	-	-	-	-	784.888.882	834.176.822	207.628.848	1
		JUNILAH INVENTARIS	784.888.882	11.873.100	-	-	3.000.000	41.005.780	41.005.780	634.176.822	535.879.484	4.358.786	4.358.786	41.008.740	-	-	-	-	-	-	784.888.882	834.176.822	207.628.848	1
		JUNILAH AIT	784.888.882	11.873.100	-	-	3.000.000	41.005.780	41.005.780	634.176.822	535.879.484	4.358.786	4.358.786	41.008.740	-	-	-	-	-	-	784.888.882	834.176.822	207.628.848	1
		ASET TIDAK BERWALID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	784.888.882	11.873.100	-	-	3.000.000	41.005.780	41.005.780	634.176.822	535.879.484	4.358.786	4.358.786	41.008.740	-	-	-	-	-	-	-	784.888.882	834.176.822	207.628.848
4	CAB. PUNOWESORO	ASET TETAP & INVENTARIS																						
		TRANKH																						
		GEUDUNG																						
		JML. ASET TTP THN & GEUDUNG	223.199.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KEMBARAHAN	223.199.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN KAWAJOR	410.858.620	11.873.100	-	-	28.677.235	4.183.000	4.183.000	427.947.755	201.861.570	4.091.903	4.091.903	4.182.991	-	-	-	-	-	-	410.858.620	427.947.755	17.373.099	1
		KOMPUTER & SEBELIANYA	159.538.000	-	-	-	-	-	-	159.238.000	141.909.022	455.700	6.221.008	6.221.008	-	-	-	-	-	-	159.538.000	159.238.000	1.299.999	1
		LAINNYA	160.879.000	13.000.000	-	-	9.442.000	8.442.000	8.442.000	79.079.666	655.939	7.231.513	9.441.988	8.441.988	-	-	-	-	-	-	160.879.000	177.027.273	26.055.227	1
		JUNILAH INVENTARIS	436.286.620	28.573.100	-	-	38.119.025	12.629.000	12.629.000	448.880.445	5.468.882	5.468.882	5.468.882	12.624.980	-	-	-	-	-	-	436.286.620	448.880.445	26.678.483	1
		JUNILAH AIT	436.286.620	28.573.100	-	-	38.119.025	12.629.000	12.629.000	448.880.445	5.468.882	5.468.882	5.468.882	12.624.980	-	-	-	-	-	-	436.286.620	448.880.445	26.678.483	1
		ASET TIDAK BERWALID	6.750.000	-	-	-	-	-	-	6.750.000	6.288.532	388.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.750.000	6.288.532	4
		TOTAL	903.018.620	28.573.100	-	-	38.119.025	12.629.000	12.629.000	924.117.255	652.212.837	5.468.882	5.468.882	12.624.980	-	-	-	-	-	-	-	903.018.620	713.293.268	26.728.487
5	CAB. MANDIRAJA	ASET TETAP & INVENTARIS																						
		TRANKH																						
		GEUDUNG																						
		JML. ASET TTP THN & GEUDUNG	143.273.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KEMBARAHAN	143.273.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN KAWAJOR	160.183.889	6.000.000	-	-	58.022.042	142.413.902	142.413.902	224.203.631	114.303.822	456.879	6.913.828	7.678.372	-	-	-	-	-	-	16			

**DAFTAR REKAP AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS
PT. PBR SURYA YUDHARECANA
BULAN DESEMBER 2020**

NO	GABANG	JENIS AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS	30/12/2019	2020	KOR (+)	KOR (-)	HAKSA PEROLEHAN				S/D SENG	S/D SENG	DESEMBER	PEROLEHAN TAHUN 2020		PEROLEHAN TAHUN 2020		S/D SENG	NILAI BUKU		
							PEMNOI(-)	PEMNOI(+)	PENGHRSN	PENJUALN				JUNILAH	PEMNOI(-)	PEMNOI(+)	TRH LALU			PENHRSN	PENJUALN
6	CAB. KALIBREHNAS	ASET TETAP & INVENTARIS																			
		TANAH																			
		GEUDING																			
		JML. ASET TRP THN & GEUDING	205.800,000																		
		KERUPUKAN	170.035,349																		
		KOMPUTER & PERLENGKAPAN	169.996,300																		
		LAINNYA	78.845,250																		
		JUNILAH INVENTARIS	652.472,038																		
		JUNILAH APT	652.472,038																		
		ASET TIDAK BERWALID																			
TOTAL		652.472,038																			
7	CAB. WAWAKANDI	ASET TETAP & INVENTARIS																			
		TANAH																			
		GEUDING																			
		JML. ASET TRP THN & GEUDING	228.800,000																		
		KERUPUKAN	394.318,332																		
		KOMPUTER & PERLENGKAPAN	212.011,430																		
		LAINNYA	102.028,000																		
		JUNILAH INVENTARIS	397.947,782																		
		JUNILAH APT	397.947,782																		
		ASET TIDAK BERWALID																			
TOTAL		652.472,038																			
8	CAB. PUSPASELAN	ASET TETAP & INVENTARIS																			
		TANAH																			
		GEUDING																			
		JML. ASET TRP THN & GEUDING	133.973,000																		
		KERUPUKAN	109.232,988																		
		KOMPUTER & PERLENGKAPAN	62.470,000																		
		LAINNYA	488.614,088																		
		JUNILAH INVENTARIS	488.614,088																		
		JUNILAH APT	488.614,088																		
		ASET TIDAK BERWALID																			
TOTAL		652.472,038																			
9	CAB. KRAMASROBAR	ASET TETAP & INVENTARIS																			
		TANAH																			
		GEUDING																			
		JML. ASET TRP THN & GEUDING	1.487.700,000																		
		KERUPUKAN	280.373,000																		
		KOMPUTER & PERLENGKAPAN	220.927,740																		
		LAINNYA	84.900,400																		
		JUNILAH INVENTARIS	747.881,148																		
		JUNILAH APT	2.715.181,148																		
		ASET TIDAK BERWALID																			
TOTAL		2.715.181,148																			
10	CAB. PANGRENTAN	ASET TETAP & INVENTARIS																			
		TANAH																			
		GEUDING																			
		JML. ASET TRP THN & GEUDING	293.110,000																		
		KERUPUKAN	179.249,410																		
		KOMPUTER & PERLENGKAPAN	113.293,000																		
		LAINNYA	627.853,310																		
		JUNILAH INVENTARIS	627.853,310																		
		JUNILAH APT	627.853,310																		
		ASET TIDAK BERWALID																			
TOTAL		627.853,310																			

**DAFTAR REKAP AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS
PT. PBR SURYA YUDHA KENCANA
BULAN DESEMBER 2020**

NO	KABANG	JENIS AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS	30/12/2019	2020	KOR (+)	KOR (-)	HARGA PEROLEHAN			PENJUALAN	S/D SENG	S/D 2019	DESEMBER	PERUBAHAN TAHUN 2020		Jumlah	PENANGKIH 2020		KOR (-) TRI LALU	PENGURANGAN TRI 2020	Jumlah	S/D SENG	NILAI BUKU	
							PERNO (-)	PERNO (-)	PENGRHSN					KOR (+)	KOR (-)		PERNO (-)	PERNO (-)						
21	CAB. DIENG	ASSET TETAP & INVENTARIS TKANAH GEDUNGS JML. ASSET TRP. TNH & GEUNGS PERALATAN KAHOR KOMPUTER & SELESIKAWA LAHAWA JUMULAH INVENTARIS JUMULAH ATI																						
		ASSET TIDAK BERHILUUD																						
		TOTAL																						
22	CAB. CIKUP	ASSET TETAP & INVENTARIS TKANAH GEDUNGS JML. ASSET TRP. TNH & GEUNGS PERALATAN KAHOR KOMPUTER & SELESIKAWA LAHAWA JUMULAH INVENTARIS JUMULAH ATI																						
		ASSET TIDAK BERHILUUD																						
		TOTAL																						
23	CAB. KROYA	ASSET TETAP & INVENTARIS TKANAH GEDUNGS JML. ASSET TRP. TNH & GEUNGS PERALATAN KAHOR KOMPUTER & SELESIKAWA LAHAWA JUMULAH INVENTARIS JUMULAH ATI																						
		ASSET TIDAK BERHILUUD																						
		TOTAL																						
24	CAB. PERUKUSAN	ASSET TETAP & INVENTARIS TKANAH GEDUNGS JML. ASSET TRP. TNH & GEUNGS PERALATAN KAHOR KOMPUTER & SELESIKAWA LAHAWA JUMULAH INVENTARIS JUMULAH ATI																						
		ASSET TIDAK BERHILUUD																						
		TOTAL																						
25	CAB. SENGAI	ASSET TETAP & INVENTARIS TKANAH GEDUNGS JML. ASSET TRP. TNH & GEUNGS PERALATAN KAHOR KOMPUTER & SELESIKAWA LAHAWA JUMULAH INVENTARIS JUMULAH ATI																						
		ASSET TIDAK BERHILUUD																						
		TOTAL																						
		TOTAL																						

SURAT PERNYATAAN UPLOAD



BPR. **BANK SURYA YUDHA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Sugeng Riyanto
NIK : 3304080810740001
Alamat Lengkap : Rejasa 3/3 Madukara Banjarmegara
Jabatan : Direktur Utama sesuai akte no.65 tanggal 3 Juli 2020 oleh notaris Sopan
Nama Perusahaan : PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA
NPWP Perusahaan : 01.460.033.2-529.000

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya berdasarkan kewenangan yang saya miliki, bersama ini saya menyatakan (*Setuju/Tidak-Setuju*) memberikan kewenangan kepada :

Nama Akuntan Publik : JUNADI, SE, M.Si, Ak, CPA, BKP
Nama Kantor Akuntan Publik : HELIANTONO & REKAN CAB. SEMARANG

Untuk dan atas nama Perusahaan memberikan Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tahun 2020 Kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Banjarmegara, 10 Maret 2021
Yang membuat pernyataan

Sugeng Riyanto
Direktur Utama

BPR BANK SURYA YUDHA

Rejasa, Banjarmegara, Jawa Tengah Indonesia 53482
Telp. (0286) 591662 (hunting), Fax (0286) 591808
Call Center (0286) 595000
Email: pusat@suryayudha.com

www.banksuryayudha.com

Thank you for audience

 Rejasa, Madukara - Banjarnegara

 (0286) 591662

 www.suryayudha.id

